KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2018

Kata Pengantar



Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Dr. Ir. HARI SUPRAYOGI, M.Eng

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta menindaklanjuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian target sasaran-sasaran program pembangunan, sebagai pertanggungjawaban atas terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) pembangunan baik dari sisi keuangan maupun akuntabilitas instansi.

Berdasarkan hal tersebut Ditjen Sumber Daya Air menyusun Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018. Laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan kinerja Ditjen Sumber Daya Air dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2018. Disamping itu, sebagai salah satu perwujudan pertanggung jawaban atas hasil pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada Ditjen Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air dalam Tahun 2018. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja Ditjen Sumber Daya Air dalam mendukung program-program Pemerintah periode

KATA PENGANTAR



2015-2019, yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, terutama dalam mendukung sasaran strategis kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja yang dilakukan selain keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sesuai target sasaran program yang ditetapkan dalam Tahun 2018 masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana layanan bidang sumber daya air ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Ditjen Sumber Daya Air selama Tahun 2018 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Ditjen Sumber Daya Air serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi Pemerintah, maupun Masyarakat. Diharapkan infrastruktur yang terbangun dan selesai dalam Tahun 2018 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai progres pencapaian sasaran-sasaran program sampai dengan Tahun keempat dari periode 2015-2019 di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air serta dapat dijadikan *lesson learned* untuk perbaikan-perbaikan ke depan.

Akhir kata, kami mengajak semua jajaran di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air untuk bekerja keras, cerdas, jujur, dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air, sesuai motto :

"Ditjen Sumber Daya Air, Melayani Untuk Negeri"

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Dr. Ir. HARI SUPRAYOGI, M.Eng





Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

RINGKASAN EKSEKUTIF x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Bab I-1

1.2 Kondisi Umum Bab I-5

1.2.1. Peningkatan Dukungan Ketahanan Air Bab I-6

1.2.2. Peningkatan Dukungan Kedaulatan Pangan Bab I-9

1.2.3. Peningkatan Dukungan Ketahanan Energi Bab I-11

1.2.4. Peningkatan Keberlanjutan Fungsi Infrastruktur SDA Bab I-11

1.3 Potensi dan Permasalahan Bab I-13

1.3.1. Potensi Bab I-13

1.3.2. Permasalahan Bab I-14

1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bab I-18

1.5 Susunan Organisasi Bab I-19

1.6 Struktur Organisasi Bab I-20

1.6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bab I-24

1.6.2. Direktorat Pengembangan Jaringan SDA Bab I-25

1.6.3. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Bab I-26

1.6.4. Direktorat Sungai dan Pantai Bab I-27

1.6.5. Direktorat Irigasi dan Rawa Bab I-28

DAFTAR ISI



1.6.6. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Bab I-28

1.6.7. Pusat Bendungan Bab I-30

1.6.8. Pusat Air Tanah dan Air Baku Bab I-30

1.6.9. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Bab I-31

1.6.10. Balai Bendungan Bab I-32

1.6.11. Balai Besar Wilayah Sungai Bab I-33

1.6.12. Balai Wilayah Sungai Bab I-35

1.6.13. Kelompok Jabatan Fungsional Bab I-37

1.7. Gambaran Wilayah Kerja Bab I-38

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 Bab II-1

2.1.1. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bab II-1

2.1.2. Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015-2019 Bab II-5

2.2 Target Tahun 2018 Menurut Renstra 2015-2019 Bab II-20

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Bab II-23

2.3.1. Indikator Kinerja Bab II-23

2.4 Metode Pengukuran Bab II-32

2.4.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program Bab II-32

2.4.2. Metode Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Bab II-34

2.4.3. Metode Pengukuran Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Bab II-38

2.4.4. Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Bab II-46

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1. Sumber Daya Manusia Bab III-1

3.1.1. Upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bab III-8



DAFTAR ISI

3.2. Sarana dan Prasarana Bab III-10

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Bab III-13

3.3.1. Triwulan I Bab III-15

3.3.2. Triwulan II Bab III-18

3.3.3. Triwulan III Bab III-21

3.3.4. Triwulan IV Bab III-24

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi Bab IV-1

4.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Capaian Sasaran Program Bab IV-1

4.1.2. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan I Bab IV-1

4.1.3. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan II Bab IV-14

4.1.4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan III Bab IV-24

4.1.5. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan IV Bab IV-53

4.1.6. Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2018 Bab IV-76

4.1.7. Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Bab IV-79

4.1.8. Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Program Bab IV-83

4.1.9. Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Bab IV-87

4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Bab IV-87

4.2.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan Target Tahun Anggaran 2018 Bab IV-87

4.2.2. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya Bab IV-88

4.2.3. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja TA 2018 Terhadap Renstra 2015-2019 Bab IV-91

4.3. Analsisi Kinerja Bab IV-101

4.3.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan, Sasaran Program dan Strategis Strategis Bab IV-101

4.3.2. Analisis Masalah dan Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Bab IV-116

DAFTAR ISI



4.3.3. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bab IV-120

4.3.4. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Bab IV-126

4.4. Realisasi Anggaran Tahun 2018 Bab IV-128

4.5. Dampak dan Manfaat Bab IV-131

BAB V PENUTUP

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Gambaran Wilayah Kerja BBWS/BWS di Lingkungan Ditjen SDA	Bab I-39
Tabel 2.1.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR	Bab II-4
Tabel 2.2.	Target Tahun 2018 menurut Renstra 2015-2019	Bab II-22
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 (awal)	Bab II-26
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 (revisi)	Bab II-30
Tabel 2.5.	Tabel Kriteria Penilaian	Bab II-32
Tabel 2.6.	Indikator RBO Performance Benchmarking	Bab II-33
Tabel 2.7.	Target Sasaran Strategis Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019	Bab II-34
Tabel 2.8.	Pengukuran Target Capaian Sasaran Strategis 2018	Bab II-36
Tabel 3.1.	Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	Bab III-2
Tabel 3.2.	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Bab III-4
Tabel 3.3.	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Bab III-6
Tabel 3.4.	Bidang Diklat di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air	Bab III-8
Tabel 3.5.	Training Program Luar Negeri Tahun 2018	Bab III-9
Tabel 3.6.	Sebaran Peralatan Berat	Bab III-13
Tabel 4.1.	Progres Paket Kontraktual Triwulan I	Bab IV-3
Tabel 4.2.	Capaian Indikator Triwulan I	Bab IV-4
Tabel 4.3.	Progres Paket Kontraktual Triwulan II	Bab IV-25
Tabel 4.4.	Capaian Indikator Triwulan II	Bab IV-26
Tabel 4.5.	Progres Paket Kontraktual Triwulan III	Bab IV-37
Tabel 4.6.	Capaian Indikator Triwulan III	Bab IV-38
Tabel 4.7.	Progres Paket Kontraktual Triwulan IV	Bab IV-54
Tabel 4.8.	Capaian Indikator Triwulan IV	Bab IV-56
Tabel 4.9.	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018	Bab IV-76
Tabel 4.10.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan	Bab IV-79

DAFTAR ISI



Tabel 4.11.	Capaian Kinerja Sasaran Program	Bab IV-86
Tabel 4.12.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	Bab IV-87
Tabel 4.13.	Capaian Kinerja TA 2017, TA 2016 dan Tahun 2015	Bab IV-89
Tabel 4.14.	Capaian *Output* Bidang Sumber Daya Air	Bab IV-90
Tabel 4.15.	*Backlog* Capaian Renstra 2015-2019	Bab IV-92
Tabel 4.16.	Perbandingan Target dan Capaian Sasaran Strategis 2015-2018	Bab IV-100
Tabel 4.17.	Tabel Progres Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 – 2018	Bab IV-122



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Program Strategis Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019 dalam Mendukung Nawacita	Bab I-3
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Ditjen Sumber Daya Air	Bab I-21
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A	Bab I-22
Gambar 1.4.	Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B	Bab I-22
Gambar 1.5.	Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe A dan B	Bab I-23
Gambar 1.6.	Struktur Organisasi Balai Bendungan	Bab I-24
Gambar 1.7.	Wilayah Kerja Ditjen Sumber Daya Air	Bab I-39
Gambar 1.8.	Peta Strategi Ditjen Sumber Daya Air	Bab I-44
Gambar 3.1.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	Bab III-3
Gambar 3.2.	Komposisi PNS Berdasarkan Gender	Bab III-4
Gambar 3.3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Bab III-5
Gambar 3.4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	Bab III-7
Gambar 3.5.	Sarana dan Prasarana	Bab III-10
Gambar 3.6.	Inventarisasi Peralatan Berat	Bab III-12
Gambar 3.7.	Kronologi Pagu Ditjen Sumber Daya Air TA 2018	Bab III-14
Gambar 3.8.	Distribusi Anggaran Berdasarkan Kategori Pengadaan Triwulan I	Bab III-15
Gambar 3.9.	Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I	Bab III-16
Gambar 3.10.	Postur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I	Bab III-17
Gambar 3.11.	Distribusi Anggaran Berdasarkan Kategori Pengadaan Triwulan II	Bab III-18
Gambar 3.12.	Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan II	Bab III-19
Gambar 3.13.	Postur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II	Bab III-20
Gambar 3.14.	Distribusi Anggaran Berdasarkan Kategori Pengadaan Triwulan III	Bab III-21
Gambar 3.15.	Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan III	Bab III-22
Gambar 3.16.	Postur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III	Bab III-23
Gambar 3.17.	Distribusi Anggaran Berdasarkan Kategori Pengadaan Triwulan IV	Bab III-24

DAFTAR ISI



Gambar 3.18.	Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan IV	Bab III-25
Gambar 3.19.	Postur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan IV	Bab III-26
Gambar 4.1.	Kurva S Progres Fisik Triwulan I	Bab IV-2
Gambar 4.2.	Status Paket Kontraktual s.d Triwulan I	Bab IV-3
Gambar 4.3.	Kurva S Progres Fisik Triwulan II	Bab IV-24
Gambar 4.4.	Status Paket Kontraktual s.d Triwulan II	Bab IV-25
Gambar 4.5.	Kurva S Progres Fisik Triwulan III	Bab IV-35
Gambar 4.6.	Status Paket Kontraktual s.d Triwulan III	Bab IV-36
Gambar 4.7.	Kurva S Progres Fisik Triwulan IV	Bab IV-53
Gambar 4.8.	Status Paket Kontraktual s.d Triwulan IV	Bab IV-55
Gambar 4.9.	Diagram Progres Keuangan dan Fisik Tahun 2015-2018	Bab IV-122
Gambar 4.10.	Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2018	Bab IV-129
Gambar 4.11.	Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik Tahun 2018	Bab IV-129




Pembangunan Embung Karohoy
Jawa Barat



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Ditjen Sumber Daya Air sebagai salah satu unit Eselon I didalamnya, merupakan pengelola sumber daya air yang bertugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan sumber daya air.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan sumber daya air.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air.
6. Pelaksanaan administrasi Ditjen Sumber Daya Air.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Sumber Daya Air serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR 2015-2019 , yaitu : *"Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".*

Untuk mewujudkan visi kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Ditjen Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Dalam mencapai visi Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Ditjen Sumber Daya Air menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA untuk mengurangi disparitas pembanguan wilayah guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Tujuan 3 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Ditjen Sumber Daya Air yang meliputi sumber daya manusia sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis periode 2015-2019 tersebut disusunlah Peta Strategi Ditjen Sumber Daya Air meliputi Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Ditjen Sumber Daya Air menetapkan sasaran program yang

menggambarkan kinerja Ditjen Sumber Daya Air yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis, meliputi :

1. Meningkatnya Ketahanan Air (SP2).
2. Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo (SP3).

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air ditetapkan 2 (dua) sasaran program dengan 7 (tujuh) indikator sasaran program dan 19 (sembilan belas) sasaran kegiatan beserta target kinerja yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air, dengan target 87% (bobot 97% terhadap SS), meliputi :
   a. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, dengan target kinerja 8,5%
      1) SK1 Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku.
      2) SK2 Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku.
   b. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan target 24%
      1) SK3 Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air.
      2) SK4 Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya.
      3) SK5 Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan.
   c. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, dengan target 13,5%
      1) SK6 Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak.
      2) SK7 Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai.
   d. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, dengan target 5%
      1) SK8 Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA.
      2) SK9 Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu.
      3) SK10 Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS.
      4) SK11 Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional.
   e. Tingkat kinerja layanan irigasi, dengan target 21%
      1) SK12 Peningkatan layanan kinerja irigasi.
      2) SK13 Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa.
   f. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan target 10%
      1) SK14 Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air.



2) SK15 Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

2. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan target 90,5% (bobot 3% terhadap SS), meliputi
   a. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan target 85,5%
      1) SK18 Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo.
      2) SK19 Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dari 2 (dua) sasaran program dengan 7 indikator sasaran program diperoleh 5 (lima) indikator sasaran program **memenuhi target,** dan 2 (dua) indikator sasaran program tidak memenuhi target.

Indikator sasaran program yang ***memenuhi*** target, yaitu :

1. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, dengan capaian kinerja 8,50% dari target 8,50%.
2. Tingkat pengendalian daya rusak, dengan capaian kinerja 14% melebihi target sebesar 13,5%.
3. Tingkat kinerja layanan irigasi, dengan capaian kinerja 21,6% melebihi target sebesar 21%.
4. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan capaian kinerja memenuhi target sebesar 10%.
5. Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, dengan capaian kinerja memenuhi target sebesar 3%.
6. Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan capaian kinerja memenuhi target sebesar 2%.
7. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan capaian kinerja 90,8% melebihi target sebesar 90,5%.

Indikator sasaran program yang tidak memenuhi target, yaitu :

1. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan capaian kinerja sebesar 18% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 24%.

2. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, dengan capaian kinerja sebesar 4,9% tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 5%.

Capaian kinerja Tahun 2015-2018 dibandingkan dengan target kinerja berdasarkan Renstra periode 2015-2019 Ditjen Sumber Daya Air, secara umum, kurang memuaskan atau kurang berhasil. Dari 7 (tujuh) indikator sasaran program, hanya 1 (satu) indikator kinerja berhasil yaitu tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, 1 (satu) indikator kinerja belum ada target di dalam dokumen Renstra Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019 yaitu indikator tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dan 5 (lima) indikator lainnya tidak berhasil, meliputi indikator tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan sumber daya air, dan tingkat kinerja layanan irigasi.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran strategis, didapati bahwa capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis "Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi" mencapai 82,20%, ***lebih tinggi*** dari target Sasaran Strategis dalam Renstra 2015-2019 sebesar 56,33%.

Prestasi capaian kinerja sasaran strategis Ditjen Sumber Daya Air dalam Tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan dari komponen-kompenen input sebagai pendukung proses penyelenggaraan pelaksanaan anggaran tahun 2018. Komponen input dimaksud meliputi :

1. Sumber dana yang tersedia cukup memadai untuk menyelesaikan seluruh target *output* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air. Pada awal tahun anggaran 2018, Ditjen Sumber Daya Air mengelola APBN sebesar Rp. 37,309 Triliun, namun adanya revisi DIPA dan percepatan *loan* sehingga DIPA TA 2018 akhir menjadi Rp. 33,825 Triliun. Realisasi penyerapan sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai 86,76% atau Rp. 32,816 Triliun. Sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 5 Triliun atau 13,24 %.
2. Sumber daya manusia yang menjadi penangungjawab kegiatan-kegiatan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat BBWS/BWS cukup memadai dari sisi kemampuan dan keterampilan dalam mengelola anggaran dan kegiatan. Namun dalam hal ini dirasakan



jumlah personil di tingkat BBWS/BWS yang memiliki latar belakang teknis lebih rendah sebanyak 2.461 orang atau 29,98% dibandingkan dengan personil dengan latar belakang pendidikan non-teknis sebanyak 5.747 orang (70,02%) dari total PNS 8.208 orang.

3. Adanya dukungan fasilitas berupa sarana kantor termasuk kelengkapan perkantoran, dan peralatan berat serta kendaraan operasional yang memadai yang mendukung kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang terbangun.

Secara umum, capaian kinerja pembangunan bidang sumber daya air pada tahun 2018 dalam beberapa hal belum seperti yang diharapkan. Masih ditemui kendala, hambatan, dan permasalahan, baik dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan sumber daya air dalam tahun 2018 masih mengalami permasalahan, kendala dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik infrastruktur di lapangan. Kendala dan hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Keterlambatan penyediaan alokasi dana untuk pembebasan tanah dari LMAN, proses pembebasan lahan yang tidak tuntas akibat lahan belum dibebaskan, waktu pembayaran ganti rugi tanah yang tidak cukup, yang menyebabkan pelaksanaan fisik di lapangan tidak berjalan dengan baik dan tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Kegiatan yang masih memerlukan review desain, petunjuk teknis yang belum terbit serta menunggu penetapan lokasi, yang menyebabkan beberapa paket kegiatan tertunda pelaksanaannya.
3. Keterlambatan pembebasan tanah dan relokasi masyarakat untuk beberapa lokasi proyek, yang menyebabkan pelaksanaan fisik di lapangan tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.
4. Permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana *loan*, antara lain keterlambatan proses pengefektifan *Loan* sehingga waktu persiapan lelang terbatas, keterlambatan penetapan lokasi daerah irigasi yang akan dikerjakan dalam program IPDMIP, prosedur administrasi pengadaan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan lelang ditingkat lembaga Donor memakan waktu panjang sehingga waktu pelelangan tidak mencukupi.



Dalam upaya meminimalisir kendala dan hambatan yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018, beberapa upaya dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan, antara lain :

1. Penyiapan dokumen perencanaan teknis (Studi Kelayakan, AMDAL, DED, LARAP) secara lebih matang untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
2. Penyiapan lokasi lahan proyek lebih awal atau sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan di lokasi yang direncanakan.
3. Penelitian lebih awal terhadap usulan-usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun berikutnya, bukan saja terhadap alokasi dana yang akan diusulkan tetapi juga penelitian terhadap kesiapan proyek yang akan dibangun.
4. Membangun sistem informasi kinerja yang dilakukan melalui sistem aplikasi *e-performance*, dalam upaya pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang dihasilkan tiap unit kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.
5. Peningkatan kompetensi *engineer*/sarjana Teknik Sipil muda dalam pengelolaan proyek (*project management*).
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan unsur keamanan serta penegak hukum dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
7. Perlu adanya ketentuan yang tegas dalam pelaksanaan pelelangan dengan menggunakan aplikasi SPSE baik yang bersumber dari dana APBN maupun yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari dana *loan* .

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Sumber Daya Air lebih meningkat lagi pada tahun-tahun mendatang. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Diharapkan dengan menggunakan sistem manajemen perencanaan atau *e-programming* dapat meningkatkan kualitas manajemen perencanaan penganggaran berbasis kinerja.

Diharapkan kinerja yang dihasilkan akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dari pemanfaatan suplai air untuk pertanian lahan beririgasi, meningkatkan akses yang lebih banyak untuk memperoleh air baku bagi pelanggan, serta



keamanan lingkungan dari terjadinya bencana banjir. Secara nasional, kinerja yang dihasilkan akan menambah dukungan terhadap meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, dimana muaranya adalah mendukung Program NAWACITA, terutama Agenda Prioritas "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".



Sand Pcoket Kali Gendol
D.I Yogyakarta





Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dnan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, setiap unit kerja/organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Sesuai dengan NAWA CITA Presiden Republik Indonesia, yakni butir 7 dari prioritas nasional NAWACITA : **"Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik"**, sasaran pembangunan terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi. Amanah sasaran pembangunan bidang sumber daya air tersebut telah ditindaklanjuti Ditjen Sumber Daya Air didalam menyusun Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air tahun 2015-2019 yang kemudian tertuang dalam reviu Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015-



2019 telah menetapkan sasaran program dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2018, yang meliputi :

1. Meningkatnya ketahan air, dengan indikator :
   a. Tingkat layanan sarana prasarana air baku (%),
   b. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%),
   c. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%),
   d. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%),
   e. Tingkat kinerja layanan irigasi (%),
   f. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%).
2. Meningkatkan pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan indikator :
   g. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%).

Dalam rangka mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional atau NAWACITA, yakni butir 7 dari NAWACITA : **"Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik"**, Ditjen Sumber Daya Air menyiapkan program strategis dalam periode 2015-2019 (secara skematik disajikan dalam Gambar 1.1) yang meliputi :

1. Pembangunan 65 Bendungan,
2. Pembangunan Irigasi Baru 1 juta hektar,
3. Rehabilitasi irigasi 3 juta hektar,
4. Penyediaan air baku 67,52 m^3/detik,
5. Pengendali banjir 3.000 km,
6. Pengamanan abrasi pantai 500 km,
7. Pengendali lahar 300 buah.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara dalam pembangunan dan pengelolaan sektor sumber daya air tersebut, Ditjen Sumber Daya Air dituntut untuk dapat melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Gambar 1.1 Program Strategis Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019 dalam Mendukung Nawacita

BAB 1
PENDAHULUAN



Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan/kinerja Ditjen Sumber Daya Air dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2018. Laporan Kinerja Instansi Ditjen Sumber Daya Air pada dasarnya menyajikan pencapaian kinerja, *output* maupun *outcome*, serta dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional didalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi Kementerian PUPR yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air dan program pengendalian lumpur Sidoarjo tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019. Meskipun, secara umum kinerja bidang sumber daya air sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, namun diakui masih ada target-target sasaran program yang belum dapat dicapai. Untuk itu, Ditjen Sumber Daya Air tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik pihak internal di lingkup Kementerian PUPR maupun pihak eksternal di luar Kementerian PUPR. Kinerja bidang sumber daya air tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup Kementerian PUPR semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran juga untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Kemeterian ATR, Kementerian LHK, peran aktif calon pemanfaat, dan lain-lain. Untuk itu, kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan



infrastruktur sumber daya air sangatlah diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Indonesia.

Buku Laporan Kinerja Instansi Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan Ditjen Sumber Daya Air berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakai dan ditetapkan di tahun 2018.

1.2 Kondisi Umum

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi serta peningkatan daya saing di dunia internasional. Pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah.

Ke depan, tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi begitu cepat, menjadi tantangan pembangunan infrastruktur, antara lain :

1. Adanya tuntutan peningkatan daya saing global, kualitas hidup manusia, dan kemandirian ekonomi, disparitas antar wilayah.
2. Perubahan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan SDA sebagai tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Target kinerja yang diamanatkan kepada Ditjen Sumber Daya Air meningkat 3 kali lipat.
4. Perubahan struktur organisasi, baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (dibentuknya Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo/PPLS di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Permen PUPR No. 05/PRT/M/2017 sebagai tindak lanjut dari pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/BPLS).



5. Restrukturisasi program dan kegiatan mengacu pada anggaran berbasis kinerja yang sasaran kinerjanya disusun berdasarkan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang diselaraskan dengan perubahan struktur organisasi dalam rangka pencapaian target kinerja oleh seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.

Hingga tahun 2014, telah dilaksanakan berbagai langkah kebijakan, dengan capaian sasaran-sasaran strategis meliputi :

1. Peningkatan dukungan terhadap ketahanan air melalui peningkatan kapasitas tampung; peningkatan layanan air baku; dan peningkatan pengendalian daya rusak air;
2. Peningkatan dukungan kedaulatan pangan melalui peningkatan layanan irigasi.
3. Peningkatan dukungan kedaulatan energi melalui pembangunan Bendungan yang berpotensi sebagai sumber energi.
4. Peningkatan keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

1.2.1 Peningkatan Dukungan Ketahanan Air

Hingga tahun 2014, peningkatan dukungan untuk ketahanan air nasional diperkirakan baru mencapai 28,95%, dan sampai dengan tahun 2017 mencapai 45,32% melalui pencapaian 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Kebutuhan Sehari-hari

   Dalam upaya meningkatkan layanan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, industri, dan perkotaan, sampai dengan 2014 telah dibangun jaringan air baku dengan kapasitas layanan 51,44 m^3/detik atau 66,35% dari pemenuhan kebutuhan air baku untuk sehari-hari. Angka diatas belum memenuhi target kapasitas yang direncanakan yakni sebesar 56,00 m^3/detik, sehingga terdapat defisit sebesar 4,56 m^3/detik.

   Sebagaimana data capaian sampai dengan tahun 2015, telah dibangun jaringan air baku dengan kapasitas layanan 58,41 m^3/detik atau 69,82% dari

pemenuhan kebutuhan air baku untuk sehari-hari, dimana terdapat penambahan sebesar 6,97 m^3/detik pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, terdapat penambahan jaringan air baku dengan kapasitas layanan 6,15 m^3/detik atau kumulatif kapasitas layanan sampai dengan tahun 2016 sebesar 64,56 m^3/detik setara dengan 72,89% dari pemenuhan kebutuhan air baku untuk sehari-hari.

Pada tahun 2017, terdapat penambahan jaringan air baku dengan kapasitas layanan 4,34 m^3/detik atau kumulatif kapasitas layanan sampai dengan tahun 2017 sebesar 68,9 m^3/detik setara dengan 75,05 % dari pemenuhan kebutuhan air baku untuk sehari-hari.

2. Peningkatan Kapasitas tampung Per Kapita

Indonesia memiliki total potensi air sebesar ± 3,9 triliun m^3 per tahun, namun hingga tahun 2014 baru ± 12,68 miliar m^3 atau 50 m^3 per kapita per tahun yang dapat dikelola melalui tampungan Bendungan sebanyak 208 Bendungan (178 Bendungan diantaranya dikelola oleh Kementerian PUPR), dimana angka ini hanya 2,5% dari angka ideal tampungan per kapita di suatu negara (1.975 m^3 per kapita per tahun).

Pembangunan tampungan lainnya adalah berupa embung /situ/bangunan penampung air lainnya. Hingga tahun 2014 telah terbangun 1.332 buah embung/situ/bangunan penampung air lainnya.

Pada tahun 2015, Ditjen Sumber Daya Air melanjutkan pembangunan Bendungan sebanyak 16 Bendungan dan 13 Bendungan baru. Dari total 29 Bendungan 5 Bendungan diantaranya selesai dibangun dan beroperasi dengan total tambahan tampungan sebanyak 1,012 miliar m^3 sehingga diperoleh ±54 m^3 per kapita per tahun atau 2,67% dari ideal tampungan per kapita di suatu negara (1.975 m^3 per kapita per tahun).

Dengan demikian, hingga tahun 2015, total Bendungan di Indonesia adalah 213 Bendungan (183 Bendungan diantaranya dikelola Kementerian PUPR) dengan total kapasitas tampung adalah 13,691 miliar m^3, yang dimanfaatkan



untuk air baku, irigasi, pengendalian banjir, serta sebagian untuk PLTA. Selain Bendungan, tahun 2015 juga dibangun sebanyak 342 embung.

Begitu halnya dengan tahun 2016, dimana pembangunan Bendungan yang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 32 Bendungan, 8 Bendungan diantaranya merupakan pembangunan baru, 22 Bendungan pembangunan lanjutan, dan 2 Bendungan selesai dibangun. Penyelesaian 2 Bendungan yaitu Bendungan Teritip dan Bendungan Payaseunara mempunyai total kapasitas tampung 3,53 juta m^3. Pembangunan tampungan lainnya berupa pembangunan embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 387 buah dengan kapasitas 13,2 juta m^3.

Pada tahun 2017, Ditjen Sumber Daya Air melanjutkan pembangunan bendungan sebanyak 36 bendungan, 28 diantaranya merupakan bendungan lanjutan, 6 bendungan baru, dan 2 bendungan selesai dibangun. Penyelesaian 2 (dua) bendungan yaitu Bendungan Raknamo dan Bendungan Tanju yang memberikan tambahan kapasitas tampung sebesar 32,26 juta m^3. Pembangunan tampungan air lainnya berupa pembangunan embung atau penampung lain sebanyak 117 buah dengan kapasitas 20 juta m^3.

Dengan demikian sampai dengan tahun 2017, total bendungan di Indonesia adalah 217 buah dan 1934 embung/penampung lainnya dengan total kapasitas tampung sebesar 13.760,26 miliar m^3, yang dimanfaatkan untuk air baku, irigasi, pengendalian banjir, serta sebagian untuk PLTA.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

   Hingga tahun 2014 sudah dibangun ± 1.447 km prasarana pengendali banjir atau melindungi sekitar 36.199 hektar (LAKIP 2014) atau sekitar 18% dari 200 ribu hektar yang harus dilindungi melalui pembangunan:

   a. Pengendalian banjir yang terdiri dari pembangunan 1.450 km dan rehabilitasi bangunan pengendali banjir 1.100 km.
   b. Pengendalian sedimen dan lahar yang terdiri dari pembangunan pengendali lahar 150 buah dan rehabilitasi bangunan pengendali lahar 140 buah.

c. Pengaman pantai yang terdiri dari pembangunan 270 km dan rehabilitasi bangunan pengaman pantai 20 km.

Pada tahun 2015, Ditjen Sumber Daya Air telah membangun 304,36 km bangunan pengendali banjir, melakukan rehabilitasi terhadap 136 km bangunan pengendali banjir, membangun 150 buah pengendali lahar, rehabilitasi 21 buah pengendali lahar, membangun 66,88 km bangunan pengaman pantai dan rehabilitasi 0,87 km bangunan pengaman pantai. Infrastruktur pengendali banjir yang dibangun tersebut mampu melindungi kawasan seluas 20.344 hektar atau sekitar 26,12% dari 200 ribu hektar kawasan yang harus dilindungi.

Tahun 2016, Ditjen Sumber Daya Air telah membangun 197,5 km bangunan pengendali banjir, 44 buah bangunan pengendali lahar dan sedimen, serta 49,5 km bangunan pengaman pantai.

Sementara itu pada tahun 2017, Ditjen Sumber Daya Air telah membangun 161,71 km bangunan pengendali banjir, 31 buah bangunan pengendali lahar dan sedimen, serta 20,42 km bangunan pengaman pantai.

1.2.2 Peningkatan Dukungan Kedaulatan Pangan

Hingga tahun 2014, peningkatan dukungan kedaulatan pangan diperkirakan baru mencapai 45,83% (Renstra 2015-2019 Ditjen Sumber Daya Air) melalui pencapaian indikator peningkatan layanan air baku untuk irigasi. Hingga tahun 2014, sasaran strategis kegiatan irigasi dan rawa yang telah dicapai meliputi :

1. Pembangunan jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 425.000 hektar daerah irigasi, telah tercapai bahkan melebihi target, yakni 429.739 hektar.
2. Pembangunan jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah dengan target 237.000 hektar, berhasil mencapai 216.406 hektar.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 1.700.000 hektar daerah irigasi telah berhasil mencapai 2.021.439 hektar.



4. Rehabilitasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah dengan target 663.000 hektar dan berhasil melebihi target, yakni mencapai 697.568 hektar.

Menurut data capaian pada tahun 2015 pembangunan jaringan irigasi permukaan tercapai mengairi 107.922 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan mencapai luas 302.270 hektar. Sedangkan pembangunan jaringan irigasi rawa tercapai seluas 40.242 hektar dan Rehabilitasi jaringan irigasi rawa mencapai 151.249 hektar. Pembangunan jaringan irigasi air tanah tercapai seluas 2.980 hektar dan rehabilitasi seluas 5.283 hektar. Pembangunan jaringan irigasi tambak mencapai 4.288 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak mencapai 33.099 hektar. Secara total tambahan dukungan layanan kebutuhan air baku untuk irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi seluas 155.382 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi mencapai 491.901 hektar.

Pada tahun 2016, total capaian luas layanan daerah irigasi dari pembangunan jaringan irigasi sebesar 52.519 hektar. Total capaian tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi permukaan seluas 44.663 hektar, pembangunan jaringan irigasi rawa seluas 3.963 hektar, pembangunan jaringan irigasi air tanah seluas 2.043 hektar, dan pembangunan jaringan irigasi tambak seluas 1.850 hektar. Sedangkan untuk total capaian luas layanan daerah irigasi dari kegiatan rehabilitasi mencapai 291.171 hektar mencakup rehabilitasi jaringan irigasi permukaan seluas 244.780 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi rawa seluas 28.459 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi air tanah seluas 4.205 hektar, dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak seluas 13.727 hektar.

Dari hasil capaian pada tahun 2017, total luas layanan daerah irigasi dari pembangunan jaringan irigasi sebesar 63.248 hektar. Total capaian tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi permukaan seluas 51.342 hektar, pembangunan jaringan irigasi rawa seluas 7.950 hektar, pembangunan jaringan irigasi air tanah seluas 2.206 hektar, dan pembangunan jaringan irigasi tambak seluas 1.750 hektar. Sedangkan untuk total capaian luas layanan daerah irigasi dari kegiatan rehabilitasi mencapai 266.143 hektar mencakup rehabilitasi jaringan irigasi permukaan seluas 197.552 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi rawa seluas

49.708 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi air tanah seluas 1.665 hektar, dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak seluas 17.218 hektar.

1.2.3 Peningkatan Dukungan Kedaulatan Energi

Hingga tahun 2014, dari 208 Bendungan yang ada di Indonesia, terdapat potensi sumber energi sekitar 8.653 MW. Sedangkan pada tahun 2015, dengan terselesaikannya 5 (lima) Bendungan baru terdapat tambahan sumber energi sebesar 111,84 MW, sehingga sampai dengan tahun 2015 tersedia potensi sumber energi sebesar 8.764,84 MW. Pada tahun 2016, tidak ada peningkatan potensi energi sumber air, meskipun ada 2 Bendungan yang selesai namun tidak memiliki potensi energi. Tahun 2017, ada peningkatan potensi energi sumber air sebesar 0.2 MW yang merupakan potensi energi dari Bendungan Raknamo yang selesai dibangun pada tahun 2017.

1.2.4 Peningkatan Keberlanjutan Fungsi Infrastruktur SDA

Guna menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA, dilaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) seluruh infrastruktur SDA yang telah dibangun. Sebagaimana data capaian hingga tahun 2015 pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi :

1. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah seluas 3.357.420 hektar.
2. Operasi dan Pemeliharaan waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.012 buah, terdiri dari 160 Bendungan dan 852 embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
3. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas 34,90 m^3/detik.
4. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 2.490 km, Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi sebanyak 87 buah, serta Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 116,22 km.



Sedangkan capaian pada pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan tahun 2016, meliputi :

1. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah seluas 3.402.053 hektar.
2. Operasi dan Pemeliharaan waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.026 buah, terdiri dari 166 Bendungan dan 860 embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
3. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas 60,92 m^3/detik.
4. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 4.333 km, Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi sebanyak 441 buah, serta Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 161 km.

Capaian pada pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan tahun 2017, meliputi :

1. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah seluas 3.216.285 hektar.
2. Operasi dan Pemeliharaan waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.278 buah, terdiri dari 166 Bendungan dan 1.112 embung/bangunan penampung air lainnya.
3. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas 87,66 m^3/detik.
4. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 3.880 km, Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi sebanyak 573 buah, serta Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 149 km.



1.3 Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Potensi

Hasil studi tahun 2016, perhitungan Litbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan di Indonesia adalah 2,78 triliun m^3/tahun, dengan potensi yang dapat dimanfaatkan sekitar 691,30 miliar m^3/tahun (24,84%) dan sudah dimanfaatkan baru sekitar 222,59 miliar m^3/tahun. Pemanfaatan terbesar adalah irigasi (79,6%) atau sekitar 177,13 miliar m^3/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada air cukup besar yang belum termanfaatkan.

Namun di sisi lain, ketersediaan air tersebut juga tidak merata. Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan ketersediaan air terbesar (28,5%), sedangkan Pulau Jawa (6,3%) dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki ketersediaan air terkecil setelah Bali dan Nusa Tenggara (1,3%) dan Maluku (2,9%).

Selain untuk pemanfaatan domestik, perkotaan, dan industri, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2015-2034, pada tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 347 TWh dengan konsumsi mencapai 1.293 kWh per kapita. Sementara, hingga 2014, total kapasitas terpasang pembangkit nasional adalah sebesar 53.065 MW, diantaranya adalah sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi : Pembangkit Listrik Tenaga Air/PLTA (5.059 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/PLTM (140 MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (30 MW).

Pengembangan Bendungan di Indonesia yang dilaksanakan saat ini berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Beberapa waduk yang berpotensi dikembangkan PLTA yaitu Waduk Karian (Kab Lebak), Jatigede (Kab Sumedang), Jatibarang (Kota Semarang), Bajulmati (Kab Banyuwangi), Bendo (Kab Ponorogo), Lolak (Kab Bolaang Mongondouw), Kuwil (kab Minahasa Utara), Karalloe (Kab Gowa), Tugu (Kab Trenggalek), Titab (Kab Buleleng) dan Marangkayu (Kab Kutai Kartanegara).



Potensi sumber energi lainnya dalam bentuk kecil adalah pengembangan PLTMH yang sesuai untuk kawasan pelosok di Indonesia. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Energi Terbarukan (RIPEBAT) 2010 – 2025 (Kementerian ESDM), terdapat 6 provinsi yang potensi tenaga airnya besar untuk dimanfaatkan menjadi PLTMH, diantaranya Papua, meliputi sungai Memberamo, Derewo, Ballem, Tuuga, Wiriagar/Sun, Kamundan, dan Kladuk dengan total potensi mencapai 12.725 MW. Potensi terbesar lainnya yaitu Kalimantan Timur, meliputi Sungai Kerayan, Mentarang, Tugu, Mahakam, Boh, Sembakung, dan Kelai dengan total potensi mencapai 6.743 MW. Empat provinsi lain yang memiliki potensi adalah Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Biaya operasional PLTMH relatif lebih murah dibandingkan sumber energi lainnya. Hingga tahun 2034, pengembangan tenaga listrik diperkirakan membutuhkan pendanaan sekitar Rp. 325.464 juta USD untuk pembangkit.

1.3.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengelolaan SDA ke depan, antara lain :

1. Kerusakan Jaringan Irigasi

   Dari 7,15 juta hektar areal irigasi yang telah dibangun, hanya sekitar 11% (±760 hektar) yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui Bendungan, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (*free intake*). Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi, pada kurun waktu 2006-2013 mencapai 100-110 ribu hektar/tahun. Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru masih terbatas. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.



Luas daerah irigasi di Indonesia sekitar 7,15 juta hektar, dengan 46% diantaranya dalam kondisi rusak. Kerusakan terbesar pada jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah. Lebih dari 50% jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah mengalami kerusakan. Di sisi lain, pembangunan jaringan irigasi baru relatif sulit dilakukan, karena keterbatasan ketersediaan lahan dan petani.

2. Layanan air baku yang belum optimal

Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti Bendungan, Embung, Danau, dan Situ. Selain itu kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin meningkat akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktifitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku, terutama di pedesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

3. Banjir dan Kekeringan

Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim seperti terjadi pada DAS Ciliwung, Citarum, dan Bengawan Solo. Tahun 2006 bencana banjir terjadi sebanyak 319 dan meningkat menjadi 1015 pada tahun 2012. Angka ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 kejadian banjir sebanyak 290.

Penanganan banjir di kota-kota besar juga masih perlu dioptimalkan, seperti : Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, dll. Banjir di kawasan perkotaan tersebut disebabkan oleh buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan



sungai. Penambangan bahan mineral yang tidak terkendali di beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dasar sungai serta erosi tebing sungai.

Di sisi lain, tidak meratanya distribusi dan pola hujan di Indonesia menyebabkan beberapa wialyah mengalami kekeringan, seperti di Prov. NTT dan NTB. Pada daerah-daerah tersebut perlu dibangun tampungan-tampungan air skala kecil sehingga air tetap ada pada saat musim kemarau.

Alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan banjir dan musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan. Hal lain yang menjadi penyebab bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan di Indoensia, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan tren kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi di hilir juga menajdi penyebab banjir karena kapasitas sungai di hilir menjadi berkurang.

4. Pelaksanaan Operasi Pemeliharaan yang belum optimal

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA antara lain disebabkan oleh manual Operasi dan Pemeliharaan yang belum seluruhnya tersedia, kurangnya fasilitas Operasi dan Pemeliharaan, kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana Operasi dan Pemeliharaan, belum seluruhnya pedoman dang Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) tersedia, dan keterbatasan penganggaran kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan AKNOP. Hal ini mengakibatkan belum semua infrastruktur SDA di-OP secara mantap, menyebabkan umur fungsional infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan umur rencana. Kerusakan yang terjadi pun, jika tidak cepat tertangani menyebabkan kebutuhan akan rehabilitasi meningkat dan hal ini membutuhkan dana yang lebih besar dari pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan itu sendiri.

5. Keterpaduan Pengelolaan SDA

Pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu sebagaimana prinsip *Integrated Water Resources Management* (IWRM), belum terlaksana secara optimal. Beberapa isu yang masih harus dihadapi terkait pengelolaan SDA secara terpadu dan menyeluruh, antara lain :

a. Koordinasi antar instansi, antar pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan antar pemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan kurang jelas.
b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah, karena kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan dari air.
c. Kelembagaan pengelolaan SDA baik ditingkat pusat (Ditjen Sumber Daya Air, BBWS/BWS), ditingkat daerah (Dinas, Balai Provinsi, Balai Kabupaten), hingga ditingkat unit khusus (PJT, pengelola irigasi, pengelola Bendungan) perlu ditata dan diperkuat untuk mencapai pemisahan fungsi yang jelas dengan tetap saling bersinergi antarfungsi.
d. Pendanaan yang tidak konsisten dan berkelanjutan menyebabkan ketidakpastian akan pelaksanaan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Keterbatasan pendanaan menuntut adanya penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan kesiapan pelaksanaan serta terbatasnya pendanaan dari APBN yang memerlukan pembiayaan dari pemegang izin (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air/BJPSDA).
e. Pengelolaan data dan informasi SDA perlu ditingkatkan keakuratannya sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran.
f. Pasca pembatalan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU No 11 tahun 1974 tentang pengairan. Praktek pengelolaan SDA yang selama ini mengacu pada UU no 7 tahun 2004 perlu segera direview dan diberikan



payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti akan disusun, dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini harus tetap ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ketiga harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

g. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS masih perlu percepatan. Hingga tahun 2015, dari 64 WS kewenangan Pusat sudah ada 44 pola Pengelolaan SDA WS Kewenangan pusat yang ditetapkan oleh Menteri PUPR, sedangkan sisanya 5 Pola masih dalam proses penetapan dan 12 Pola masih dalam proses perbaikan. Adapun 3 pola untuk WS yang baru menjadi kewenangan pusat berdasarkan Permen PUPR No. 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan WS masih belum disusun. Sementara Rencana Pengelolaan SDA WS yang sudah ditetapkan 1 (satu) buah yaitu Rencana PSDA WS Bengawan Solo, sedangkan 6 Rencana masih dalam proses penetapan, 48 Rencana masih dalam proses perbaikan, dan sisanya 9 Rencana masih dalam proses penyusunan termasuk 3 Rencana untuk WS baru.

h. Adanya keterpaduan dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Berdasarkan Menteri PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 telah ditetapkan 35 WPS yang menjadi panduan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, baik antar eselom I di Lingkungan Kementerian PUPR maupun antar K/L terkait. Dengan adanya keterpaduan pembangunan infrastruktur di dalam 1 WPS dapat menjadi pengungkit ekonomi yang bersinergi dengan potensi dan kekurangan wilayah tersebut serta selaras dengan kelestarian lingkungan.

1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Ditjen Sumber Daya Air yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin oleh Menteri PUPR yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Ditjen Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan sumber daya air.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Pelaksanaan administrasi Ditjen Sumber Daya Air.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.5 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Ditjen Sumber Daya Air tersebut terdiri dari unit-unit sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
2. Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air.
3. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air.



4. Direktorat Sungai, dan Pantai.
5. Direktorat Irigasi dan Rawa.
6. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Serta Pusat-pusat yang berada di bawah koordinasi Ditjen Sumber Daya Air, yaitu :

7. Pusat Bendungan.
8. Pusat Air Tanah dan Air Baku.
9. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2017).

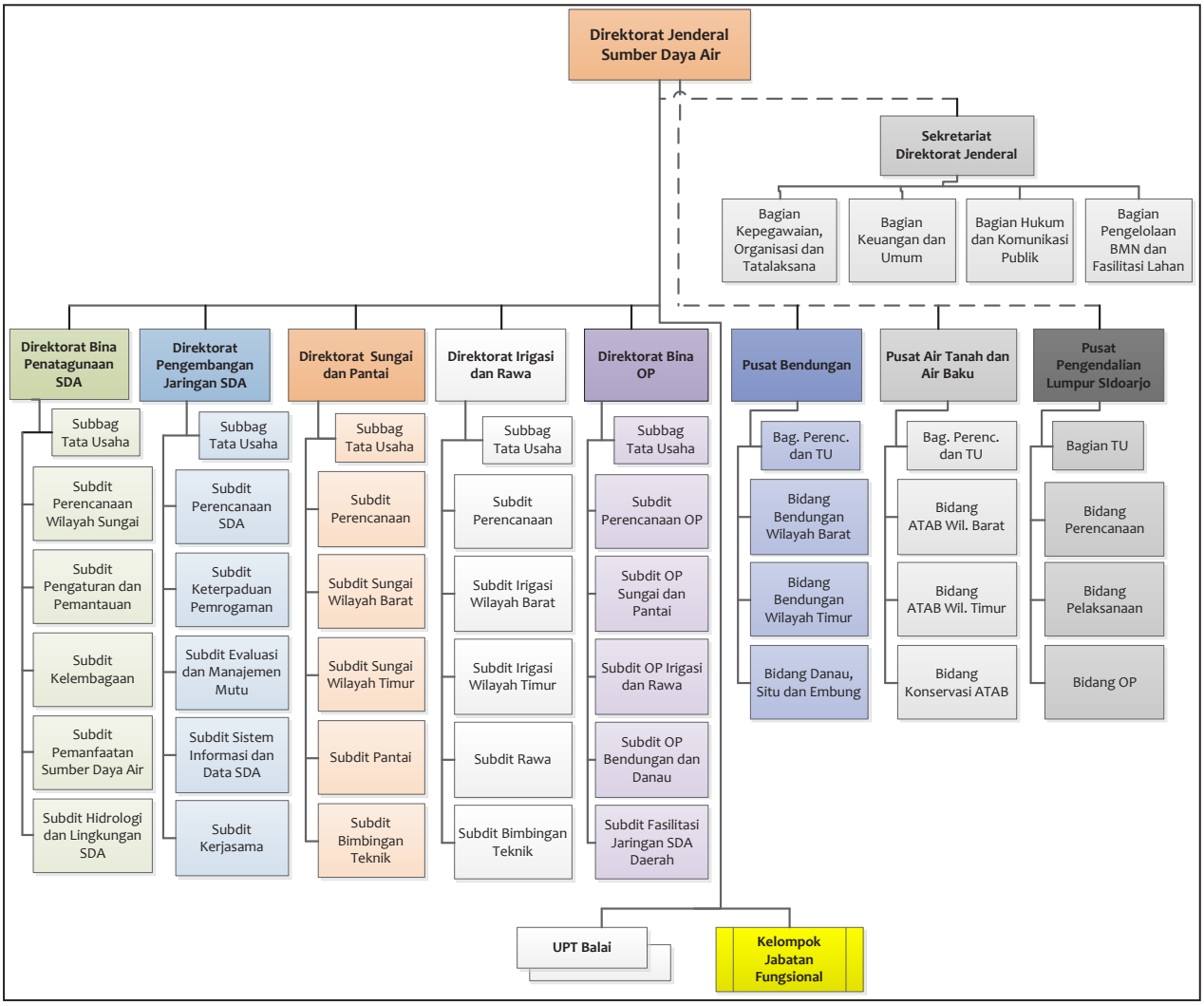
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mendukung tugas dan fungsi Ditjen Sumber Daya Air dalam pengelolaan wilayah sungai telah dibentuk 12 (dua belas) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS Tipe A dan B), 22 (dua puluh dua) Balai Wilayah Sungai (BWS Tipe A dan B), Balai Bendungan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6 Struktur Organisasi

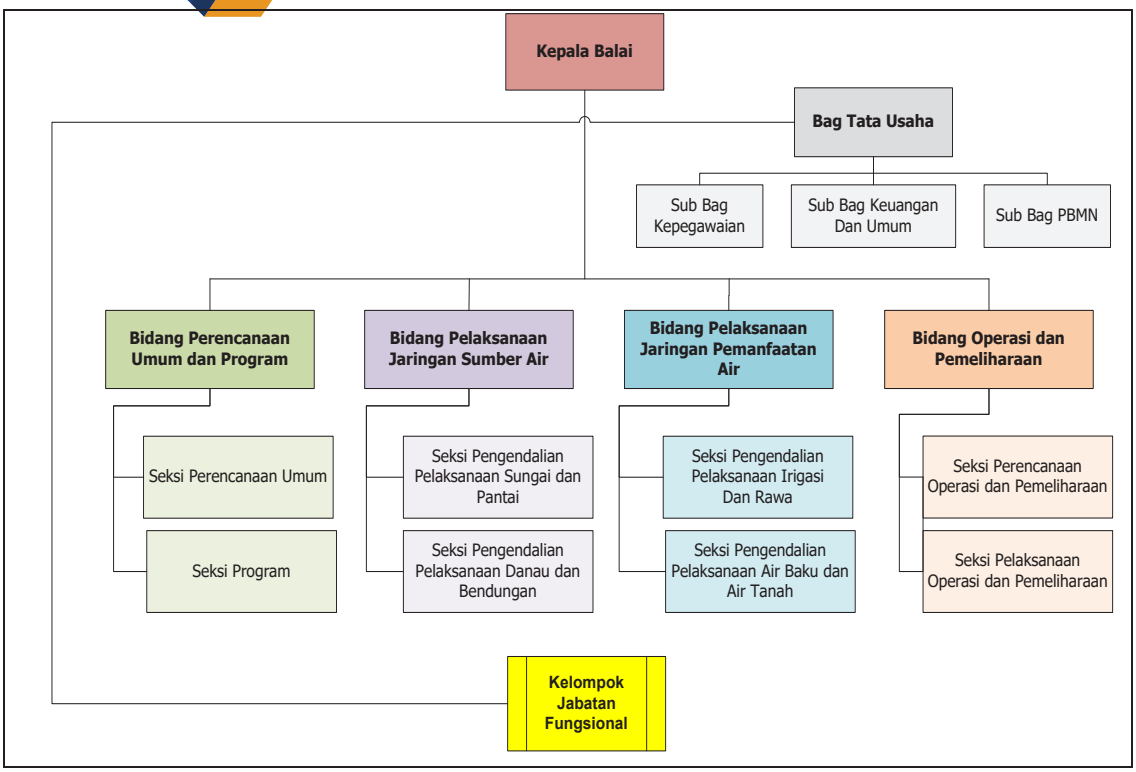
Bagan struktur organisasi dari Ditjen Sumber Daya Air dan struktur organisasi Balai Besar/Balai Wilayah Sungai serta Balai Bendungan dapat dilihat pada Gambar 1.2 sampai Gambar 1.6 dibawah ini :



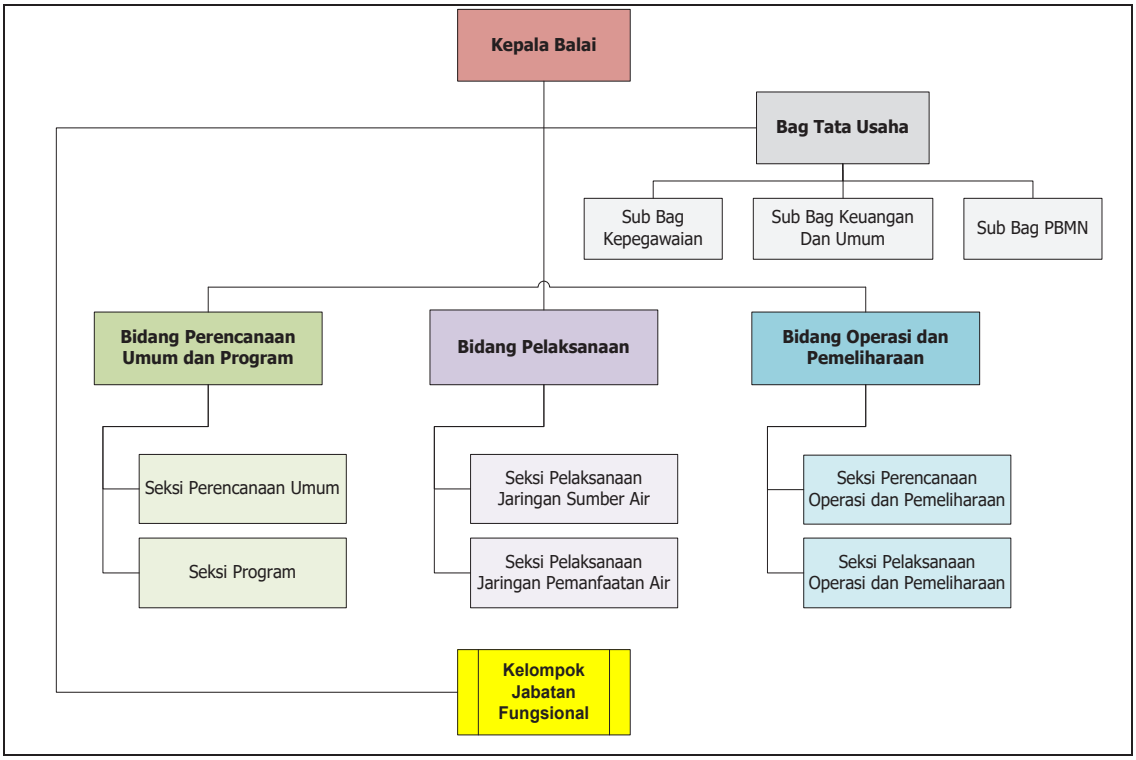
BAB 1
PENDAHULUAN



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Ditjen Sumber Daya Air

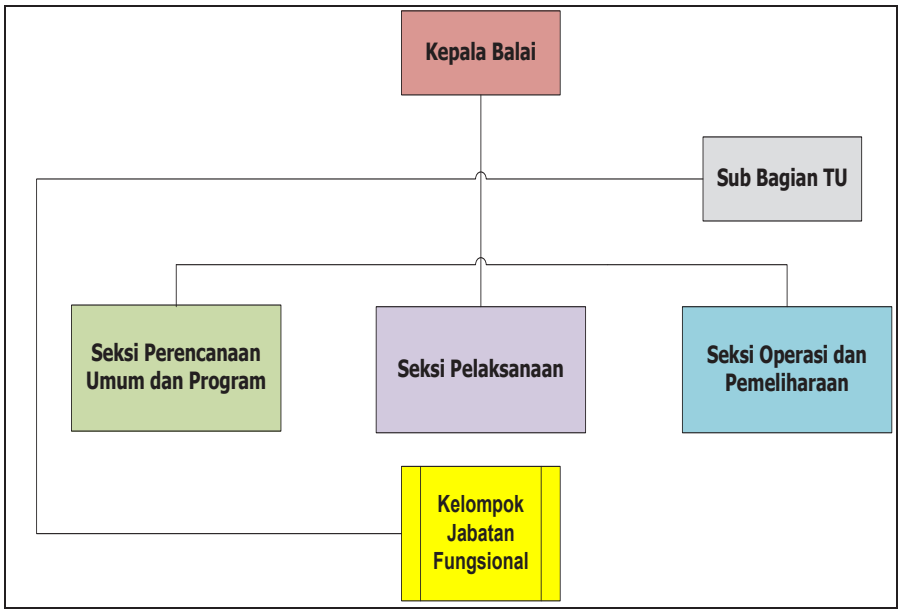


Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

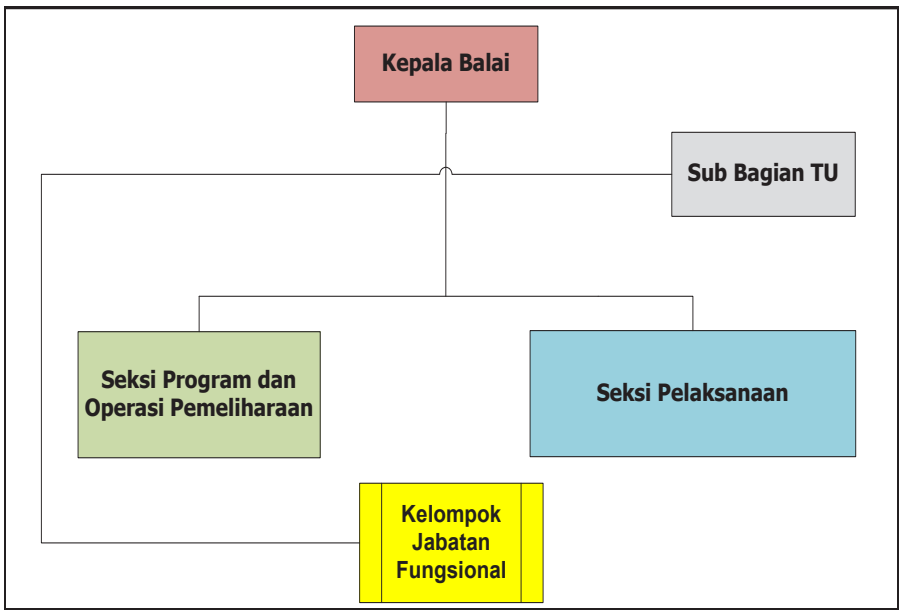


Gambar 1.4 Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

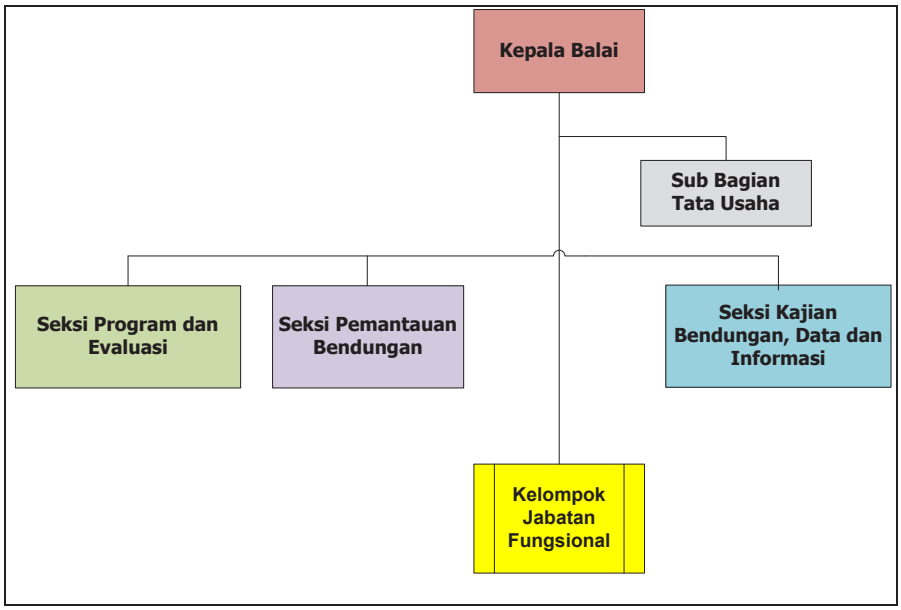
Struktur Organisasi BWS Tipe A



Struktur Organisasi BWS Tipe B



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe A dan B



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Balai Bendungan

1.6.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana.
2. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara.
4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian internal dan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.
6. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
7. Pelaksanaan fasilitasi lahan.

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

1. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
2. Bagian Keuangan dan Umum.
3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.
4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.2 Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan jaringan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama.
3. Penyiapan penyusunan NSPK dibidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air terdiri dari :



1. Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air.
2. Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman.
3. Subdirektorat Evaluasi dan Manajemen Mutu.
4. Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air.
5. Subdirektorat Kerja Sama.
6. Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.3 Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan SDA.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Bina PSDA terdiri dari :

1. Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai.

2. Subdirektorat Pengaturan dan Pemantauan.
3. Subdirektorat Kelembagaan.
4. Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air.
5. Subdirektorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air.
6. Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.4 Direktorat Sungai dan Pantai

Direktorat Sungai Dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan NSPK, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sungai Dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
2. Penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
3. Penyusunan perencanaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
4. Pembinaan pengelolaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
5. Pembinaan persiapan pelaksanaan OP sarana dan prasarana pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Direktorat Sungai dan Pantai terdiri dari :

1. Subdirektorat Perencanaan.
2. Subdirektorat Sungai Wilayah Barat.
3. Subdirektorat Sungai Wilayah Timur.
4. Subdirektorat Pantai.
5. Subdirektorat Bimbingan Teknik.
6. Subbagian Tata Usaha.



7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.5 Direktorat Irigasi dan Rawa

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan irigasi dan rawa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan NSPK irigasi dan rawa.
2. Penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa.
3. Penyusunan perencanaan irigasi dan rawa.
4. Pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa.
5. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri dari :

1. Subdirektorat Perencanaan.
2. Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat.
3. Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur.
4. Subdirektorat Rawa.
5. Subdirektorat Bimbingan Teknik.
6. Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.6 Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan darurat akibat bencana, dan fasilitasi jaringan sumber daya air daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :



1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, Bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan OP sungai dan pantai, irigasi dan rawa, Bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, Bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan SDA daerah.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, Bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, Bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah.
6. Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
7. Pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan OP.
8. Pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :

1. Subdirektorat Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan.
2. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai.
3. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.



4. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau.
5. Subdirektorat Fasilitasi Jaringan Sumber Daya Air Daerah.
6. Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.7 Pusat Bendungan

Pusat Bendungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelakasanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1363, Pusat Bendungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pembinaan pelaksanan NSPK Bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.
2. Penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada Bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.
3. Penyusunan perencanaan Bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.
4. Pembinaan pengelolaan Bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Bendungan terdiri atas :

1. Bagian Perencanaan dan Tata Usaha.
2. Bidang Bendungan Wilayah Barat.
3. Bidang Bendungan Wilayah Timur.
4. Bidang Danau, Situ, Embung.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.8 Pusat Air Tanah dan Air Baku

Pusat Air Tanah Dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan NSPK, perencanaan dan konservasi air tanah dan air baku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1382, Pusat Air Tanah Dan Air Baku menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.
2. Penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.
3. Penyusunan perencanaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.
4. Pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Air Tanah dan Air Baku terdiri atas :

1. Bagian Perencanaan dan Tata Usaha.
2. Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat.
3. Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Timur.
4. Bidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.9 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS)

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lumpur Sidoarjo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana umum, rencana teknis serta program dan anggaran pengendalian lumpur Sidoarjo.
2. Pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan lingkungan.
3. Penyiapan serta pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo.
4. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo.
5. Pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo.



6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pengendalian lumpur Sidoarjo.
7. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan
8. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum.

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha.
2. Bidang Perencanaan.
3. Bidang Pelaksanaan.
4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.10 Balai Bendungan

Balai Bendungan adalah Unit Pelaksanaan Teknis dibidang Keamanan Bendungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Balai Bendungan dibentuk dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/2427/M.Pan/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006.

Menurut Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Balai Bendungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan bimbingan teknis Bendungan serta pemantauan perilaku Bendungan kepada Komisi Keamanan Bendungan dimana Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagai ketua Komisi (Peraturan Menteri PU No. 72/PRT/M/1997 tentang Keamanan Bendungan). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Balai Bendungan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program.
2. Pengkajian Bendungan untuk mendapatkan persetujuan.
3. Inspeksi berkala dan luar biasa.
4. Pelaksanaan analisa perilaku Bendungan.
5. Penyiapan bimbingan teknis Bendungan.

6. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik Bendungan.
7. Penyebarluasan dan pemberian bimbingan Bendungan.
8. Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis Bendungan.
9. Inventarisasi, registrasi dan klarifikasi bahaya Bendungan.
10. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Balai Bendungan terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha.
2. Seksi Program dan Evaluasi.
3. Seksi Pemantauan Bendungan.
4. Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.11 Balai Besar Wilayah Sungai

Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis dibidang konservasi sumber daya air, pembangunan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengembalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai ditetapkan melalui Permen PUPR No 20/PRT/M/2016. Dalam menjalankan tugasnya Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tanggung jawab dalam bidang pengelolaan drainase utama perkotaan, serta pendetailan fungsi BBWS terkait pengelolaan drainase utama perkotaan, penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan SMK3, penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :



1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.
4. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/ pengembangan sumber daya air.
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP).
6. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).
7. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
8. Pengelolaan drainase utama perkotaan.
9. Pengelolaan sistem hidrologi.
10. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
11. Pelaksanaan OP SDA pada wilayah sungai.
12. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
13. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.
14. Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA pada wilayah sungai.
15. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
16. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah.
17. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJP Sumber Daya Air) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik.
19. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, dan
20. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Balai Besar Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) tipe :

1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A.
2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A, terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha.
2. Bidang Program dan Perencanaan Umum.
3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air.
4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha.
2. Bidang Program dan Perencanaan Umum.
3. Bidang Pelaksanaan.
4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.12 Balai Wilayah Sungai

Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis dibidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Tugas dan fungsi Balai Wilayah Sungai ditetapkan melalui Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016. Dalam menjalankan tugasnya Balai Wilayah Sungai mempunyai tanggung jawab dalam bidang pengelolaan drainase utama perkotaan, serta pendetailan fungsi BWS terkait pengelolaan drainase utama



perkotaan, penyelenggaraan SMM dan SMK3, penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.
4. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau desain atau pengembangan sumber daya air.
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP).
6. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).
7. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
8. Pengelolaan drainase utama perkotaan.
9. Pengelolaan sistem hidrologi.
10. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
11. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SDA pada wilayah sungai.
12. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
13. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan SDA dan izin pengusahaan SDA pada wilayah sungai.
14. Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA pada wilayah sungai.
15. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA.
16. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah.

17. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJP Sumber Daya Air) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik.
19. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, dan
20. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Balai Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) Tipe :

1. Balai Wilayah Sungai Tipe A.
2. Balai Wilayah Sungai Tipe B.

Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe A terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha.
2. Seksi Program dan Perencanaan Umum.
3. Seksi Pelaksanaan.
4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe B terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha.
2. Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan.
3. Seksi Pelaksanaan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6.13 Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan



Fungsional, mempunyai tugas malakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

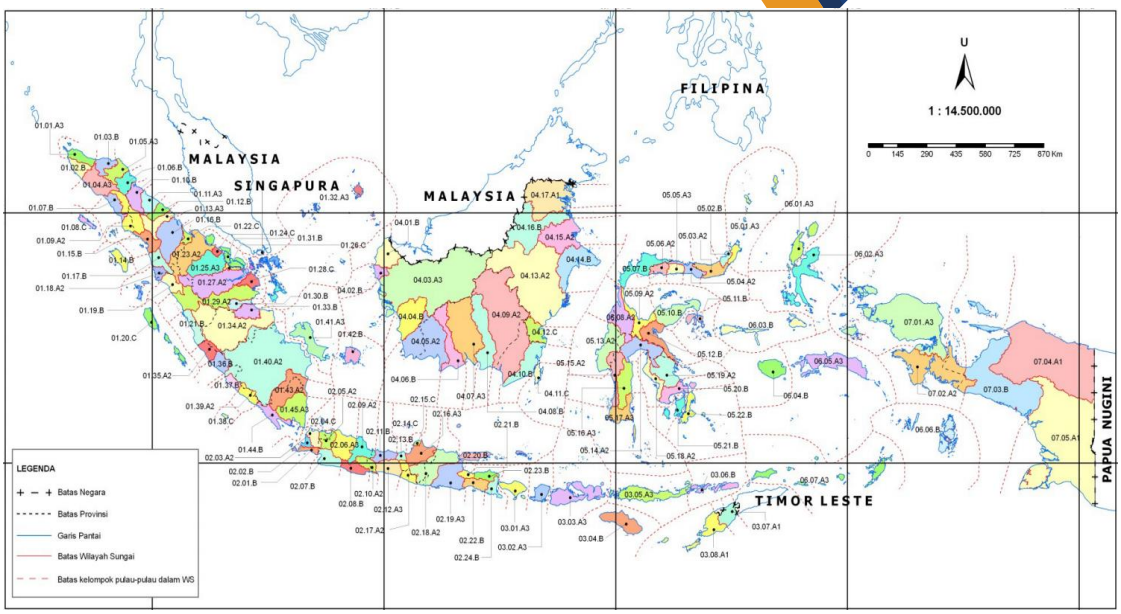
1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7 Gambaran Wilayah Kerja

Wilayah kerja Ditjen Sumber Daya Air meliputi 34 Provinsi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah sungai di Indonesia dibagi atas :

1. Wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat, terdiri atas :
    1. 5 (lima) Wilayah Sungai Lintas Negara.
    2. 31 Wilayah Sungai Lintas Provinsi.
    3. 28 Wilayah Sungai Strategis Nasional
2. Wilayah sungai kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas 64 wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
3. 12 (dua belas) wilayah sungai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ditjen Sumber Daya Air memiliki kewenangan pengelolaan atas wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional.



Gambar 1.7 Wilayah Kerja Ditjen Sumber Daya Air

Tabel 1.1 Gambaran Wilayah Kerja BBWS/BWS di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air

No	BBWS/BWS	Wilayah Kerja (Wilayah Sungai)	Lokasi/Provinsi
1	BWS Sumatera I	**WS Strategis Nasional :**	Aceh
		WS Aceh-Meureudu, WS Woyla-Bateue, WS Jambo-Aye	
		WS Lintas Provinsi :	
		WS Alas-Singkil	
2	BWS Sumatera II	**WS Strategis Nasional :**	Sumatera Utara
		WS Belawan-Ular Padang, WS Toba-Asahan	
		WS Lintas Provinsi :	
		Batang Natal-Batang Batahan	
3	BWS Sumatera III	**WS Strategis Nasional :**	Riau
		WS Siak	
		WS Lintas Provinsi :	
		WS Rokan, WS Kampar	
4	BWS Sumatera IV	**WS Strategis Nasional :**	Kepulauan Riau
		Ws. Kep. Riau	
5	BWS Sumatera V	**WS Lintas Provinsi :**	Sumatera Barat
		WS Indragiri-Akuaman	
6	BWS Sumatera VI	**WS Lintas Provinsi :**	Jambi
		WS Batanghari	
7	BWS Sumatera VII	**WS Lintas Provinsi :**	Bengkulu
		WS Teramang-Muar, WS Nasal-Padang Guci	
8	BBWS Sumatera VIII	**WS Strategis Nasional :**	Sumatera Selatan
		WS Bangka	
		WS Lintas Provinsi :	Bangka Belitung
		WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	
9	BBWS Mesuji Sekampung	**WS Strategis Nasional :**	Lampung
		WS Seputih-Sekampung	
		WS Lintas Provinsi :	
		WS Mesuji-Tulang Bawang	



No	BBWS/BWS	Wilayah Kerja (Wilayah Sungai)	Lokasi/Provinsi
10	BBWS Cidanau-Ciujung- Cidurian	**WS Lintas Provinsi :**	Banten
		WS Cidanau-Ciujung- Cidurian	
11	BBWS Ciliwung-Cisadane	**WS Lintas Provinsi :**	DKI Jakarta
		WS Ciliwung-Cisadane	
12	BBWS Cimanuk-Cisanggarung	**WS Lintas Provinsi :**	Cirebon, Jawa Barat
		WS Cimanuk-Cisanggarung	
13	BBWS Citanduy	**WS Lintas Provinsi :**	Banjar, Jawa Barat
		WS Citanduy	
14	BBWS Citarum	**WS Strategis Nasional :**	Bandung, Jawa Barat
		WS Citarum	
15	BBWS Bengawan Solo	**WS Lintas Provinsi :**	Surakarta, Jawa Tengah
		WS Bengawan Solo	
16	BBWS Pemali-Juana	**WS Strategis Nasional :**	Semarang, Jawa Tengah
		WS Jratunseluna	
17	BBWS Serayu Opak	**WS Strategis Nasional :**	DI Yogyakarta
		WS Serayu-Bogowonto	
		WS Lintas Provinsi :	
		WS Progo-Opak-Serang	
18	BBWS Brantas	**WS Strategis Nasional :**	Jawa Timur
		WS Brantas	
19	BWS Bali-Penida	**WS Strategis Nasional :**	Bali
		WS Bali-Penida	
20	BWS Nusa Tenggara I	**WS Strategis Nasional :**	Nusa Tenggara Barat
		WS Lombok, WS Sumbawa	
21	BWS Nusa Tenggara II	**WS Lintas Negara :**	Nusa Tenggara Timur
		WS Benanain, WS Noelmina	
		WS Strategis Nasional :	
		WS Flores	
22	BWS Kalimantan I	**WS Strategis Nasional :**	Kalimantan Barat
		WS Kapuas	
		WS Lintas Provinsi :	
		WS Jelai Kendawangan	
23	BWS Kalimantan II	**WS Strategis Nasional :**	Kalimantan Tengah
		WS Mentaya-Katingan	
		WS Lintas Provinsi :	Kalimantan Selatan
		WS Barito	
24	BWS Kalimantan III	**WS Lintas Negara :**	Kalimantan Utara
		WS Sesayap	
		WS Lintas Provinsi :	Kalimantan Timur
		WS Mahakam, WS Berau-Kelai	
25	BBWS Pompengan-Jeneberang	**WS Lintas Provinsi :**	Sulawesi Barat
		WS Pompengan-Larona, WS Saddang	
		WS Strategis Nasional :	Sulawesi Selatan
		WS Walanae-Cenranae, WS Jeneberang	
26	BWS Sulawesi I	**WS Strategis Nasional :**	Sulawesi Utara
		WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas	
		WS Lintas Provinsi :	
		WS Dumoga-Sangkup	
27	BWS Sulawesi II	**WS Strategis Nasional :**	Gorontalo
		WS Paguyaman	
		WS Lintas Provinsi :	
		WS Limboto-Bulango-Bone, WS Randangan	



No	BBWS/BWS	Wilayah Kerja (Wilayah Sungai)	Lokasi/Provinsi
28	BWS Sulawesi III	**WS Lintas Provinsi :** WS Palu-Lariang, WS Kalukku-Karama,WS Parigi-Poso	Sulawesi Tengah
29	BWS Sulawesi IV	**WS Lintas Provinsi :** WS Lasolo-Konaweha, WS Towari-Lasusua	Sulawesi Tenggara
30	BWS Maluku	**WS Strategis Nasional :** WS Ambon-Seram, WS Kep. Yamdena-Wetar	Maluku
31	BWS Maluku Utara	**WS Strategis Nasional :** WS Halmahera Utara, WS Halmahera Selatan	Maluku Utara
32	BWS Papua Barat	**WS Strategis Nasional :** WS Kamundan Sebyar **WS Lintas Provinsi :** WS Omba	BWS Papua Barat
33	BWS Papua	**WS Lintas Negara :** WS Memberamo-Tami-Apauvar	Papua
34	BWS Papua Merauke	**WS Lintas Negara :** WS Einlanden-Digul-Bikuma	Papua Merauke

1.8 Isu Strategis

Permasalahan yang berkembang menjadi isu strategis di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. **Sekitar 3.288.993 hektar (46%)** dari total luas daerah irigasi 7.145.168 hektar **dalam kondisi rusak**. Sekitar 83,70% dari yang kondisinya rusak tersebut, merupakan irigasi **kewenangan provinsi dan Kabupaten.**
2. **Tampungan per kapita 50 m^3 per kapita** (jauh lebih rendah dari Thailand - 1.277 m^3 per kapita dan satu tingkat di atas Ethiopia-38 m^3 per kapita).
3. Kapasitas air baku hingga 2015 (60,09 m^3/detik) baru menjangkau layanan + 70,66% penduduk.
4. **Frekuensi dan intensitas kejadian banjir dan kekeringan meningkat**, akibat :
   a. Perubahan pola hujan dan iklim.
   b. Kerusakan DAS akibat alih fungsi lahan.
   c. Inkonsistensi kebijakan di daerah (RTRW dan alih fungsilahan).
   d. Keterbatasan pendanaan.



5. Umur fungsional infrastruktur tidak sesuai dengan umur rencana karena pelaksanaan OP yang belum optimal.
6. Pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu dan menyeluruh belum terlaksana secara optimal baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi masyarakat, kelembagaan pengelolaan SDA, pendanaan yang tidak konsisten maupun penyusunan pola dan rencana yang masih perlu percepatan.

Berangkat dari isu strategis yang ada, maka arah kebijakan umum Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan **memperhatikan keserasian** antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply* yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan berbasis wilayah sungai dan didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan Sumber Daya Air) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan Sumber Daya Air), yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.
3. **Konservasi akan lebih diutamakan** sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. **Pengendalian pemanfaatan air tanah** seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem *conjuctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya **peningkatan fungsi jaringan irigasi** yang sudah

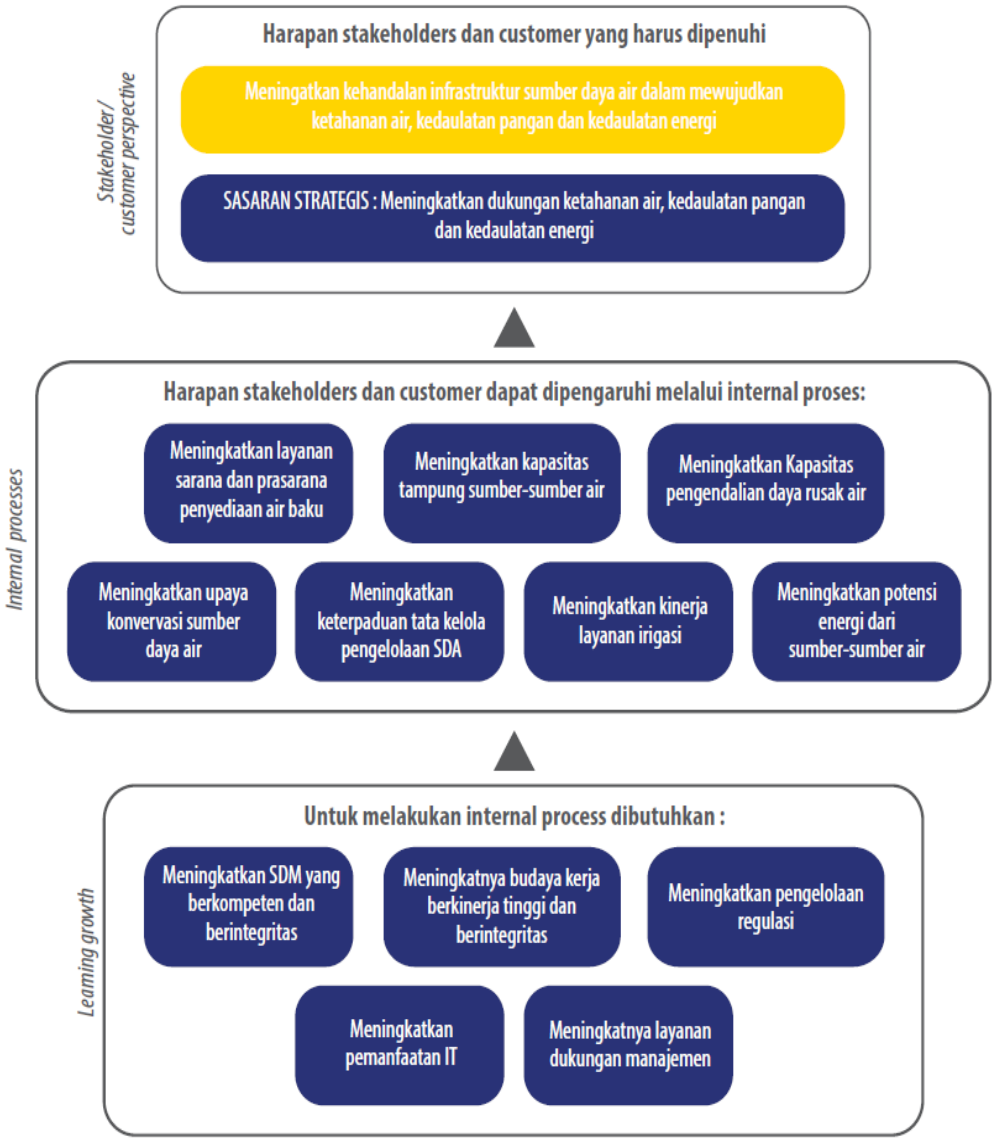
dibangun, **rehabilitasi** pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan **peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan**.

6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada **pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis**.
7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal **penanggulangan banjir** dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non struktural melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada **daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis**.
8. **Pengamanan pantai-pantai dari abrasi** terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
9. **Mitigasi dan adaptasi bidang Sumber Daya Air** dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
10. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan** di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga operasi dan pemeliharaan.
11. **Penataan kelembagaan Ditjen Sumber Daya Air**, melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau *role sharing* dalam pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu.
12. **Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab** masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau *role sharing*.
13. **Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi** sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan



dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Ditjen Sumber Daya Air.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program dan tujuan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air maka disusun *Road Map* Pengelolaan Sumber Daya Air 2015-2019 seperti pada Gambar 1.8 dibawah ini :



Gambar 1.8 Road Map Pengelolaan Sumber Dayar Air 2015-2019



Bendungan Sei Gong
Provinsi Kepulauan Riau





Bab II
Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini termasuk Kementerian PUPR (PUPR), agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, Kementerian PUPR lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk mendukung agenda prioritas nasional dalam membangun infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal serta berperan strategis dalam perekonomian nasional, Kementerian PUPR menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. : 13.1/PRT/M/2015 yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta disesuikan dengan program NAWACITA (visi dan misi Presiden dan wakil Presiden) sebagai Agenda Prioritas Nasional.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat,



kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian PUPR menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah :

Visi

> *" Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong "*

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong-royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.



BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

Misi

Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, yang harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan. Misi Kementerian PUPR 2015 – 2019 adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip **'Infrastruktur Untuk Semua'**.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.



Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Kementerian PUPR merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari Visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR

Tujuan	Sasaran Strategis
Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi.
Tujuan 3 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan.
Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya tata kelola Kementerian PUPR.

Sumber : Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 (hasil reviu paruh waktu)



2.1.2 Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015-2019

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019, Ditjen Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR dirumuskan tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air selama periode 2015-2019 dalam rangka mendukung upaya pencapaian target dukungan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketahanan air serta keterpaduan pembangunan bidang PUPR dengan pengembangan wilayah. Untuk itu Ditjen Sumber Daya Air menyusun Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015-2019.

1. Tujuan Ditjen Sumber Daya Air

Dari visi dan misi Kementerian PUPR dapat dirumuskan tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Ditjen Sumber Daya Air tahun 2015 – 2019 yang merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian PUPR untuk mencapai sasaran dan tujuan Kementerian PUPR serta sasaran-sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019 meliputi :

Tujuan 1

"Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi."



Tujuan 2

"Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan Sumber Daya Air untuk mengurangi disparitas pembanguan wilayah guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi."

Tujuan 3

"Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Ditjen Sumber Daya Air yang meliputi sumber daya manusia sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel."

2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Kementerian PUPR memiliki 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi.
3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

Ditjen Sumber Daya Air mendukung perwujudan sasaran strategis ke-2, yaitu : **"Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi."** Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Ditjen Sumber Daya Air menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Ditjen Sumber Daya Air yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis, meliputi :

1. Meningkatnya Ketahanan Air (SP2).
2. Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo (SP3).

Dalam rangka mewujudkan sasaran program (SP2) Meningkatnya ketahanan air, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu :

1. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku.



2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air.
3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak.
4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA.
5. Tingkat kinerja layanan irigasi.
6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan.

Sementara dalam rangka mewujudkan sasaran program (SP3) Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo, terdapat 1 (satu) indikator yaitu Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo.

Masing-masing indikator tersebut didukung oleh pencapaian sasaran-sasaran kegiatan secara *cascade* (berjenjang). Masing-masing sasaran kegiatan diwujudkan oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, baik di Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, Direktorat, Pusat, maupun di BBWS/BWS. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Direktorat dan Pusat fokus pada pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (Turbinwas), sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS fokus pada pelaksanaan (konstruksi dan operasi pemeliharaan).

Masing-masing sasaran kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian sasaran program melalui indikator-indikator terkait, sesuai bobot yang telah disepakati. Bobot ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya :

a. Dukungan terhadap perwujudan prioritas nasional.
b. Alokasi anggaran tiap tahunnya.
c. Pertimbangan beban target terhadap perwujudan sasaran program dan sasaran strategis.

Tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program Ditjen Sumber Daya Air sebagaimana diatas memiliki hubungan hirarki yang terkait satu dengan lainnya sebagai berikut :

Tujuan 1

Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna



menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, *Tujuan 1* ini akan dicapai melalui sasaran strategis program sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan air, melalui :
    a. Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku.
    b. Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air.
    c. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak.
    d. Peningkatan kinerja layanan irigasi.
    e. Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
2. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, melalui peningkatan layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo.

Tujuan 2

Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan Sumber Daya Air untuk mengurangi disparitas pembanguan wilayah guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, *Tujuan 2* ini akan dicapai melalui sasaran kegiatan meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA melalui peningkatan indeks RBO (indeks).

Tujuan 3

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Ditjen Sumber Daya Air yang meliputi sumber daya manusia sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air yang efektif efisien transparan dan akuntabel, *Tujuan 3* ini akan dicapai melalui upaya-upaya internal organisasi Ditjen Sumber Daya Air, meliputi :

1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dan berintegritas.
2. Meningkatkan budaya kerja berkinerja tinggi berintegritas.
3. Meningkatkan pengelolaan regulasi.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT).
5. Meningkatkan layanan dukungan manajemen.



3. Arah Kebijakan Umum Ditjen Sumber Daya Air

Arah kebijakan umum Ditjen Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan **keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*** yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.

b. Pengelolaan sumber daya air **secara terpadu dilaksanakan di tiap wilayah sungai kewenangan Pusat** didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.

c. **Konservasi sumber air** dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

d. **Pengendalian pemanfaatan air tanah** seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.

e. Pendayagunaan sumber daya air untuk **pemenuhan kebutuhan air irigasi** difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.

f. Pendayagunaan sumber daya air untuk **pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga** terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.



g. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal **penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural** melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.

h. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada **daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi** untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.

i. **Mitigasi dan adaptasi bidang SDA** dalam menghadapi dampak *negative* perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.

j. Peningkatan **partisipasi masyarakat dan kemitraan** diantara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

k. Penataan **kelembagaan** Ditjen Sumber Daya Air melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau *role sharing* dalam pengelolaan SDA secara terpadu.

l. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan **data dan informasi sumber daya air** dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Ditjen Sumber Daya Air.

m. **Penerapan "*living in harmony with mud*" dalam pengendalian lumpur Sidoarjo**. Hal ini dengan mempertimbangkan pendapat sebagian ahli Geologi bahwa semburan lumpur panas Sidoarjo tidak mungkin bisa dihentikan.

4. Strategi Operasional

Dalam rangka mencapai arah kebijakan sebagaimana disebutkan di atas, strategi operasional Ditjen Sumber Daya Air 2015 – 2019 dibagi atas strategi operasional :

a. Strategi Operasional Konservasi SDA

Konservasi sumber air ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan. Strategi pelaksanaan konservasi meliputi konservasi fisk dan non-fisik.

Strategi pelaksanaan konservasi fisik dicapai melalui :

1) Pembangunan 65 bendungan, terdiri dari penyelesaian/lanjutan 16 bendungan, 49 bendungan baru dengan target 29 bendungan dapat diselesaikan pada periode 2015 – 2019. Disamping itu juga dibangun ± 1.088 embung/bangunan penampung air lainnya.
2) Rehabilitasi/peningkatan 45 bendungan serta 625 embung dan bangunan penampung air lainnya.
3) Restorasi 55 sungai, revitalisasi 24 danau, dan konservasi 34 kawasan rawa.
4) Operasi dan pemeliharaan 35 bendungan dan 1.899 embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
5) Pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber-sumber air alami lainnya.
6) Konservasi air tanah difokuskan pada kawasan yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku.
7) Mendukung revitalisasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 Menteri pada 9 Mei 2015, baik dengan kegiatan fisik maupun non-fisik.

Sementara, strategi pelaksanaan konservasi non fisik dicapai melalui :

1) Sosialisasi terkait perlunya konservasi kepada masyarakat disekitar sumber air.



2) Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air.
3) Pembinaan Pemerintah Daerah dan dunia usaha terkait kegiatan konservasi sumber-sumber air.
4) Peningkatan peran wadah koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll) dalam perumusan kebijakan maupun strategi dan pelaksanaan operasionalnya.

b. Strategi Operasional Pendayagunaan SDA

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dicapai melalui strategi :

1) Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku dari kapasitas 51,44 m^3/detik menjadi 118,6 m^3/detik atau peningkatan sebesar 67,52 m^3/detik.
2) Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku kapasitas sebesar 22 m^3/detik.
3) Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku kapasitas sebesar 94,75 m^3/detik.
4) Penyediaan air baku diutamakan bersifat regional dengan mempertimbangkan aspek keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta pola dan rencana pengelolaan SDA dan didasarkan atas desain yang menyeluruh mulai dari unit air baku, unit produksi, hingga unit distribusi.
5) Sinkronisasi lokus penyediaan air baku dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, mencakup : i) Kawasan Strategis Nasional (KSN), ii) Kawasan yang rawan air bersih, iii) Kawasan perbatasan, pulau terluar, dan pesisir, iv) Kawasan perkotaan, v) Kawasan pariwisata prioritas, serta kawasan strategis lainnya.



Untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dicapai melalui strategi :

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah untuk mendukung kedaulatan pangan, yang dilaksanakan melalui :
   a. Peningkatan suplai irigasi yang dialayani dari bendungan dari 11% menjadi 13% (cakupan dari total area irigasi).
   b. Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 juta hektar, yang terdiri dari :
      1) Jaringan irigasi kewenangan pusat yang dibangun sepanjang 4.160 km, jaringan irigasi rawa yang dibangun 2.282 km, jaringan irigasi tambak sepanjang 158,28 km, jaringan irigasi air tanah 1.967 km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 561 ribu hektar.
      2) Jaringan irigasi kewenangan daerah yang dibangun sepanjang 13.423 km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 439 ribu hektar.
   c. Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 juta hektar, yang terdiri dari :
      1) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat sepanjang 20.162 km, jaringan irigasi rawa sepanjang 8.093 km, jaringan irigasi tambak sepanjang 837 km, jaringan irigasi air tanah sepanjang 0,343 km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 1,4 juta hektar.
      2) Rehabiltasi jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah sepanjang 21.289 km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 1,6 juta hektar.
   d. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan daerah dilaksanakan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
   e. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, meliputi jaringan irigasi 3,9 juta hektar



(Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi permukaan 128,28 km, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi air tanah 0,68 km, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi rawa 112,35 km, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi tambak 14,88 km).

f. Pengembangan irigasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Pengembangan irigasi pada masing-masing pulau dibedakan sebagai berikut :
   1) Pengembangan irigasi di Pulau Sumatera diarahkan pada peningkatan sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi.
   2) Pengembangan irigasi di Pulau Jawa diarahkan pada rehabilitasi dan modernisasi daerah irigasi yang telah habis umur ekonomisnya. Pada kurun 2015 – 2019 modernisasi difokuskan pada DI Jatiluhur (Jawa Barat), DI Rentang (Jawa Barat), dan DI Wadas Lintang.
   3) Pengembangan irigasi di Pulau Bali diarahkan pada rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, didukung oleh sistem pengembangan padi SRI.
   4) Pengembangan irigasi di Pulau Nusa Tenggara diarahkan pada irigasi air tanah, didukung oleh pengembangan sumber-sumber air (embung/bendungan).
   5) Pengembangan irigasi di Pulau Kalimantan diarahkan pada pengembangan irigasi rawa, terutama untuk *food estate*.
   6) Pengembangan irigasi di Pulau Maluku diarahkan pada pengembangan irigasi permukaan.
   7) Pengembangan irigasi di Pulau Papua diarahkan pada pengembangan irigasi rawa terutama untuk *food estate.*
g. Pengembangan irigasi rawa, termasuk untuk *food estate* harus mempertimbangkan tata air rawa dalam rangka pencegahan emisi gas rumah kaca serta mempertimbangkan rencana tata ruang.
h. Pengembangan irigasi tambak dilakukan dengan bersinkronisasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

i. Pengembangan irigasi air tanah difokuskan pada daerah-daerah minim sumber air permukaan didukung oleh konservasi air tanah sebagai upaya menjaga keberlanjutan air tanah.

j. Pengelolaan dan pengembangan irigasi difokuskan pada 14 lumbung pangan : Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Kalsel, Kalbar, Sulsel, dan Sulteng.

k. Pengembangan irigasi didukung oleh pemantapan pengelolaan irigasi, antara lain melalui : penerapan SRI, penyelenggaraan O&P yang didukung oleh anggaran yang memadai (AKNOP) dll.

l. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, antara lain melalui : pemberdayaan petani (P3A), peningkatan kemampuan personil Operasi dan Pemeliharaan, pembentukan dan operasionalisasi Unit Pengelola Irigasi, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah).

2. Peningkatan kapasitas sumber energi untuk mendukung kedaulatan energi, yang dilaksanakan melalui :

   a. Inventarisasi bendungan eksisting yang memiliki potensi PLTA dan identifikasi potensi-potensi PLTM dan PLTMH.

   b. Pemanfaatan potensi tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero).

   c. Pelibatan swasta dan badan usaha lainnya dalam pemanfaatan air sebagai sumber energi dilaksanakan melalui mekanisme perijinan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan 6 (enam) prinsip dasar batasan pengelolaan SDA sesuai putusan MK No. 58/PUU-XI/2013.

c. Strategi Operasional Pengendalian Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurasi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir,



sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non-struktural. Strategi dengan pendekatan struktural meliputi :

1. Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul serta perkuatan tebing sepanjang 3.080 km.
2. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 200 ribu hektar.
3. Penanganan banjir dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir pada masing-masing wilayah sungai.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali sedimen sebanyak 306 buah.
5. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 km.
6. Penanganan drainase perkotaan sepanjang 4 km.

Sementara strategi dengan pendekatan non-struktural meliputi :

1. Penyusunan *master plan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya spot-spot tertentu.
2. Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah kerja BBWS/BWS.
3. Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal disepanjang sungai.
4. Pelibatan pemerintah daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
5. Penetapan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
6. Pembuatan atau *updating* (pembaruan) peta rawan bencana (*flood risk map*).
7. Pengoperasian *flood forecasting warning system* (FFWS) di sungai-sungai utama sebagai upaya peringatan dini.

d. Strategi Operasional Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola SDA

Peningkatan keterpaduan tata kelola SDA ditujukan untuk mewujudkan tata kelola SDA yang lebih *accountable*, didukung oleh *decision making process* yang lebih partisipatif dan demokratif dalam rangka terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, yang dicapai melalui strategi :

1. Perencanaan pengelolan SDA pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melalui :
   a) Penyelesaian penyusunan, pembahasan dan penetapan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS di wilayah kerja BBWS/BWS.
   b) Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
   c) Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing BBWS/BWS untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.
   d) Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA.
2. Peningkatan peran serta *stakeholders*, melalui :
   a) Optimalisasi peran *stakeholder* pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) pada masing-masing WS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga O&P pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antar instansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.
   b) Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangannya.



c) Pembatasan pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pemanfaatan sumber daya air bukan pada bentuk kerjasama, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PUPR No. 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.

3. Peningkatan Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air (SISDA) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, melalui :
   a) Pemantapan *website* Ditjen Sumber Daya Air yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat dan akuntabel. Website ini didukung di masing-masing BBWS/BWS yang menampilkan data dan informasi lebih detil terkait pengelolaan WS dan infrastruktur SDA di wilayah kerjanya masing-masing.
   b) Pengembangan jejaring SISDA, yang mencakup informasi terkait kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan SDA, dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan SDA.
   c) Penerapan *one map policy* pada penyelenggaraan pengelolaan SDA.
   d) Pengembangan sistem *e-government* yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan SDA di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, meliputi :
      1) Pengembangan dan penerapan *e-programming* untuk perencanaan pemrograman kegiatan.
      2) Penerapan *e-budgeting* dengan memanfaatkan RKA-K/L yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk penganggaran kegiatan.
      3) Penerapan *e-procurement* dan *e-monitoring* yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR.
      4) Pengembangan dan penerapan *e-kinerja* untuk pengukuran kinerja unit organisasi dan kinerja individu (pegawai).

e) Pemantapan sistem komunikasi publik Ditjen Sumber Daya Air yang didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat dan akuntabel.

f) Peningkatan kapasitas SDM dibidang komunikasi publik dan teknologi informasi melalui pelatihan, studi banding dll.

4. Pemberian izin kepada usaha swasta dan badan usaha lainnya untuk melakukan pengusahaan atas air dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat, mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air yang memuat pertimbangan teknis dan saran. Prioritas pemberian izin dilakukan untuk :

   a) Pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar.

   b) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air.

   c) Pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.

   d) Pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum.

   e) Kegiatan bukan usaha.

   f) Pengusahaan sumber daya air oleh BUMN /BUMD.

   g) Pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta.

e. Strategi Operasional Operasi dan Pemeliharaan

Pelaksanaan OP ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air, yang dicapai melalui strategi :

1. Seluruh prasarana SDA yang berupa aset harus dioperasi dan dipelihara.
2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada seluruh objek Operasi dan Pemeliharaan yang terdiri atas :

   a) Seluruh infrastruktur SDA yang meliputi jaringan irigasi, bendungan, sarana dan prasarana air baku, dan sarana pengendali banjir.

   b) Wadah (alami) yang strategis meliputi sungai perkotaan dan danau/situ.



3. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan OP sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) secara bertahap.
4. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan pelaksana Operasi dan Pemeliharaan dibagi atas :
   a) Untuk sistem makro (sungai dan bendungan) dilakukan oleh BBWS/BWS dan Perum Jasa Tirta.
   b) Untuk sistem mikro (jaringan irigasi, situ, air baku) dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP).
5. Pengembangan kelembagaan Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan SDM dan regulasi.

f. Strategi Operasional Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo ditujukan untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan akibat luapan lumpur serta mewujudkan sistem pengendalian lumpur yang handal, melalui strategi :

1. Penuntasan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan warga terdampak.
2. Pengembangan pola pengelolaan dan pengerukan lumpur di ruang/kolam tampungan.
3. Peningkatan pengaliran lumpur ke Kali Porong.
4. Pemetaan bawah permukaan wilayah penanganan luapan lumpur.
5. Menjaga tingkat keandalan tanggul PAT dan infrastruktur pendukung lainnya.
6. Peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.

2.2 Target Tahun 2018 Menurut Renstra 2015-2019

Target rencana kinerja tahun 2018 mengalami perubahan setelah adanya reviu paruh waktu terhadap Rencana Strategis 2015-2019. Menurut Renstra 2015 – 2019 Ditjen Sumber Daya Air awal, target rencana kinerja tahun 2018 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) sasaran program dan 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil reviu paruh waktu Renstra Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019, target kinerja dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 (dua) Sasaran Program, 7 (tujuh)



indikator Sasaran Program, dan 19 (sembilan belas) Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

A. Sasaran Program Meningkatnya Ketahanan Air Nasional

1. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku (%)
   - SK1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku
   - SK2. Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku
2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%)
   - SK3. Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air
   - SK4. Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan penampung air lainnya
   - SK5. Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan
3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%)
   - SK6. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak
   - SK7. Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai
4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%)
   - SK8. Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
   - SK9. Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu
   - SK10. Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS
   - SK11. Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional
5. Tingkat kinerja layanan irigasi (%)
   - SK12. Peningkatan layanan kinerja irigasi
   - SK13. Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa
6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%)
   - SK14. Peningkatan kinerja layanan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air
   - SK15. Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
7. *Learning & Growth* :
   - SK16. Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pengelolaan SDA
   - SK17. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya



B. Sasaran Program Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo

1. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%)

SK18. Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo

SK19. Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo

2. *Learning & Growth* :

SK16. Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pengelolaan SDA

SK17. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Tabel 2.2 Target Tahun 2018 menurut Renstra 2015-2019

Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)	Satuan	Reviu Rencana Target 2018	Pagu (Rp. Juta)
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air			
Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi	**%**	**56,33**	**37.309.552**
1 Tingkat dukungan ketahanan air	%	57,34	36.903.454
2 Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo	%	60	406.098
Program : Pengelolaan Sumber Daya Air			
Sasaran Program : Meningkatnya Ketahanan Air Nasional			**36.903.454**
1 Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	%		
2 Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air	%		
3 Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	%		
4 Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	%		
5 Tingkat kinerja layanan irigasi	%		
6 Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan	%		
7 *Learning & Growth*			
Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pengelolaan SDA	%		
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%		
Program : Pengendalian Lumpur Sidoarjo			
Sasaran Program : Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo			**406.098**
1 Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo	%		
2 *Learning & Growth*			
Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pengelolaan SDA	%		
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%		



Target sasaran Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019 (Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan), Rencana Pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program Ditjen Sumber Daya Air 2015 – 2019, dan Matriks Kinerja dan Pendanaan Ditjen Sumber Daya Air 2015 – 2019 berdasarkan hasil reviu Renstra 2015-2019 disajikan dalam Lampiran.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Menurut Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja.

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air setiap tahunnya perencanaan stratejik dituangkan dalam suatu perjanjian Kinerja Tahunan. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja (*output*/*outcome*) yang hendak dicapai dalam satu tahun (2018) dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran program dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaran pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan oleh Menteri PUPR guna mewujudkan capaian sasaran strategis dan sasaran program Ditjen Sumber Daya Air.

2.3.1 Indikator Kinerja

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sumberdaya air sebagai salah satu persyaratan



terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran Ditjen Sumber Daya Air.

Perjanjian Kinerja 2018 Ditjen Sumber Daya Air yang ditetapkan pada awal tahun anggaran 2018 dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 (dua) Sasaran Program dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja termasuk didalamnya Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing program dengan rincian sebagai berikut :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi sasaran program sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Baku,** dengan indikator kinerja
   a. Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dengan target 4,79 m^3/detik.
   b. Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula, dengan target 0,18 m^3/detik.
   c. Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dengan target 143,05 m^3/detik.

2. **Meningkatnya Kapasitas Tampung Sumber-Sumber Air,** dengan indikator kinerja
   a. Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air, dengan target 250 juta m^3.
   b. Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air, tetap mempertahankan target 2,5 juta m^3.
   c. Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air, dengan target 4.497 juta m^3.

3. **Meningkatnya Kapasitas Pengendalian Daya Rusak Air,** dengan indikator kinerja
   a. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak, dengan target 12.929 hektar.

4. **Meningkatnya Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Air,** dengan indikator kinerja
   a. Peningkatan indeks RBO, dengan target 3,02 indeks.
5. **Meningkatnya Upaya Konservasi Sumber Daya Air,** dengan indikator kinerja
   a. Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas, dengan target *output* tetap 20% dan target *outcome* 20%.
6. **Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi,** dengan indikator kinerja
   a. Peningkatan layanan jaringan irigasi, dengan target 47.512 hektar.
   b. Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi, dengan target 145.670 hektar.
   c. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi, dengan target 3.053.595 hektar.
   d. Persentase daerah irigasi yang diari oleh bendungan, dengan target 12%.
7. **Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air,** dengan indikator kinerja
   a. Peningkatan potensi energi sumber air, dengan target 11,35 MW.

Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo, meliputi sasaran program sebagai berikut:

8. **Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air,** dengan indikator kinerja
   a. Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan target 1,77 Km.
   b. Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan target 1,84 Km.
   c. Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan target 13,50 Km.
   d. Teralirkannya lumpur luapan ke Kali Porong, dengan target 40 juta m^3 slurry.
   e. Tertatanya kawasan diluar PAT, dengan target 2 Hektar.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air (awal) diuraikan pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 (awal)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Santoso
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

IMAM SANTOSO






BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	1 Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	4,79	m^3/detik
		2 Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	0,18	m^3/detik
		3 Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	143,05	m^3/detik
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	1 Peningkatan kapasitas tampung sumber air	250,00	juta m^3
		2 Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	2,50	juta m^3
		3 Terjaganya kapasitas tampung sumber air	4.497,00	juta m^3
3	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	1 Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	12.929,00	Ha
4	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	1 Peningkatan Indeks RBO (Indeks)	3,02	indeks
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber air	1 Peningkatan persentase kawasan/ lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas	20,00	%
6	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	1 Peningkatan layanan jaringan irigasi	47.512,00	Ha
		2 Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	145.670,00	Ha
		3 Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	3.053.595,00	Ha
		4 Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan	12,00	%
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air	1 Peningkatan potensi energi sumber air	11,35	Mw
2) PROGRAM PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO				
8	Meningkatnya pengendalian lumpur sidoarjo	1 Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur sidoarjo	1,77	Km
		2 Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur sidoarjo	1,84	Km
		3 Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur sidoarjo	13,50	Km
		4 Teralirkannya lumpur luapan ke kali Porong	40,00	juta m^3 slurry
		5 Tertatanya kawasan diluar PAT	2,00	Ha

Program :
1 Pengelolaan Sumber Daya Air
2 Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Anggaran
Rp. 36.903.453.526.000
Rp. 406.098.025.000

JAKARTA, JANUARI 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR

IMAM SANTOSO



Selanjutnya dengan adanya reviu Rencana Strategi Ditjen Sumber Daya Air 2015 – 2019, untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi dimana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR No. 5 tahun 2017, menjadi unit kerja dibawah Ditjen Sumber Daya Air, disamping itu terjadi perubahan lingkungan strategis dimana terjadi beberapa perubahan :

a. Nomenklatur Sasaran Strategis (SS) hanya digunakan untuk sasaran pada *customers*/stakeholders *perspective*.
b. Sasaran strategis pada *internal process dan learning and growth*, nomenklaturnya berubah menjadi Sasaran Program (SP).
c. Berdasarkan peta strategi ini, Ditjen Sumber Daya Air mendukung 1 (satu) SS yaitu SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.
d. Pada *internal process*, Ditjen Sumber Daya Air mendukung 2 (dua) SP, yaitu SP2. Meningkatnya ketahanan air, dan SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo. Kedua sasaran program ini akan menjadi *customers*/stakeholders *perspectives* pada peta strategi Ditjen Sumber Daya Air nantinya (peta strategi level Eselon I).
e. Dengan perubahan nomenklatur ini berarti SS2 pada level *customers*/stakeholders *perspectives* didukung oleh 2 (dua) sasaran program pada *internal process* (*cascade*).

Perubahan-perubahan sebagaimana dijabarkan diatas berimplikasi pada hal yang menjadi dasar bagi penyusunan reviu Renstra Ditjen Sumber Daya Air, yaitu :

a. Perubahan peta strategi Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019

   Hal ini untuk mengakomodir perubahan peta strategi Kementerian PUPR 2015-2019.
b. Perubahan cara perhitungan capaian Sasaran Strategis (SS) pada level Kementerian PUPR dan Sasaran Program (SP) pada level Ditjen Sumber Daya Air.

   Hal ini akan menjadi masukan pada Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj).



Dengan adanya perubahan peta strategi, perubahan struktur organisasi sebagaimana dijelaskan di atas, akan berpengaruh pada perubahan Perjanjian Kinerja 2018 Ditjen Sumber Daya Air (revisi) dimana Ditjen Sumber Daya Air mendukung 1 (satu) sasaran strategis "Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi" dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 (dua) sasaran program, 7 (tujuh) indikator sasaran program, 19 (sembilan belas) sasaran kegiatan, yang kemudian digunakan sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing program dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Ketahanan Air, dengan target 87% (bobot 97%), meliputi indikator

1. **Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku,** dengan target 85% (bobot 10%).
2. **Tingkat Kapasitas Tampung Sumber-sumber Air,** dengan target 80% (bobot 30%).
3. **Tingkat Kapasitas Pengendalian Daya Rusak,** dengan target 90% (bobot 15%).
4. **Tingkat Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan SDA,** dengan target 100% (bobot 5%).
5. **Tingkat Kinerja Layanan Irigasi,** dengan target 84% (bobot 25%) .
6. **Tingkat Kinerja Operasi dan Pemeliharaan,** dengan target 100% (bobot 10%).

Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo, dengan target 90,5% (bobot 3%) dengan indikator

1. **Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo,** dengan target 90% (bobot 95%).

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air (revisi) diuraikan pada Tabel 2.4 dibawah ini.



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 (revisi)

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hari Suprayogi
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua	Pihak Pertama
M. BASUKI HADIMULJONO	HARI SUPRAYOGI






PERJANJIAN KINERJA 2018
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET TERHADAP CAPAIAN SS
SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi	87%
SP2 Meningkatnya Ketahanan Air	87%
1 Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	9%
2 Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air	24%
3 Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	14%
4 Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	5%
5 Tingkat kinerja layanan irigasi	21%
6 Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan	10%
Learning & Growth :	
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	3%
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	2%
SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo	91%
1 Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	86%
Learning & Growth :	
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	2%
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	3%

Program :

1	Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 37.220.230.064.000
2	Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Rp. 406.098.025.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

JAKARTA , DESEMBER 2018
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR

HARI SUPRAYOGI



2.4 Metode Pengukuran

2.4.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

Penilaian Kinerja yang diberikan pada rencana aksi tahun 2018 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Permen PAN&RB Nomor 20 Tahun 2013. Penilaian dibagi menjadi 6 kategori dan dibedakan berdasarkan *range* nilai dan warna seperti dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Tabel Kriteria Penilaian

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kategori Warna
1	AA	>85 - 100	Memuaskan	
2	A	>75 - 85	Sangat Baik	
3	B	>65 - 75	Baik, Perlu sedikit perbaikan	
4	CC	>50 - 65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	
5	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar	
6	D	0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar	

Sumber : Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2013

Pengukuran Kinerja tahun 2018 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja 2018 dalam rangka pelaksanaan DIPA APBN TA 2018 Ditjen Sumber Daya Air.

Nilai Kinerja dari masing-masing *output* merupakan perbandingan nilai kinerja dari realisasi capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dari masing masing sub-*output* dalam sistem *emonitoring*.

Pengukuran capaian indikator kinerja Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Ketahanan Air Nasional meliputi indikator 1), 2), 3), 5), 6), dan indikator kinerja Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo meliputi indikator 1) dilakukan melalui sistem *emonitoring*, sedangkan capaian kinerja pada indikator sasaran program 4) dilakukan secara manual karena data belum dapat diperoleh secara *online*.

Sasaran program 4) yaitu "*Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA*", perhitungan capaian melalui pengukuran indikator kinerja peningkatan indeks RBO. Penilaian RBO Indeks berdasarkan pada pedoman pengukuran kinerja atas 5 *key performance indicator* dan 15 indikator. Dimana untuk setiap indikator memiliki skor antara 0 – 4 dengan kenaikan skor 0,5. Adapun indikator yang digunakan ditunjukkan pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Indikator RBO *Performance Benchmarking*

Kode	Bidang Kinerja Kritis		Indikator	Skor Maksimum
A	Misi	1	Status Badan Pengelola SDA	4
		2	Tata Kelola Sumber Daya Air	4
B	Pemilik Kepentingan	3	Keterlibatan Pemakai Air	4
		4	Umpan Balik Pemakai Air	4
		5	Kondisi Lingkungan	4
		6	Konservasi SDA	4
C	Pembelajaran dan Pertumbuhan	7	Pengembangan Sumber Daya Manusia	4
		8	Pengembangan Teknik	4
		9	Pengembangan RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT)	4
D	Tata Kelola Internal Organisasi	10	Perencanaan tata kelola di dalam RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT)	4
		11	Pendayagunaan SDA, Alokasi Air, Perijinan dan Kekeringan	4
		12	Pengendalian Daya Rusak Air	4
		13	Pengelolaan Data	4
E	Keuangan	14	Efisiensi Keuangan	4
		15	Pemulihan Biaya	4

RBO Indeks menunjukkan rata-rata kenaikan skor RBO-PB untuk seluruh B/BWS di Indonesia. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata kenaikan dari RBO Indeks ini adalah :

RBO Indeks = 2,5 % x 60 (Skor Maksimum RBO - PB



2.4.2 Metode Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan dokumen Renstra 2015-2019, ukuran keberhasilan Sasaran Strategis ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis. Target Sasaran Strategis Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019 sebagaimana pada Tabel 2.7, dibawah ini :

Tabel 2.7 Target Sasaran Strategis 2015 – 2019

Sasaran Strategis	2015	2016	2017	2018	2019
Target pada Renstra Kementerian PUPR	45,83%	50,33%	54,83%	59,33%	63,43%
Target pada Renstra Ditjen Sumber Daya Air	52,66%	53,93%	55,15%	56,33%	57,28%
Capaian	52,56%	53,15%	54,15%	-	-

Cara pengukuran capaian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air berbeda dengan cara pengukuran capaian pada tahun sebelumnya (2015-2017) karena berdasarkan hasil reviu Renstra 2015-2019 bahwa pengukuran capaian menganut prinsip *cascade* (berjenjang) dengan nilai bobot masing-masing indikator telah ditetapkan.

Keterkaitan berjenjang antara Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) diwujudkan pada keterkaitan masing-masing indikator. Indikator pencapaian SS didukung oleh pencapaian SP, indikator pencapaian SP didukung oleh pencpaaian SK, dan indikator pencapaian SK didukung oleh pencapaian *output-output* didalamnya. Besarnya kontribusi diukur dalam bentuk bobot atau persentase (%).

SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dicapai dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Tingkat ketahanan ari, **dengan bobot 97%** didukung oleh SP2. Meningkatnya ketahanan air.
2. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo, **dengan bobot 3%** didukung oleh SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo.

Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis terdiri dari 1, yaitu Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, dengan target 56,33%.
2. Sasaran Strategis di atas didukung oleh 2 (dua) sasaran program, dengan masing-masing bobot sebagai berikut :
   a. Meningkatnya ketahanan air, dengan bobot 97%
      1) Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, dengan bobot 10%.
      2) Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan bobot 30%.
      3) Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, dengan bobot 15%.
      4) Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, dengan bobot 5%.
      5) Tingkat kinerja layanan irigasi, dengan bobot 25%.
      6) Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan bobot 10%.
   b. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan bobot 3%
      7) Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot 95%.

   Selain indikator sasaran program yang terdapat pada *Internal Process* di atas terdapat 2 (dua) indikator pada level *Learning & Growth* dengan bobot 5 % yaitu :

   8) Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA.
   9) Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.

Pada setiap indikator sasaran program, didukung oleh sasaran kegiatan yang meliputi kegiatan dilingkup unit pelaksana teknis (BBWS/BWS/SNVT/Satker/SKPD TP-OP) dan kegiatan pembinaan di satker Direktorat/Pusat Pembina, dimana masing-masing memiliki bobot, sebagaimana disajikan pada tabel 2.8 berikut :



Tabel 2.8 Pembobotan indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan		Bobot
Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku (10%)	SK1.	Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku	90%
	SK2.	Peningkatan layanan pembinaan	10%
Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (30%)	SK3.	Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air	85%
	SK4.	Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan penampung air lainnya	10%
	SK5.	Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan	5%
Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (15%)	SK6.	Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak	90%
	SK7.	Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai	10%
Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (5%)	SK8.	Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	80%
	SK9.	Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	10%
	SK10.	Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS	8%
	SK11.	Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	2%
Tingkat kinerja layanan irigasi (25%)	SK12.	Peningkatan layanan kinerja irigasi	90%
	SK13.	Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa	10%
Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (10%)	SK14.	Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air	90%
	SK15.	Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	10%
Learning & Growth (SDA 5%)	SK16.	Peningkatan pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	80%
	SK17.	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	80%
Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (95%)	SK18.	Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	25%
	SK19.	Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	75%
Learning & Growth (PPLS 5%)	SK16.	Peningkatan pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	20%
	SK17.	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	20%

Selanjutnya untuk pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2018 tidak dapat menggunakan metode pengukuran yang sama dengan pengukuran capaian tahun 2015-2017, mengingat adanya reviu Renstra paruh

waktu 2015-2019 sehingga terjadi perubahan peta strategi dan berimplikasi pada perubahan pengukuran capaian kinerja sasaran strategis. Pada Laporan Kinerja 2018, Sasaran Strategis yang dilakukan pengukuran capaian kinerjanya hanya 1 SS yaitu Meningkatnya Dukungan Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi. Sebagaimana dijelaskan pada Laporan Kinerja 2017 bahwa Pengukuran Persentase *Baseline* Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis (tahun 2014 s.d tahun 2017) merupakan rata-rata total capaian dari sasaran program yang mendukung langsung, terdiri atas 5 (lima) variabel pengukuran yaitu :

1. Untuk **Sasaran Strategis "Meningkatnya dukungan untuk ketahanan air"** dengan indikator sasaran strategis **"Tingkat dukungan untuk ketahanan air (%)"** merupakan rata-rata capaian sasaran program dengan variable pengukuran :
   a. **Pemenuhan kebutuhan air baku untuk kehidupan sehari-hari**, dihitung berdasarkan perbandingan total kapasitas air baku tahun eksisting terhadap total kebutuhan air baku eksisting ditambah akses air baku tahun sebelumnya. Capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 75,05%.
   b. **Peningkatan kapasitas tampung sumber air per kapita**, dihitung berdasarkan perbandingan total kapasitas tampung sampai dengan tahun eksisting terhadap jumlah penduduk tahun eksisting dibandingkan dengan kapasitas tampung perkapita ideal. Capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 2,68%.
   c. **Peningkatan layanan infrastruktur pengendali daya rusak air**, dihitung berdasarkan perhitungan total luas kawasan yang terlindungi sampai dengan tahun eksisting terhadap target perlindungan kawasan seluas 200 ribu hektar. Capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 58,22%.

2. Untuk **Sasaran Strategis "Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi"** dengan indikator sasaran strategis **"Tingkat dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi (%)"** merupakan rata-rata capaian sasaran program dengan variable pengukuran :



a. **Pemenuhan kebutuhan air baku untuk layanan irigasi**, dihitung berdasarkan total produksi GKG dari irigasi yang tersedia sampai dengan tahun eksisting dibandingkan dengan total kebutuhan GKG, dengan capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 85,46% dan dihitung berdasarkan perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan luas daerah irigasi total dengan capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 76,81% (pengembalian fungsi).
b. **Peningkatan potensi sumber air**, dihitung berdasarkan perbandingan tambahan potensi energi pada tahun eksisting terhadap total potensi energi yang ada, capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 1,26%.

2.4.3 Metode Pengukuran Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

Lebih lanjut pada level Sasaran Program, ditetapkan 2 (dua) sasaran program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Ditjen Sumber Daya Air dengan 6 (enam) indikator sasaran program mendukung SP2 dan 1 (satu) indikator sasaran program mendukung SP3. Pengukuran capaian indikator sasaran program berdasarkan 19 (sembilan belas) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran kegiatan didukung oleh *output* kegiatan yang mempunyai satuan *outcome* yang sama. Berikut selengkapnya keterkaitan antara masing-masing sasaran program, indikator kinerja sasaran program, sasaran kegiatan dan *output* kegiatan.

1. SP2. Sasaran Program Meningkatnya Ketahanan Air, dicapai dengan 6 (enam) indikator sasaran program pada *Internal Process* dan 2 indikator pada *Learning and Growth*, dengan masing-masing kegiatan yang mendukungnya yaitu :
   a. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, dengan bobot 10%, didukung oleh :
      1) SK1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dengan bobot terhadap indikator (1) SP2 sebesar 90%. SK1 merupakan sasaran Kegiatan 5040. Penyediaan dan Pengelolaan Air

Tanah dan Air Baku, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS. SK1 mencakup 2 (dua) sub indikator, yaitu:

a) *Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku yang dibangun*, dengan bobot terhadap SK1 adalah 70%, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur air baku, meliputi: sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, unit air, termasuk rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku.

b) *Tingkat pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula*, dengan bobot terhadap SK1 adalah 30%, melalui kegiatan rehabilitasi infrastruktur air baku, meliputi: sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, dan unit air.

2) SK2. Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku, dengan bobot terhadap indikator (1) SP2 sebesar 10%. SK2 merupakan sasaran Kegiatan 5302. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku, yang dilaksanakan oleh Pusat Air Tanah dan Air Baku.

b. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan bobot 30%, didukung oleh :

1) SK3. Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan bobot terhadap indikator (2) SP2 sebesar 85%. SK3 merupakan sasaran Kegiatan 5039. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS. SK3 mencakup 3 (tiga) sub indikator, yaitu:

a) Tingkat kapasitas tampung bangunan air yang dibangun, dengan bobot terhadap SK3 adalah 60%, melalui kegiatan pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan *dan bangunan penampung air lainnya.*



b) *Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula*, dengan bobot terhadap SK3 adalah 35%, melalui kegiatan rehabilitasi bendungan, embung termasuk revitalisasi danau.

c) *Tingkat potensi energi sumber air*, dengan bobot terhadap SK3 adalah 5%, merupakan potensi energi (MW) dari bendungan-bendungan yang sudah selesai dibangun.

2) SK4. Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, dengan bobot terhadap indikator (2) SP2 sebesar 10%. SK4 merupakan sasaran Kegiatan 5301. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, yang dilaksanakan oleh Pusat Bendungan.

3) SK5. Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan, dengan bobot terhadap indikator (2) SP2 sebesar 5%. SK5 merupakan sasaran Kegiatan 5035. Penyelenggaraan Keamanan Bendungan, yang dilaksanakan oleh Balai Bendungan.

c. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, dengan bobot 15%, didukung oleh :

1) SK6. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 90%. SK6 merupakan sasaran Kegiatan 5037. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS. SK6 mencakup 3 (tiga) sub indikator, yaitu:

a) Peningkatan luas kawasan yang terlidungi dari daya rusak air, dengan bobot terhadap SK6 adalah 70%, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak mencakup pengendali banjir (tanggul, tebing, pintu air, kanal banjir, pompa banjir, polder, drainase utama perkotaan, FFWS), pengendali sedimen/lahar (sabo dam, *check dam*), pengaman pantai (*breakwater* dan *seawall*), termasuk rencana teknis dan dokumen

lingkungan hidup untuk konstruksi infrastruktur pengendali banjir, sedimen, lahar, dan pengaman pantai.

b) *Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak seperti semula*, dengan bobot terhadap SK6 adalah 30%, melalui kegiatan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak mencakup pengendali banjir (tanggul, tebing, pintu air, kanal banjir, pompa banjir, polder, drainase utama perkotaan, FFWS), pengendali sedimen/lahar (sabo dam, *check dam*), serta pengaman pantai (*breakwater* dan *seawall*).

2) SK7. Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 10%. SK7 merupakan sasaran Kegiatan 2424. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai, yang dilaksanakan oleh Direktorat Sungai dan Pantai.

d. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, dengan bobot 5%, didukung oleh :

1) SK8. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu, dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 80%. SK8 merupakan sasaran Kegiatan 5038. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu.

2) SK9. Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA Terpadu, dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 10%. SK9 merupakan sasaran Kegiatan 2420. Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air, yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penatagunaan SDA.

3) SK10. Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS, dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 8%. SK10 merupakan sasaran Kegiatan 5030. Dukungan Manajemen BBWS/BWS, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS.



4) SK11. Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasinoal (DSDAN), dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 2%. SK11 merupakan sasaran Kegiatan 2418. Dukungan Manaajemen Dewan SDA Nasional.

e. Tingkat kinerja layanan irigasi, dengan bobot 25%, didukung oleh :

1) SK12. Peningkatan kinerja layanan irigasi, dengan bobot terhadap indikator (5) SP2 sebesar 90%. SK12 merupakan sasaran Kegiatan 5036. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak dan Kegiatan 5040. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku (untuk jaringan irigasi air tanah – JIAT), yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS. SK12 mencakup 3 (tiga) sub indikator, yaitu :

a) *Tingkat layanan jaringan irigasi*, dengan bobot terhadap SK12 adalah 65%, melalui kegiatan pembangunan bendung dan jaringan irigasi, baik irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, irigasi air tanah (JIAT), termasuk rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa.

b) *Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi*, dengan bobot terhadap SK12 adalah 30%, melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, baik irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, irigasi air tanah (JIAT).

c) *Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk*, dengan bobot terhadap SK12 adalah 5%, merupakan potensi luas daerah irigasi yang diairi oleh waduk, kumulatif dari waduk eksisting dan waduk yang selesai dibangun pada tahun berjalan.

2) SK13. Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 10%. SK13 merupakan sasaran Kegiatan 2422. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak.

f. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan bobot 10%, didukung oleh :

1) SK14. Peningkatan kinerja layanan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana SDA, dengan bobot terhadap indikator (6) SP2 sebesar 90%. SK14 merupakan sasaran Kegiatan 5300. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS. SK14 mencakup 5 (lima) sub indikator, yaitu :

a) *Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku*, dengan bobot terhadap SK14 adalah 25%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air baku, meliputi: sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, unit air baku, dan mata air.

b) Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air, dengan bobot terhadap SK14 adalah 25%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan tampungan air, meliputi : bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya), termasuk pemeliharaan danau sebagai sumber air alami.

c) Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, dengan bobot terhadap SK14 adalah 23%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali daya rusak, meliputi:

1. Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir, dengan bobot terhadap sub indikator (3) adalah 70%, meliputi Operasi dan Pemeliharaan tanggul, tebing, kanal, pompa banjir, polder, dan sungai (tanpa infrastruktur).
2. Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi, dengan bobot terhadap sub indikator (3) adalah 20%, meliputi Operasi dan Pemeliharaan sabo dam dan *check dam*.



3. Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana pengaman pantai, dengan bobot terhadap sub indikator (3) adalah 10%, meliputi Operasi dan Pemeliharaan *breakwater* dan *seawall*.

d) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi, dengan bobot terhadap SK14 adalah 25%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi, baik irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, maupun sumur dan irigasi air tanah serta kawasan rawa.

e) *Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA*, dengan bobot terhadap SK14 adalah 2% melalui kegiatan pendukung pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, meliputi: operasional Unit Pengelola Irigasi (UPI), operasional Unit Pengelola Bendungan (UPB), penyusunan alokasi air, penanganan tanggap darurat bencana, serta Operasi dan Pemeliharaan peralatan dan fasilitas pendukung O&P (alat berat, warehouse, dll).

2) SK15. Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 10%. SK15 merupakan sasaran Kegiatan 2423. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.

2. SP3. **Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo**, dicapai dengan indikator tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot 95%, dicapai dengan 2 (dua) sasaran kegiatan (SK), yaitu :

1) SK18. Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan bobot terhadap indikator SP3 sebesar 25%. SK18 merupakan sasaran Kegiatan 2407. Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

2) SK19. Peningkatan layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot terhadap indikator SP3 sebesar 75%. Sk19 merupakan sasaran Kegiatan 2408. Pengendalian lumpur Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh Satker Pelaksana di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

SK19 mencakup 5 (lima) indikator, yaitu :

a) *Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo*, dengan bobot terhadap SK19 adalah 10%, melalui kegiatan pembangunan tanggul lumpur, termasuk penyusunan rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo.

b) *Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo*, dengan bobot terhadap SK19 adalah 5% melalui kegiatan rehabilitasi/peningkatan tanggul lumpur.

c) *Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo,* dengan bobot terhadap SK19 adalah 10%, melalui kegiatan pemeliharaan tanggul lumpur serta operasi dan pemeliharaan peralatan pendukung.

d) *Teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong,* dengan bobot terhadap SK19 adalah 70%, melalui kegiatan pengaliran lumpur ke Kali Porong.

e) *Tertatanya kawasan diluar PAT,* dengan bobot terhadap SK19 adalah 5%, melalui kegiatan penataan kawasan diluar PAT.

3. Kedua Sasaran Kegiatan (SK) SK16 dan SK17 sifatnya melayani seluruh Sasaran Program (SP) atau yang disebut memberikan layanan ***cross-cutting***.

a. **SK16. Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA**, dicapai dengan indikator tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA. Porsi SK 16 ini 80% adalah untuk pengelolaan SDA dan 20% untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Bobot (kontribusi) dukungan SK16 terhadap



SP2. Meningkatnya ketahanan air adalah 3%, sedangkan untuk SP3. Pengendalian Lumpur Sidoarjo adalah 2%.

b. **SK17. Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya**, dicapai dengan indikator tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. SK 17 juga memiliki porsi 80% adalah untuk pengelolaan SDA dan 20% untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Bobot (kontribusi) dukungan SK17 terhadap SP2. Meningkatnya ketahanan air adalah 2%, sedangkan untuk SP3. Pengendalian Lumpur Sidoarjo adalah 3%.

2.4.4 Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi

Rencana aksi harus dibuat tepat waktu pada akhir Triwulan I, II, III dan IV, sehingga didapatkan data capaian per masing-masing indikator kinerja yang terukur dan akuntabel sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada Laporan Kinerja tahun 2018 ini, pengukuran rencana aksi pada Triwulan I dan II menggunakan rencana aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja awal tahun 2018, sedangkan pengukuran Triwulan III dan IV mengacu pada Perjanjian Kinerja revisi yang telah disesuaikan dengan hasil reviu paruh waktu Rencana Strategi 2015-2019.

Tata cara perhitungan **Total Kinerja** rencana aksi Triwulan I dan II dapat diperoleh menggunakan **rumus tertimbang** baik rencana maupun realisasi pada masing-masing *output* kegiatan yang sesuai dengan struktur ADIK, yang telah dirincikan *output* kegiatan apa saja yang mendukung secara langsung capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran program yang akan diukur per Triwulannya. Berikut langkah-langkah perhitungan kinerja pada setiap *output* kegiatan hingga perhitungan total masing-masing indikator kinerja sasaran program :

1. Perhitungan konversi persentase rencana (RN) dan realisasi (RL) masing-masing *output* kegiatan pendukung ke dalam rupiah

$$\frac{\text{Persen RN/RL}}{100} \times \text{Pagu} = \text{Rp.}\ldots\ldots$$

2. Jumlahkan semua *output* yang sudah dikonversi dalam rupiah dibagi dengan total pagu *output* kegiatan pendukung indikator sasaran progam dikali dengan 100% (masing-masing Rencana/RN dan Realisasi/RL), sehingga diperoleh % Rencana dan % Realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran program

$$\frac{\text{Total Uang Rencana}}{\text{Total Pagu Output}} \times \% = \ldots\ldots\%$$

$$\frac{\text{Total Uang Realisasi}}{\text{Total Pagu Output}} \times \% = \ldots\ldots\%$$

3. Perhitungan total kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran program

$$\frac{\%\text{Realisasi}}{\%\text{Rencana}} \times 100\% = \ldots\ldots\%$$

Tata cara perhitungan **Total Kinerja** rencana aksi Triwulan III dan IV pada prinsipnya sama dengan perhitungan kinerja rencana aksi Triwulan I dan II, yaitu dapat diperoleh menggunakan **rumus tertimbang** baik rencana maupun realisasi pada masing-masing *output* kegiatan yang sesuai dengan struktur ADIK, yang telah dirincikan *output* kegiatan apa saja yang mendukung langsung capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran program yang akan diukur capaian Triwulannya, namun dikalikan dengan bobot persentase yang sudah ditetapkan pada masing-masing Indikator sasaran kegiatan dan sasaran kegiatan terhadap sasaran program. Berikut langkah-langkah perhitungan kinerja pada setiap *output* kegiatan hingga perhitungan total masing-masing indikator kinerja sasaran program :

1. Perhitungan konversi persentase rencana (RN) dan realisasi (RL) masing-masing *output* kegiatan pendukung ke dalam rupiah.



$$\frac{\text{Persen RN/RL}}{100} \times \text{Pagu} = \text{Rp. .....}$$

2. Dari hasil tersebut, kemudian dikalikan dengan bobot per sasaran kegiatan dan atau sasaran program yang sudah ditetapkan.

$$\frac{\text{\% Bobot}}{} \times \text{Pagu} = \text{Rp. .....}$$

3. Jumlahkan semua pagu *output* yang sudah dibobot dan dikonversi ke dalam rupiah, dibagi dengan total pagu *output* dan dikalikan dengan 100% (masing-masing Rencana/RN dan Realisasi/RL), sehingga diperoleh % Rencana dan % Realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dan atau sasaran program.

$$\frac{\text{Total Uang Rencana}}{\text{Total Pagu Output}} \times \% = \text{..... \%}$$

$$\frac{\text{Total Uang Realisasi}}{\text{Total Pagu Output}} \times \% = \text{..... \%}$$

4. Perhitungan total kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dan atau sasaran program.

$$\frac{\text{\%Realisasi}}{\text{\%Rencana}} \times 100\% = \text{.....\%}$$


BEN



Bendungan Mila
Nusa Tenggara Barat



Bab III
Kapasitas Organisasi

3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta manajemen organisasi. Sumber daya manusia pada dasarnya adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan, target, sasaran serta dapat mewujudkan eksistensi organisasi. Dalam pelaksanaan manajemen organisasi, sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam membangun infrastruktur yang handal serta mewujudkan *good governance*.

Ditjen Sumber Daya Air yang merupakan salah satu Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR sejak tahun 2015 tengah mengalami peningkatan beban kerja yang sangat signifikan, sehingga peran sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia di Ditjen Sumber Daya Air terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.

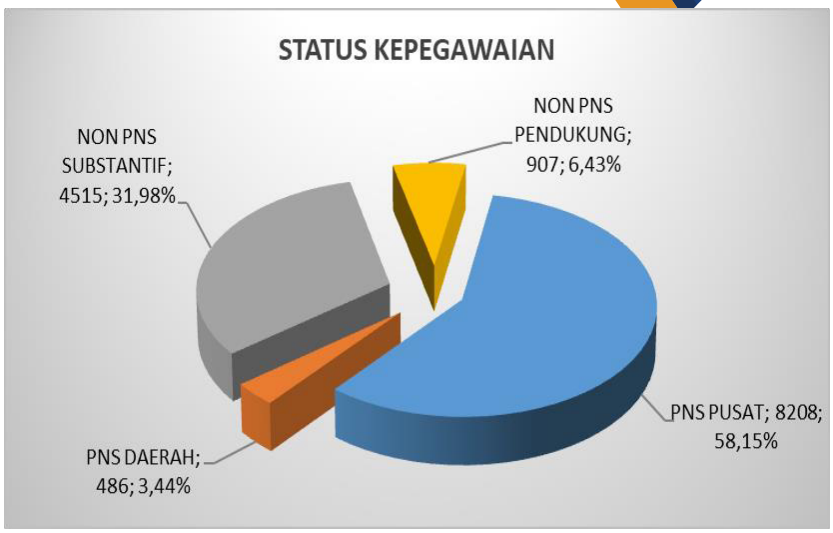
Total PNS Ditjen Sumber Daya Air pada akhir tahun 2018 adalah 8.694 orang, dimana telah terjadi penurunan dari semula 9.048 orang pada akhir 2017. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya pegawai yang pensiun, meninggal, dan pengembalian pegawai dinas ke daerah. Dari 8.694 pegawai tersebut 8.208 berstatus PNS pusat (94,40%) dan 486 berstatus PNS daerah (5,60%). Adapun rincian PNS di Ditjen Sumber Daya Air sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 di bawah ini :



Tabel 3.1 Sebaran Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Unit Kerja	PNS Pusat	PNS Daerah	Non PNS Substantif	Non PNS Pendukung	Total
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	105	0	21	7	133
2	Direktorat Pengembangan Jaringan SDA	66	0	30	2	98
3	Direktorat Bina PSDA	55	0	27	1	83
4	Direktorat Sungai dan Pantai	65	0	20	2	87
5	Direktorat Irigasi dan Rawa	61	0	20	6	87
6	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan	62	0	21	0	83
7	Sekretariat Dewan SDA	17	0	5	0	22
8	Pusat Air Tanah dan Air Baku	39	0	13	0	52
9	Pusat Bendungan	42	0	19	0	61
10	PPLS	22	2	90	0	114
11	BWS Sumatera I	405	62	179	54	700
12	BWS Sumatera II	382	22	97	40	541
13	BWS Sumatera III	104	1	79	1	185
14	BWS Sumatera IV	46	0	15	12	73
15	BWS Sumatera V	135	18	73	27	253
16	BWS Sumatera VI	77	12	120	0	209
17	BWS Sumatera VII	198	0	48	23	269
18	BBWS Sumatera VIII	257	190	119	50	616
19	BBWS Mesuji Sekampung	349	20	134	48	551
20	BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian	172	0	92	29	293
21	BBWS Ciliwung-Cisadane	120	0	139	16	275
22	BBWS Citarum	252	0	148	9	409
23	BBWS Cimanuk-Cisanggarung	275	0	234	48	557
24	BBWS Citanduy	176	0	141	16	333
25	BBWS Pemali-Juana	209	0	303	61	573
26	BBWS Serayu Opak	319	1	248	85	653
27	BBWS Bengawan Solo	336	1	129	50	516
28	BBWS Brantas	455	33	352	0	840
29	BWS Kalimantan I	81	0	65	0	146
30	BWS Kalimantan II	150	10	107	35	302
31	BWS Kalimantan III	150	5	212	0	367
32	BWS Bali-Penida	185	0	158	16	359
33	BWS Nusa Tenggara I	541	0	114	0	655
34	BWS Nusa Tenggara II	306	49	28	0	383
35	BWS Sulawesi I	197	0	74	15	286
36	BWS Sulawesi II	104	1	55	41	201
37	BWS Sulawesi III	228	0	152	42	422
38	BWS Sulawesi IV	329	4	33	38	404
39	BBWS Pompengan Jeneberang	743	4	259	87	1093
40	BWS Maluku	166	0	136	11	313
41	BWS Maluku Utara	60	1	89	18	168
42	BWS Papua	69	22	55	0	146
43	BWS Papua Barat	43	8	30	0	81
44	BWS Papua Merauke	29	20	23	0	72
45	Balai Bendungan	26	0	9	17	52
	Total	**8208**	**486**	**4515**	**907**	**14.116**
	Persentase	**58,15%**	**3,44%**	**31,98%**	**6,43%**	**100%**

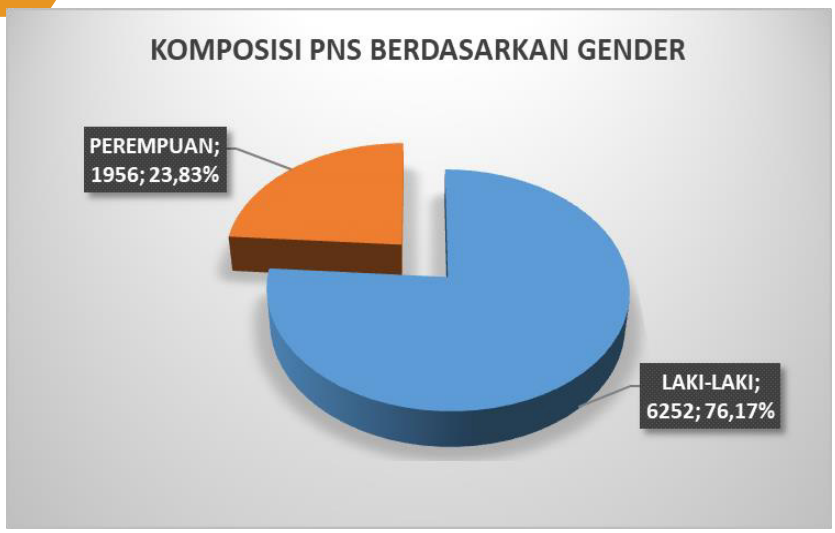
Sumber : Data e-HRM



Gambar 3.1 Sebaran Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 di atas, jumlah pegawai yang tercatat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air secara keseluruhan berjumlah 14.116 orang yang terdiri dari 8.208 PNS Pusat (58,15%), 486 PNS Daerah (3,44%) dan pegawai Non PNS berjumlah 5.422 (38,41%). Apabila kita bandingkan jumlahnya, pegawai dengan status Non PNS jumlahnya cukup signifikan hampir mencapai setengah dari total pegawai PNS yang ada dan jika dilihat dari sebaran pada unit kerja terdapat beberapa unit kerja yang justru jumlah pegawai Non PNS nya lebih banyak dari pegawai PNS, antara lain : Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), BWS sumatera VI, BBWS Ciliwung Cisadane, BBWS Cimanuk Cisanggarung, BBWS Pemali Juana, BBWS Serayu Opak, BWS Kalimantan III, dan BWS Maluku Utara.

Berdasarkan data komposisi PNS tersebut di atas, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen Sumber Daya Air termasuk jangkauannya yang tersebar di seluruh provinsi untuk membangun infrastruktur sumber daya air, maka proses pelaksanaan pekerjaan yang utama adalah pekerjaan fisik di lapangan (*on site*) sebagai perencana teknis, pelaksana teknis, dan pengawas sehingga komposisi PNS Ditjen Sumber Daya Air didominasi oleh Laki – laki dengan total 6.252 PNS atau 76,17%, dari total 8.208 PNS sedangkan jumlah PNS perempuan adalah 1.956 atau 23,83% dari total 8.208 PNS sebagaimana gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.2 Komposisi PNS berdasarkan Gender

Namun dalam proses penyelenggaraan kegiatan di Ditjen Sumber Daya Air, secara ideal sumber daya manusia dalam organisasi ini masih belum memiliki komposisi yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki proses pekerjaan utama pada bidang teknik. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan latar belakang sebagaimana tabel 3.2 dan gambar 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.2 Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Unit Kerja	Teknik	Non Teknik	Total
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	13	92	105
2	Direktorat Pengembangan Jaringan SDA	28	38	66
3	Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air	32	23	55
4	Direktorat Sungai dan Pantai	42	23	65
5	Direktorat Irigasi dan Rawa	30	31	61
6	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan	30	32	62
7	Sekretariat Dewan SDA	3	14	17
8	Pusat Air Tanah dan Air Baku	23	16	39
9	Pusat Bendungan	36	6	42
10	PPLS	15	7	22
11	BWS Sumatera I	147	258	405
12	BWS Sumatera II	66	316	382
13	BWS Sumatera III	37	67	104
14	BWS Sumatera IV	25	21	46
15	BWS Sumatera V	62	73	135
16	BWS Sumatera VI	39	38	77
17	BWS Sumatera VII	62	136	198
18	BBWS Sumatera VIII	80	177	257
19	BBWS Mesuji Sekampung	88	261	349
20	BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian	60	112	172

No	Unit Kerja	Teknik	Non Teknik	Total
20	BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian	60	112	172
21	BBWS Ciliwung-Cisadane	62	58	120
22	BBWS Citarum	90	162	252
23	BBWS Cimanuk-Cisanggarung	76	199	275
24	BBWS Citanduy	46	130	176
25	BBWS Pemali-Juana	99	110	209
26	BBWS Serayu Opak	87	232	319
27	BBWS Bengawan Solo	84	252	336
28	BBWS Brantas	96	359	455
29	BWS Kalimantan I	28	53	81
30	BWS Kalimantan II	67	83	150
31	BWS Kalimantan III	71	79	150
32	BWS Bali-Penida	44	141	185
33	BWS Nusa Tenggara I	112	429	541
34	BWS Nusa Tenggara II	66	240	306
35	BWS Sulawesi I	72	125	197
36	BWS Sulawesi II	41	63	104
37	BWS Sulawesi III	48	180	228
38	BWS Sulawesi IV	61	268	329
39	BBWS Pompengan Jeneberang	137	606	743
40	BWS Maluku	42	124	166
41	BWS Maluku Utara	26	34	60
42	BWS Papua	31	38	69
43	BWS Papua Barat	27	16	43
44	BWS Papua Merauke	18	11	29
45	Balai Bendungan	12	14	26
Total		2.461	5.747	8.208
Persentase		29,98%	70,02%	100%



Gambar 3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Meskipun *recruitment* yang dilakukan mulai Tahun 2005 memberikan persyaratan minimal pendidikan S1 (Teknik dan Non Teknik), dan porsi untuk



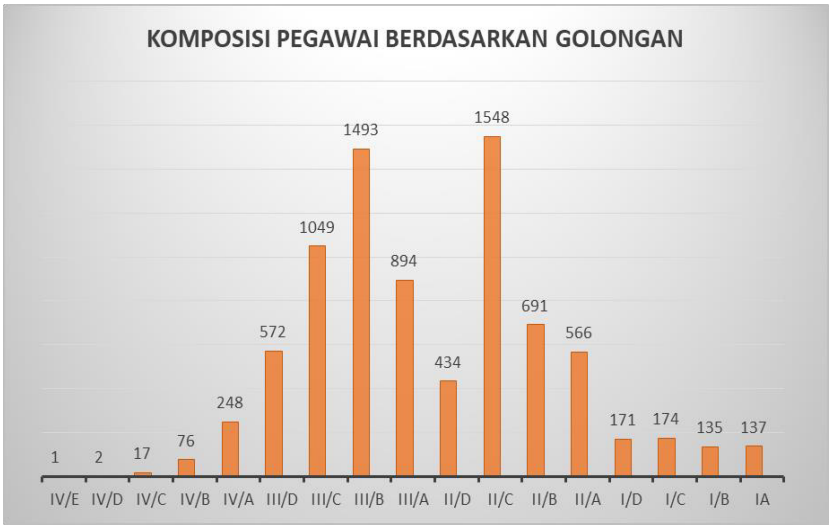
lulusan S1 dan S2 dengan latar belakang pendidikan Teknik selalu lebih besar namun karena *recruitment* pada tahun-tahun sebelumnya (terutama pengangkatan yang berasal dari jalur Non PNS) lebih banyak dari SMA (sederajat) kebawah berpendidikan non Teknik sehingga berpengaruh pada jumlah secara keseluruhan. Komposisi jumlah pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	SMA Ke Bawah	D1	D2	D3	S1	S2	S3
Teknik	0	0	2	202	1.470	781	5
Non Teknik	3.828	2	2	134	1.406	374	2
Jumlah	**3.828**	**2**	**4**	**336**	**2.876**	**1.115**	**7**
Persentase	**46,64%**	**0,02%**	**0,05%**	**4,09%**	**35,04%**	**14,07%**	**0,09%**

Potret komposisi tersebut tentunya cukup mengkhawatirkan bagi organisasi dalam upaya mengejar target pembangunan infrastruktur sumber daya air. Mempertimbangkan hal tersebut, saat ini Ditjen Sumber Daya Air tengah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Untuk memenuhi kekurangan SDM pada sisi kuantitas, Ditjen Sumber Daya Air telah melakukan penataan tenaga honorer agar tenaga yang ada dapat berfungsi maksimal dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Ditjen Sumber Daya Air tengah melakukan pengembangan pelatihan berupa pelaksanaan bimbingan teknik pekerjaan bidang sumber daya air kepada seluruh pegawai di lapangan baik teknik maupun non teknik, selain itu juga sedang dilakukan pengembangan jabatan fungsional teknik pengairan dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan para tenaga jabatan fungsional dan untuk mengatasi gap golongan antar pegawai. Hal ini didorong karena tengah terjadi gap yang cukup besar antara pegawai golongan III dan IV sehingga jika dibiarkan akan sulit mencari kaderisasi pejabat di masa datang, sebagaimana gambar 3.4 di bawah ini.



Gambar 3.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Jika dilihat secara keseluruhan bahwa komposisi pegawai saat ini lebih didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 48,83% diikuti oleh Golongan II sebesar 39,46%. Kementerian PUPR melakukan *recruitment* CPNS yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak Tahun 2005 yang mensyaratkan pendidikan minimal S1 (baik Teknik maupun Non Teknik) dan CPNS dengan latar belakang Sarjana ini secara otomatis akan diangkat menjadi PNS dengan golongan III/a untuk lulusan S1 dan III/b untuk lulusan S2. Selain itu, jumlah PNS golongan III juga disumbang oleh PNS yang tadinya berasal dari Golongan II/d naik golongan menjadi III/a baik karena melanjutkan pendidikan S1 (penyesuaian ijasah) maupun telah memenuhi masa pengabdian selama 20 Tahun (golongan naik setiap 4 tahun sekali).

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa PNS Ditjen Sumber Daya Air didominasi oleh PNS golongan III/b dengan jumlah 1.493, dimana hal ini jika tidak dibangun strategi pengembangan jabatan fungsional yang memungkinkan seorang PNS dapat naik pangkat 2 tahun sekali, maka pada masa datang organisasi akan kehabisan kaderisasi yang sanggup mengejar persyaratan golongan dalam suatu jabatan Eselon III (administrator) ke atas.

Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia, tidak membuat kinerja Ditjen Sumber Daya Air menurun karena strategi pengembangan pegawai baik untuk PNS maupun Tenaga Honorer yang jika ditotal maka saat ini berjumlah



14.116 orang terus dilakukan secara konsisten. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diupayakan terselenggara secara optimal guna memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder, khususnya terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia Ditjen Sumber Daya Air.

3.1.1 Upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, penugasan untuk keikutsertaan maupun usulan penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) telah diupayakan. Bidang diklat yang diikuti mencakup beberapa bidang sebagaimana Tabel 3.4 berikut yang diikuti oleh peserta dengan total berjumlah 2.230 peserta.

Tabel 3.4 Bidang Diklat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air

Teknis Sumber Daya Air (Perencanaan dan Pengawasan)	Jabatan Fungsional	Manajemen
Analisis Stabilitas Tubuh Bendungan	Bimtek Penyusunan DUPAK	PIM II
Evaluasi Keamanan Bendungan	Latsartek Bidang SDA	PIM III
Pemeriksaan Bendungan	Pelaksanaan Anggaran	PIM IV
Penanganan Longsoran pada Bendungan	RBO Performance Benchmarking	Bendahara Pengeluaran
Perhitungan Debit Banjir Dengan Curah Hujan TRMM Pada Bendungan	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	PISK
Keahlian Perencanaan Sungai	Pengelolaan Keuangan	Risk Management & Leadership
Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Management Of Training (MOT)
O&P Rawa	Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Teknik Pengairan Tingkat Ahli	
Padat Karya	Perencanaan Anggaran	
Penanggulangan Bencana Banjir	Sistem Akuntansi Instansi	
Perencanaan Teknis Air Baku	Training Of Facilitator Pelatihan Dasar CPNS	
Perencanaan Teknis Air Tanah	Training Officer Course (TOC)	
Perencanaan Teknis Bendungan		
Perencanaan Teknis Embung		
Perencanaan Teknis Hidrologi & Alokasi Air		
Perencanaan Teknis Irigasi		
Perencanaan Teknis Rawa		



Teknis Sumber Daya Air (Perencanaan dan Pengawasan)	Jabatan Fungsional	Manajemen
Perencanaan Teknis Sungai		
Perencanaan Teknis Sungai (Sertifikasi)		
Teknologi Bendung Knock Down		
Teknologi Pengaman Pantai		
Teknologi Sabo Dam Micro Modular		
Operasi dan Pemeliharaan Bendungan		
Uji Mutu Timbunan Tubuh Bendungan Urugan		

Selain pengembangan kapasitas SDM yang diselenggarakan di dalam negeri, beberapa training program di luar negeri juga diikuti oleh beberapa pegawai di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, sebagaimana tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Training Program Luar Negeri Tahun 2018

No	Training Program	Penyelenggara
1	Single Country Training Program 2018 (Batch I)	KOICA (Korea Selatan)
2	Training for Asian Young Professional and Performance Assesment of Irrigation System	China
3	Single Country Training Program 2018 (Batch II)	KOICA (Korea Selatan)
4	Training Program on Water and Sanitation	CAS TWAS CEWE (China)
5	The 8th Run of The Temasek Foundation International Water Leadership	Lee Kwan Yuu University (Singapore)
6	Overseas Training in Japan for Jakarta Sewerage Development Project	JICA (Jepang)
7	Water Resources Training in Japan	JICA (Jepang)
8	Sustainable Water Management in Response to Climate Change	KOICA (Korea Selatan)
9	Overseas Training Promoting Countermeasures Againts Land Subsidence in Jakarta	JICA (Jepang)
10	Water Resources Management Plan Training in Japan 2018	JICA (Jepang)
11	Technical Workshop on Project Preparation for Transformational Climate Resillience Water Project in Asia	GWP (Philipina)
12	NCICD Invitation Training Program for High Level Official	KOICA (Korea Selatan)
13	Disaster Management for Landslide and Sediment Related (Trigered by Rainfall, Earthquake, and Volcano Activities)	JICA (Jepang)
14	Training Program for Manager Official	KOICA (Korea Selatan)



Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Organisasi Ditjen Sumber Daya Air sangat dipengaruhi oleh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama antara lain :

1. Sebaran jumlah PNS Pusat yang tidak merata di setiap wilayah kerja.
2. Latar belakang pendidikan yang tidak seimbang antara yang pendidikan Teknik dan Non Teknik.
3. Minimnya pengadaan pendidikan dan pelatihan, dan/atau kursus-kursus yang diperoleh PNS/Non-PNS sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas. Ditjen Sumber Daya Air memiliki sejumlah sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Alat pengolah data 16.543 Unit.
b. Kendaraan Dinas Operasional (KDO) 4.457 Unit.
c. Peralatan berat (dumptruck, excavator, loader, dredger) 7.556 unit.
d. Gedung (Kantor, laboratorium, bengkel/hanggar, gudang, mess/wisma, dll), baik di Pusat maupun yang dimiliki masing-masing BBWS/BWS dengan jumlah 8.279 Unit.



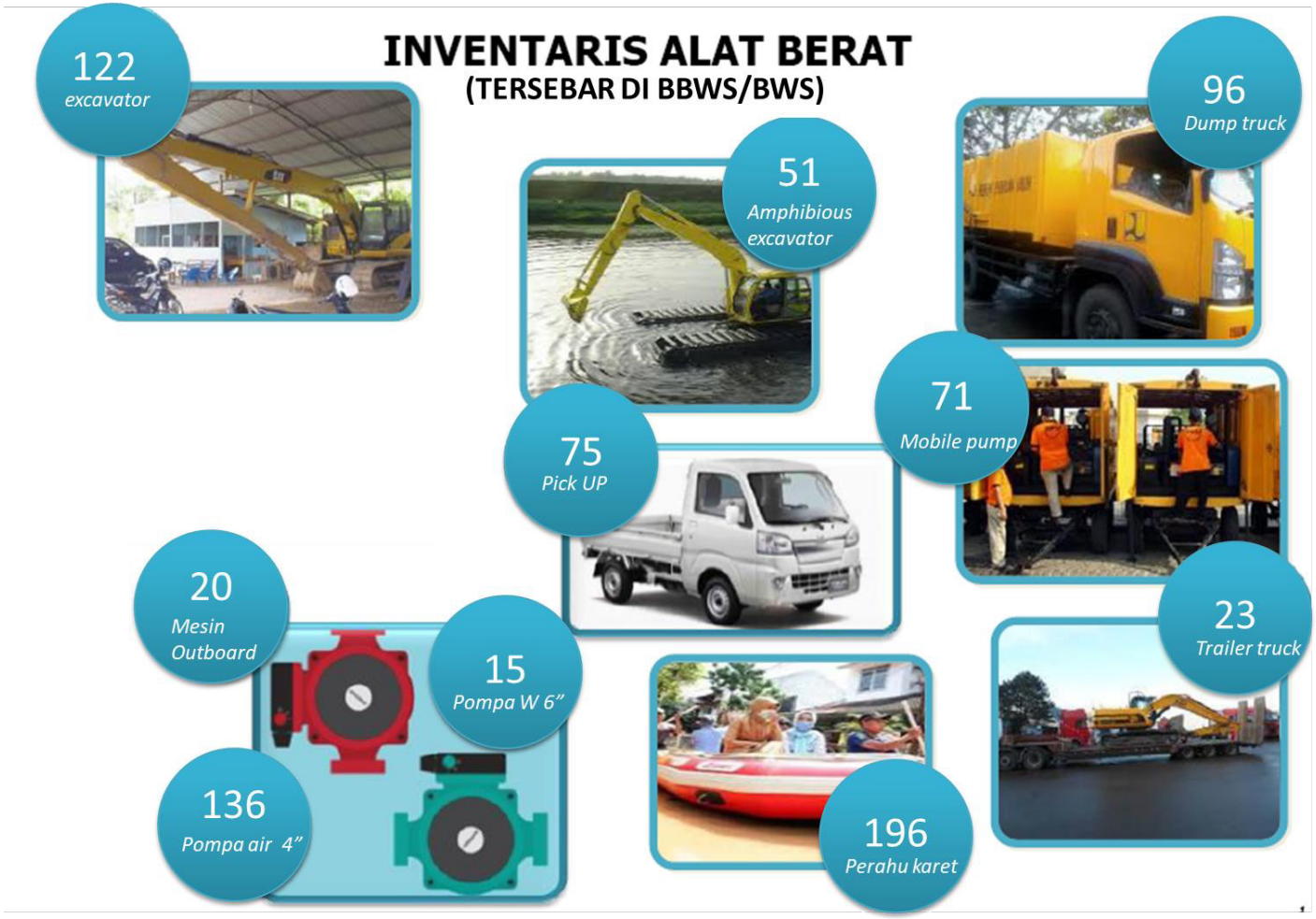
Gambar 3.5 Sarana dan Prasarana



Sarana dan prasarana diatas telah memberikan dukungan yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. Gedung (berupa bangunan kantor, laboratorium, bengkel/hanggar, gudang, dll), peralatan berat (truck, excavator, loader, dll), peralatan komunikasi dan komputer serta kendaraan dinas operasional telah memberikan andil yang besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam upaya terjaganya fungsi infrastruktur sumber daya air yang telah terbangun.

Inventarisasi peralatan berat yang ada di seluruh BBWS/BWS tersaji pada gambar 3.8 sebagai berikut :

a. Amphibious Excavator, sejumlah 51 unit.
b. Excavator, sejumlah 112 unit.
c. Dump Truck, sejumlah 96 unit.
d. Trailer Truck, sejumlah 23 unit.
e. Mobile Pump, sejumlah 71 unit.
f. Perahu Karet, sejumlah 196 unit.
g. Mobil pick Up, sejumlah 75 unit.
h. Bahan Banjiran (Sandbag, bronjong, geobag) sejumlah 584.807 buah.



Gambar 3.6 Inventarisasi Peralatan Berat



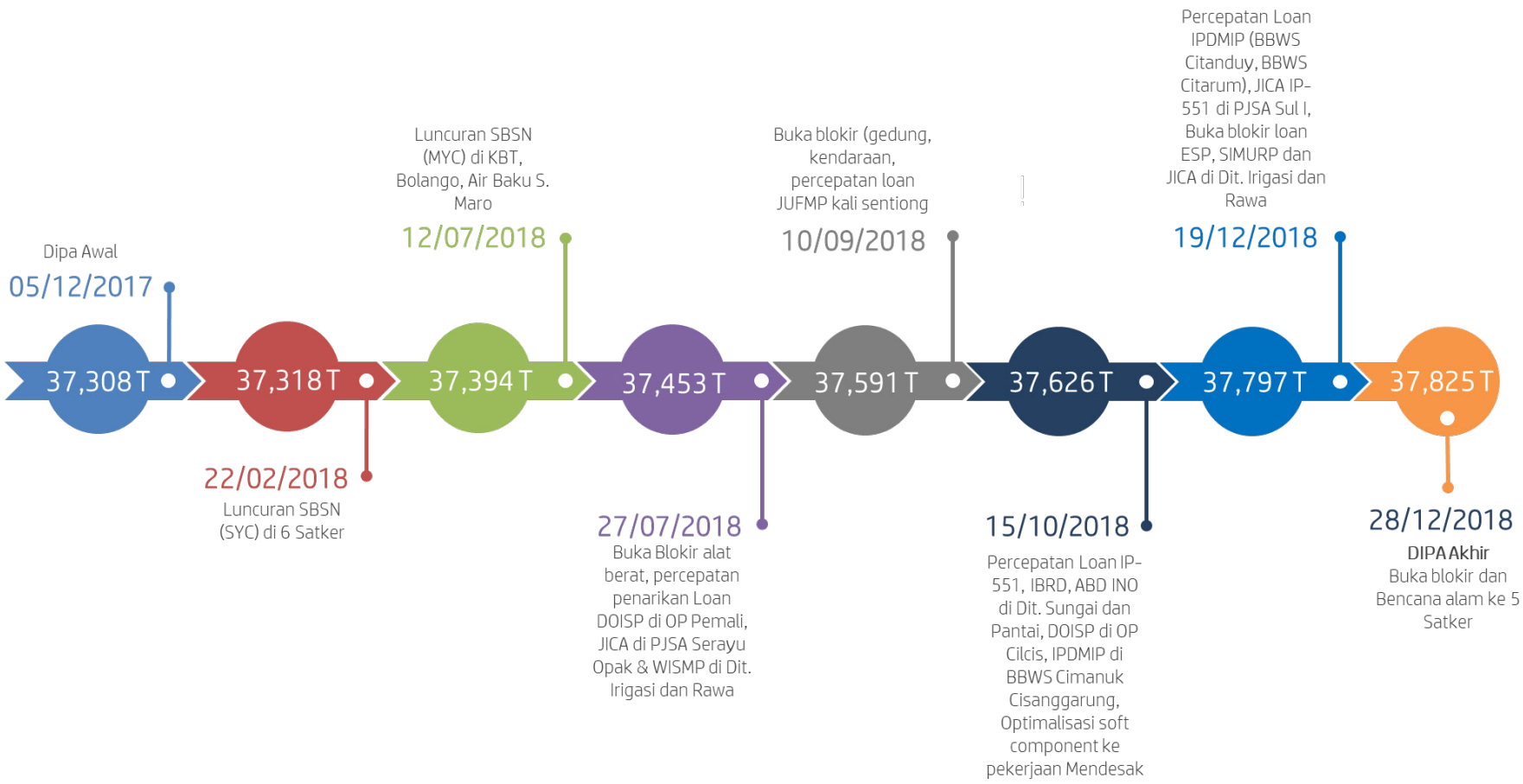
Sebaran peralatan berat diatas selanjutnya lebih detail disajikan dalam tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Sebaran Peralatan Berat

NO	BBWS/BWS	SEBARAN ALAT BERAT (UNIT)										
		AMPHIBIOUS EXCAVATOR	EXCAVATOR	DUMP TRUCK	TRAILER TRUCK	MOBILE PUMP	PICK UP	PERAHU KARET	MESIN OUTBOARD	BAHAN BANJIRAN		
										SANDBAG	BRONJONG	GEOBAG
1	BWS SUMATERA I	1	2	1	1	4	0	0	0	3.480	585	-
2	BWS SUMATERA II	1	2	2	0	0	0	1	0	14.845	220	-
3	BWS SUMATERA III	1	4	2	0	2	0	1	3	2.700	8.000	-
4	BWS SUMATERA IV	2	2	1	0	0	0	1	0	-	350	250
5	BWS SUMATERA V	1	6	11	1	3	0	0	0	26.490	3.151	904
6	BWS SUMATERA VI	1	1	1	0	0	2	1	0	32.140	10.792	-
7	BWS SUMATERA VII	1	1	1	2	0	0	8	12	-	1.095	-
8	BBWS SUMATERA VIII	1	3	2	2	7	1	22	16	1.000	3.699	-
9	BBWS MESUJI SEKAMPUNG	1	2	1	1	5	0	6	0	37.500	4.000	2.000
10	BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAI	1	4	2	1	6	1	2	2	900	-	295
11	BBWS CILIWUNG CISADANE	2	4	6	9	9	4	6	2	5.000	-	4.000
12	BBWS CITARUM	2	3	6	1	1	6	3	2	-	1.440	-
13	BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	2	1	5	1	5	8	7	3	20.700	7.200	-
14	BBWS CITANDUY	2	3	7	1	0	0	1	0	18.700	3.811	-
15	BBWS PEMALI JUANA	0	9	6	1	6	0	0	4	11.300	661	2.719
16	BBWS SERAYU OPAK	1	3	7	1	0	1	0	0	35.700	2.876	3.600
17	BBWS BENGAWAN SOLO	3	9	9	2	8	4	31	0	135.050	563	600
18	BBWS BRANTAS	2	10	5	1	1	0	2	0	5.189	210	-
19	BWS BALI PENIDA	2	4	4	1	0	8	0	0	-	4.374	3.700
20	BWS NUSA TENGGARA I	3	4	1	0	0	11	5	0	-	-	-
21	BWS NUSA TENGGARA II	2	2	3	0	0	26	1	0	9.300	3.541	-
22	BWS KALIMANTAN I	2	1	1	0	1	1	8	3	-	-	700
23	BWS KALIMANTAN II	1	1	0	0	0	0	1	0	-	558	-
24	BWS KALIMANTAN III	1	1	1	0	0	0	0	2	30.000	2.118	-
25	BWS SULAWESI I	1	1	6	0	1	1	4	0	15.900	4.612	-
26	BWS SULAWESI II	2	3	2	1	1	0	9	0	31.998	-	-
27	BWS SULAWESI III	1	3	2	1	3	0	0	0	-	610	-
28	BWS SULAWESI IV	1	4	2	0	1	8	0	0	6.350	4.196	-
29	BBWS POMPENGAN JENEBERANG	2	7	4	5	0	0	0	0	36.550	2.575	510
30	BWS MALUKU	0	2	1	0	0	0	1	0	-	-	-
31	BWS MALUKU UTARA	0	5	2	0	0	0	0	0	5.000	7.500	-
32	BWS PAPUA	0	3	1	0	0	0	0	0	-	400	-
33	BWS PAPUA BARAT	1	1	1	0	0	0	1	0	-	600	-
34	BWS PAPUA MERAUKE	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
JUMLAH		44	112	106	33	64	82	122	49	485.792	79.737	19.278

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

Pada awal Tahun Anggaran 2018, Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi dana sebesar Rp. 37,308 Triliun. Namun terjadi revisi anggaran antara lain blokir, luncuran SBSN (SYC & MYC), optimalisasi pekerjaan soft komponen, pemanfaatan dana sisa lelang, buka blokir (P3TGAI, Gedung, alat berat dan kendaraan), percepatan penarikan loan, sehingga pagu akhir Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp. 37,825 Triliun. Berikut disajikan perjalanan pagu awal – akhir Ditjen Sumber Daya Air pada gambar 3.7 berikut :



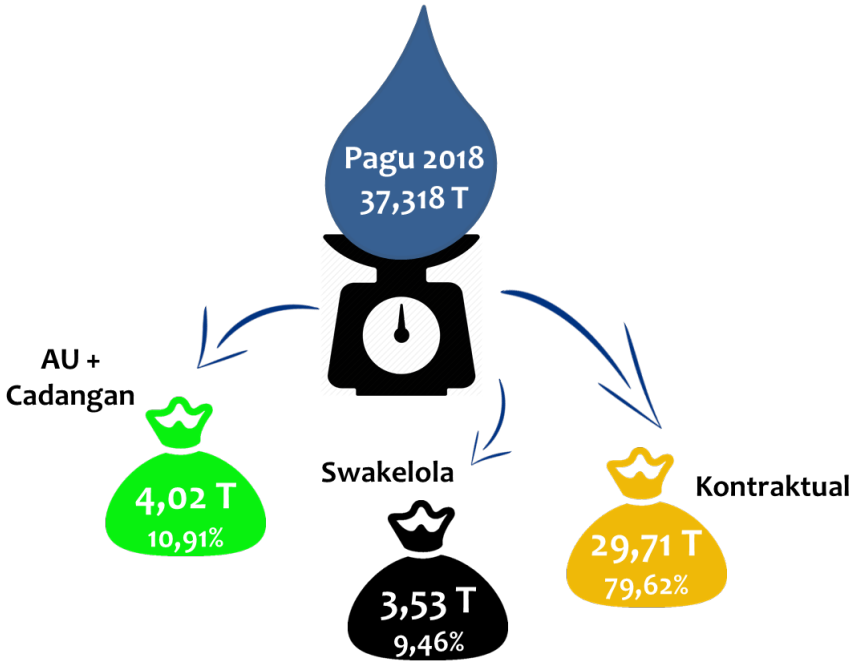
Gambar 3.7 Kronologi Pagu Ditjen Sumber Daya Air TA 2018

3.3.1 Triwulan I

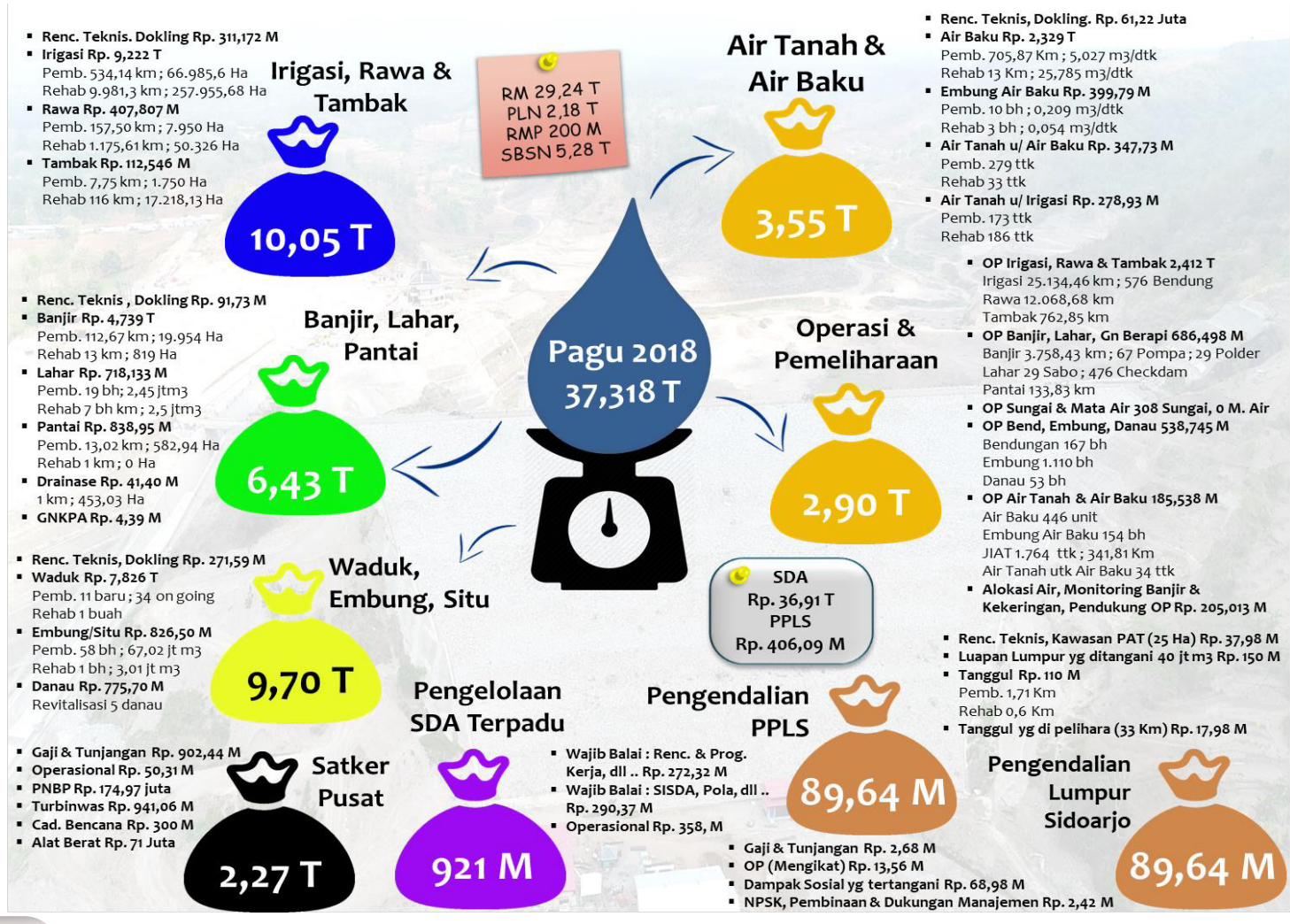
Dalam melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, Ditjen Sumber Daya Air di beri amanah pagu anggaran pada Triwulan I sebesar Rp. 37,308 Triliun, namun mengalami revisi karena Luncuran paket-paket SBSN (SYC) sehingga menjadi Rp. 37,318 Triliun, yang terdiri dari Rp. 29,86 Triliun Rupiah Murni, Rp. 2,18 Triliun Pinjaman Luar Negeri, Rp. 198,50 Miliar Rupiah Murni Pendamping dan Rp. 5,28 Triliun SBSN untuk melaksanakan kegiatan sebanyak 14.093 paket pekerjaan, kemudian dibagi menjadi 3 kategori pengadaan :

a. Administrasi umum + Cadangan, 3.470 paket.
b. Swakelola, 7.211 paket.
c. Kontraktual, 3.412 paket.

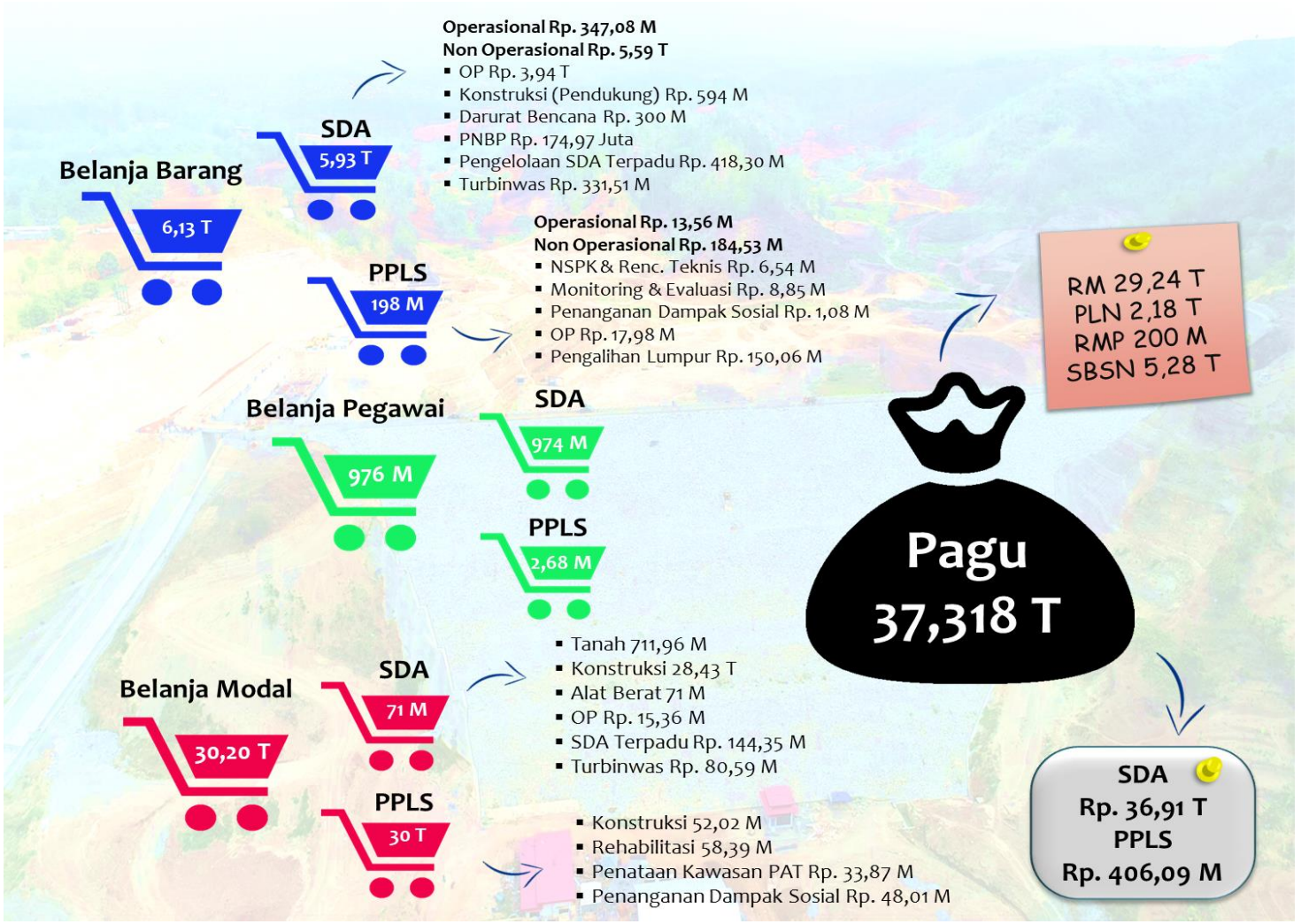
Distribusi pagu anggaran berdasarkan kategori pengadaan, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan jenis belanja Triwulan I Tahun anggaran 2018 secara detil disajikan pada Gambar 3.8, Gambar 3.9, dan Gambar 3.10 dibawah ini :



Gambar 3.8 Distribusi Anggaran Berdasarkan Pengadaan Triwulan I



Gambar 3.9 Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I



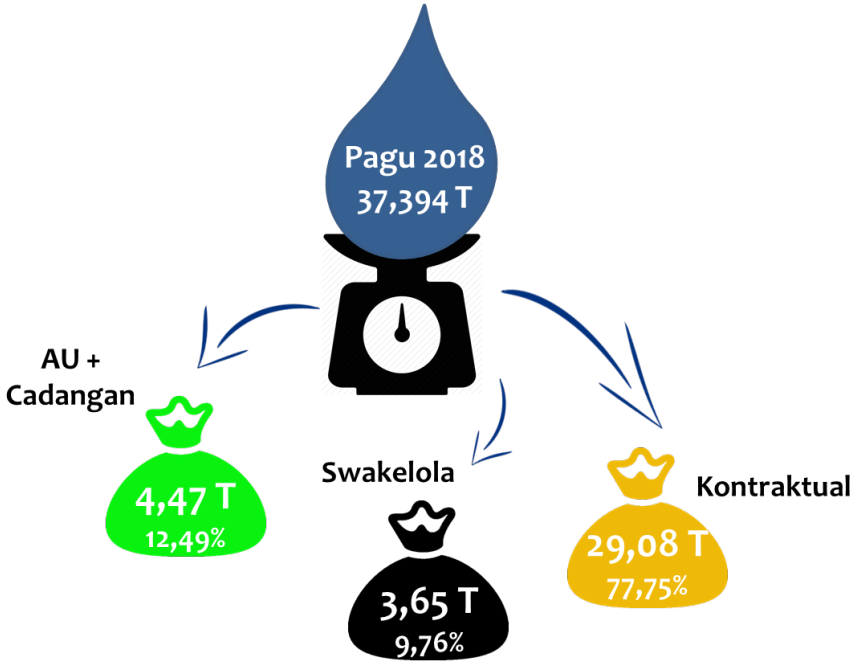
Gambar 3.10 Postur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I

3.3.2 Triwulan II

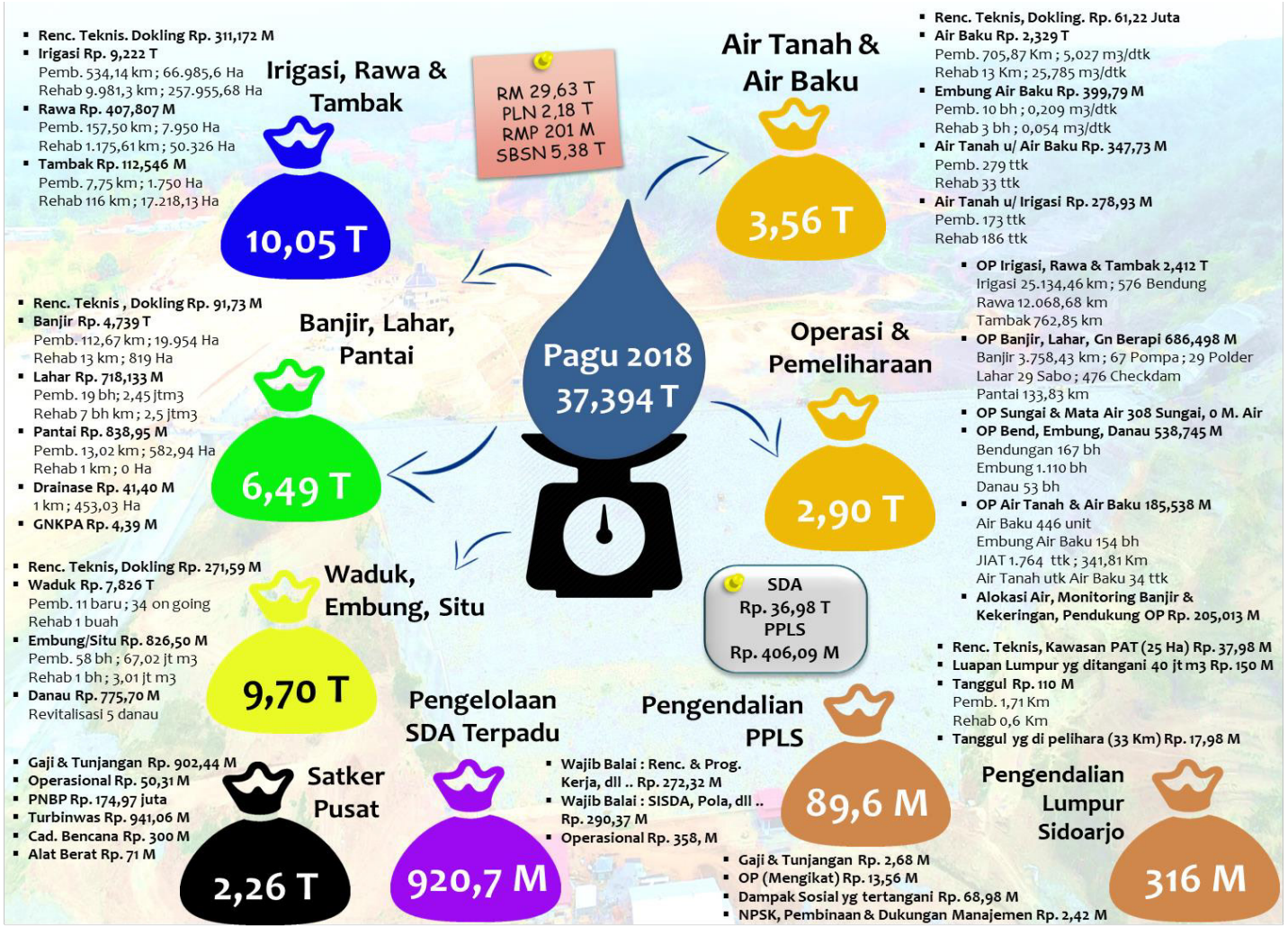
Selanjutnya pada Triwulan II Ditjen Sumber Daya Air mengalami perubahan pagu anggaran dikarenakan luncuran SBSN (MYC), sehingga pagu Ditjen Sumber Daya Air adalah sebesar Rp. 37,394 Triliun, yang dibagi menjadi Rp. 29,83 Triliun Rupiah Murni, Rp. 2,18 Triliun PHLN dan Rp. 5,38 Triliun SBSN, untuk melaksanakan kegiatan sebanyak 14.973 paket pekerjaan, kemudian dibagi menjadi 3 kategori pengadaan :

a. Administrasi umum + Cadangan, 3.439 paket.
b. Swakelola, 8.135 paket.
c. Kontraktual, 3.399 paket.

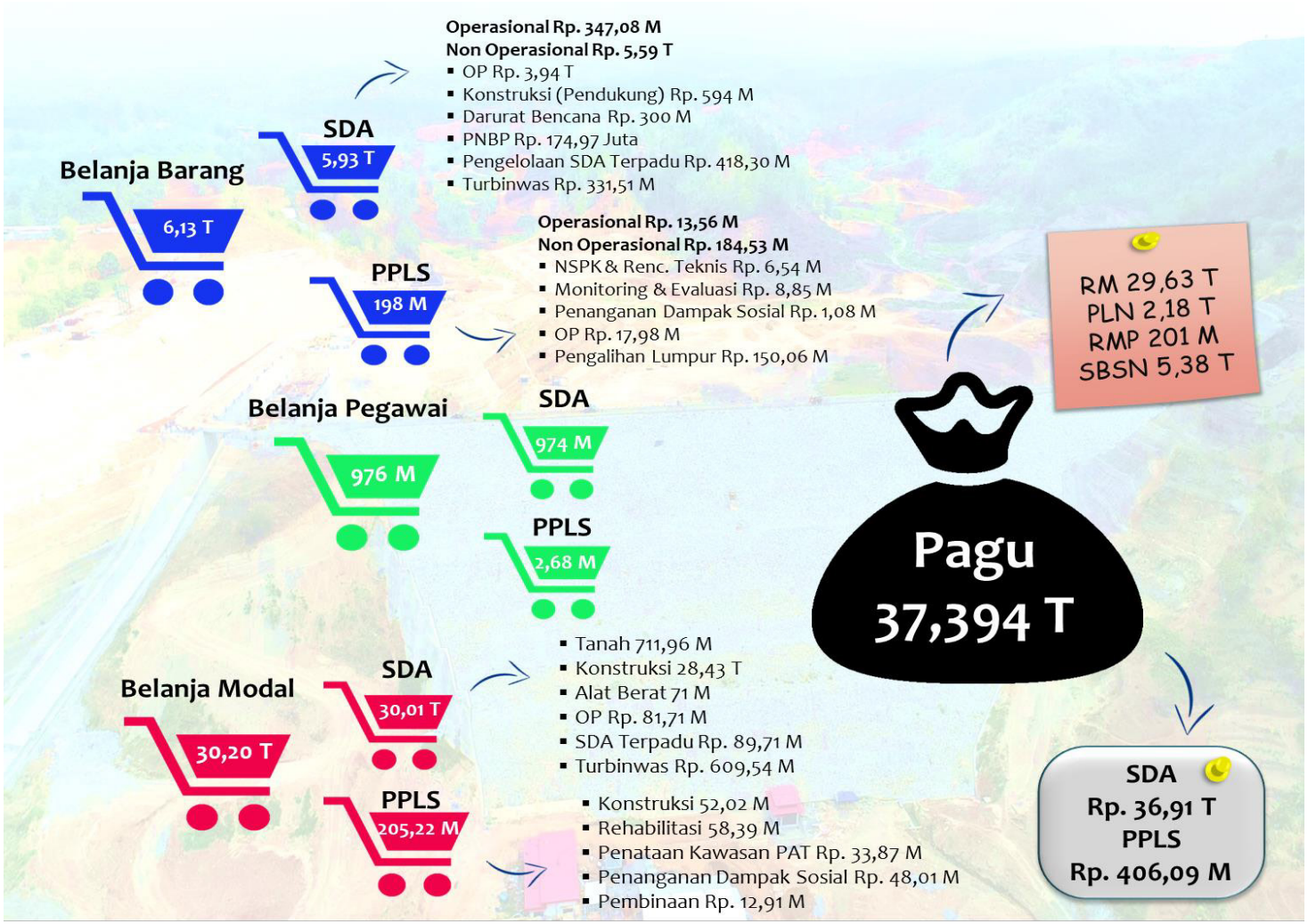
Distribusi pagu anggaran berdasarkan kategori pengadaan, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan jenis belanja Triwulan II Tahun anggaran 2018 secara detil disajikan pada Gambar 3.11, Gambar 3.12, dan Gambar 3.13 dibawah ini :



Gambar 3.11 Distribusi Anggaran Berdasarkan Kategori Pengadaan Triwulan II



Gambar 3.12 Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan II



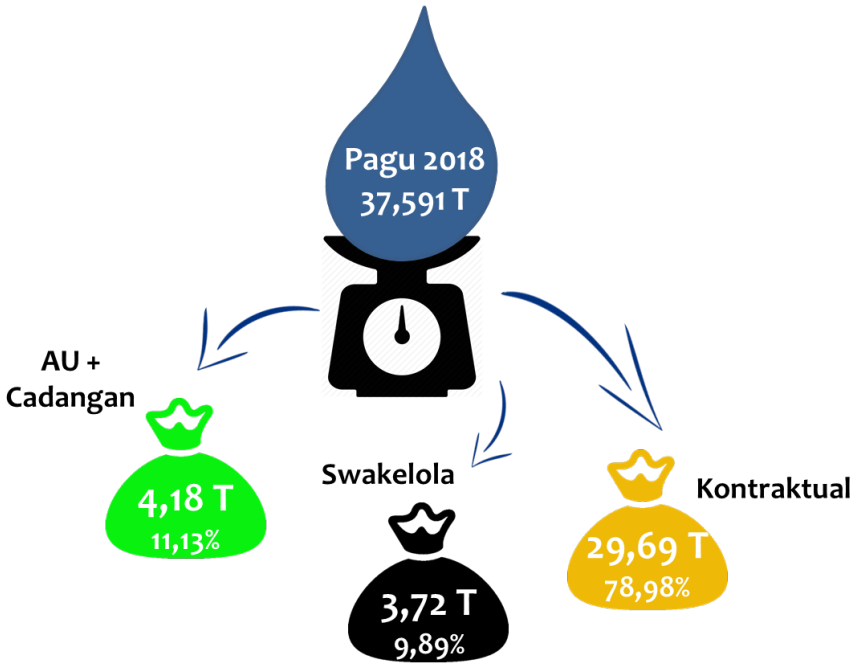
Gambar 3.13 Postur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II

3.3.3 Triwulan III

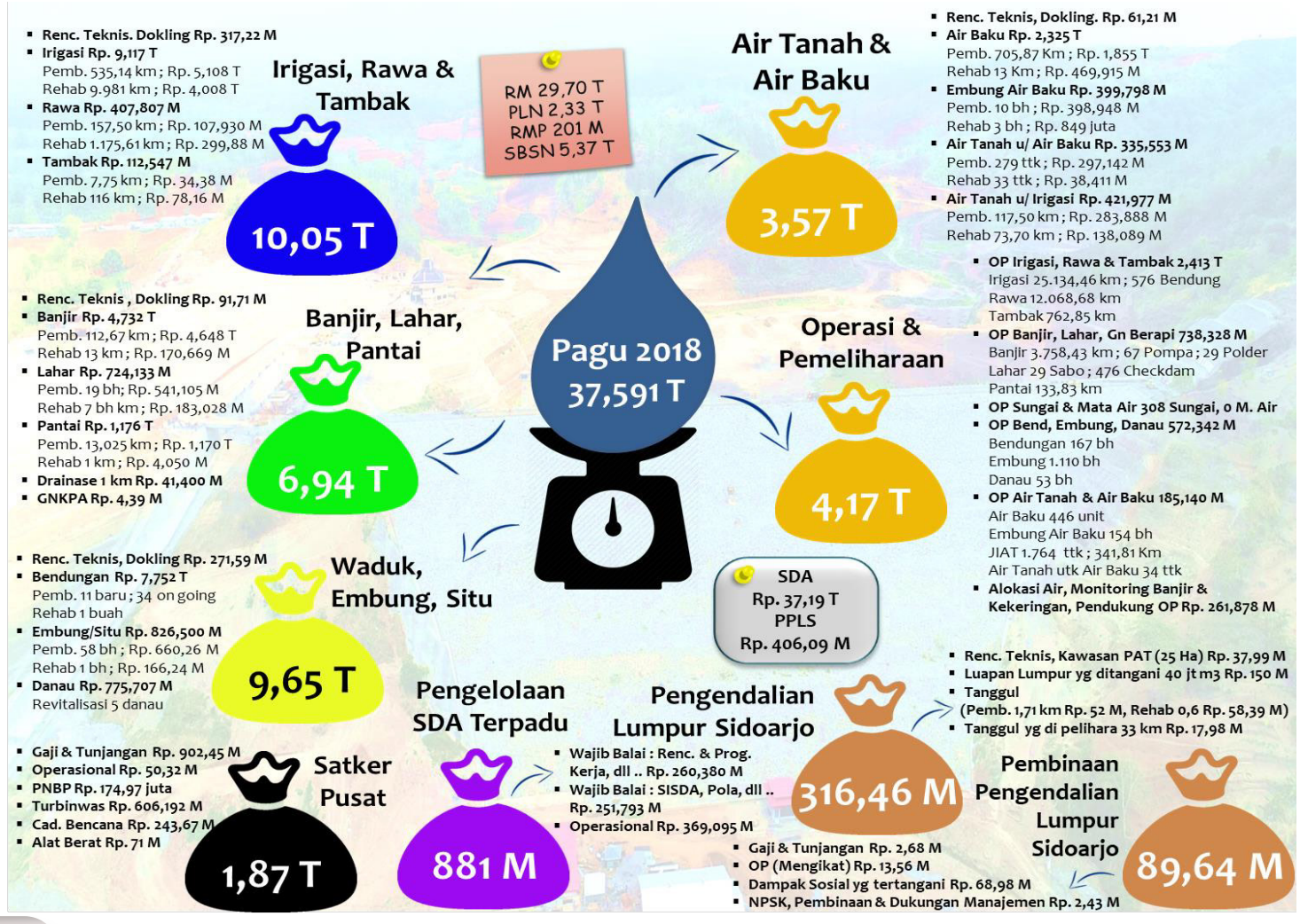
Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pagu Ditjen Sumber Daya Air mengalami kenaikan dikarenakan revisi buka blokir (Gedung dan Kendaraan), pergeseran antar jenis belanja di Satker OP Citarum dan PJPA Citarum dan percepatan penarikan Loan JUFMP kali Sentiong di PJSA Cilcis, sehingga pagu Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp. 37,591 Triliun, yang terdiri dari Rp. 29,890 Triliun, Rp. 2,326 Triliun PHLN dan Rp. 5,375 Triliun SBSN untuk melaksanakan 15.069 paket pekerjaan, kemudian dibagi menjadi 3 kategori pengadaan :

a. Administrasi umum + Cadangan, 3.067 paket.
b. Swakelola, 8.530 paket.
c. Kontraktual, 3.472 paket.

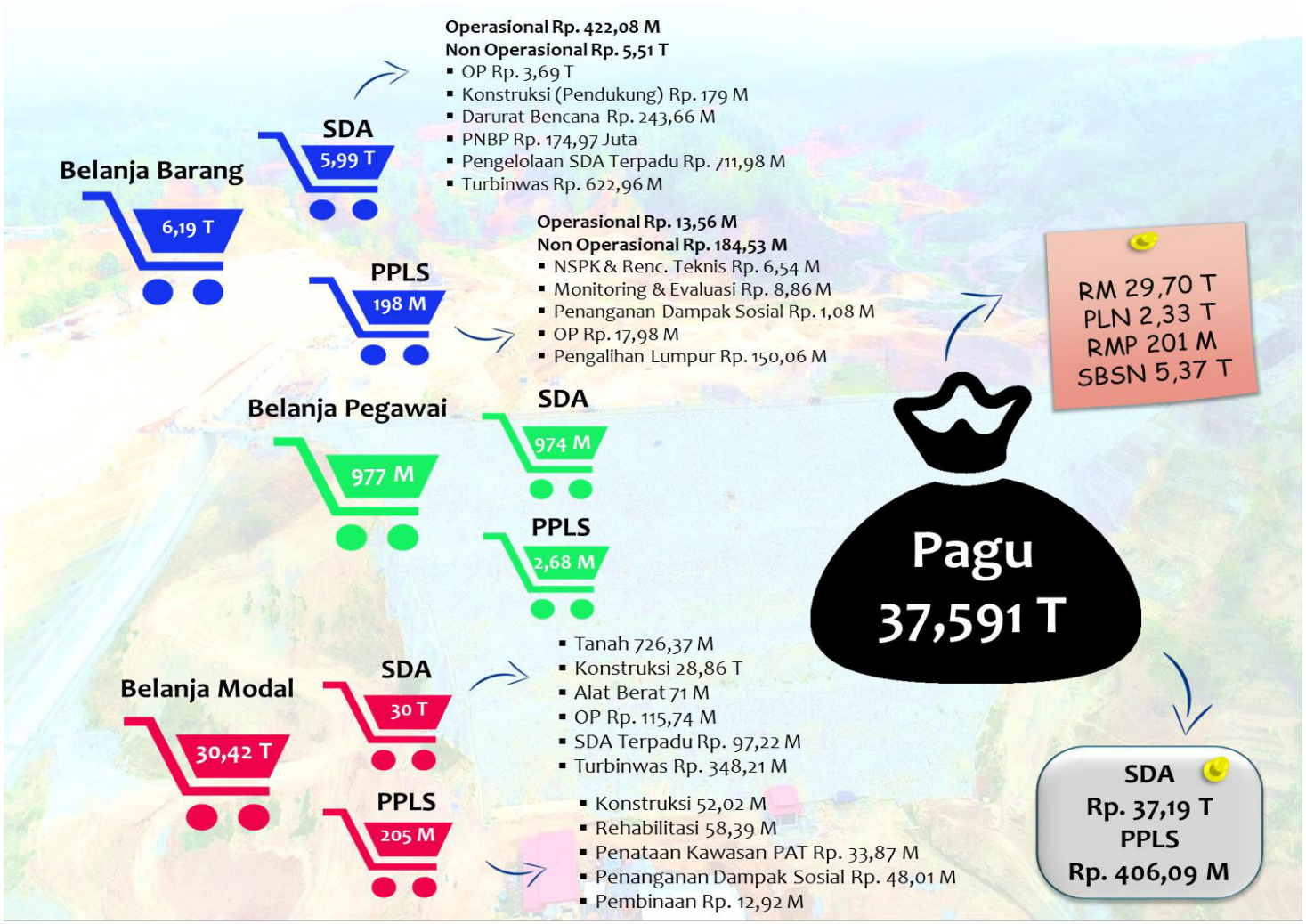
Distribusi anggaran Ditjen Sumber Daya Air pada Triwulan III berdasarkan kategori pengadaan, postur anggaran berdasarkan jenis kegiatan dan postur anggaran per jenis belanja disajikan dalam gambar 3.14, gambar 3.15 dan gambar 3.16 berikut dibawah ini :



Gambar 3.14 Distribusi Anggaran Berdasarkan Kategori Pengadaan Triwulan III



Gambar 3.15 Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan III



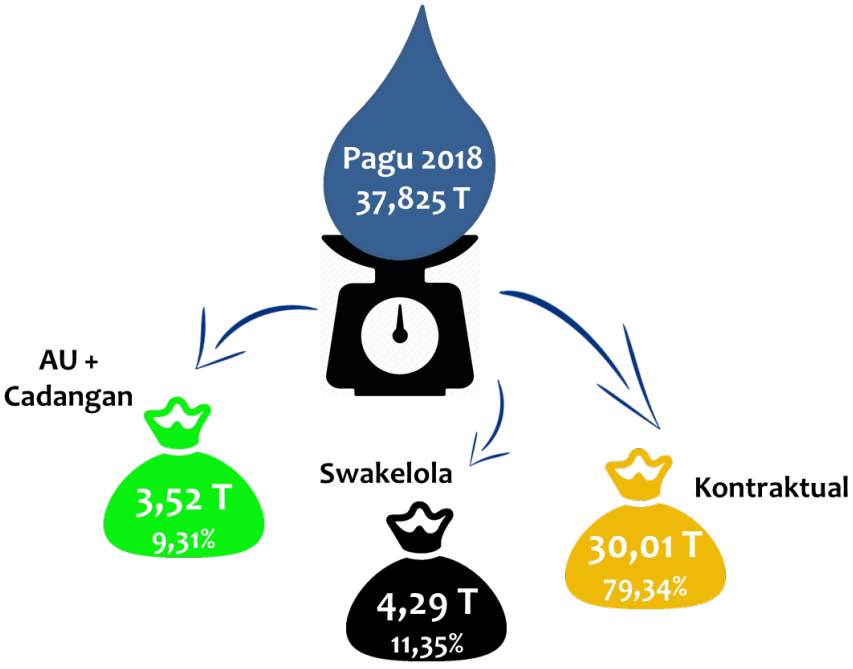
Gambar 3.16 Postur Anggaran Bedasarkan Jenis Belanja Triwulan III

3.3.4 Triwulan IV

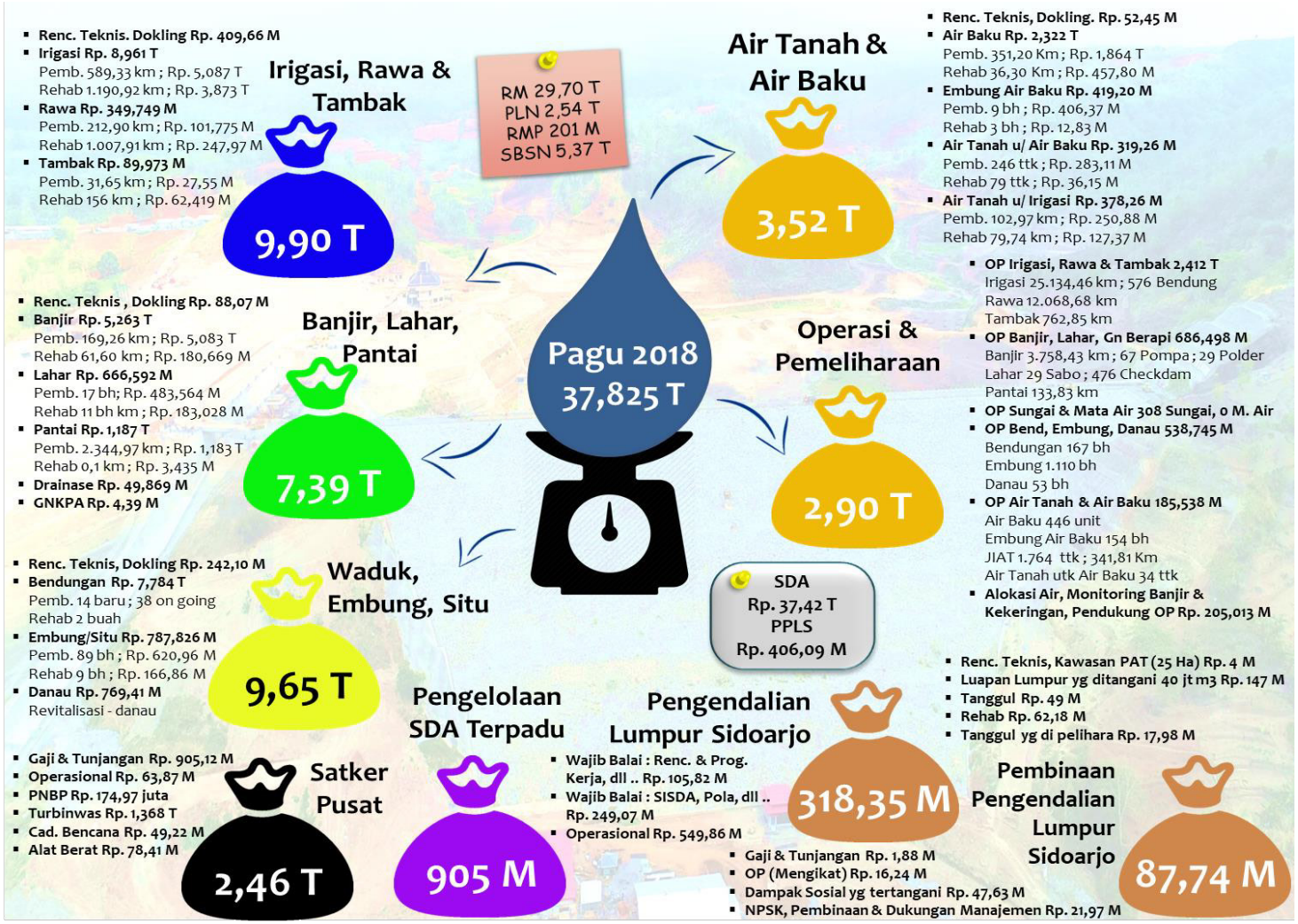
Pada akhir Triwulan IV terjadi lagi perubahan DIPA Ditjen Sumber Daya Air akibat adanya pergeseran pagu anggaran antar satker, dari satker Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk bencana alam ke 5 satker lainnya dan revisi buka blokir, sehingga pagu akhir Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp. 37,825 Triliun, yang terdiri dari Rp. 29,905 Triliun Rupiah Murni, Rp. 2,545 Triliun PHLN dan Rp. 5,375 Triliun SBSN untuk melaksanakan 14.909 Paket pekerjaan, kemudian dibagi menjadi 3 kategori pengadaan :

a. Administrasi umum + Cadangan, 2.660 paket.
b. Swakelola, 8.697 paket.
c. Kontraktual, 3.552 paket.

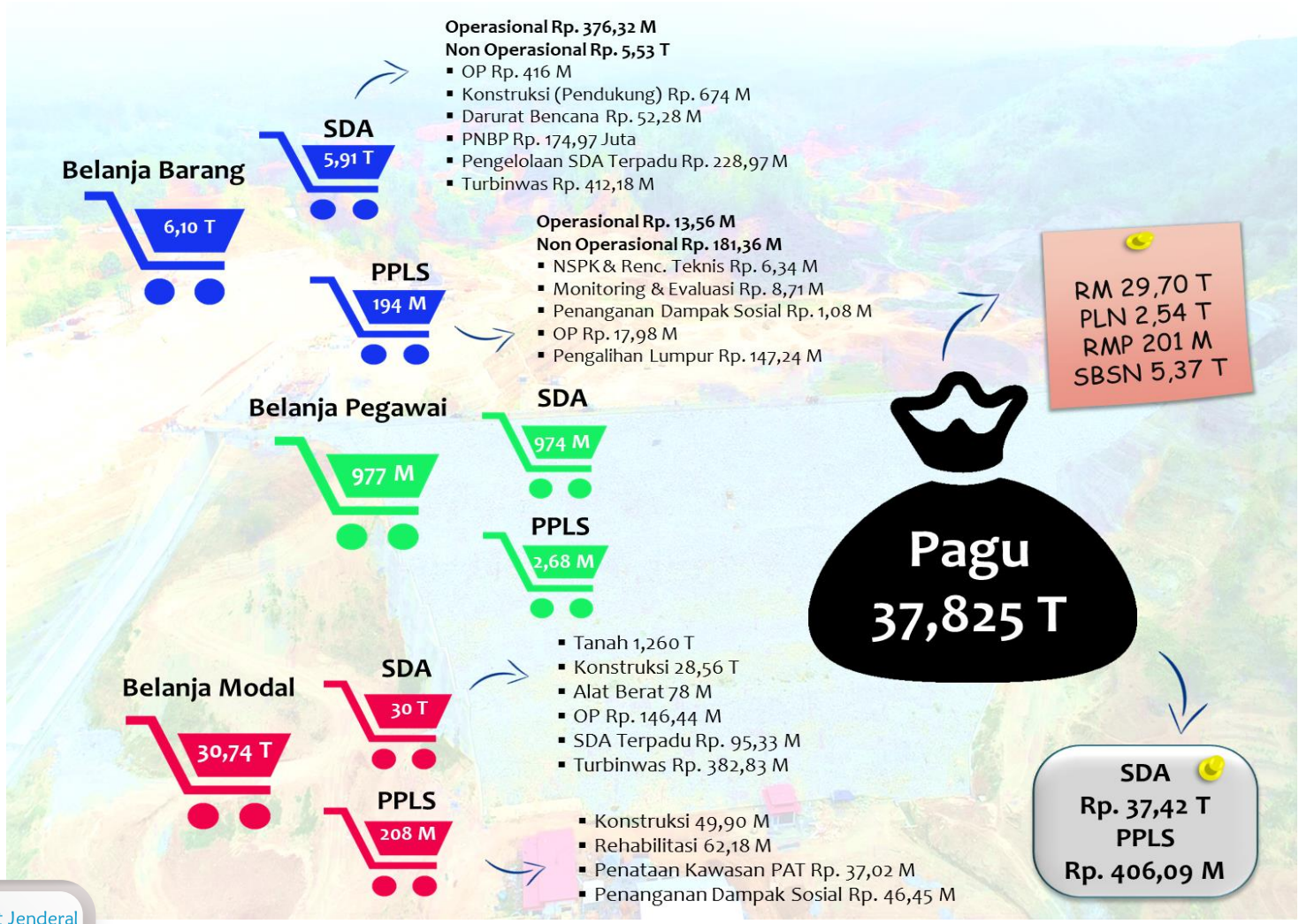
Distribusi anggaran Ditjen Sumber Daya Air pada Triwulan IV berdasarkan kategori pengadaan, postur anggaran berdasarkan jenis kegiatan dan postur anggaran per jenis belanja disajikan dalam gambar 3.17, gambar 3.18 dan gambar 3.19 dibawah ini :



Gambar 3.17 Distribusi Anggaran Berdasarkan Kategori Pengadaan Triwulan IV



Gambar 3.18 Postur Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan IV



Gambar 3.19 Postur Anggaran Bedasarkan Jenis Belanja Triwulan IV


Bendungan Rotiklot
Nusa Tenggara Timur

Bab IV
Akuntabilitas Kinerja

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

4.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Capaian Sasaran Program

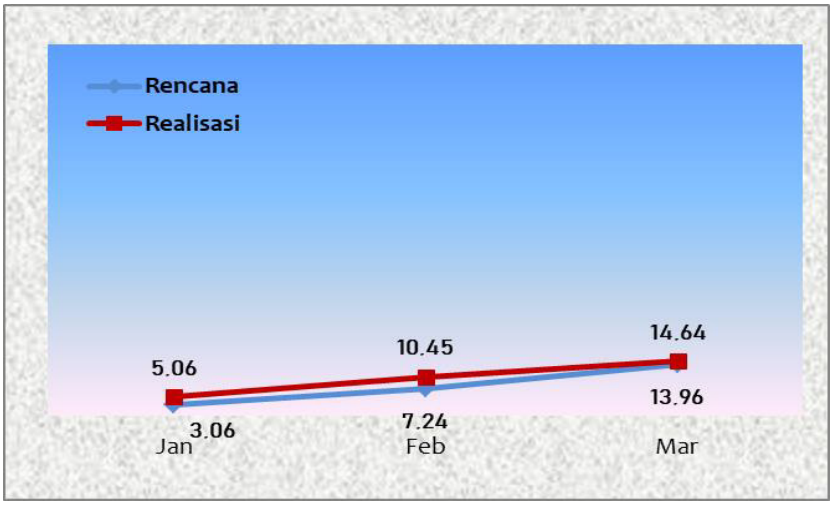
Penilaian Kinerja yang diberikan pada rencana aksi Tahun 2018 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Permen PAN&RB Nomor 20 Tahun 2013. Penilaian dibagi menjadi 6 kategori dan dibedakan berdasarkan *range* nilai dan warna seperti dalam Bab II Tabel 2.5 di atas.

Pengukuran Kinerja Tahun 2018 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi capaian kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air pada tahun yang diukur pada setiap triwulan.

Nilai Kinerja dari masing-masing *output* merupakan perbandingan realisasi progres kinerja terhadap progres target capaian kinerja yang telah ditetapkan dari masing masing sub-*output* dalam sistem *emonitoring online*.

4.1.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan I

Sampai dengan akhir Triwulan I, realisasi progres fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air sebesar 14,64% dan realisasi progres keuangan 12,71%, sementara target fisik 13,96% dan rencana penyerapan keuangan sebesar 14,80%, sehingga terdapat deviasi progres fisik sebesar -0,68% dan deviasi progres keuangan sebesar -2,09%. Secara umum progres pelaksanaan anggaran tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air secara menyeluruh masih baik karena deviasi yang terjadi masih dibawah 10%. Gambar 4.1 memperlihatkan grafik perbandingan antara target dan realisasi fisik Ditjen Sumber Daya Air pada Triwulan I TA 2018.



Gambar 4.1 Kurva S Target dan Realisasi Fisik Triwulan I

Total paket Kontraktual sampai dengan akhir Triwulan I adalah 3.412 paket senilai 29,71 Triliun, yang terdiri dari :

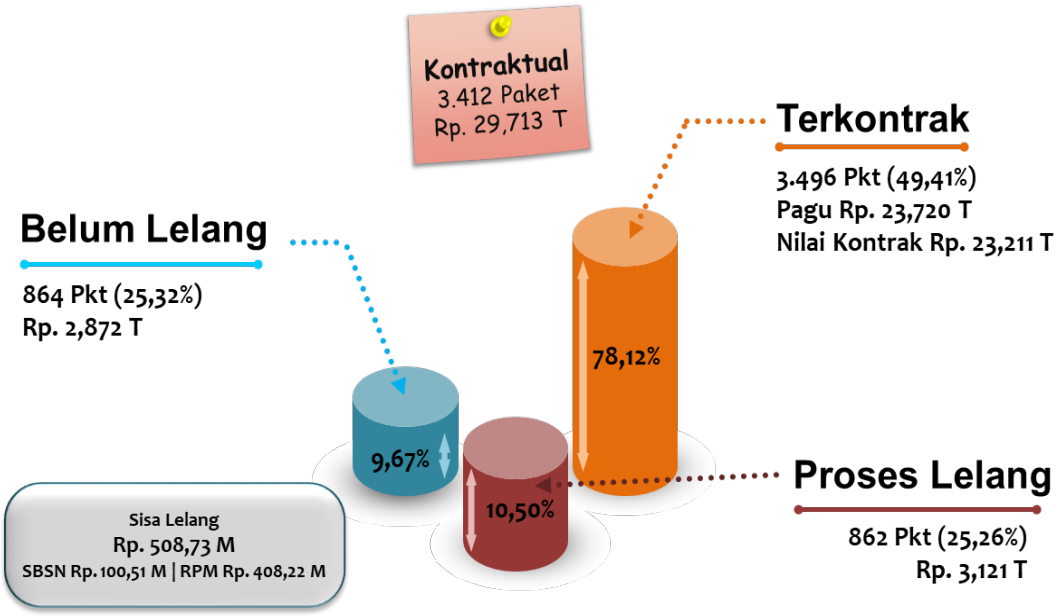
a. 1.686 Paket senilai Rp. 23,21 Triliun (78,12%) sudah terkontrak,
b. 862 Paket senilai Rp. 3,12 Triliun (10,5%) masih proses lelang,
c. 864 Paket senilai Rp. 2,87 Triliun (9,66%) belum lelang.
d. Sisa Lelang senilai Rp. 508,73 Miliar, terdiri dari Rp. 100,51 Miliar dan Rp. 408,22 Miliar Rupiah Murni.

Secara umum progres pelaksanaan kontraktual sudah baik, disebabkan karena kebijakan pelelangan paket-paket kontraktual sudah dimulai pada bulan September 2017 (lelang dini) dan sebanyak 442 paket MYC Lanjutan juga sedang berjalan.

Progres pelaksanaan paket-paket kontraktual hingga akhir Triwulan I disajikan dalam Tabel 4.1 dan Gambar 4.2.

Selanjutnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan I untuk 7 (tujuh) Sasaran Program dengan 14 (empat belas) indikator kinerja program pengelolaan sumber daya air, dan tambahan 1 (satu) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja program penanggulangan lumpur Sidoarjo dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target/rencana capaian kinerja disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 menunjukkan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran program. Sampai dengan Triwulan I, total capaian kinerja sasaran program sebesar **77,31% (Sangat baik)**, dimana realisasi capaian indikator kinerja sebesar **15,30%** dari rencana capaian indikator kinerja sebesar **19,79%.**



Gambar 4.2 Status Paket Kontraktual s.d Triwulan I

Tabel 4.1 Progres Paket Kontraktual Triwulan I

Kontraktual	Paket	Pagu (dlm Miliar)	Realisasi (dlm Miliar)	%
Total Kontraktual	**3.412**	**29.713,95**	**3.834,64**	**16,17**
a. Tahunan	2.849	8.480,43	619,93	15,96
b. MYC Baru	120	1.397,08	0,00	0,00
c. MYC Lanjutan	443	19.836,44	3.212,25	16,20
Tahunan	**2.849**	**8.480,43**	**619,93**	**15,96**
a.Terkontrak	1.243	3.375,29	619,93	
b.Proses Lelang	850	2.748,65		
c. Belum Lelang	756	1.847,75		
d. Sisa Lelang		508,73		
MYC Baru	**120**	**1.397,08**	**0,00**	**0,00**
a.Terkontrak	-	-	0,00	
b.Proses Lelang	12	372,53		
c. Belum Lelang	108	1.024,55		
d. Sisa Lelang	-	-		
MYC Lanjutan	**442**	**19.832,51**	**3.212,25**	**16,20**
a.Terkontrak	442	19.832,51	3.212,25	
b.Proses Lelang	-	-		
c. Belum Lelang	-	-		



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Output		Target Outcome		Target Triwulan I		
				Volume	Satuan	Volume	Satuan	RN	RL	Kinerja
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air										
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	1	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	315,22 8 198	Km Buah Titik	4,79	m^3/detik	19,45	17,48	89,87
		2	Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	34,30 - 38	Km Buah Titik	0,18	m^3/detik	16,77	21,24	126,66
		3	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	415 25 183	Buah Titik Unit	143,05	m^3/detik	18,58	4,90	26,40
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	1	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	34 14 80	Baru On Going Buah	250	juta m^3	19,82	17,80	89,80
		2	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	2 11	Bendungan Buah	2,5	juta m^3	10,68	7,88	73,81
		3	Terjaganya kapasitas tampung sumber air	167 1.057	Bendungan Buah	4.497	juta m^3	19,71	6,18	31,33
3	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	1	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	189,78 2,00	Km Unit	12.929	Ha	20,28	19,95	98,37
4	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	1	Peningkatan indeks RBO (indeks)	3,02	Indeks	3,02	Indeks	17,48	7,44	42,58
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber air	1	Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang di konservasi pada kawasan prioritas	20	%	20	%	6,60	16,63	251,93
6	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	1	Peningkatan layanan jaringan irigasi	888,64 14	Km Bendung	47.512 14	Ha Bendung	20,61	12,77	61,99
		2	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	1.973,83 6	Km Bendung	145.670 6	Ha Bendung	18,65	11,37	60,96
		3	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	38.870 605	Km Bendung	3.053.595 605	Ha Bendung	27,12	11,47	42,28
		4	Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan	12	%	12	%	3,32	0,07	2,17
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air	1	Peningkatan potensi energi sumber air	5	Bendungan	11,35	Mw	13,61	25,33	186,12
2) Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo										
8	Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	1,77	Km	1,77	Km	22,00	0,32	1,45
		2	Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	1,84	Km	1,84	Km	14,64	0,58	3,95
		3	Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	13,50	Km	13,50	Km	10,20	2,92	28,68
		4	Teralirkannya lumpur luapan ke Kali Porong	40,00	juta m3 slurry	40,00	Juta m3 slurry	15,06	6,13	40,73
		5	Tertatanya kawasan diluar PAT	2,00	Ha	2,00	Ha	14,71	0,65	4,41
Total								19,79	15,30	77,31
Deviasi										-4,49



BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

Berikut adalah rincian penjelasan capaian Kinerja pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Program berdasarkan Rencana Aksi pada Triwulan I :

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Capaian kinerja pada Sasaran Program **"Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku"** meliputi 3 indikator Kinerja yaitu :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku						
	1	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	315,22 Km 8 Buah 198 Titik	4,79 m^3/detik	19,45	17,48	89,87
	2	Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	34,30 Km - Buah 38 Titik	0,18 m^3/detik	16,77	21,24	126,66
	3	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	415 Buah 25 Titik 183 Unit	143,05 m^3/detik	18,58	4,90	26,40

a. *Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku*, dengan nilai capaian kinerja **89,87% (Biru Tua)**, masuk dalam kategori **Memuaskan**. Sampai dengan Triwulan I kegiatan-kegiatan pembangunan baru berupa intake dan jaringan penyediaan air baku, pembangunan sumur air tanah untuk air baku, masih dalam tahap pelelangan dan dalam masa persiapan mulai pelaksanaan. Capaian kinerja didukung oleh progres pelaksanaan paket-paket tahun jamak (MYC) dengan alokasi besar antara lain seperti pembangunan Long Storage Kalimati Untuk Air Baku di Kab Sidoarjo, Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Banjarbakula dari IPA II Pinus (Banjar) ke IPA Pramuka (Banjarmasin), Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Keburejo (Kab. Kebumen), Pembangunan Intake Dan Jaringan Air Baku Gandrungmangu (Kab. Cilacap), Pembangunan SPAM Purwakarta, Pembangunan SPAM Gambung, Pembangunan Embung Air Baku DAS Kawal di Kab. Bintan.

b. *Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku*, dengan nilai capaian kinerja **126,66% (Biru Tua)**, masuk dalam kategori **memuaskan**. Sebagian besar paket pekerjaan rehabilitasi sarana dan



prasarana air baku sudah terkontrak dan merupakan paket pekerjaan dengan Kontrak Tahunan (SYC) berskala kecil.

c. *Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku*, berkinerja sangat baik dengan nilai capaian **26,40% (Merah)** masuk dalam kategori **Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.** Kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin embung air baku, pemeliharaan rutin unit air baku, pemeliharaan berkala prasarana air baku dengan pagu dibawah Rp. 200 juta yang umumnya dilaksanakan secara swakelola serta dikerjakan pada musim kering.

2. Capaian kinerja pada Sasaran Program **"Meningkatkan kapasitas tampung sumber air"**, meliputi 3 indikator Kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air						
	1	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	34 On going 14 baru 80 buah	250 juta m^3	19,82	17,80	89,80
	2	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	2 bend. 11 buah	2,5 juta m^3	10,68	7,88	73,81
	3	Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	167 bend. 1.057 buah	4.497 juta m^3	19,71	6,18	31,33

a. *Peningkatan kapasitas tampung sumber air*, dengan nilai capaian kinerja **89,80% (Biru Tua)** masuk dalam kategori **memuaskan**. Untuk pekerjaan pembangunan 34 (tiga puluh empat) bendungan *on going* dalam tahap konstruksi dan sebagian besar menunjukkan progres yang signifikan di atas 50% baik fisik maupun keuangan (antara lain Bendungan Logung, Bendungan Mila, Bendungan Rotiklot, Bendungan Sei Gong). Pembangunan 14 (Empat Belas) bendungan baru progresnya masih relatif rendah antara lain karena masih dalam tahap proses usulan RPB, atau usulan ijin MYC (antara lain Bendungan Sidan, Bendungan Tiga Dihaji, Bendungan Bener, Bendungan Jlantah, Bendungan Tamblang, Bendungan Randugunting), dalam penyelesaian pengadaan tanah (Bendungan Tiga Dihaji, Bendungan Bagong), dalam tahap penyusunan dokumen AMDAL/LARAP (Bendungan Bener, Bendungan Manikin, Bendungan Mbay), dalam tahap proses sertifikasi

desain (Bendungan Beringsila, Bendungan Manikin, Bendungan Bolango Hulu). Sedangkan pembangunan 80 buah embung sudah dalam tahap pelaksanaan (antara lain pembangunan embung serbaguna di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lanjutan Pembangunan Embung Danau Gatel (Tahap II) Kab. Kotawaringin Barat).

b. *Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air,* dengan nilai realisasi capaian Kinerja **73,81% (Hijau)** masuk dalam kategori **Baik, perlu sedikit perbaikan**. Capaian kinerja pada indikator ini cukup memadai karena sebagian kegiatan rehabilitasi situ dan embung sedang dalam tahap pelaksanaan.

c. *Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air,* dengan nilai realisasi capaian kinerja **31,33% (Oranye)** dan masuk dalam kategori **Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar**. Kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala pada beberapa embung dan bendungan belum mulai berjalan dalam tahap pelaksanaan secara swakelola, progres capaian didukung oleh kegiatan operasi rutin dan kegiatan yang bersifat *soft component*, seperti penyusunan manual OP, penyusunan Rencana Tindak Darurat (RTD).

3. Capaian kinerja pada sasaran program **"Meningkatkan kapasitas pengendalian daya rusak air"**, meliputi 1 indikator Kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
3	**Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air**						
	1	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	189,78 km 2 unit	12.929 Ha	20.28	19.95	98,37

a. *Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air,* dengan nilai capaian Kinerja **98,37% (Biru Tua)** termasuk dalam kategori **memuaskan**, dikarenakan sebagian besar kegiatan pengendalian daya rusak air (pembuatan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai, normalisasi alur) sudah terkontrak dan dalam tahap pelaksanaan. Beberapa kegiatan MYC lanjutan seperti Pembangunan Pengendali Banjir Kali Kemuning Kab. Sampang (Paket I dan Paket II) dalam tahap pelaksanaan. Sedangkan



kegiatan MYC baru belum masuk tahap pelaksanaan seperti Pengendali Banjir Sungai Warmare di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Pembangunan Pengendali Banjir Kali Bogel di Kab. Blitar, Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Kali Kedunglarangan di Kab. Pasuruan dan Kab. Sidoarjo, Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Kali Sadar Kabupaten dan Kota Mojokerto.

4. Capaian Kinerja pada sasaran program **"Meningkatkan keterpaduan tata kelola pengelolaan sumber daya air"** terdiri dari 1 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
4	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan Sumber Daya Air						
	1	Peningkatan RBO Indeks	3,02 Indeks	3,02 indeks	17,48	7,44	42,58

a. *Peningkatan presentase RBO Indeks*, dengan nilai realisasi capaian kinerja **42,58% (Oranye)** masuk dalam kategori **Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar**. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang berkaitan dengan kegiatan wajib Balai meliputi hidrologi dan kualitas air (rasionalisasi/revitalisasi pos hidrologi, pengadaan peralatan hidrologi), fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan, Penyiapan Bahan Evaluasi dan Bahan Penyebarluasan Informasi Pola PSDA, kegiatan TKPSDA Wilayah Sungai, kegiatan Sistem Informasi dan Data SDA (SISDA) masih dalam tahap pelaksanaan.

5. Capaian Kinerja pada sasaran program **"Meningkatnya upaya konservasi sumber air"** terdiri dari 1 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber air						
	1	Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang di konservasi pada kawasan prioritas	20%	20%	6,60	16,63	251,93

a. *Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas*, dengan nilai capaian kinerja **251,93% (Biru Tua)** termasuk dalam kategori **Memuaskan**. Hal ini disebabkan sebagian besar paket kegiatan perlindungan sungai dan sempadan sungai, perlindungan terhadap mata air,

serta revitalisasi danau sudah dilaksanakan (antara lain Revitalisasi Danau UNS di Kota Surakarta, Revitalisasi danau Kerinci di Kab. Kerinci, Revitalisasi Danau Tempe di Kab. Wajo, Kab. Soppeng, Kab. Sidarap, Revitalisasi Danau Tondano dan Danau Daud Sendow di Kab. Minahasa), sebagian sisanya seperti kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dalam proses lelang.

6. Capaian Kinerja pada sasaran program **"Meningkatnya kinerja layanan irigasi"** terdiri dari 4 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
6	**Meningkatnya kinerja layanan irigasi**						
	1	Peningkatan layanan jaringan irigasi	888,64 Km 14 Bendung	47.512 Ha 14 Bendung	20,61	12,77	61,99
	2	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	1.973,83 Km 6 Bendung	145.670 Ha 6 Bendung	18,65	11,37	60,96
	3	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	38.870 Km 605 Bendung	3.053.595 Ha 605 Bendung	27,12	11,47	42,28
	4	Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan	12%	12%	3,32	0,07	2,17

a. *Peningkatan layanan jaringan irigasi,* dengan nilai realisasi capaian kinerja **61,99%** (Ungu) termasuk dalam kategori **Cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar**. Sebagian besar kegiatan pembangunan/peningkatan irigasi permukaan, irigasi rawa, tambak dan jaringan irigasi air tanah sudah dalam tahap pelaksanaan terutama yang bersifat kontak tahun jamak (MYC), sebagian sisanya dalam proses lelang, namun masih ada paket yang belum berjalan terkait usulan proses RPB dan usulan MYC 2018 (antara lain *Modernization of Rentang Barrage and Cipelang Main Canal From BCPL.0 - BCPL.5* Kab. Indramayu, *Modernization of Utara Main Canal From BCPl.5 to BUt.18* Kab. Majalengka, Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Batang Asai Kab. Sarolangun, Pembangunan Bendung DI. Gilireng Kab. Wajo (Paket I), Pembangunan Bendung D.I. Batang Toru Kab. Tapanuli Utara, Pembangunan Bendung DI. Serdang Kab. Deli Serdang), review desain (antara lain Pembangunan Bendung Tingal) dan terkendala pembebasan tanah pada paket MYC lanjutan (antara lain Pembangunan Jaringan Sekunder DI. Osaka Kabupaten Rokan Hulu).



b. *Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi*, mempunyai kinerja **Cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar**, dengan nilai capaian kinerja **60,96%** (Ungu) dikarenakan pekerjaan rehabilitasi bendung/jaringan irigasi yang sebagian besar didanai melalui *Loan* IPDMIP antara lain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mrican Kab. Jombang, Rehabilitasi D.I. Kerasaan Kab. Simalungun, Rehabilitasi DI Karang Agung Tengah, Rehabilitasi Daerah Irigasi Sekampung Sistem, Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawajitu belum berjalan. Kegiatan rehabilitasi (fisik) tersebut belum dapat terlaksana sebelum kegiatan Survey Investigasi Desain dan Penyusunan PSETK selesai, dimana pada triwulan I ini kegiatan *soft component* tersebut juga masih terkendala.

c. *Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi*, dengan nilai **kinerja 42,28%** (Oranye) termasuk dalam kategori **Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar**. Kegiatan berupa operasi rutin sudah dalam tahap pelaksanaan secara swakelola dan sebagian sisanya berupa kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala dalam proses lelang.

d. *Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan,* merupakan Persentase kumulatif penambahan luasan daerah irigasi yang diairi oleh bendungan (yang selesai dibangun). Untuk Tahun 2018, target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini sama dengan target tahun 2017 sebesar 12%. Dua bendungan yang selesai dibangun pada tahun 2017 yaitu Bendungan Raknamo di Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bendungan Tanju di Kab. Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat, mempunyai potensi manfaat untuk mengairi daerah irigasi masing-masing seluas 1.250 hektar dan 2.250 hektar. Sehingga potensi daerah irigasi yang diairi oleh Bendungan bertambah dari 857.286,82 hektar (kumulatif s.d tahun 2016) menjadi 860.786,82 hektar dari total daerah irigasi yang ada 7.145.168 hektar, atau dalam bentuk persentase daerah irigasi yang diari bendungan sebesar 12,04%. Sedangkan pada tahun 2018 dari target 4 bendungan selesai yang mempunyai potensi untuk mengairi daerah irigasi sebagai berikut Bendungan logung (5.354 hektar), Bendungan Mila (1.689 hektar),

Bendungan Rotiklot (139 hektar), dan Bendungan Sei Gong (tidak mempunyai potensi untuk mengairi daerah irigasi). Kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini sebesar 2,17% (merah) termasuk dalam kategori **sangat kurang**, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

7. Capaian Kinerja pada sasaran program **"Meningkatnya potensi energi dari sumber daya air"** terdiri dari 1 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber daya air						
	1	Peningkatan potensi energi sumber air	4 Bendungan	11,35 MW	13,61	25,33	53,73

a. *Peningkatan potensi energi sumber air,* merupakan penambahan potensi energi dari bendungan yang selesai dibangun, yang mana bendungan tersebut mempunyai manfaat sebagai pembangkit listrik mikrohidro. Tahun 2018 ini ditetapkan target untuk indikator kinerja peningkatan potensi energi sumber air sebesar 1 MW karena bendungan yang direncanakan selesai pada tahun ini beberapa mempunyai potensi sumber energi listrik. Kinerja yang dicapai sebesar 53,73 % (**ungu**) termasuk dalam kategori **Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar**.

B. Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo

1. Capaian Kinerja pada sasaran program **"Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo"** terdiri dari 1 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan I		
					RN	RL	Kinerja
1	Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo						
	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	1,77 Km	1,77 Km	22	0,32	1,45
	2	Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Siodarjo	1,84 Km	1,84 Km	14,6	0,58	3,95
	3	Terjaganya fungsi layanan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	13,5 Km	13,5 Km	10,20	2,92	28,68
	4	Teralirkannya lumpur luapan ke Kali Porong	40 juta m3 slurry	40 juta m3 slurry	15,10	6,13	40,73
	5	Tertatanya kawasan diluar PAT	2 Ha	2 Ha	14,70	1,35	9,16



a. *Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo,* dengan capaian kinerja **1,45%** (Merah) termasuk dalam kategori **Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.** Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah pembangunan tanggul dan infrastruktur lainnya, dimana pada triwulan 1 ini masih dalam proses lelang, sehingga belum ada pelaksanaan fisik di lapangan.

b. *Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo,* dengan capaian kinerja sebesar **3,95%** (Merah) termasuk dalam kategori **Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar**. Seperti kegiatan pembangunan diatas, kegiatan rehabilitasi tanggul dan infrastruktur lainnya yang mendukung indikator ini masih dalam tahap proses lelang.

c. *Terjaganya fungsi layanan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo,* mencapai nilai kinerja **28,68%**, masih termasuk dalam kelompok warna Merah dengan kategori **Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar**. Kegiatan operasi pemeliharaan tanggul dan infrastruktur lainnya sebagian sudah berjalan namun progresnya masih rendah.

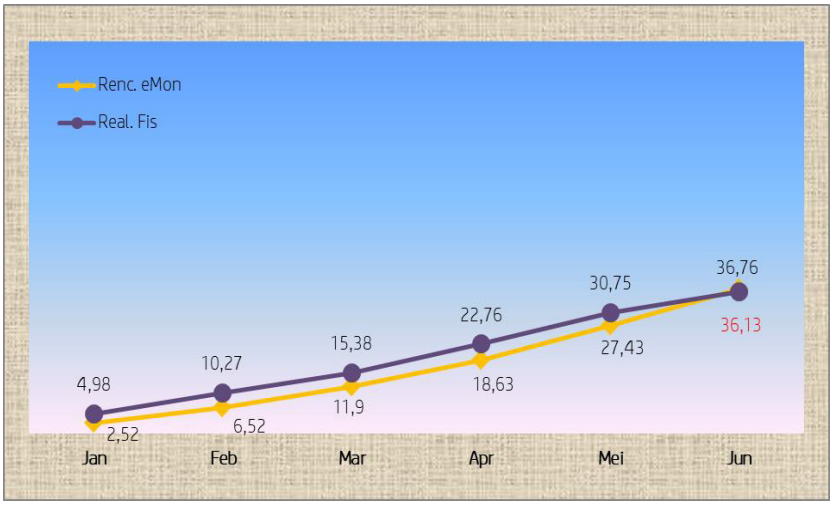
d. *Teralirkannya lumpur luapan ke Kali porong,* mempunyai kinerja **Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar**, dengan nilai capaian kinerja **40,73%** (Oranye). Kegiatan pengaliran lumpur sudah dalam tahap pelaksanaan namun progresnya masih rendah.

e. *Tertatanya kawasan diluar PAT, mempunyai kinerja* **Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar,** dengan nilai capaian kinerja **9,16%** (Merah). Kegiatan penataan kawasan di luar PAT mengalami kendala tidak adanya payung hukum paska dicabutnya Perpres No. 33 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Perpres No. 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

4.1.3 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan II

Sampai dengan akhir Triwulan II, realisasi progres fisik pelaksanaan anggaran tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air sebesar 36,13%, dan realisasi keuangan 33,41%, sementara target capaian fisik 36,76% dan rencana penyerapan keuangan sebesar 36,49%, sehingga terdapat deviasi progres fisik sebesar -0,63% dan deviasi progres keuangan sebesar -3,08%. Secara umum capaian per indikator kinerja Ditjen Sumber Daya Air masih baik karena deviasi yang terjadi masih dibawah 10%.

Gambar 4.3 memperlihatkan grafik perbandingan antara target dan realisasi fisik Ditjen Sumber Daya Air pada Triwulan II TA 2018.



Gambar 4.3 Kurva S Progres Fisik Triwulan II

Total paket Kontraktual sampai dengan akhir Triwulan II adalah 3.399 paket senilai 29,075 Triliun, yang terdiri dari :

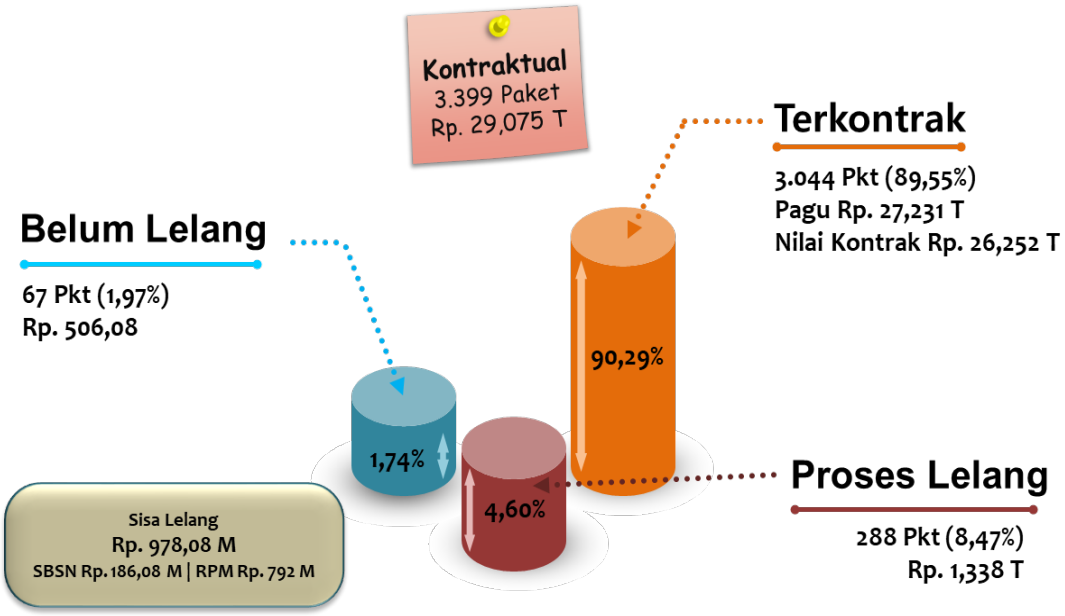
a. 3.044 Paket senilai Rp. 26,252 Triliun (90,29%) sudah terkontrak,
b. 288 Paket senilai Rp. 1,338 Triliun (4,60%) masih proses lelang,
c. 67 Paket senilai Rp. 506,08 Miliar (1,74%) belum lelang.
d. Sisa Lelang senilai Rp. 978,08 Miliar, terdiri dari Rp. 186,08 Miliar SBSN dan Rp. 792 Miliar Rupiah Murni.

Secara umum progres pelaksanaan kontraktual sudah baik, hal ini disebabkan karena persiapan proyek yang lebih baik terutama paket-paket



kontraktual tahunan (SYC) yang sudah terkontrak sebanyak lelang dini sudah dimulai pada bulan September 2017.

Progres pelaksanaan paket-paket kontraktual hingga akhir Triwulan II disajikan dalam Tabel 4.3 dan Gambar 4.4 sebagai berikut.



Gambar 4.4 Status Paket Kontraktual s.d Triwulan II

Tabel 4.3 Progres Paket Kontraktual Triwulan II

Kontraktual	Paket	Pagu (dlm Miliar)	Realisasi (dlm Miliar)	%
Total Kontraktual	**3.399**	**29.075,67**	**9.551,18**	**36,82**
a. Tahunan	2.789	8.093,88	2.733,20	33,77
b. MYC Baru	169	1.571,06	81,63	5,24
c. MYC Lanjutan	441	19.410,73	7.889,94	40,65
Tahunan	**2.789**	**8.093,88**	**2.733,20**	**33,77**
a. Terkontrak	2.598	6.681,20	2.733,20	
b. Proses Lelang	166	292,09		
c. Belum Lelang	25	142,52		
d. Sisa Lelang		978,08		
MYC Baru	**169**	**1.571,06**	**81,63**	**5,24**
a.Terkontrak	5	161,06	81,63	
b.Proses Lelang	122	1.046,44		
c. Belum Lelang	42	363,56		
d. Sisa Lelang	-	-		
MYC Lanjutan	**441**	**19.410,73**	**7.889,94**	**40,65**
a.Terkontrak	441	19.410,73	7.889,94	
b.Proses Lelang	-	-		
c. Belum Lelang	-	-		



BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 4.4 Capaian Indikator Kinerja Triwulan II

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Output		Target Outcome		Target Triwulan II		
				Volume	Satuan	Volume	Satuan	RN	RL	Kinerja
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air										
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	1	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	315,22	Km	4,79	m^3/detik	34,93	39,76	113,83
				8	Buah					
				198	Titik					
		2	Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	34,30	Km	0,18	m^3/detik	35,17	45,25	128,67
				-	Buah					
				38	Titik					
		3	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	415	Buah	143,05	m^3/detik	38,54	30,71	79,69
				25	Titik					
				183	Unit					
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	1	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	34	Baru	250	juta m^3	35,10	34,51	98,30
				14	On Going					
				80	Buah					
		2	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	2	Bendungan	2,5	juta m^3	23,71	26,67	112,47
				11	Buah					
		3	Terjaganya kapasitas tampung sumber air	167	Bendungan	4.497	juta m^3	40,02	29,07	72,64
				1.057	Buah					
3	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	1	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	189,78	Km	12.929	Ha	38,48	40,10	104,22
				2,00	Unit					
4	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	1	Peningkatan indeks RBO (indeks)	3,02	Indeks	3,02	Indeks	35,51	28,99	81,65
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber air	1	Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang di konservasi pada kawasan prioritas	20	%	20	%	15,87	41,09	258,84
6	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	1	Peningkatan layanan jaringan irigasi	888,64	Km	47.512	Ha	40,46	29,12	71,99
				14	Bendung	14	Bendung			
		2	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	1.973,83	Km	145.670	Ha	38,90	32,14	82,61
				6	Bendung	6	Bendung			
		3	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	38.870	Km	3.053.595	Ha	47,26	43,18	91,37
				605	Bendung	605	Bendung			
		4	Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan	12	%	12	%	13,04	8,21	40,61
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air	1	Peningkatan potensi energi sumber air	5	Bendungan	11,35	Mw	33,08	46,47	140,48
2) Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo										
8	Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	1,77	Km	1,77	Km	54,99	16,17	29,40
		2	Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	1,84	Km	1,84	Km	45,63	21,63	47,41
		3	Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	13,50	Km	13,50	Km	35,07	4,89	13,94
		4	Teralirkannya lumpur luapan ke Kali Porong	40,00	juta m3 slurry	40,00	juta m3 slurry	40,29	17,20	42,69
		5	Tertatanya kawasan diluar PAT	2,00	Ha	2,00	Ha	45,87	21,65	47,20
Total								37,49	35,19	93,85
Deviasi										-2,30



A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Capaian kinerja pada Sasaran Program **"Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Baku"** meliputi 3 indikator Kinerja yaitu :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku						
	1	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	315,22 Km 8 Buah 198 Titik	4,79 m^3/detik	34,93	39,76	113,83
	2	Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	34,30 Km - Buah 38 Titik	0,18 m^3/detik	35,17	45,25	128,67
	3	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	415 Buah 25 Titik 183 Unit	143,05 m^3/detik	38,54	30,71	79,69

a. *Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku*, dengan nilai capaian kinerja **113,83% (Biru Tua)** masuk dalam kategori **memuaskan**. Sampai dengan Triwulan II kegiatan-kegiatan pembangunan baru berupa intake dan jaringan penyediaan air baku, pembangunan sumur air tanah untuk air baku, masih dalam tahap pelaksanaan. Capaian kinerja didukung oleh progres pelaksanaan paket-paket tahun jamak (MYC) dengan alokasi besar antara lain pembangunan Long Storage Kalimati Untuk Air Baku di Kab. Sidoarjo, Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Banjarbakula dari IPA II Pinus (Banjar) ke IPA Pramuka (Banjarmasin), Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Keburejo (Kab. Kebumen), Pembangunan Intake Dan Jaringan Air Baku Gandrungmangu (Kab. Cilacap), Pembangunan SPAM Purwakarta, Pembangunan SPAM Gambung. Begitu juga dengan paket pekerjaan untuk mengatasi kekeringan berupa pengeboran sumur air tanah sudah berjalan, bahkan ada yang sudah selesai.

b. *Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku*, dengan nilai capaian kinerja **128,67%** (Biru Tua), masuk dalam kategori **memuaskan**. Sebagian besar paket pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku sudah terkontrak dan merupakan paket pekerjaan dengan Kontrak Tahunan (SYC) berskala kecil. Beberapa paket pekerjaan rehabilitasi menunjukkan progres di atas 70% pada akhir triwulan II, antara

lain Rehabilitasi Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tanah Goyang Kab. SBB, Rehabilitasi Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Namrole Kab. Buru Selatan, Rehabilitiasi Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sumanbaho Kab. Mamuju, Rehabilitasi Sumur Bor Kabupaten Gunung Mas, dan Rehabilitasi Sumur Bor Kabupaten Kapuas.

c. *Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku*, berkinerja **sangat baik** dengan nilai capaian **79,69%** (Biru Muda). Indikator kinerja ini merupakan realisasi kegiatan operasi pemeliharaan sudah dalam tahap pelaksanaan yang sebagian besar dikerjakan secara swakelola. Beberapa paket pekerjaan pemeliharaan berkala berskala kecil bahkkan sudah selesai dilaksanakan, antara lain Pemeliharaan Berkala Air Baku Batang Tuaka dan Air Baku Kotabaru di Kab. Indragiri Hilir, Pemeliharaan Berkala Air Baku Rambah Samo dan Air Baku Pasir Pangaraian di Kab. Rokan Hulu.

2. Capaian kinerja pada Sasaran Program **"Meningkatkan Kapasitas Tampung Sumber Air"**, meliputi 3 indikator Kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber air						
	1	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	34 On going 14 baru 80 buah	250 juta m^3	35,10	34,51	98,30
	2	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	2 bendungan 11 buah	2,5 juta m^3	23,71	26,67	112,47
	3	Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	167 bendungan 1.057 buah	4.497 juta m^3	40,02	29,07	72,64

a. *Peningkatan kapasitas tampung sumber air*, dengan nilai capaian kinerja **98,30% (Biru Tua)** masuk dalam kategori **memuaskan**. Untuk pekerjaan pembangunan 34 (tiga puluh) bendungan *on going* dalam tahap konstruksi dan sebagian menunjukkan progres yang signifikan di atas 70% baik fisik maupun keuangan, seperti pembangunan Bendungan Tugu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gondang, Bendungan Logung, Bendungan Muara Sei Gong, Bendungan Rotiklod, Bendungan Passeloreng. Beberapa bendungan yang progresnya masih rendah terkendala pada proses pembebasan lahan



(antara lain Bendungan Gongseng, Bendungan Pidekso, Bendungan Sindang Heula, Bendungan Kreureto, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Cipanas, Bendungan Leuwikeris). Sementara untuk 14 rencana bendungan baru belum mulai pelaksanaan konstruksi dikarenakan beberapa masih dalam tahap proses lelang (Bendungan Tigadihaji, Bendungan Sidan dan Bendungan Bener), dalam tahap proses sertifikasi desain (Bendungan Manikin, Bendungan Digoel, Bendungan Tamblang), terkendala masalah lahan (Bendungan Randugunting, Bendungan Sadawarna, Bendungan Bagong), masih dalam tahap reviu desain dan studi LARAP (Bendungan Bolangu Hulu, Bendungan Rukoh). Pembangunan 80 buah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan sedang dalam tahap pelaksanaan (antara lain beberapa paket lanjutan seperti Pembangunan Embung Konservasi ITERA Tahap III, Embung Karohroy di Kab. Tasikmalaya, Kolam Konservasi Kolong Mempadin Kab. Belitung).

b. ***Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air,*** dengan nilai realisasi capaian Kinerja **112,47% (Biru Tua)**, kinerja kegiatan rehabilitasi termasuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja pada indikator ini sangat baik karena kegiatan rehabilitasi embung/situ sebagian besar dalam tahap pelaksanaan dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

c. ***Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air,*** dengan nilai realisasi capaian kinerja **72,64%** (hijau) dan masuk dalam kategori **baik, perlu sedikit perbaikan.** Kegiatan operasi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala pada beberapa bangunan penampung sumber air (bendungan, danau, situ, embung) sudah berjalan dan beberapa sudah mencapai progres fisik/keuangan di atas 70% (Pemeliharaan Embung D.I. Sihora hora dan Embung Simarigung Kab. Humbang Hasundutan, Pemeliharaan Berkala Embung Bengawan Solo Hulu, Pemeliharaan Rutin Embung Bengawan Kota Tarakan, Pemeliharaan berkala Bendungan Sermo).

3. Capaian kinerja pada Sasaran Program **"Meningkatkan Kapasitas Pengendalian Daya Rusak Air",** meliputi 1 indikator Kinerja :



No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
3	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air						
	1	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	189,78 km; 2 unit	12.929 Ha	38,48	40,10	104,22

a. ***Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air,*** dengan nilai capaian Kinerja **104,22% (Biru Tua)** termasuk dalam kategori **memuaskan**, dikarenakan sebagian besar kegiatan pengendalian daya rusak air berupa pekerjaan pengendalian banjir sudah dalam tahap pelaksanaan dan mencapai progres pelaksanaan yang cukup signifikan, antara lain paket pekerjaan yang bersifat *multi years contract* dengan dana SBSN yaitu Pengendalian Banjir Sungai Palu Paket I dan Paket II Kab. Sigi. Paket pekerjaan lain yang didanai PHLN seperti *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II* dan *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River* juga sudah mencapai progres lebih dari 80%. Begitu juga dengan paket Pengendalian Banjir Way Ketibung dan Way Sulan Kab. Lampung Selatan, Peningkatan Kapasitas Sudetan *Floodway* (Plangwoot-Sedayu Lawas).

4. Capaian kinerja pada Sasaran Program **"Meningkatkan Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Air"** terdiri dari 1 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
4	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan Sumber Daya Air						
	1	Peningkatan RBO Indeks	3,02 Indeks	3,02 indeks	35,51	28,99	81,65

a. ***Peningkatan presentase RBO Indeks***, dengan nilai realisasi capaian kinerja **81,65%** (Biru Muda) masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang berkaitan dengan kegiatan wajib Balai yang dilaksanakan secara rutin meliputi data informasi dan komunikasi publik, pola rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat, hidrologi dan kualitas air, kelembagaan pengelolaan SDA, dan rekomtek pemanfaatan SDA, sudah berjalan dengan baik di masing-masing BBWS/BWS.

5. Capaian kinerja pada Sasaran program **"Meningkatnya Upaya Konservasi Sumber Air"** terdiri dari 1 indikator kinerja :



No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber air						
	1	Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang di konservasi pada kawasan prioritas	20%	20%	15,87	41,09	258,84

a. ***Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas***, dengan nilai capaian kinerja **258%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**. Hal ini disebabkan sebagian paket kegiatan yang berkaitan dengan *output* kegiatan revitalisasi danau (antara lain revitalisasi Danau Tempe, revitalisasi Danau Kerinci, revitalisasi Danau UNS, revitalisasi Danau Tondano) telah melampaui target yang direncanakan.

6. Capaian kinerja pada Sasaran Program **"Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi"** terdiri dari 4 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
6	Meningkatnya kinerja layanan irigasi						
	1	Peningkatan layanan jaringan irigasi	888,64 Km 14 Bendung	47.512 Ha 14 Bendung	40,46	29,12	71,99
	2	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	1.973,83 Km 6 Bendung	145.670 Ha 6 Bendung	38,90	32,14	82,61
	3	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	38.870 Km 605 Bendung	3.053.595 Ha 605 Bendung	47,26	43,18	91,37
	4	Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan	12%	12%	13,04	8,21	62,95

a. ***Peningkatan layanan jaringan irigasi,*** dengan nilai realisasi capaian kinerja **71,99% (Hijau)** termasuk dalam kategori **Baik**, perlu sedikit perbaikan. Sebagian besar kegiatan pembangunan/peningkatan irigasi permukaan, irigasi rawa, tambak dan jaringan irigasi air tanah sudah dalam tahap pelaksanaan, antara lain Pembangunan Bendung Tiley, Bendung DI Kamijoro, kegiatan yang bersifat *multi years contract* seperti Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai, Jaringan Utama Irigasi Bahuga D.I. Komering Paket I, Jaringan Tersier Rawa Sragi II, Daerah Irigasi Jabung, DI. Progo Pistan, Jaringan Irigasi DI Lhok Guci, Jaringan Utama dan Jaringan Tersier DI Batang Anai II. Sedangkan sebagian sisanya dalam proses lelang, dan beberapa paket lainnya masih dalam tahap review desain antara lain paket IP-574

Loan JICA (*Package 1 : Perjaya Headworks, Komering Main Canal, Lempuing Secondary Canal (Section-3), Lempuing Sub Secondary Canal and Tertiary Development (Blok G and H)* Kab.OKU Timur; *Package 2 : Belitang Secondary Canal (BB.0-BB.15), Lempuing Sub-Secondary Canal and tertiary Development (Block I and J)*; *Package 3: Belitang Secondary Canal (BB.0-BB.25), Lempuing Sub Secondary Canal and Tertiary Development (Block K)*). Proses usulan MYC 2018 antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Batang Asai (MYC) Kab. Sarolangun, Pembangunan Bendung DI. Gilireng Kab. Wajo (Paket I), Pembangunan Bendung D.I. Batang Toru Kab Tapanuli Utara, Pembangunan Bendung DI. Serdang Kab. Deli Serdang).

b. ***Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi***, mempunyai kinerja **sangat baik**, melampaui target yang telah ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja **82,61%** (Biru Muda) dikarenakan pekerjaan rehabilitasi bendung/jaringan irigasi sudah dalam tahap pelaksanaan konstruksi (antara lain Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gumbasa, Rehabilitasi Bendung Metukul D.I Rias, Rehabilitasi Bendung Pasar Baru D.I Cisadane, Modernisasi Jaringan Irigasi DI. Rentang, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sausu Atas, Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS. Kandanghaur CS). Beberapa masih dalam proses usulan RPB antara lain *Modernization of Rentang Barrage and Cipelang Main Canal From BCPL.0 - BCPL.5* Kab. Indramayu, *Modernization of Utara Main Canal From BCPl.5 to BUt.18* Kab. Majalengka.

c. ***Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi***, dengan nilai kinerja **91,37%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**. Sebagian besar kegiatan swakelola operasi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi sudah dalam tahap pelaksanaan dan sebagian sisanya dilaksanakan pada musim pengeringan.

d. ***Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan,*** merupakan persentase kumulatif penambahan luasan daerah irigasi yang diairi oleh bendungan yang selesai dibangun. Untuk Tahun 2018, target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini sama dengan target tahun 2017 sebesar 12%. Dua bendungan yang selesai dibangun pada tahun 2017 yaitu Bendungan



Raknamo di Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bendungan Tanju di Kab. Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat, mempunyai potensi manfaat untuk mengairi daerah irigasi masing-masing seluas 1.250 hektar dan 2.250 hektar. Sehingga potensi daerah irigasi yang diairi oleh Bendungan bertambah dari 857.286,82 Ha (kumulatif s.d tahun 2016) menjadi 860.786,82 hektar dari total daerah irigasi yang ada 7.145.168 hektar, atau dalam bentuk persentase daerah irigasi yang diari bendungan sebesar 12,04%. Sedangkan pada tahun 2018 dari target 4 bendungan selesai yang mempunyai potensi untuk mengairi daerah irigasi sebagai berikut Bendungan logung (5.354 hektar), Bendungan Mila (1.689 hektar), Bendungan Rotiklot (139 hektar), dan Bendungan Sei Gong (tidak mempunyai potensi untuk mengairi daerah irigasi). Kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini sebesar **62,97%** (Ungu) termasuk dalam kategori **Cukup (memadai), perlu perbaikan yang tidak mendasar**.

7. Capaian kinerja pada sasaran program **"Meningkatnya potensi energi dari sumber daya air"** terdiri dari 1 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber daya air						
	1	Peningkatan potensi energi sumber air	4 Bendungan	11,35 MW	33,08	46,47	140,48

a. ***Peningkatan potensi energi sumber air,*** merupakan penambahan potensi energi dari bendungan yang selesai dibangun yang mana bendungan tersebut mempunyai manfaat sebagai pembangkit listrik mikrohidro. Sampai dengan triwulan II tahun 2018 ini dari 4 bendungan yang ditargetkan selesai, ditetapkan target untuk indikator kinerja peningkatan potensi energi sumber air sebesar 11.35 MW karena beberapa bendungan yang direncanakan selesai pada tahun ini mempunyai potensi sumber energi listrik. Kinerja yang dicapai sampai dengan akhir triwulan II sebesar **140,48%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **Memuaskan**.



B. Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo

1. Capaian Kinerja pada sasaran program **"Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo"** terdiri dari 1 indikator kinerja :

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja		Target *Output*	Target *Outcome*	Triwulan II		
					RN	RL	Kinerja
1	Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo						
	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	1,77 Km	1,77 Km	54,99	16,17	29,40
	2	Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Siodarjo	1,84 Km	1,84 Km	45,63	21,63	47,41
	3	Terjaganya fungsi layanan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	13,5 Km	13,5 Km	35,07	4,89	13,94
	4	Teralirkannya lumpur luapan ke Kali Porong	40 juta m^3 slurry	40 juta m^3 slurry	40,29	17,20	42,69
	5	Tertatanya kawasan diluar PAT	2 Ha	2 Ha	45,87	21,65	47,20

a. *Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo,* dengan capaian kinerja **29,40%** (Merah) termasuk dalam kategori **Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.** Kegiatan yang mendukung indikator ini sudah terkontrak namun progres pelaksanaan fisiknya masih rendah, antara lain Pembangunan Tanggul Kedung Bendo, Peningkatan Tanggul Ketapang, Peningkatan Tanggul Jatirejo Siring, Peningkatan Tanggul Gempolsari - Renokenongo.

b. *Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo,* dengan capaian kinerja sebesar **47,41%** (Oranye) termasuk dalam kategori **Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar**. Seperti kegiatan pembangunan diatas, kegiatan rehabilitasi tanggul dan infrastruktur lainnya yang mendukung indikator ini antara lain Peningkatan Tanggul Ketapang, Peningkatan Tanggul Jatirejo Siring, Peningkatan Tanggul Gempolsari – Renokenongo, masih sudah dalam tahap pelaksananaan namun progres fisiknya masih rendah.

c. *Terjaganya fungsi layanan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo,* mencapai nilai kinerja **13,94%** (Merah), masih termasuk dalam kelompok warna Merah dengan kategori **Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar**. Kegiatan operasi rutin



sarana dan prasarana tanggul serta sarana prasarana drainase dan lingkungan sebagian besar belum berjalan.

d. *Teralirkannya lumpur luapan ke Kali porong,* mempunyai kinerja **Kurang**, **perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar**, dengan nilai capaian kinerja **42,69%** (Oranye). Kegiatan pengaliran lumpur ke Kali Porong sudah dalam tahap pelaksanaan.

e. *Tertatanya kawasan diluar PAT, mempunyai kinerja* **Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar,** dengan nilai capaian kinerja **47,20%** (Oranye). Kegiatan penataan kawasan di luar PAT sudah dalam tahap pelaksanaan.

4.1.4 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan III

Sampai dengan akhir Triwulan III, realisasi progres fisik pelaksanaan anggaran tahun 2018 adalah sebesar 60,50%, dan realisasi keuangan 54,38%, sementara target capaian fisik 67,30% dan rencana penyerapan keuangan sebesar 65,81%, sehingga terdapat deviasi progres fisik sebesar -6,80% dan deviasi progres keuangan sebesar -11,43%. Deviasi negatif antara realisasi dan rencana fisik dan keuangan cukup tinggi yakni >10%.

Gambar 4.5 memperlihatkan grafik perbandingan antara target dan realisasi fisik Ditjen Sumber Daya Air pada Triwulan III TA 2018.



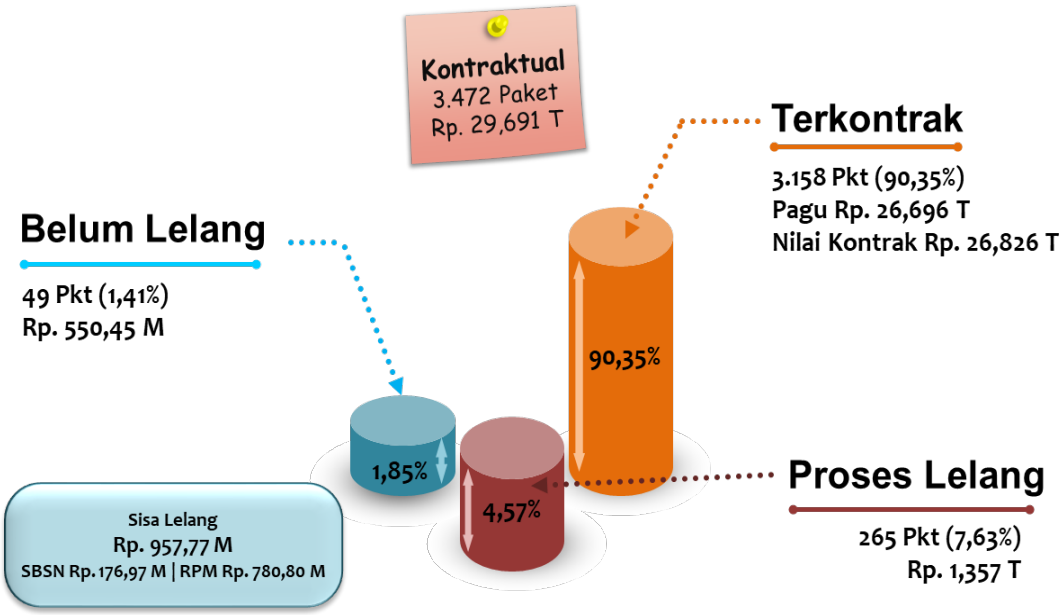
Gambar 4.5 Kurva S Target dan Realisasi Fisik Triwulan III

Total paket Kontraktual sampai dengan akhir Triwulan III adalah 3.472 paket senilai 29,69 Triliun, yang terdiri dari :

a. 3.158 Paket senilai Rp. 26,83 Triliun (90,36%) sudah terkontrak,
b. 265 Paket senilai Rp. 1,357 Triliun (4,58%) masih proses lelang,
c. 49 Paket senilai Rp. 550,45 Miliar (1,85%) belum lelang.
d. Sisa lelang senilai Rp. 957,77 Miliar, terdiri dari Rp. 176,67 Miliar SBSN dan Rp. 780,80 Miliar Rupiah Murni.

Secara umum progres pelaksanaan kontraktual sudah baik, hal ini terlihat dari jumlah paket terkontrak sebesar 90,96% dari total paket 3.472 paket kontraktual.

Progres pelaksanaan paket-paket kontraktual hingga akhir Triwulan III disajikan dalam Tabel 4.5 dan Gambar 4.6 sebagai berikut.



Gambar 4.6 Status Paket Kontraktual s.d Triwulan III



Tabel 4.5 Progres Paket Kontraktual Triwulan III

Kontraktual	Paket	Pagu (dlm Miliar)	Realisasi (dlm Miliar)	%
Total Kontraktual	**3.472**	**29.691,73**	**16.059,24**	**59,86**
a. Tahunan	2.835	8.073,07	4.375,74	63,93
b. MYC Baru	194	1.835,39	120,63	60,83
c. MYC Lanjutan	443	19.783,27	11.562,87	58,45
Tahunan	**2.835**	**8.073,07**	**4.375,74**	**63,93**
a. Terkontrak	2.702	6.844,60	4.375,74	
b. Proses Lelang	113	176,39		
c. Belum Lelang	20	94,31		
d. Sisa Lelang		957,77		
MYC Baru	**194**	**1.835,39**	**120,63**	**60,83**
a. Terkontrak	13	198,33	120,63	
b. Proses Lelang	152	1.180,91		
c. Belum Lelang	29	456,15		
d. Sisa Lelang		-		
MYC Lanjutan	**443**	**19.783,27**	**11.562,87**	**58,45**
a. Terkontrak	443	19.783,27	11.562,87	
b. Proses Lelang	-	-		
c. Belum Lelang	-	-		

Kinerja triwulan III mengacu pada perubahan peta strategi hasil reviu paruh waktu Rencana Strategis 2015-2019, dimana capaian kinerja Triwulan III diukur untuk 2 (dua) Sasaran Program dengan 7 (tujuh) indikator Sasaran Program, dan 19 Sasaran Kegiatan dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan rencana capaian kinerja disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 menunjukkan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran program. Sampai dengan Triwulan III, total realisasi capaian kinerja Sasaran Program sebesar **90,63% (Memuaskan)**, dimana realisasi capaian indikator kinerja sebesar **58,70%** dari rencana capaian indikator kinerja sebesar **64,77%.**



Tabel 4.6 Capaian Indikator Kinerja Triwulan III

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM			% TARGET PER INDIKATOR SP	Target Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
SS2.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi					
SP2	**Meningkatnya Ketahanan Air**		**87%**	**64,67**	**58,76**	**90,85**
1	**Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku**		**85%**	**63,45**	**65,22**	102,79
	SK1	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku		63,44	65,28	**102,90**
	SK2	Peningkatan Layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku		72,16	14,02	19,44
2	**Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air**		**80%**	**60,70**	**57,66**	**94,99**
	SK3	Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air		60,70	57,68	**95,03**
	SK4	Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya		69,45	27,66	**39,83**
	SK5	Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan		68,10	50,02	**73,46**
3	**Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak**		**90%**	**66,46**	**61,68**	**92,81**
	SK6	Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak		66,48	61,79	**92,93**
	SK7	Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai		55,31	11,37	20,55
4	**Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA**		**100%**	**71,29**	**56,48**	**79,23**
	SK8	Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA		71,23	56,32	**79,08**
	SK9	Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu		70,57	53,02	**75,13**
	SK10	Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS		72,77	61,01	**83,84**
	SK11	Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional		78,00	60,04	**76,97**
5	**Tingkat kinerja layanan irigasi**		**84,0%**	**64,68**	**52,87**	**81,75**
	SK12	Peningkatan layanan kinerja irigasi		63,71	54,03	**84,81**
	SK13	Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa		85,72	27,61	**32,21**
6	**Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan**		**100%**	**72,05**	**67,67**	**93,92**
	SK14	Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air		71,77	70,10	**97,67**
	SK15	Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA		78,34	14,85	18,95
Learning & Growth :						
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA			**100%**	**90,56**	**36,43**	**40,23**
	SK16	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA		90,56	36,43	**40,23**
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya			**100%**	**73,87**	**46,31**	62,69
	SK17	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)		73,87	46,31	62,69
SP3	**Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo**		**90,50%**	**73,65**	**53,72**	**72,94**
1	**Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo**		**90%**	**64,92**	**65,12**	**100,31**
	SK18	Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur sidoarjo		74,41	26,00	34,94
	SK19	Peningkatan layanan sarana dan prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo		63,01	73,00	115,85
Learning & Growth :						
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA			**100%**	**90,56**	**36,43**	**40,23**
	SK16	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA		90,56	36,43	**40,23**
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya			**100%**	**73,87**	**46,31**	62,69
	SK17	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (PPLS)		73,87	46,31	62,69
Total				**64,77**	**58,70**	**90,63**
Deviasi						- 6,07



Berikut adalah rincian penjelasan capaian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air berdasarkan uraian Rencana Aksi pada Triwulan III :

A. Sasaran Program Meningkatnya Ketahanan Air

1. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku"** sebesar **102,79%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu:

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
1	Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku		85%	63,45	65,22	102,79
	SK1	Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku		63,44	65,28	102,90
	SK2	Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku		72,16	14,02	19,44

a. *Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku*, dengan nilai capaian kinerja **102,90%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **Memuaskan**. Sasaran kegiatan ini mencakup 2 indikator yaitu : i) tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, meliputi pekerjaan sumur air tanah untuk air baku yang dibangun, embung air baku yang dibangun, unit air baku yang dibangun; dan indikator ii) tingkat pengembalian fungsi debit dan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula, meliputi pekerjaan sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi, embung air baku yang direhabilitasi, dan unit air baku yang direhabilitasi. Sasaran kegiatan ini merupakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku yang dilaksanakan di BBWS/BWS. Komponen kegiatan yang mendukung capaian ini berupa beberapa paket pekerjaan yang telah mencapai progres yang signifikan antara lain Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Sampit, Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Kab. Mamuju, Pembangunan Prasarana Pengambilan Air Tanah Untuk Air Baku Kab. Sarolangun, Rehabilitasi Sumur Bor Kabupaten Gunung Mas, Rehabilitasi Sumur Eksplorasi Air Tanah Distrik Nimbokrang Kab.Jayapura.

b. *Peningkatan layanan pembinaan bidang air baku dan air tanah*, dengan nilai capaian kinerja **19,44%** (Merah) masuk dalam kategori **Sangat Kurang,** perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.



Layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku sebagai program rutin unit kerja masih berjalan untuk 34 BBWS/BWS, meskipun demikian ada kegiatan penunjang yang sifatnya kontraktual yang mempengaruhi capaian progres yaitu kegiatan ESP (*Engineering Service Project*) yaitu *Master plan of Sustainable Raw Water Supply Sistem*, yang masih dalam proses lelang hingga akhir triwulan III.

2. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air"** sebesar **94,99%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 3 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
2	**Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air**		**80%**	**60,7**	**57,66**	**94,99**
	SK3	Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air		60,7	57,68	95,03
	SK4	Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya		69,45	27,66	39,83
	SK5	Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan		68,1	50,02	73,46

a. *Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air*, dengan nilai capaian kinerja **95,03% (Biru Tua)** masuk dalam kategori **Memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada sasaran kegiatan 3 (SK3) ini terdiri atas indikator : i) tingkat kapasitas tampung sumber air yang meliputi pekerjaan bendungan yang selesai dibangun pada tahun eksisting, bendungan baru yang dibangun, bendungan dalam tahap pelaksanaan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun; indikator ii) tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula, yang meliputi pekerjaan bendungan yang direhabilitasi, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi, dan danau yang direvitalisasi; dan indikator iii) tingkat potensi energi sumber air, meliputi pekerjaan bendungan yang selesai pada tahun berjalan. Untuk pekerjaan pembangunan 34 (tiga puluh empat) bendungan *on going* dalam tahap konstruksi dan sebagian menunjukkan progres yang signifikan di atas 80% baik fisik maupun keuangan, seperti pembangunan Bendungan Tugu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gondang, Bendungan Logung, Bendungan



Muara Sei Gong, Bendungan Mila, Bendungan Rotiklod, Bendungan Sindang Heula. Beberapa bendungan yang progresnya masih rendah terkendala pada proses pembebasan lahan (antara lain Bendungan Kreureto, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Cipanas, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Napun Gete). Sementara untuk 14 rencana bendungan baru belum mulai pelaksanaan konstruksi dikarenakan beberapa masih dalam tahap proses lelang, dalam tahap proses sertifikasi desain, terkendala masalah lahan, dan masih dalam tahap reviu desain dan studi LARAP/AMDAL. Pembangunan 80 buah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan sedang dalam tahap pelaksanaan (antara lain beberapa paket lanjutan seperti Pembangunan Embung Konservasi ITERA Tahap III, Embung di Distrik Karubaga Kab Tolikara, Embung Karohroy di Kab. Tasikmalaya, Kolam Konservasi Kolong Mempadin Kab. Belitung, Pembangunan Long Storage kabupaten Boven Digoel).

b. ***Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya,*** dengan nilai realisasi capaian Kinerja **39,83%** (Oranye) masuk dalam kategori **Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 4 (SK4) ini terdiri atas indikator layanan pembinaan bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Bendungan sebagai program rutin masih dalam tahap proses pelaksanaan untuk 34 BBWS/BWS, Namun demikian, terdapat pekerjaan penunjang berupa paket pekerjaan kontraktual dimana besaran pagunya sebesar 55% dari total pagu satuan kerja Pusat Bendungan dan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak, yang progres pelaksanaannya masih di bawah 50% yaitu *Consultant Firm for Preparation of Jragung Multipurpose Dam Project*.

c. ***Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan,*** dengan nilai realisasi capaian kinerja **73,46%** (Hijau) dan masuk dalam kategori **Baik,** perlu sedikit perbaikan**.** Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 5 (SK5) ini antara lain terdiri atas indikator NSPK teknis keamanan bendungan, rencana dan program kerja Balai Bendungan, dan



layanan teknis keamanan bendungan. Kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagian dalam tahap pelaksanaan.

3. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak"** sebesar **92,81%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
3	Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak		90%	66,46	61,68	92,81
	SK6	Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak		66,48	61,79	92,93
	SK7	Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai		55,31	11,37	20,55

a. *Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak,* dengan nilai capaian Kinerja **92,93%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**, Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 6 (SK6) mencakup 2 (dua) indikator : i) Tingkat luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, terdiri atas jumlah kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun, jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dibangun, dan jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dibangun. Indikator ii) Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, terdiri atas jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi, jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi, dan jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan yang sifatnya *multi years contract* (MYC) dengan pendanaan melalui SBSN pada akhir triwulan III telah mencapai progres 100% seperti Pengendalian Banjir Sungai Palu Paket I dan Paket II Kab. Sigi. Beberapa paket pekerjaan lanjutan juga telah mencapai progres di atas 90% seperti Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani (lanjutan) Kab. Lampung Timur, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Miangas Paket I (Lanjutan) Kab. Kep. Talaud,



Pembangunan Pengaman Pantai Bakau Kecil-Besar (Lanjutan) Kab. Mempawah, Pembangunan Pengendali Banjir Air Payang dan Air Jerinjing Anak Air Selagan Kabupaten Mukomuko, Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Belanting di Kabupaten Lombok Timur, Pengendalian banjir Sungai Iray Kab. Pegunungan Arfak, Pembangunan *Check dam* Cisuru Kec. Cipari. Beberapa kegiatan rehabilitasi juga sudah mencapai progres fisik yang signifikan diatas 70%, sebagai contoh Rehabilitasi dan rekonstruksi sabo dam Merapi Kali Woro Kab. Klaten, Rehabilitasi Pengamanan Pantai di Kepulauan Nusa Penida Kab. Klungkung, Rehabilitasi Terowongan Puncak Gunung Kelud dan Jalan Inspeksi Kab Kediri. Hingga akhir triwulan III masih ada beberapa paket pekerjaan *multi years contract* (MYC) baru yang belum dilakukan pelelangan, antara lain Sentiong - Ancol Pump Station (terkendala perpanjangan *Loan* JUFMP World Bank), *Engineering Service for Bangka Island Flood Management Subproject*; Kota Pangkal Pinang (masih dalam proses persetujuan REOI dan RFP dari EDCF), *Preparation of Deli-Percut-Belawan River Basin Flood Management Project in North Sumatera Province* dan *Preparation Seputih-Tulang Bawang River Basin Flood Management Project in Lampung Province* (*Loan* ESP, menunggu No Objection Letter/NOL dari Asian Development Bank/ADB), FFWS For BWS Maluku (belum dapat dilaksanakan, karena menunggu hasil studi selesai dilaksanakan).

b. ***Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan panta****i*, dengan nilai realisasi capaian kinerja **20.55%** (merah) dan masuk dalam kategori **sangat kurang,** perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar**.** Kegiatan yang mendukung indikator tersebut berupa layanan pembinaan bidang sungai dan pantai yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Sungai dan Pantai sebagai program rutin untuk 34 BBWS/BWS masih dalam tahap pelaksanaan, Namun demikian, terdapat pekerjaan penunjang berupa paket pekerjaan kontraktual jasa konsultansi yang direncanakan untuk pendampingan kegiatan fisik di lapangan baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun PHLN yaitu *engineering service project* (ESP) masih 0% karena keterlambatan proses pelelangan untuk

paket-paket fisiknya sehingga kegiatan konsultansi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini juga tidak dapat berjalan.

4. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA"** sebesar **79,23%** (Biru Muda) masuk dalam kategori **sangat baik**. Indikator sasaran program ini meliputi 4 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
4	Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA		100%	71,29	56,48	79,23
	SK8	Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA		71,23	56,32	79,08
	SK9	Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu		70,57	53,02	75,13
	SK10	Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS		72,77	61,01	83,84
	SK11	Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional		78	60,04	76,97

a. ***Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA***, dengan nilai realisasi capaian kinerja **79,08%** (Biru Muda) dan masuk dalam kategori **sangat baik.** Indikator yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 8 (SK8) ini adalah peningkatan RBO (*river basin organization*) index di lingkungan BBWS/BWS. Sebagian besar kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini sudah mencapai progres di atas 80% sebagai contoh Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air, Pengelolaan Sistem Informasi dan Data SDA, Penyusunan dan Penetapan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS, Pemberdayaan Kelembagaan SDA dan Masyarakat, Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Penyusunan Rekomendasi Teknis Bidang SDA, Penyusunan Neraca Air.

b. ***Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu,*** dengan nilai capaian kinerja **75,13%** (Biru Muda) termasuk dalam kategori **sangat baik**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator SK9 tersebut sebagian dalam tahap pelaksanaan dengan progres fisik mencapai 80% seperti pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Dukungan Penetapan Rancangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Pelaksanaan *River Basin Organization Performance Benchmarking*, Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air,



Rekomendasi Teknik Perizinan Sumber Daya Air, Penerapan PNBP BJPSDA di Pusat dan Daerah, Penyelenggaraan KPBU Bidang SDA.

c. *Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS,* dengan nilai capaian kinerja **83,84%** (Biru Muda) termasuk dalam kategori **sangat baik**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator SK10 tersebut merupakan kegiatan yang bersifat rutin di ketatalaksanaan dan program kerja BBWS/BWS mencakup kegiatan manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan negara, penatausahaan barang milik negara (BMN), administrasi kegiatan, komunikasi dan layanan publik, perawatan gedung kantor, advokasi/bantuan hukum. Sebagian kegiatan tersebut dalam tahap pelaksanaan dengan progres fisik mencapai 80%.

d. *Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional,* dengan nilai capaian kinerja **76,97%** (Biru Muda) termasuk dalam kategori **sangat baik**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator SK11 tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat Dewan SDA Nasional mencakup penyusunan konsep kebijakan dan program pengelolaan SDA Nasional serta layanan data dan informasi, dimana progres fisik rerata telah mencapai 70%.

5. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kinerja layanan irigasi"** sebesar **81,75%** (Biru Muda) masuk dalam kategori **sangat baik**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
5	Tingkat kinerja layanan irigasi		84%	64,68	52,87	81,75
	SK12	Peningkatan layanan kinerja irigasi		63,71	54,03	84,81
	SK13	Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa		85,72	27,61	32,31

a. *Peningkatan layanan kinerja irigasi*, dengan nilai capaian kinerja **84,81%** (Biru Muda) termasuk dalam kategori **sangat baik**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 12 (SK12) mencakup 3 (tiga) indikator : i) Tingkat layanan kinerja irigasi, ii) Tingkat pengembalian fungsi dan



layanan jaringan irigasi, dan iii) Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk.

Kegiatan yang mendukung tingkat layanan kinerja irigasi meliputi jaringan irigasi permukaan, rawa, tambak, JIAT, dan bendung yang dibangun. Sebagai contoh paket kegiatan yang telah mencapai progres fisik diatas 80% antara lain Pembangunan Saluran Interkoneksi DI. Osaka Kab. Rokan Hulu, Pembangunan Jaringan Utama Irigasi Bahuga D.I. Komering Paket II, Pembangunan Jaringan Irigasi Akelamo Kiri D.I. Akelamo (Tahap II), Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Akelamo 3.600 hektar (Tahap V), Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kahoho (Tahap IV), Pembangunan Daerah Irigasi Rawa Kepi-Kuti (800 hektar), D.I Rawa Mur-Linggua (850 hektar), dan Daerah Irigasi Rawa Bade II (1.400 hektar) Kab. Mappi Prov. Papua, Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong Kanan (19D) dan Kiri (19C) Kab. Garut, Pembangunan Jaringan Tata Air Tambak DIT Seruyan, Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa DR. Salim Batu Kab. Bulungan, Pembangunan Jaringan Irigasi DI Tonggauna (MYC) Kab. Kolaka Timur.

Kegiatan yang mendukung tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi permukaan, rawa, tambak, JIAT, dan bendung yang direhabilitasi/ditingkatkan. Beberapa paket kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini dan telah mencapai progres fisik mencapai 100% antara lain Rehabilitasi D.I.R Barambai Kabupaten Barito Kuala, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I. Air Manjunto Kab. Mukomuko, Rehabilitasi BPP 22A DI. Mrican Kanan Kab. Kediri, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bedadung Kab. Jember, Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder DI. Rentang dari BGs.10 - BGs.24 Kab. Cirebon dan Indramayu, Rehabilitasi Bendung D.I Way Apu Sistem (Sub D.I Way Lo), Rehabilitasi Bendung dan Jaringan D.I Way Geren Kab. Buru, Rehabilitasi Bangunan Utama DI Klambu Kab. Grobogan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Aek Sibundong Tahap II Kab. Humbang Hasundutan, Rehabilitasi Jaringan Tata Air Tambak DIT Seruyan, Pembangunan/Peningkatan Rawa Tambak Tikke Kab. Mamuju Utara.



Kegiatan yang mendukung indikator tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk, diukur berdasarkan persentase kumulatif potensi penambahan luasan daerah irigasi yang diairi oleh bendungan yang selesai dibangun. Untuk Tahun 2018, target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini sama dengan target tahun 2017 sebesar 12%. Dua bendungan yang selesai dibangun pada tahun 2017 yaitu Bendungan Raknamo di Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bendungan Tanju di Kab. Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat, mempunyai potensi manfaat untuk mengairi daerah irigasi masing-masing seluas 1.250 hektar dan 2.250 hektar. Sehingga potensi daerah irigasi yang diairi oleh Bendungan bertambah dari 857.286,82 hektar (kumulatif s.d tahun 2016) menjadi 860.786,82 hektar dari total daerah irigasi yang ada 7.145.168 hektar, atau dalam bentuk persentase daerah irigasi yang diari bendungan sebesar 12,04%. Sedangkan pada tahun 2018 dari target awal 4 bendungan selesai yang mempunyai potensi untuk mengairi daerah irigasi sebagai berikut Bendungan logung (5.354 hektar), Bendungan Mila (1.689 hektar), Bendungan Rotiklot (139 hektar), dan Bendungan Sei Gong (tidak mempunyai potensi untuk mengairi daerah irigasi), diperkirakan 5 bendungan yang akan selesai pada tahun 2018 yaitu Bendungan Logung, Bendungan Mila, Bendungan Rotiklot Bendungan Sei Gong, dan Bendungan Sindang Heula, dengan masing-masing daerah irigasi yang akan dilayani antara lain DI Logung dan areal irigasi Tanju.

b. ***Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa***, dengan nilai realisasi capaian kinerja **32,31% (orange)** dan masuk dalam kategori **kurang,** perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar, Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 13 (SK13) ini antara lain terdiri atas *output* dokumen NSPK bidang irigasi dan rawa, serta *output* BBWS/BWS yang dibina dalam bidang irigasi dan rawa. Kegiatan Layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa yang merupakan kegiatan rutin untuk 34 BBWS/BWS masih dalam tahap pelaksanaan, meskipun ada beberapa pekerjaan kontraktual *multi years contract* (MYC) sebagai kegiatan



pendukung yang didanai melalui *Loan* ESP Asian Development Bank (ADB) sejumlah 10 paket kontraktual (dengan nilai Rp. 110,76 Miliar) di unit kerja Direktorat Irigasi dan Rawa yang masih dalam tahap lelang.

6. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan"** sebesar **93,92%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
6	Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan		100%	72,05	67,67	93,92
	SK14	Peningkatan kinerja layanan OP sarana dan prasarana sumber daya air		71,77	70,1	97,67
	SK15	Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA		78,34	14,85	18,95

a. *Peningkatan kinerja layanan OP sarana dan prasarana sumber daya air*, dengan nilai capaian kinerja **97,67% (Biru tua)** termasuk dalam kategori **memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 14 (SK14) mencakup 5 (lima) indikator : i) Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku; ii) Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air; iii) Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air; iv) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi; v) Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA.

Indikator terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku didukung oleh *output* kegiatan sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara, embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara, unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara. Pada akhir triwulan III, beberapa kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana penyediaan air baku telah mencapai progres fisik 100%, antara lain Pemeliharaan Berkala Embung Langsat Besar Kab. Tanah Laut, Pemeliharaan Berkala Air Baku Rambah Samo dan Air Baku Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu, Pemeliharaan Rutin Embung Bira-Bira Kab. Jeneponto, Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Baku Bili-Bili dan Parangloe Kab. Gowa.



Indikator terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air didukung oleh *output* kegiatan bendungan yang dioperasikan dan dipelihara, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara, dan danau yang dipelihara. Hingga akhir triwulan III, sebagian besar kegiatan rehabilitasi, rencana tindak darurat dan pemeliharaan bendungan, embung dan penampung lainnya telah menunjukkan progres diatas 85%, antara lain Rehabilitasi Bendungan Ketro Kab. Sragen, Pemeliharaan Berkala Bendungan Wilayah Madiun, Pemeliharaan Berkala Embung Bengawan Solo Hilir, Pemeliharaan Berkala Situ Babakan Kecamatan Gunung Putri, Operasi dan Pemeliharaan Danau Tondano, Pemeliharaan Rutin Embung Sebatik Kab. Nunukan, dan Pemeliharaan Berkala Bendungan Sermo 2.

Indikator terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air didukung oleh *output* kegiatan tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara, kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara, stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara, polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara, sungai yang dipelihara, bangunan sabo yang dipelihara, *check dam* yang dioperasikan dan dipelihara, *breakwater/seawall* dan bangunan penampang pantai lainnya yang dipelihara. Hingga akhir triwulan III capaian kinerja indikator sasaran kegiatan ini sebagian besar telah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan progres fisik diatas 80% bahkan beberapa mencapai 100%, antara lain Pemeliharaan *Long Storage* Kabupaten Merauke, Pemeliharaan Berkala Tanggul Sungai Citanduy DI Wadas Jontor, Pemeliharaan Sungai Putih Kota Medan, Pemeliharaan *Medan Flood Control* 10.000 hektar Kota Medan, Pemeliharaan Berkala Tanggul/Tebing Sungai Bengawan Solo Hilir, Pemeliharaan Rutin Pengaman Pantai Kubu Kab.Kotawaringin Barat, Pemeliharaan Berkala Pantai Loban, Pemeliharaan Berkala *Check dam* Waduk Manggar Kota Balikpapan.

Indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi didukung oleh *output* kegiatan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat dan daerah yang dioperasikan dan dipelihara, jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara, jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara, jaringan

irigasi air tanah (JIAT) yang dioperasikan dan dipelihara, bendung irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara, sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara, serta kawasan rawa yang dipelihara. Kegiatan operasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan perbaikan hampir seluruhnya telah mencapai 100%.

Indikator terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA meliputi *output* unit pengelola irigasi, unit pengelola bendungan, alokasi air yang disusun, kegiatan tanggap darurat bencana, dan peralatan/fasilitasi pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara. Progres pelaksanaan penyusunan alokasi air, dan pemeliharaan fasilitas pendukung OP telah mencapai 100%.

b. ***Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA,*** dengan nilai capaian kinerja **18,95% (merah)** termasuk dalam kategori **sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 15 (SK15) mencakup dokumen NSPK bidang operasi dan pemeliharaan, BBWS/BWS yang dibina dalam bidang OP infrastruktur SDA, pemda yang dibina dalam bidang OP infrastruktur SDA, peralatan pendukung OP, dan layanan tanggap darurat akibat bencana. Keterlambatan progres diakibatkan beberapa kegiatan kontraktual jasa konsultan dengan sumber pendanaan PHLN yang mendukung program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) seperti Pemetaan LIDAR, dan yang mendukung program DOISP (*Dam Operational Improvement and Safety Project*) seperti konsultan CPIU (*Central Project Implementing Unit*), CPMU (*Central Project Manajement Unit*), dan CDMU (*Central Dam Monitoring Unit*) belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses penyesuaian AWP (*Annual Work Plan*).

7. Capaian kinerja indikator pada level ***Learning and growth*** yaitu **"Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA"**



sebesar **40,23%** (Oranye) masuk dalam kategori **kurang,** perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar.

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
7	**Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA**		100%	90,6	36,4	40,23
	SK16	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (SDA)		90,56	36,43	40,23

Indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan 16 (SK16) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air berupa Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA. Keterlambatan pencapaian kinerja pada indikator ini disebabkan paket pekerjaan kontraktual yang mendukung program IPDMIP melalui dana PHLN dari Asian Development Bank (ADB) berupa konsultan manajemen proyek yaitu Konsultan Program Manajemen Nasional, Konsultan Nasional Monitoring dan Verifikasi, serta Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi Pai Iksi Berbasis Web Dan Android yang masih dalam tahap proses lelang hingga akhir triwulan III.

8. Capaian kinerja indikator pada level *Learning and growth* yaitu **"Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya"** sebesar **62,69%** (Ungu) masuk dalam kategori **cukup (memadai),** perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
8	**Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya**		100%	73,9	46,3	62,69
	SK17	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)		73,87	46,31	62,69

Indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan 17 (SK17) yang dijalankan oleh Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air berupa Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya merupakan kegiatan non fisik berupa pembinaan teknis kepegawaian, manajemen keuangan, pengelolaan barang milik negara, bantuan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan komunikasi publik.

B. Sasaran Program Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo

9. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo"** sebesar **100,31%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan III		
				RN	RL	Kinerja
1	Tingkat layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo		90%	64,92	65,12	100,31
	SK18	Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo		74,41	26	34,94
	SK19	Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo		63,01	73	115,85

a. *Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo* dengan nilai capaian kinerja **34,94%** (Oranye) termasuk dalam kategori **kurang,** perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 18 (SK18) mencakup 4 (empat) *output* kegiatan yaitu: i) NSPK pengendalian lumpur; ii) layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo; iii) Dampak sosial yang ditangani; iv) layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini masuk dalam kategori kurang, dampak sosial yang ditangani berupa pekerjaan Pengadaan Tanah dan Bangunan di luar PAT terkendala karena tidak adanya payung hukum/regulasi yang mengatur paska dicabutnya Perpres No. 33 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Perpres No.14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, terdapat juga kendala terkait penolakan warga untuk menjual tanah (UU No. 2 tahun 2012).

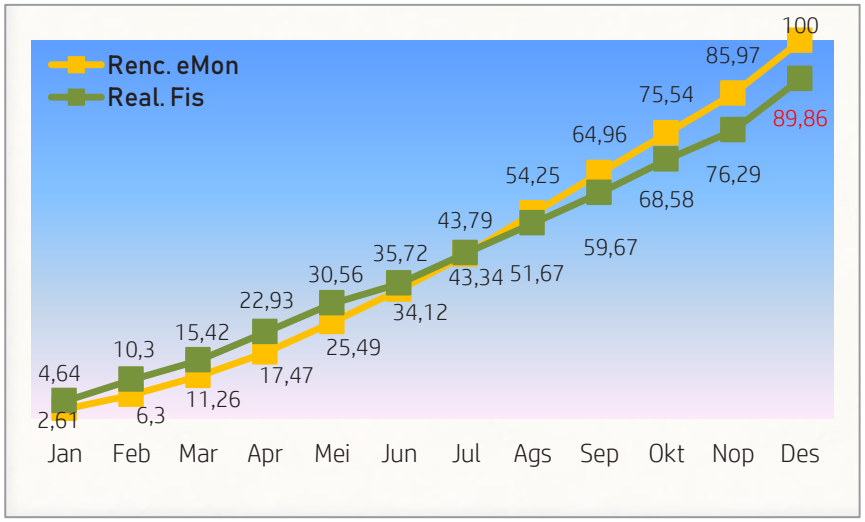
b. *Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo* dengan nilai capaian kinerja **115,85%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 19 (SK19) mencakup 5 (lima) indikator : i) tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo; ii) tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo; iii) terjaganya fungsi layanan sarana prasrana pengendali lumpur Sidoarjo; iv) teralirkannya



luapan lumpur ke Kali Porong; v) tertatanya kawasan diluar PAT. Sebagian besar paket pekerjaan yang mendukung indikator sasaran kegiatan (SK19) telah menunjukkan progres fisik yang cukup memuaskan, kecuali untuk kegiatan yang mendukung terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo berupa OP Rutin Sarana Prasarana Tanggul dan Waduk, Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala Sarana dan Prasarana Drainase dan Lingkungan, serta Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala Sarana Prasarana Tanggul dan Waduk progres fisik masih rendah.

4.1.5 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan IV

Sampai dengan akhir Triwulan IV, realisasi progres fisik pelaksanaan anggaran tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air sebesar 89,86 %, dan realisasi keuangan 86,76%, sementara target capaian fisik 100,00 % dan rencana penyerapan keuangan sebesar 100,00%, sehingga terdapat deviasi progres fisik sebesar –10,14% dan deviasi progres keuangan sebesar -13,24%. Deviasi negatif antara realisasi dan rencana fisik dan keuangan masing-masing cukup tinggi yakni >10%. Gambar 4.7 memperlihatkan grafik perbandingan antara progres fisik dan realisasi penyerapan keuangan secara menyeluruh Ditjen Sumber Daya Air pada akhir Triwulan IV TA 2018.



Gambar 4.7 Kurva S Progres Fisik Triwulan IV



Total paket kontraktual hingga akhir Triwulan IV sebanyak 3.553 paket senilai Rp. 30,049 Triliun, yang terdiri dari :

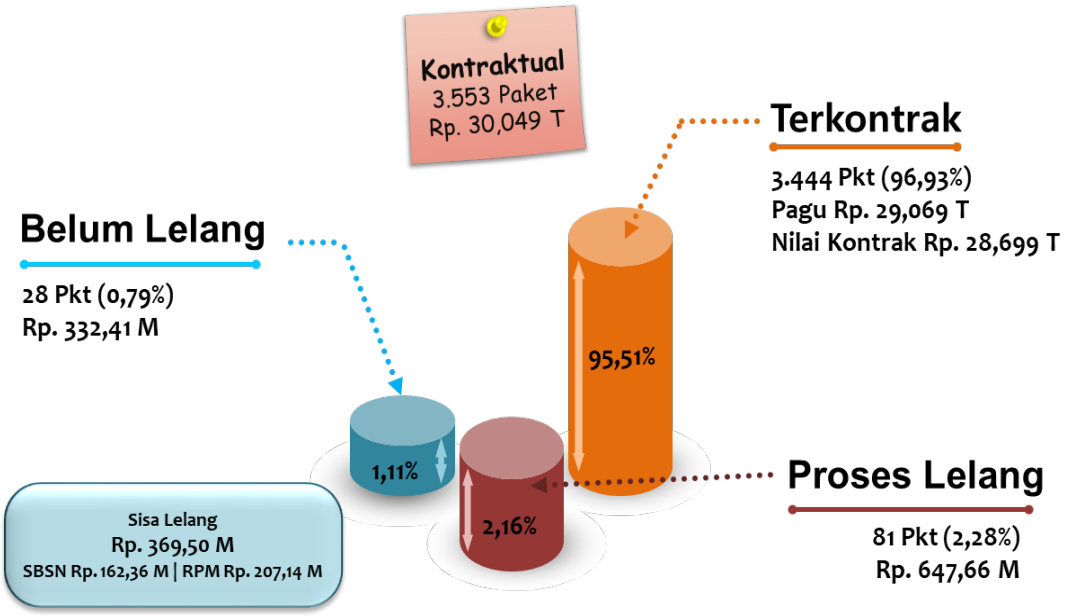
a. 3.444 Paket senilai Rp. 28,70 Triliun (96,93%) sudah terkontrak,
b. 81 Paket senilai Rp. 647,66 Miliar (2,16%) masih proses lelang,
c. 28 Paket senilai Rp. 332,41 Miliar (0,79%) belum lelang.
d. Sisa lelang senilai Rp. 369,50 Miliar, terdiri dari Rp. 162,36 Miliar SBSN dan Rp. 207,14 Miliar Rupiah Murni.

Secara umum paket yang belum lelang tidak akan terserap antara lain disebabkan tanah belum siap, desain belum siap, menunggu studi dan reviu desain selesai, adanya penolakan warga, AWP tidak sesuai, dan terkendala belum adanya *Loan agreement*.

Progres pelaksanaan paket-paket kontraktual hingga akhir Triwulan IV disajikan dalam Tabel 4.7 dan Gambar 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Progres Paket Kontraktual Triwulan IV

Kontraktual	Paket	Pagu	Realisasi Keuangan	%
Total Kontraktual	**3.553**	**30.049,32**	**26.138,33**	**91,09**
a. Tahunan	2.868	7.552,75	7.112,51	99,99
b. MYC Baru	232	1.865,36	776,77	80,04
c. MYC Lanjutan	453	20.611,21	18.249,05	88,54
Tahunan	**2.868**	**7.572,75**	**7.112,51**	**99,99**
a. Terkontrak	2.844	7.113,03	7.112,51	99,99
b. Proses Lelang	14	48,15		
c. Belum Lelang	10	42,06		
d. Sisa Lelang		369,50		
MYC Baru	**232**	**1.865,36**	**776,77**	**80,04**
a.Terkontrak	147	975,51	776,77	80,04
b.Proses Lelang	67	599,51		
c. Belum Lelang	18	290,34		
d. Sisa Lelang		-		
MYC Lanjutan	**453**	**20.611,21**	**18.249,05**	**88,54**
a.Terkontrak	453	20.611,21		88,54
b.Proses Lelang		-		
c. Belum Lelang		-		



Gambar 4.8 Status Paket Kontraktual s.d Triwulan IV

Hingga Triwulan IV terdapat 28 paket kontraktual yang belum lelang, 4 paket dilanjutkan (1 paket tahunan atau *Single Years Contract* (SYC), senilai Rp. 583 juta dan 3 paket tahun jamak atau *Multi Years Contract* (MYC),senilai Rp. 98,79 Miliar). Sisanya sebanyak 24 paket belum lelang tidak akan dilanjutkan, senilai Rp. 233,03 Miliar yang terdiri dari 8 paket dengan pagu Rp. 8,12 Miliar sumber dana rupiah murni, dan 16 paket dengan pagu Rp. 224,92 Miliar sumber dana PHLN.

Sebagaimana kinerja Triwuan III, maka kinerja triwulan IV juga mengacu pada perubahan peta strategi hasil reviu paruh waktu Rencana Strategis 2015-2019, dimana capaian kinerja Triwulan III diukur untuk 2 (dua) Sasaran Program dengan 7 (tujuh) indikator Sasaran Program, dan 19 Sasaran Kegiatan dengan membandingkan antara realisasi/capaian kinerja dengan target/rencana kinerja disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8 menunjukkan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran program. Sampai dengan Triwulan IV, total realisasi capaian kinerja Sasaran Program sebesar **88,72% (Memuaskan)**, dimana realisasi capaian indikator kinerja sebesar **88,67%** dari rencana capaian indikator kinerja sebesar **99,94%.**



BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 4.8 Capaian Indikator Kinerja Triwulan IV

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM			% TARGET PER INDIKATOR SP	Target Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
SS2.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi		87,11%			
SP2	**Meningkatnya Ketahanan Air**		**87%**	**99,94**	**88,63**	**88,68**
1	**Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku**		**85%**	**100,00**	**95,87**	95,87
	SK1	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku		100,00	95,96	**95,96**
	SK2	Peningkatan Layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku		100,00	21,35	21,35
2	**Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air**		**80%**	**100,00**	**89,04**	**89,04**
	SK3	Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air		100,00	89,06	**89,06**
	SK4	Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya		100,00	57,49	**57,49**
	SK5	Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan		100,00	81,88	**81,88**
3	**Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak**		**90%**	**99,64**	**90,39**	**90,71**
	SK6	Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak		99,66	90,53	**90,83**
	SK7	Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai		90,00	26,33	29,26
4	**Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA**		**100%**	**100,00**	**93,53**	**93,53**
	SK8	Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA		100,00	93,74	**93,74**
	SK9	Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu		100,00	75,38	**75,38**
	SK10	Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS		100,00	93,99	**93,99**
	SK11	Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional		100,00	96,60	**96,60**
5	**Tingkat kinerja layanan irigasi**		**84,0%**	**100,00**	**82,09**	**82,09**
	SK12	Peningkatan layanan kinerja irigasi		100,00	84,53	**84,53**
	SK13	Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa		100,00	28,89	**28,89**
6	**Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan**		**100%**	**100,69**	**94,49**	**93,84**
	SK14	Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air		100,72	97,02	**96,32**
	SK15	Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA		100,00	39,08	39,08
Learning & Growth :						
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA			**100%**	**100**	**98,83**	**98,83**
	SK16	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA		100	98,83	**98,83**
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya			**100%**	**100**	**83,71**	**83,71**
	SK17	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)		100	83,71	**83,71**
SP3	**Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo**		**90,50%**	**100,00**	**91,76**	**91,76**
1	**Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo**		**90%**	**100,00**	**91,04**	**91,04**
	SK18	Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur sidoarjo		100,00	51,32	51,32
	SK19	Peningkatan layanan sarana dan prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo		100,00	99,03	99,03
Learning & Growth :						
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA			**100%**	**100**	**98,83**	**98,83**
	SK16	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA		100	98,83	**98,83**
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya			**100%**	**100**	**83,71**	**83,71**
	SK17	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (PPLS)		100	83,71	**83,71**
Total				**99,94**	**88,67**	**88,72**
Deviasi						- 11,27

A. Sasaran Program Meningkatnya Ketahanan Air

1. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku"** sebesar **95,87%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
1	**Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku**		**85%**	**100**	**95,87**	**95,87**
	SK1	Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku		100	95,96	**95,96**
	SK2	Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku		100	21,35	21,35



a. *Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku*, dengan nilai capaian kinerja **95,96%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **Memuaskan**. Sasaran kegiatan ini mencakup 2 indikator yaitu : i) tingkat layanan sarana dan prasarana air baku yang meliputi pekerjaan sumur air tanah untuk air baku yang dibangun, embung air baku yang dibangun, unit air baku yang dibangun; dan indikator ii) tingkat pengembalian fungsi debit dan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula, meliputi pekerjaan sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi, embung air baku yang direhabilitasi, dan unit air baku yang direhabilitasi. Sasaran kegiatan ini merupakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku yang dilaksanakan di BBWS/BWS. Komponen kegiatan yang mendukung capaian ini berupa beberapa paket pekerjaan yang telah mencapai progres yang signifikan antara lain Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Sampit, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pulau Pandan Kota Jambi, Pembangunan Prasarana Pengambilan Air Tanah Untuk Air Baku Kab. Sarolangun, Rehabilitasi Sumur Bor Kabupaten Gunung Mas, Rehabilitasi JIAT Perpipaan di Kabupaten Karangasem.

Hingga akhir triwulan IV ada beberapa kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja tidak mencapai 100%, antara lain paket pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Penyediaan Air Baku Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen Papua sebagai akibat atas perubahan lokasi dari semula yang akan dikerjakan di Distrik Nimbokrang Jayapura karena terkendala adanya penolakan masyarakat namun proses revisi DIPA pemanfaatan sisa lelang tidak mendapat persetujuan Kementerian Keuangan sehingga tidak dapat dilaksanakan, Pembangunan Embung dan Jaringan Transmisi Air Baku Aji Raden Kota Balikpapan yang terkendala lahan belum bebas, kendala pengadaan lahan untuk area genangan juga terjadi pada paket pekerjaan Air Baku Embung Sebatik, dan keterlambatan proses revisi DIPA pemanfaatan sisa lelang (PSL) pada paket Pembangunan Intake Air Baku Ogan II Kota Palembang.

b. *Peningkatan layanan pembinaan bidang air baku dan air tanah*, dengan nilai capaian kinerja **21,35%** (Merah) masuk dalam kategori **Sangat Kurang,** perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku sebagai program rutin unit kerja telah berjalan untuk 34 BBWS/BWS dengan capaian 100%, meskipun demikian ada kegiatan penunjang berupa kontraktual jasa konsultan yang mempengaruhi capaian progres yang rendah yaitu kegiatan ESP (*Engineering Service Project*) : *Master plan of Sustainable Raw Water Supply Sistem*, yang masih dalam proses lelang hingga akhir triwulan IV.

2. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air"** sebesar **89,04%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 3 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
2	**Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air**		**80%**	**100**	**89,04**	**89,04**
	SK3	Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air		100	89,06	89,06
	SK4	Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya		100	57,49	57,49
	SK5	Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan		100	81,88	81,88

a. *Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air*, dengan nilai capaian kinerja **89,06%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada sasaran kegiatan 3 (SK3) ini terdiri atas indikator : i) tingkat kapasitas tampung sumber air yang meliputi pekerjaan bendungan yang selesai dibangun pada tahun eksisting, bendungan baru yang dibangun, bendungan dalam tahap pelaksanaan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun; indikator ii) tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula, yang meliputi pekerjaan bendungan yang direhabilitasi, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi, dan danau yang direvitalisasi; dan indikator iii) tingkat potensi energi sumber air, meliputi pekerjaan bendungan yang selesai pada tahun berjalan. Untuk pekerjaan pembangunan 34 (tiga puluh) bendungan *on going* dalam tahap konstruksi



dan sebagian menunjukkan progres tahun anggaran yang signifikan di atas 90% baik fisik maupun keuangan, seperti pembangunan Bendungan Tugu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gondang, Bendungan Logung, Bendungan Mila, Bendungan Rotiklod, Bendungan Gongseng, Bendungan Pidekso, Bendungan Tukul, Bendungan Temef, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Karalloe, Bendungan Cipanas. Beberapa bendungan yang progresnya masih rendah terkendala pada proses pembebasan lahan (antara lain Bendungan Kreureto, Bendungan Karian, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi).

Untuk rencana 14 bendungan baru, 12 bendungan terkontrak dan akan dilaksanakan di TA 2018 terdiri dari Pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Komering II/Tiga Dihaji, Bendungan Bener, Bendungan Jlantah, Bendungan Sadawarna, Bendungan Beringinsila, Bendungan Rukoh, Bendungan Tamblang, Bendungan Bagong, Bendungan Manikin, Bendungan Meninting, dan Bendungan Randugunting. Sementara Bendungan Bolango Hulu secara proses lelang telah selesai, masih menunggu penetapan pemenang oleh Menteri PUPR dan 1 bendungan lagi yaitu Bendungan Mbay ditunda dikarenakan ada permasalahan sosial yaitu penolakan masyarakat, saat ini sedang berproses untuk pendekatan kepada masyarakat.

Selanjutnya dari target 8 bendungan selesai di tahun 2018 dengan target total kapasitas tampung 231,65 juta m^3, pada akhir triwulan IV tercatat 5 bendungan selesai dengan total tambahan kapasitas tampung 58,54 juta m^3 yaitu Bendungan Logung, Bendungan Mila, Bendungan Rotiklot, Bendungan Sei Gong dan Bendungan Sindang Heula. Sementara 3 bendungan lainnya yaitu Bendungan Kuningan masih terkendala masalah lahan dan ganti rugi tegakan serta Bendungan Passeloreng dan Bendungan Gondang masih menyelesaikan pekerjaan fisik di TA 2019.

Pada akhir triwulan IV pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan tercatat 99 buah selesai dilaksanakan dengan memberikan tambahan total kapasitas tampung sebesar 14,66 juta m^3.

b. *Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya,* dengan nilai realisasi capaian Kinerja **57,49%** (ungu) masuk dalam kategori **cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 4 (SK4) ini terdiri atas indikator layanan pembinaan bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Bendungan sebagai program rutin telah berjalan untuk 34 BBWS/BWS dengan capaian 100%, Namun demikian, terdapat pekerjaan penunjang berupa paket pekerjaan kontraktual dimana besaran pagunya sebesar 55% dari total pagu satuan kerja Pusat Bendungan dan dilaksanakan sebagai kontrak tahun jamak, yang progres pelaksanaannya masih di bawah 50% yaitu *Consultant Firm for Preparation of Jragung Multipurpose Dam Project*.

c. *Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan,* dengan nilai realisasi capaian kinerja **81,88%** (Biru Muda), masuk dalam kategori **sangat baik.** Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 5 (SK5) ini antara lain terdiri atas indikator NSPK teknis keamanan bendungan, rencana dan program kerja Balai Bendungan, dan layanan teknis keamanan bendungan. Kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagian besar menunjukkan progres capaian yang cukup signifikan. Capaian kinerja secara total tidak dapat 100% beberapa diantaranya merupakan kegiatan pendampingan DOISP II yang baru akan dilaksanakan di 2019, sedangkan kegiatan lain yang sifatnya *soft* komponen dan rutin yang mendukung layanan pembinaan bidang keamanan bendungan telah berjalan 100%.

3. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak"** sebesar **90,71%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
3	Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak		90%	99,64	90,39	90,71
	SK6	Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak		99,66	90,53	90,83
	SK7	Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai		90	26,33	29,26



a. *Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak,* dengan nilai capaian Kinerja **90,83%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**, Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 6 (SK6) mencakup 2 (dua) indikator : i) Tingkat luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, terdiri atas jumlah kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun, jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dibangun, dan jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dibangun. Indikator ii) Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, terdiri atas jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi, jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi, dan jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi. Hampir seluruh kegiatan baik yang sifatnya *multi years contract* (MYC) dengan pendanaan melalui SBSN seperti Pengendalian Banjir Sungai Palu Paket I dan Paket II Kab. Sigi, beberapa paket pekerjaan lanjutan seperti Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani (lanjutan) Kab. Lampung Timur, Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Miangas Paket I (Lanjutan) Kab. Kep. Talaud, Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Onggunoi Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pembangunan Pengendali Banjir Air Payang dan Air Jerinjing Anak Air Selagan Kabupaten Mukomuko, Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Belanting di Kabupaten Lombok Timur, Pengendalian banjir sungai Iray Kab. Pegunungan Arfak, Pembangunan *Check dam* Cisuru Kec. Cipari telah mencapai progres 100%. Begitu juga halnya dengan kegiatan rehabilitasi juga sudah mencapai progres fisik yang signifikan mencapai 100% sebagai contoh Rehabilitasi dan rekonstruksi sabo dam Merapi Kali Woro Kab. Klaten, Rehabilitasi Pengamanan Pantai di Kepulauan Nusa Penida Kab. Klungkung, Rehabilitasi Terowongan Puncak Gunung Kelud dan Jalan Inspeksi Kab Kediri.

Hingga akhir triwulan IV masih ada beberapa paket pekerjaan *multi years contract* (MYC) baru yang belum dilakukan pelelangan, antara lain Sentiong - Ancol Pump Station (terkendala perpanjangan *Loan* JUFMP World Bank), *Engineering Service for Bangka Island Flood Management Subproject* Kota Pangkal Pinang, *Engineering Service for Siak River Basin Flood Management Project in Riau Province* Kota Pekanbaru, *Engineering Service for Batam and Bintan Islands Flood Management Sub Project in Kepulauan Riau, Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2)* (masih dalam proses persetujuan REOI dan RFP dari EDCF), *Preparation of Deli-Percut-Belawan River Basin Flood Management Project in North Sumatera Province* dan *Preparation Seputih-Tulang Bawang River Basin Flood Management Project in Lampung Province* (*Loan* ESP, menunggu *No Objection Letter*/NOL dari Asian Development Bank/ADB), FFWS For BWS Maluku (belum dapat dilaksanakan, karena menunggu hasil studi selesai dilaksanakan).

Beberapa kegiatan lain yang bersifat *multi years contract* dan bersumber dari pendanaan PHLN dan belum dapat dilaksanakan hingga akhir triwulan IV antara lain Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu (*Package A1-River Improvement & Construction of River Structures of Citarum Upstream*) Kab. Bandung terkendala permasalahan lahan menunggu hasil appraisal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sub Component 2 D.Civil works (Priority work - Batu Merah *Check dam* Petra) Kota Ambon masih dalam proses lelang, dan *Engineering Services For Cipungara River Basin Management Sub Project In West Java Province* Kab Subang terkendala karena *Loan* EDCF INA-22 belum efektif.

Kegiatan dengan progres <30% untuk *multi years contract* antara lain Pembangunan *Floodway Cisangkuy* di Kab. Bandung (Paket I) terkendala lahan, Perkuatan *Arriving Shaft* Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Peningkatan Turap Sungai Sesayap Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

b. ***Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai***, dengan nilai realisasi capaian kinerja **29,26%** (merah) dan masuk dalam kategori **sangat kurang,** perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat



mendasar. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 7 (SK7) ini antara lain terdiri atas *output* dokumen NSPK bidang sungai dan pantai, serta *output* BBWS/BWS yang dibina dalam bidang sungai dan pantai. Kegiatan yang mendukung indikator tersebut berupa layanan pembinaan bidang sungai dan pantai yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Sungai dan Pantai sebagai program rutin telah berjalan untuk 34 BBWS/BWS dengan capaian 100%, Namun demikian, terdapat pekerjaan penunjang berupa paket pekerjaan kontraktual jasa konsultansi yang direncanakan untuk pendampingan kegiatan fisik di lapangan baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun PHLN berupa *engineering service project* (ESP) masih 0% karena keterlambatan proses pelelangan untuk paket-paket fisiknya sehingga kegiatan konsultansi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini juga tidak dapat berjalan.

4. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA"** sebesar **93,53%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 4 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
4	**Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA**		**100%**	**100**	**93,53**	**93,53**
	SK8	Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA		100	93,74	**93,74**
	SK9	Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu		100	75,38	**75,38**
	SK10	Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS		100	93,99	**93,99**
	SK11	Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional		100	96,60	**96,60**

a. ***Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA***, dengan nilai realisasi capaian kinerja **93,74%** (Biru Tua) dan masuk dalam kategori **memuaskan.** Indikator yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 8 (SK8) ini adalah peningkatan RBO (*River Basin Organization*) indeks di lingkungan BBWS/BWS. Sebagian besar kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini sudah selesai dilaksanakan sebagai contoh Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air, Pengelolaan Sistem Informasi dan Data SDA, Penyusunan dan Penetapan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS, Pemberdayaan

Kelembagaan SDA dan Masyarakat, Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Penyusunan Rekomendasi Teknis Bidang SDA, Penyusunan Neraca Air. Kegiatan yang mendukung capaian sasaran kegiatan (SK8) merupakan kegiatan yang bersifat *soft component* yang dilaksanakan secara swakelola, beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyebaran informasi pola/rencana PSDA mempunyai progres rendah karena terkendala harus menunggu penetapan pola/rencana. Mekanisme pelaksanaan kegiatan RBO performance pada tahun 2018 dilaksanakan terpusat oleh pembina pada satu waktu dan satu lokasi, BBWS/BWS tidak perlu mengagendakan sendiri pelaksanaannya, hal ini menyebabkan efisiensi pelaksanaan baik dari sisi waktu, biaya dan sumber daya manusia.

b. ***Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu,*** dengan nilai capaian kinerja **75,38%** (Biru Muda) termasuk dalam kategori **sangat baik**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator SK9 tersebut sudah dalam proses penyelesaian pekerjaan seperti pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Dukungan Penetapan Rancangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Pelaksanaan *River Basin Organization Performance Benchmarking*, Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air, Rekomendasi Teknik Perizinan Sumber Daya Air, Penerapan PNBP BJPSDA di Pusat dan Daerah, Penyelenggaraan KPBU Bidang SDA. Kendala dari beberapa jenis pekerjaan meskipun tidak secara langsung mendukung ouput layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu yang mempengaruhi pencapaian kinerja SK9 terkait Penyusunan Naskah Akademik Pedoman Rencana PSDA yang belum selesai karena pembahasan yang cukup memakan waktu, kegiatan Dukungan Finalisasi Rancangan Undang-Undang Bidang SDA juga tidak dapat mencapai fisik 100% terkendala pada jadwal pembahasan yang sangat tergantung dengan Komisi V DPR RI, hal ini berimplikasi pada kegiatan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan SDA (dalam bentuk PP) yang baru dapat dilaksanakan jika RUU SDA telah disahkan menjadi UU.



c. *Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS,* dengan nilai capaian kinerja **93,99%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator SK10 tersebut merupakan kegiatan yang bersifat rutin diketatalaksanaan dan program kerja BBWS/BWS mencakup kegiatan manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan negara, penatausahaan barang milik negara (BMN), administrasi kegiatan, komunikasi dan layanan publik, Perawatan gedung kantor, advokasi/bantuan hukum. Kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan SK10 merupakan kegiatan swakelola, yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan untuk operasional rutin.

d. *Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional,* dengan nilai capaian kinerja **96,60%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator SK11 tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat Dewan SDA Nasional mencakup penyusunan konsep kebijakan dan program pengelolaan SDA Nasional serta layanan data dan informasi, dimana progres fisik rerata telah mencapai 96%.

5. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kinerja layanan irigasi"** sebesar **82,09%** (Biru Muda) masuk dalam kategori **sangat baik**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
5	**Tingkat kinerja layanan irigasi**		**84%**	**100**	**82,09**	**82,09**
	SK12	Peningkatan layanan kinerja irigasi		100	84,53	84,53
	SK13	Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa		100	28,89	28,89

a. *Peningkatan layanan kinerja irigasi*, dengan nilai capaian kinerja **84,53%** (Biru Muda) termasuk dalam kategori **sangat baik**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 12 (SK12) mencakup 3 (tiga) indikator : i) Tingkat layanan kinerja irigasi, ii) Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi, dan iii) Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk.



Kegiatan yang mendukung tingkat layanan kinerja irigasi meliputi jaringan irigasi permukaan, rawa, tambak, JIAT, dan bendung yang dibangun. Capaian kinerja SK12 meskipun termasuk dalam kategori sangat baik, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa paket pekerjaan dengan sumber dana PHLN yang ditunda pelaksanaannya karena menunggu review desain oleh *consulting services* antara lain IP 574 - JICA terdiri dari 4 paket yaitu *Package 1 Perjaya Headworks, Komering Main Canal, Lempuing Secondary Canal(Section-3),Lempuing Sub Secondary Canal and Tertiary Development (Blok G and H) Kab.OKU Timur, Package 2 Belitang Secondary Canal (BB.0-BB.15), Lempuing Sub-Secondary Canal and tertiary Development (Block I and J), Package 3 Belitang Secondary Canal (BB.0-BB.25), Lempuing Sub Secondary Canal and tertiary Development (Block K), Package 4 Procurement of OM Equipment)*, *Loan* URSIS Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Sragi I ditunda karena belum ada *Loan agreement*, Pembangunan Jaringan irigasi D.I Bintang Bano Kab. Sumbawa Barat (Paket II) dan supervisinya, baru terkontrak pada bulan Desember 2018, sehingga belum ada realisasi fisik, Pembangunan Jaringan irigasi DI Bintang Bano Kab. Sumbawa Barat (Paket I, Paket III, Paket IV) dan supervisinya belum terkontrak karena surat ijin *multi years contract*nya belum keluar, Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier DI. Leuwigoong Kanan Kab. Garut dan supervisinya, tidak dapat dilaksanakan karena alokasi pendanaan dalam DIPA 2018 tidak mencukupi sehingga ditunda tahun anggaran 2019, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Asai Kab. Sarolangun (MYC) Paket I mengalami gagal lelang sehingga harus lelang ulang, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Asai Kab. Sarolangun (MYC) Paket II dan Paket III baru terkontrak pada akhir Desember 2018 sehingga progres capaian fisik masih rendah.

Kegiatan yang mendukung tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi permukaan, rawa, tambak, JIAT, dan bendung yang direhabilitasi/ditingkatkan. Beberapa paket kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini dan telah mencapai progres fisik mencapai 100% antara lain Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I Air Manjunto Kab. Mukomuko,



Rehabilitasi BPP 22A D.I Mrican Kanan Kab. Kediri, Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa DR. Suliliran Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder D.I Rentang dari BGs.10 - BGs.24 Kab. Cirebon dan Indramayu, Rehabilitasi Bendung D.I Way Apu Sistem (Sub D.I Way Lo), Rehabilitasi Bendung dan Jaringan D.I Way Geren Kab. Buru, Rehabilitasi Bangunan Utama D.I Klambu Kab. Grobogan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aek Sibundong Tahap II Kab. Humbang Hasundutan, Rehabilitasi Jaringan Tata Air Tambak DIT Seruyan.

Paket-paket kegiatan yang mendukung indikator tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi permukaan, rawa, tambak, JIAT, dan bendung yang direhabilitasi/ditingkatkan, terdapat paket kegiatan yang pendanaannya melalui program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project*) berupa rehabilitasi jaringan yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu kegiatan SID selesai, antara lain Rehabilitasi D.I Mentawa Kab. Banggai, D.I Lakbok Utara Kab. Ciamis, D.I Manganti Sidareja Kab. Cilacap, D.I Mrican Kab. Jombang, D.I Ciliman Kab. Pandeglang, D.I Cibaliung Kab. Pandeglang, D.I Air Lakitan Kab. Musi Rawas, D.I Karang Agung Tengah Kab Musi Banyuasin, D.I Waduk Wadaslintang Kab. Kebumen, D.I Cipanas II Kab. Indramayu, D.I Pelaparado Kab. Bima, D.I Rababaka Kompleks di Kab. Dompu, D.I Panti Rao di Kab. Pasaman, D.I Batang Bayang di Kab. Pasaman Barat, D.I Dataran Kotamobagu Kota Manado, D.I. Saddang Kab. Pinrang, DIR Belanti I & II Kab. Banjar, D.I Cikaranggeusan Kab. Sukabumi, D.I. Wae Dingin Kab. Manggarai Timur, D.I Panti Rao Kab. Pasaman.

Selain paket-paket IPDMIP tersebut diatas ada paket pekerjaan peningkatan modernisasi irigasi Rentang (*multi years contract*) melalui pendanaan *Loan* JICA IP 573 belum dapat dilaksanakan karena masih proses lelang yaitu *ICB Package LMS-01 Rentang Barrage and Cipelang Main Canal, ICB Package LMS-02 Utara Main Canal, ICB Package LMS-03 Barat Main Canal, ICB Package LSS-02 Secondary Canals and Drains Upgrading Works Left Bank II, ICB Package LSS-03 Secondary Canals and Drains Upgrading Works Left Bank III, ICB*



Package LSS-04 Secondary Canals and Drains Upgrading Works Left Bank IV , ICB Package LSS-05 Secondary Canals and Drains Upgrading Works Left Bank V, ICB Package LSS-06 Secondary Canals and Drains Upgrading Works Left Bank VI, ICB Package LSS-08 Secondary Canals and Drains Upgrading Works Left Bank VIII, dan Consulting Services Rentang Irrigation Modernization Project .

Kegiatan yang mendukung indikator tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk, diukur berdasarkan persentase kumulatif potensi penambahan luasan daerah irigasi yang diairi oleh bendungan yang selesai dibangun. Untuk Tahun 2018, target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini sama dengan target tahun 2017 sebesar 12%. Dua bendungan yang selesai dibangun pada tahun 2017 yaitu Bendungan Raknamo di Kab. Kupang Provinsi NTT dan Bendungan Tanju di Kab. Dompu Provinsi NTB, mempunyai potensi manfaat untuk mengairi daerah irigasi masing-masing seluas 1.250 hektar dan 2.250 hektar. Sehingga potensi daerah irigasi yang diairi oleh Bendungan bertambah dari 857.286,82 hektar (kumulatif s.d tahun 2016) menjadi 860.786,82 hektar dari total daerah irigasi yang ada 7.145.168 hektar, atau dalam bentuk persentase daerah irigasi yang diari bendungan sebesar 12,04%. Sedangkan pada tahun 2018 dari target Perjanjian Kinerja (revisi) 4 bendungan selesai yang mempunyai potensi untuk mengairi daerah irigasi sebagai berikut Bendungan logung, Bendungan Mila, Bendungan Rotiklot dan Bendungan Sei Gong, hingga akhir triwulan IV terdapat 5 bendungan yang selesai pada tahun 2018 yaitu Bendungan Logung (5.354 hektar), Bendungan Mila (1.689 hektar), Bendungan Rotiklot (139 hektar), Bendungan Sei Gong (tidak mempunyai potensi irigasi), dan Bendungan Sindang Heula (1.289 hektar), dengan daerah irigasi yang akan dilayani antara lain D.I Logung dan areal irigasi Tanju. Penambahan potensi daerah irigasi yang diairi bendungan bertambah dari 860.786,82 hektar (kumulatif s.d tahun 2017) menjadi 869.257,82 hektar dari total daerah irigasi yang ada 7.145.168 hektar, atau dalam bentuk persentase daerah irigasi yang diari bendungan sebesar 12,16%.



b. ***Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa***, dengan nilai realisasi capaian kinerja **28,89% (merah)** dan masuk dalam kategori **sangat kurang,** perlu banyak sekali perbaikan termasuk perubahan yang sangat mendasar. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 13 (SK13) ini antara lain terdiri atas *output* dokumen NSPK bidang irigasi dan rawa, serta *output* BBWS/BWS yang dibina dalam bidang irigasi dan rawa. Kegiatan Layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa yang merupakan kegiatan rutin telah dapat dilaksanakan untuk 34 BBWS/BWS, meskipun ada beberapa pekerjaan kontraktual *multi years contract* (MYC) sebagai kegiatan pendukung yang didanai melalui *Loan* ESP Asian Development Bank (ADB) di unit kerja Direktorat Irigasi dan Rawa yang masih dalam proses lelang yaitu *Development Of Asahan Irrigation Sistem In North Sumatera Phase-I (Asahan Labuhan Batu Utara); Development of Irrigation Sistem in Asahan Phase - 2 (Asahan Labuhan Batu Utara); Development Of Irr. Sistem In Sentra Ekonomi Pertanian Kab. Merauke Phase-I (District Kurk, Semangga, Jagebob, Tanah Miring) Papua Merauke; Development Of Irr. Sistem In Sentra Ekonomi Pertanian Kab. Merauke Phase-Ii (District Kurk, Semangga, Jagebob, Tanah Miring) Papua Merauke; Development Of Irrigation Sistem In Way Sekampung Under Ipdmip Pesawan, Tulangbawang, Lampung Tengah; Development Of Irrigation Sistem In Wadaslintang Under Ipdmip Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara; Development Of Irrigation Sistem In Mrican Under Ipdmip Jombang, Jember, Kediri, Lumajang; Development Of Irrigation Sistem In Saddang Under Ipdmip Wajo, Pinrang, Sidenrang, Rappang, Bone, Soppeng; Development Of Irrigation Sistem In Walimpong And Boya (Soppeng, Bone, Wajo); Development Of Rongkong And Pelosika Irrigation Sistem In Southern Sulawesi (Luwu Utara).*

Selain itu paket-paket kontraktual dalam rangka fasilitasi pendampingan kegiatan *Loan* di sekretariat seperti NPIU *Consulting Services For Guideline Improvement* IPDMIP, NPIC *Consulting Services for Implementation* IPDMIP, NPIC *Consulting Services for* DLI *Arrangement* IPDMIP, *Consulting Services* SIMURP dan beberapa kegiatan swakelola yang mendukung project

management unit yaitu Sekretariat PIU ESP, Sekretariat PIU IPDMIP, PMU *Urgent Rehabilitation Of Strategic Irrigation For Western Region Of Indonesia* (URSIS), PMU *Rentang Irrigation Modernization Project* (RIMP), PMU *Komering Irrigation Project Phase-3*, belum dapat dilelangkan karena harus sejalan dengan kegiatan fisik di BBWS/BWS dimana hingga akhir triwulan IV tahun 2018 banyak kegiatan yang tertunda karena keterlambatan lelang.

6. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan"** sebesar **94,49%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
6	**Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan**		**100%**	**100**	**94,49**	**94,49**
	SK14	Peningkatan kinerja layanan OP sarana dan prasarana sumber daya air		100	97,02	97,02
	SK15	Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA		100	39,08	39,08

a. ***Peningkatan kinerja layanan OP sarana dan prasarana sumber daya air***, dengan nilai capaian kinerja **97,02%** (Biru tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 14 (SK14) mencakup 5 (lima) indikator : i) Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku; ii) Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air; iii) Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air; iv) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi; v) Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA.

Indikator terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku didukung oleh *output* kegiatan sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara, embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara, unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara. Pada akhir triwulan IV, kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana penyediaan air baku telah mencapai progres fisik 100%, antara lain Pemeliharaan Berkala Embung Langsat Besar Kab. Tanah Laut, Pemeliharaan Berkala Air Baku Rambah Samo dan Air Baku Pasir



Pangaraian Kab. Rokan Hulu, Pemeliharaan Rutin Embung Bira-Bira Kab. Jeneponto, Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Baku Bili-Bili dan Parangloe Kab. Gowa.

Indikator terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air didukung oleh *output* kegiatan bendungan yang dioperasikan dan dipelihara, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara, dan danau yang dipelihara. Hingga akhir triwulan IV, beberapa kegiatan rehabilitasi, rencana tindak darurat dan pemeliharaan bendungan, embung dan penampung lainnya telah menunjukkan capaian kinerja 100% antara lain Pemeliharaan Berkala Bendungan Wilayah Madiun, Pemeliharaan Berkala Embung Bengawan Solo Hilir, Pemeliharaan Berkala Situ Babakan Kecamatan Gunung Putri, Pemeliharaan Rutin Embung Sebatik Kab. Nunukan, dan Pemeliharaan Berkala Bendungan Sermo 2.

Namun ada aket-paket kegiatan yang pendanaannya melalui PHLN DOISP II belum dapat dikerjakan karena tidak sesuai dengan *Annual Work Program* (AWP) nya sehingga perlu revisi, antara lain Perbaikan dan Pergantian Instrumen Keamanan Bendungan Keuliling dan Rajui; Penyiapan Dan Penetapan Izin Operasi Bendungan Dawuhan, Ketro, Dan Gonggang; OP Bendungan Ranca Bereum Kab. Majalengka; OP Bendungan Darma Kab. Kuningan; OP Bendungan Malahayu Kab. Brebes; OP Bendungan Situ Patok Kab. Cirebon; Rehabilitasi Peralatan Hidromekanika, Elektrikal dan Instrumentasi Bendungan Sermo; Spesial Studi for Gintung Dam (Spesial Studi Bendungan Gintung); Pemasangan Instrumentasi Bendungan Cipancuh *(piezometer, surface marker, acclerograph, V-notch)*; Rehabilitasi Bendungan Mamak dan Gapit di Pulau Sumbawa; Rehabilitasi dan Remidial Bendungan Kalola dan Bili-Bili; Pola Operasi Sistem Kaskade Bendungan Djuanda, Cirata dan Saguling.

Indikator terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air didukung oleh *output* kegiatan tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara, kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara, stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara, polder/kolam retensi yang

dioperasikan dan dipelihara, sungai yang dipelihara, bangunan sabo yang dipelihara, *check dam* yang dioperasikan dan dipelihara, *breakwater/seawall* dan bangunan penampang pantai lainnya yang dipelihara. Hingga akhir triwulan IV capaian kinerja indikator sasaran kegiatan ini sebagian besar telah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan progres fisik mencapai 100%, antara lain Pemeliharaan *Long Storage* Kabupaten Merauke, Pemeliharaan Berkala Tanggul Sungai Citanduy D.I Wadas Jontor, Pemeliharaan *Medan Flood Control* 10.000 hektar Kota Medan, Pemeliharaan Berkala Tanggul/Tebing Sungai Bengawan Solo Hilir, Pemeliharaan Rutin Pengaman Pantai Kubu Kab. Kotawaringin Barat, Pemeliharaan Berkala *Check dam* Waduk Manggar Kota Balikpapan.

Indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi didukung oleh *output* kegiatan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat dan daerah yang dioperasikan dan dipelihara, jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara, jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara, jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dioperasikan dan dipelihara, bendung irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara, sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara, serta kawasan rawa yang dipelihara. Kegiatan operasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan perbaikan hampir seluruhnya telah mencapai 100%.

Indikator terlaksananya kegiatan pendukung OP sarana prasarana SDA meliputi *output* unit pengelola irigasi, unit pengelola bendungan, alokasi air yang disusun, kegiatan tanggap darurat bencana, dan peralatan/fasilitasi pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara. Progres pelaksanaan penyusunan alokasi air, dan pemeliharaan fasilitas pendukung OP telah mencapai 100%.

b. ***Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA,*** dengan nilai capaian kinerja **39,08%** (Oranye) termasuk dalam kategori **Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 15 (SK15) mencakup dokumen NSPK bidang operasi dan pemeliharaan,



BBWS/BWS yang dibina dalam bidang OP infrastruktur SDA, pemda yang dibina dalam bidang OP infrastruktur SDA, peralatan pendukung OP, dan layanan tanggap darurat akibat bencana. *Output* layanan pembinaan bidang op infrastruktur SDA yang merupakan kegiatan rutin telah dilaksanakan pada 34 BBWS/BWS. Keterlambatan progres diakibatkan beberapa kegiatan penunjang berupa kontraktual jasa konsultan dengan sumber pendanaan PHLN yang mendukung program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) seperti Pemetaan LIDAR, dan yang mendukung program DOISP (*Dam Operational Improvement and Safety Project*) seperti konsultan CPIU (*Central Project Implementing Unit*), CPMU (*Central Project Manajement Unit*), dan CDMU (*Central Dam Monitoring Unit*) belum dapat dilaksanakan karena proses penyesuaian AWP (*Annual Work Plan*) yang diajukan mengalami keterlambatan persetujuan dimana persetujuan Bappenas dikeluarkan tanggal 21 Desember 2018 bertepatan dengan akhir penerimaan proses administrasi di KPPN. Kegiatan untuk tanggap darurat bencana posisi masih blokir.

7. Capaian kinerja indikator pada level ***Learning and growth*** yaitu **"Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA"** sebesar **98,83%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**.

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
7	**Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA**		**100%**	**100**	**98,83**	**98,83**
	SK16	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA		100	98,83	**98,83**

Indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan 16 (SK16) yang dijalankan oleh Direktorat Pengembangan Jaringan SDA berupa Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA. Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dalam rangka Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA. Capaian juga didukung oleh paket pekerjaan kontraktual manajemen berupa *Enginering Service Project*



yang bersifat *multi years contract*. Disamping itu ada paket pekerjaan kontraktual yang mendukung program IPDMIP melalui dana PHLN dari *Asian Development Bank* (ADB) berupa konsultan manajemen proyek yaitu Konsultan Program Manajemen Nasional, Konsultan Nasional Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi, dan Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi PAI IKSI Berbasis Web dan Android yang terkontrak pada triwulan IV tahun 2018 belum menunjukkan progres yang signifikan.

8. Capaian kinerja indikator pada level ***Learning and growth*** yaitu **"Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya"** sebesar **83,71%** (Biru Muda) masuk dalam kategori **sangat baik**.

No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
8	**Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya**		**100%**	**100**	**83,71**	**83,71**
	SK17	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)		100	83,71	**83,71**

Indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan 17 (SK17) yang dijalankan secara swakelola oleh Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air berupa Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya merupakan kegiatan non fisik berupa pembinaan teknis kepegawaian, manajemen keuangan, pengelolaan barang milik negara, bantuan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan komunikasi publik sudah berjalan dengan target 34 BBWS/BWS, Balai Bendungan. Kinerja yang tidak mencapai 100% diakibatkan ada kegiatan yang sifatnya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi namun tidak memberikan *output* secara langsung terhadap sasaran kegiatan.

B. Sasaran Program Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo

1. Capaian kinerja pada Indikator Sasaran Program **"Tingkat layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo"** sebesar **91,04%** (Biru Tua) masuk dalam kategori **memuaskan**. Indikator sasaran program ini meliputi 2 Sasaran Kegiatan yaitu :



No	Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		% Target	Triwulan IV		
				RN	RL	Kinerja
1	Tingkat layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo		90	100	91,04	91,04
	SK18	Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo		100	51,32	51,32
	SK19	Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo		100	99,03	99,03

a. *Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo* dengan nilai capaian kinerja **51,32%** (ungu) termasuk dalam kategori **cukup (memadai),** perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 18 (SK18) mencakup 4 (empat) *output* kegiatan yaitu: i) NSPK pengendalian lumpur; ii) layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo; iii) Dampak sosial yang ditangani; iv) layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini masuk dalam kategori cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Dampak sosial yang ditangani berupa pekerjaan Pengadaan Tanah dan Bangunan di luar PAT dan Penanganan Masalah Sosial Terkait Jual Beli Tanah dan Bangunan terkendala belum adanya regulasi tentang jual beli tanah sehingga capaian tidak dapat memenuhi target yang diharapkan. Terdapat juga kegiatan kontraktual pengadaan kendaraan operasional yang dananya masih di blokir.

b. *Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo* dengan nilai capaian kinerja **99,03%** (Biru Tua) termasuk dalam kategori **memuaskan**. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 19 (SK19) mencakup 5 (lima) indikator : i) tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo; ii) tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo; iii) terjaganya fungsi layanan sarana prasrana pengendali lumpur Sidoarjo; iv) teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong; v) tertatanya kawasan diluar PAT. Sebagian besar paket pekerjaan yang mendukung indikator sasaran kegiatan (SK19) menunjukkan progres fisik yang cukup memuaskan, meskipun ada beberapa kegiatan swakelola yang mendukung terjaganya fungsi layanan sarana

prasarana pengendali lumpur Sidoarjo berupa OP Rutin Sarana Prasarana Tanggul dan Waduk, OP Rutin Sarana Prasarana Drainase dan lingkungan, Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala Sarana dan Prasarana Drainase dan Lingkungan, serta Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala Sarana Prasarana Tanggul dan Waduk terkendala kondisi tanggul yang masih dalam proses pembangunan/peningkatan.

4.1.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Realisasi capaian kinerja TA 2018 untuk Sasaran Strategis, Sasaran Program dengan masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada Tabel 4.9 dan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.9 Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Bobot (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja
SS2	**Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi**	100	87,10	82.94	95,22
Tingkat dukungan ketahanan air					
SP2	**Meningkatnya Ketahanan Air**	97	87	82,70	95,06
1	Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	10	8,5	8.5	
2	Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air	30	24	18.8	
3	Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	15	13,5	14	
4	Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	5	5	4.9	
5	Tingkat kinerja layanan irigasi	25	21	21.6	
6	Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan	10	10	10	
	Learning & Growth :				
	Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	3	3	3	
	Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	2	2	2	
Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo					
SP3	**Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo**	3	90,50	90.80	100,33
1	Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	95	85,50	85.75	
	Learning & Growth :				
	Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	2	2	2	
	Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	3	3	3	



Sasaran Startegis **SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi**, dengan realisasi 82.94% dari target 87,1%. Realisasi kinerja sasaran strategis ini didukung oleh capaian 2 (dua) sasaran program sebagai berikut :

1. Sasaran program **SP2 Meningkatnya Ketahanan air**, realisasi capaian kinerja sebesar 82,70 % dari target 87%. Capaian ini didukung oleh masing-masing indikator sasaran program sebagai berikut :
   a. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, dengan realisasi capaian 8,5% dari target 8,5%. Kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK1 Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku, dan SK2 Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah dan Air Baku.
   b. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan realisasi capaian 18,8% dari target 24%. Kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK3 Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air, SK4 Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya, dan SK5 Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan.
   c. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, dengan realisasi capaian sebesar 14% dari target 13,5%. Kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK6 Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak dan SK7 Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai.
   d. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, dengan realisasi kinerja sebesar 4,9% dari target 5%. Kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK8 Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, SK9 Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu, SK10 Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS, dan SK11 Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional.
   e. Tingkat kinerja layanan irigasi, dengan realisasi kinerja sebesar 21.6% dari target 21%. Capaian kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK 12 Peningkatan layanan kinerja irigasi dan SK13 Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa.

f. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10% dari target 10%. Capaian kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK14 Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air, dan SK15 Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

Pada level *learning and growth*, didukung oleh indikator :

a. Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, dengan realisasi kinerja sebesar 3% memenuhi target 3%. Indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK16 Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (SDA).
b. Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan realisasi kinerja sebesar 2% dari target 2%. Capaian kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK17 Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA).

2. Sasaran program **SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo**, realisasi capaian kinerja sebesar 90,8% dari target 90.5%. Capaian ini didukung oleh satu indikator sasaran program sebagai berikut :
   a. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 85.75% dari target 85,5%. Kinerja pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK18 Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur sidoarjo, dan SK19 Peningkatan layanan sarana dan prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo.

   Pada level *learning and growth*, didukung oleh indikator :

   a. Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, dengan realisasi kinerja sama dengan target sebesar 2%. Indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK16 Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (PPLS).
   b. Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan realisasi kinerja sama dengan target sebesar 3%. Capaian kinerja



pada indikator ini didukung oleh sasaran kegiatan SK17 Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (PPLS).

4.1.7 Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Persentase capaian kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan (SK) dihitung berdasarkan perbandingan capaian *outcome* terhadap target *outcome* pada komponen *output* kegiatan yang mendukung langsung terhadap sasaran kegiatan dimaksud yang dilaksanakan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, baik di Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, Pusat, maupun di BBWS/BWS. Terdapat 19 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Direktorat dan Pusat fokus pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas), sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS fokus pada pelaksanaan (konstruksi serta OP). Berikut realisasi kinerja sasaran kegiatan :

Tabel 4.10. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan			Bobot (SK,%)	Target		Capaian	
SK1	**Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku**			**100**	**%**	**83**	**%**
	1	**Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku**	**70**	**100**	**%**	**83**	**%**
		Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun		0,717	m^3/det	0,748	m^3/det
		Embung air baku yang dibangun		0,13	m^3/det	0,13	m^3/det
		Unit air baku yang dibangun		8,38	m^3/det	6,582	m^3/det
		Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku		46	Dokumen	41	Dokumen
	2	**Tingkat pengembalian fungsi debit dan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula**	**30**	**100**	**%**	**89**	**%**
		Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi		0,06	m^3/det	0,06	m^3/det
		Embung air baku yang direhabilitasi		0	m^3/det	0	m^3/det
		Unit air baku yang direhabilitasi		0,31	m^3/det	0,27	m^3/det
SK2	**Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah dan Air Baku**			**100**	**%**	**100**	**%**
	1	**Tingkat pelayanan pembinaan bidang air tanah dan air baku**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**
		Dokumen NSPK bidang air tanah dan air baku		1	N/S/P/K	1	N/S/P/K
		BBWS/BWS yang dibina dalam bidang air tanah dan air baku		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
SK3	**Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air**			**100**	**%**	**56,2**	**%**
	1	**Tingkat kapasitas tampung sumber air**	**60**	**100**	**%**	**31**	**%**
		Bendungan yang selesai dibangun pada tahun eksisting		231,65	Juta m^3	58,54	Juta m^3
		Bendungan baru yang dibangun		0	Juta m^3	0	Juta m^3
		Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)		0	Juta m^3	0	Juta m^3
		Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun		3,59	Juta m^3	14,66	Juta m^3
		Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya		113	Dokumen	106	Dokumen
	2	**Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula**	**35**	**100**	**%**	**100**	**%**
		Bendungan yang direhabilitasi		109,8	Juta m^3	109,8	Juta m^3
		Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi		1,16	Juta m^3	1,27	Juta m^3
		Danau yang direvitalisasi		10	Danau	9	Danau



Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan			Bobot (SK,%)	Target		Capaian	
	3	**Tingkat potensi energi sumber air**	5	100	%	50	%
		Bendungan yang selesai pada tahun berjalan		1	MW	0,5	MW
SK4		**Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya**		100	%	100	%
	1	**Tingkat pelayanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangun**	100	100	%	100	%
		Dokumen NSPK bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya		2	N/S/P/K	2	N/S/P/K
		BBWS/BWS yang dibina dalam bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung lainnya		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
SK5		**Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan**		100	%	97,4	%
	1	**Tingkat pelayanan pembinaan bidang keamanan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya**	100	100	%	97,4	%
		Dokumen NSPK bidang keamanan bendungan		4	N/S/P/K	3	N/S/P/K
		Rencana dan program kerja Balai Bendungan		2	Dokumen	2	Dokumen
		Layanan teknis keamanan bendungan		33	Instansi	33	Instansi
SK6		**Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak**		100	%	92,34	%
	1	**Tingkat luas kawasan yang telindungi dari daya rusak air**	70	100	%	89	%
		Jumlah luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun :	70	100	%	84	%
		Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan		16.128	Hektar	13.665	Hektar
		Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan		1.195	Hektar	1.029	Hektar
		Kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan		1.229	Hektar	1.229	Hektar
		Stasiun pompa banjir yang dibangun/ditingkatkan		239	Hektar	0	Hektar
		Pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan		56	Hektar	1	Hektar
		Polder/kolam retensi yang dibangun/ditingkatkan		0	Hektar	0	Hektar
		Saluran drainase yang dibangun / ditingkatkan		91	Hektar	61	Hektar
		Flood forecasting & warning sistem (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan		0	Unit	0	Unit
		Rencana teknis pengendalian banjir		40	Dokumen	38	Dokumen
		Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dibangun :	20	100	%	99,87	%
		Bangunan sabo yang dibangun/ ditingkatkan		1,561	Juta m^3	1,561	Juta m^3
		Checkdam yang dibangun/ ditingkatkan		0,665	Juta m^3	0,662	Juta m^3
		Rencana teknis pengendali sedimen/ lahar		1	Dokumen	0	Dokumen
		Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dibangun :	10	100	%	100	%
		Breakwater yang dibangun/ ditingkatkan		2,95	Km	2,95	Km
		Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun/ ditingkatkan		24,38	Km	24,38	Km
		Rencana teknis pengaman pantai		11	Dokumen	11	Dokumen
	2	**Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**	30	100	%	99,99	%
		Jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi :	70	100	%	99,98	%
		Tanggul yang direhabilitasi		5.033	Hektar	5.033	Hektar
		Bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi		1,2	Hektar	1,2	Hektar
		Kanal banjir yang direhabilitasi		0	Hektar	0	Hektar
		Pintu air/bendungan pengendali banjir yang direhabilitasi		0	Hektar	0	Hektar
		Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi		0	Hektar	0	Hektar
		Polder/kolam retensi yang direhabilitasi		2	Hektar	1	Hektar
		Saluran drainase yang direhabilitasi		0	Hektar	0	Hektar
		Sungai yang direstorasi		0	Sungai	0	Sungai
		Mata air yang dilindungi		4	Mata Air	1	Mata Air
		Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi :	20	100	%	100	%
		Bangunan sabo yang direhabilitasi		0,82	Juta m^3	0,82	Juta m^3
		Checkdam yang direhabilitasi		0	Juta m^3	0	Juta m^3



Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan			Bobot (SK,%)	Target		Capaian	
		Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi :	**10**	**100**	**%**	**100**	**%**
		Breakwater yang direhabilitasi		0	Km	0	Km
		Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi		0,109	Km	0,109	Km
SK7	**Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai**			**100**	**%**	**100**	**%**
	1	**Tingkat pelayanan pembinaan bidang sungai dan pantai**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**
		Dokumen NSPK bidang sungai dan pantai		0	N/S/P/K	0	N/S/P/K
		BBWS/BWS yang dibina dalam bidang sungai dan pantai		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
SK8	**Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA**			**100**	**%**	**97,35**	**%**
	1	**Peningkatan indeks RBO**	**100**	**100**	**%**	**97,35**	**%**
		Peningkatan indeks RBO		3,02	Indeks	2,94	Indeks
SK9	**Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu**			**100**	**%**	**100**	**%**
	1	**Tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**
		Dokumen NSPK bidang tata kelola pengelolan SDA terpadu		0	N/S/P/K	0	N/S/P/K
		BBWS/BWS yang dibina dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
		BBWS/BWS yang dibina dalam pengelolaan kelembagaan pengelolaan SDA		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
		BBWS/BWS yang dibina dalam pemanfaatan sumber daya air		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
		BBWS/BWS yang dibina dalam pengelolaan hidrologi, kualitas air, dan lingkungan SDA		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
		Draft Peraturan pengelolaan SDA		0	Dokumen	0	Dokumen
SK10	**Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS**			**100**	**%**	**99,3**	**%**
	1	**Tingkat layanan manajemen BBWS/BWS**	**100**	**100**	**%**	**99,3**	**%**
		Rencana dan program kerja BBWS/BWS		149	Dokumen	146	Dokumen
		Dokumen ketatalaksanaan BBWS/BWS (kepegawaian, BMN, keuangan dll)		243	Layanan	243	Layanan
SK11	**Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional**			**100**	**%**	**100**	**%**
	1	**Tingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**
		Dokumen konsep kebijakan dan program pengelolaan SDA Nasional		4	Dokumen	4	Dokumen
		Layanan data dan informasi Sekretariat Harian DSDAN		1	Layanan	1	Layanan
SK12	**Peningkatan layanan kinerja irigasi**			**100**	**%**	**84,69**	**%**
	1	**Tingkat layanan jaringan irigasi**	**60**	**100**	**%**	**74**	**%**
		Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun		44.634	Hektar	30.682	Hektar
		Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun		0	Hektar	0	Hektar
		Jaringan irigasi rawa yang dibangun		7.393	Hektar	6.746	Hektar
		Jaringan irigasi tambak yang dibangun		2.410	Hektar	2.511	Hektar
		Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun		328	Hektar	328	Hektar
		Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan		0	Titik	0	Titik
		Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa		261	Dokumen	162	Dokumen
		Bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun		43	Bendung	42	Bendung
		Bendung irigasi kewenangan daerah yang dibangun		5	Bendung	5	Bendung
	2	**Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi**	**35**	**100**	**%**	**90**	**%**
		Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan		123.299	Hektar	124.044	Hektar
		Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang direhabilitasi / ditingkatkan		0	Hektar	0	Hektar
		Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi/ditingkatkan		45.831	Hektar	21.868	Hektar
		Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan		5.820	Hektar	9.920	Hektar
		Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi/ditingkatkan		7.044	Hektar	7.154	Hektar
		Sumur JIAT yang direhabilitasi		0	Titik	0	Titik
		Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan		19	Bendung	21	Bendung



Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan			Bobot (SK,%)	Target		Capaian	
		Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi/ditingkatkan		15	Bendung	15	Bendung
		Kawasan rawa yang dikonservasi		0	Hektar	0	Hektar
	3	**Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk**	5	**100**	%	**100**	%
		Bendungan yang selesai pada tahun berjalan		7.182	Hektar	8.471	Hektar
SK13	**Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa**			**100**	%	**100**	%
	1	**Tingkat layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa**	100	**100**	%	**100**	%
		Dokumen NSPK bidang irigasi dan rawa		0	N/S/P/K	0	N/S/P/K
		BBWS/BWS yang dibina dalam bidang irigasi dan rawa		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
SK14	**Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air**			**100**	%	**100**	%
	1	**Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku**	25	**100**	%	**100**	%
		Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara		26,65	m^3/det	26,65	m^3/det
		Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara		61,52	m^3/det	61,52	m^3/det
		Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara		43,21	m^3/det	43,21	m^3/det
		Mata air yang dipelihara		4	Mata Air	4	Mata Air
	2	**Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air**	25	**100**	%	**100**	%
		Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara		4.327	Juta m^3	4.327	Juta m^3
		Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara		150	Juta m^3	150	Juta m^3
		Danau yang dipelihara		55	Danau	55	Danau
	3	**Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**	23	**100**	%	**100**	%
		Jumlah luas kawasan yang selalu terlindungi dari daya rusak air oleh saran prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	70	**100**	%	**100**	%
		Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara		152.098,81	Hektar	152.098,81	Hektar
		Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara		21.955,69	Hektar	21.955,69	Hektar
		Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara		3.995	Hektar	3.995	Hektar
		Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara		13	Juta m^3	13	Juta m^3
		Sungai yang dipelihara		337	Sungai	337	Sungai
		Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dioperasikan dan dipelihara	20	**100**	%	**100**	%
		Bangunan sabo yang dipelihara		7	Juta m^3	7	Juta m^3
		Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara		592,75	Juta m^3	592,75	Juta m^3
		Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dioperasikan dan dipelihara	10	**100**	%	**100**	%
		Breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara		163,86	Km	163,86	Km
	4	**Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi**	25	**100**	%	**100**	%
		Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara		2.234.627,81	Hektar	2.234.627,81	Hektar
		Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara		613.956	Hektar	613.956	Hektar
		Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara		88.734,70	Hektar	88.734,70	Hektar
		Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dioperasikan dan dipelihara		10.470,79	Hektar	10.470,79	Hektar
		Bendung irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara		593	Bendung	593	Bendung
		Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara		1.484	Titik	1.484	Titik
		Kawasan rawa yang dipelihara		2	Hektar	2	Hektar
	5	**Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA**	2	**100**	%	**100**	%
		Unit pengelola irigasi		10	Unit	10	Unit
		Unit pengelola bendungan		13	Unit	13	Unit
		Alokasi air yang disusun		38	Dokumen	38	Dokumen



Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan			Bobot (SK,%)	Target		Capaian	
		Kegiatan tanggap darurat akibat bencana		60	Kegiatan	60	Kegiatan
		Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara		443	Unit	443	Unit
SK15	**Peningkatan pembinaan OP infrastruktur SDA**			**100**	%	**100**	%
	1	**Tingkat layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA**	**100**	**100**	%	**100**	%
		Dokumen NSPK bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA		2	N/S/P/K	2	N/S/P/K
		BBWS/BWS yang dibina dalam bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA		34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS
		Pemda yang dibina dalam bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA		34	Pemda	34	Pemda
		Peralatan pendukung OP		10	Unit	10	Unit
		Layanan tanggap darurat akibat bencana		1	Layanan	1	Layanan
SK16	**Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (SDA)**			**100**	%	**100**	%
	1	**Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA**	**100**	**100**	%	**100**	%
		Dokumen NSPK bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen Sumber Daya Air		0	N/S/P/K	0	N/S/P/K
		BBWS/BWS yang dibina dalam bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen Sumber Daya Air		36	BBWS/BWS	36	BBWS/BWS
SK17	**Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)**			**100**	%	**100**	%
	1	**Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya**	**100**	**100**	%	**100**	%
		BBWS/BWS yang dibina dalam manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya		36	BBWS/BWS	36	BBWS/BWS
SK18	**Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur sidoarjo**			**100**	%	**93**	%
	1	**Tingkat layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo**	**100**	**100**	%	**93**	%
		NSPK pengendalian lumpur		3	N/S/P/K	3	N/S/P/K
		Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo		1	Layanan	7	Layanan
		Dampak sosial yang ditangani		50	Berkas	40	Berkas
		Layanan dukungan manajemen PPLS		1	Layanan	1	Layanan
SK19	**Peningkatan layanan sarana dan prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo**			**100**	%	**89**	%
	1	**Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur sidoarjo**	**10**	**100**	%	**100**	%
		Rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo		2	Dokumen	2	Dokumen
		Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun		1,77	Km	1,77	Km
	2	**Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur sidoarjo**	**5**	**100**	%	**100**	%
		Tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi/ditingkatkan		3,34	Km	4,15	Km
	3	**Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur sidoarjo**	**10**	**100**	%	**100**	%
		Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara		13,5	Km	13,5	Km
		Peralatan dan fasilitas pendukung yang dioperasi dan dipelihara		0	Unit	0	Unit
	4	**Teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong**	**70**	**100**	%	**85**	%
		Luapan lumpur yang ditangani		40	Juta m^3	33,97	Juta m^3
	5	**Tertatanya kawasan diluar PAT**	**5**	**100**	%	**100**	%
		Kawasan di luar PAT yang ditata		2	Hektar	10	Hektar

4.1.8 Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Program

Persentase capaian kinerja sasaran program dihitung berdasarkan capaian pada masing-masing indikator kinerja sasaran program sesuai bobot yang telah



disepakati pada setiap indikator. Masing-masing indikator tersebut didukung oleh pencapaian sasaran-sasaran kegiatan secara *cascade* (berjenjang).

A. Capaian kinerja Sasaran Program **SP2 Meningkatnya Ketahanan Air** dicapai dengan 6 (enam) indikator, yaitu :

1. **Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku**, dengan bobot 10%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 85% didukung oleh SK1 dengan bobot 90% dan SK2 dengan bobot 10%.

   % Indikator SP = 90% x SK1 + 10% x SK2 = 85%

2. **Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air**, dengan bobot 30%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 62,62% didukung oleh SK3 dengan bobot 85%, SK4 dengan bobot 10%, dan SK5 dengan bobot 5%.

   % Indikator SP = 85% x SK3 + 10% x SK4 + 5% x SK5 = 62,62%

3. **Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak**, dengan bobot 15%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 93,1 % didukung oleh SK6 dengan bobot 90% dan SK7 dengan bobot 10%.

   % Indikator SP = 90% x SK6 + 10% x SK7 = 93,10%

4. **Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA**, dengan bobot 5%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 98 % didukung oleh SK8 dengan bobot 80%, SK 9 dengan bobot 10%, SK10 dengan bobot 8% dan SK11 dengan bobot 2%.

   % Indikator SP = 80% x SK8 + 10% x SK9 + 8% x SK110 + 2% x SK11 = 98%

5. **Tingkat kinerja layanan irigasi**, dengan bobot 25%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 86,23 % didukung oleh SK12 dengan bobot 90% dan SK13 dengan bobot 10%.



% Indikator SP = 90% x SK12 + 10% x SK13 = 86,23%

6. **Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan**, dengan bobot 10%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100 % didukung oleh SK14 dengan bobot 90% dan SK15 dengan bobot 10%.

% Indikator SP = 90% x SK14 + 10% x SK15 = 100%

Pada level *learning and growth*, terdapat 2 indikator yang mendukung capaian sasaran program SP2 Meningkatnya Ketahanan Air, yaitu :

1. **Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA**, dengan bobot 3%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % didukung oleh SK16 dengan bobot 100%.
2. **Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya**, dengan bobot 2%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % didukung oleh SK17 dengan bobot 100%.

Capaian Kinerja **Indikator Sasaran Strategis Tingkat Dukungan Ketahanan Air** yang didukung oleh capaian Sasaran Program **SP2 Meningkatnya Ketahanan Air**, diformulasikan dengan rumus berikut :

Capaian SP2 =
10% ISP1 + 30% ISP2 + 15% ISP3 + 5% ISP4 + 25% ISP5 + 10% ISP6 + 3% SK16 + 2% SK17 = 82,70%

Capaian kinerja Sasaran Program **SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo** dicapai dengan 1 (satu) indikator, yaitu :

1. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot 95%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 90,27% didukung oleh SK18 sebesar 25% dan SK 19 sebesar 75%.

% Indikator SP = 25% x SK18 + 75% x SK19 = 90,27%

Pada level ***learning and growth***, terdapat 2 indikator yang mendukung capaian sasaran program SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo, yaitu :

1. **Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA**, dengan bobot 2%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% didukung oleh SK16 dengan bobot 100%.
2. **Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya**, dengan bobot 3%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % didukung oleh SK17 dengan bobot 100%.

Capaian Kinerja **Indikator Sasaran Strategis Tingkat Dukungan Pengendalian Lumpur Sidoarjo** yang didukung oleh capaian Sasaran Program **SP2 Meningkatnya Ketahanan Air**, diformulasikan dengan rumus berikut :

$$\text{Capaian SP3} = 95\%\,\text{ISP1} + 2\%\,\text{SK16} + 3\%\,\text{Sk17} = 90{,}80\,\%$$

Selengkapnya, capaian kinerja indikator sasaran strategis dan sasaran program disajikan pada tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11. Capaian Kinerja Sasaran Program

Indikator SS/Sasaran Program/Indikator SP			Bobot (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
Tingkat Dukungan Ketahanan Air			*97*	*87*	*82,70*	*95,06*
SP2	Meningkatnya Ketahanan Air		97	87	82,70	95,06
	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	10	8,5	8,5	
	2	Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air	30	24	18,8	
	3	Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	15	13,5	14	
	4	Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	5	5	4.9	
	5	Tingkat kinerja layanan irigasi	25	21	21.6	
	6	Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan	10	10	10	
	Learning and growth :					
		Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	3	3	3	
		Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	2	2	2	
Tingkat Dukungan Pengendalian Lumpur Sidoarjo			*3*	*90,5*	*90.8*	*100,33*
SP3	Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo		3	90,5	90.8	100,33
	1	Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	95	85,5	85.75	
	Learning and growth :					
		Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	2	2	2	
		Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	3	3	3	



4.1.9 Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis 2015-2019, Ditjen Sumber Daya Air saat ini hanya mendukung 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu SS2 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis diperoleh dari penjumlahan capaian kinerja indikator sasaran strategis yang didukung oleh capaian sasaran program sesuai dengan bobotnya masing-masing, yaitu SP2 Meningkatnya Ketahanan Air dengan bobot 97% dan SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo dengan bobot 3%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{Capaian SS} = 97\% \times \text{SP2} + 3\% \times \text{SP3} = 82{,}94\%$$

Tabel 4.12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis/Sasaran Program			Bobot (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
SS2	Meningkatnya Dukungan Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi		100	87,10	82,94	95,22
	Tingkat Dukungan Ketahanan Air					
	SP2	Meningkatnya Ketahanan Air	97	87	82,70	
	Tingkat Dukungan Pengendalian Lumpur Sidoarjo					
	SP3	Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo	3	90,50	90,80	

4.2. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Capaian Kinerja

4.2.1 Realisasi Capaian Kinerja TA 2018 dan Target TA 2018

Sebagaimana telah disajikan pada Tabel 4.9 Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018, dari 2 (dua) sasaran program beserta 7 indikator pada level *internal process* dan 2 indikator pada level *learning and growth*, diperoleh 5 (lima) indikator memenuhi target dan 2 (dua) indikator tidak memenuhi target, sedangkan 2 (dua) indikator pada level *learning and growth* dapat memenuhi target.

Terkait dengan 2 (dua) indikator yang tidak memenuhi target, meliputi :

a. Indikator sasaran program Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dari target 24% tercapai 18,8%. Dari target 8 (delapan) bendungan yang direncanakan selesai tahun 2018 dengan penambahan kapasitas tampung



sebesar 231,65 juta m^3, tercapai 5 (lima) bendungan selesai dengan penambahan kapasitas tampung sebesar 58,54 juta m^3.

b. Indikator sasaran program Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, capaian kinerja sebesar 4.9% dari target 5%. Berdasarkan hasil Penilaian indeks *RBO (River Basin Organization) performance benchmarking* dari yang di targetkan sebesar indeks 3.02, hasil *peer reviewer* diperoleh capaian indeks RBO sebesar 2,94.

4.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Anggaran sebelumnya

Capaian kinerja *output* dan *outcome* tahun anggaran 2018 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2015 s.d 2017) tidak serta merta dapat diperbandingkan karena ada perbedaan level sasaran program dan indikatornya serta munculnya istilah sasaran kegiatan yang tidak ditemukan pada arsitektur ADIK tahun sebelumnya. Hal ini sebagai akibat adanya perubahan peta strategi di Kementerian PUPR dan Ditjen Sumber Daya Air pada saat reviu paruh waktu Rencana Strategi 2015-2019. Untuk realisasi *output* dan *outcome* pada tahun anggaran 2015-2017 disajikan kembali pada Laporan Kinerja 2018 sebagaimana dalam Tabel 4.13 berikut.



Tabel 4.13 Capaian Kinerja TA 2015, TA 2016 dan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	2015		2016		2017		Total 2015 - 2017	
					Target PK	Capaian PK	Target PK	Capaian PK	Target PK	Capaian PK	Target	Realisasi
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana air baku	1)	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	M^3/dtk	8,74	6,97	6,27	6,15	4,45	4,34	19,46	17,46
		2)	Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	M^3/dtk	8,20	7,97	0,92	0,92	0,72	0,7	9,84	9,59
		3)	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	M3/dtk	69,64	69,64	60,92	60,92	60,15	89,21	69,64	89,21
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	1)	Peningkatan kapasi tas tampung sumber air	Juta m^3	1.024,59	1.012	52,87	16,73	18,6	18,27	1.096,06	1.047
		2)	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	Juta m^3	377	377	6,23	4,3	6,36	3,44	389,59	384,74
		3)	Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	Juta m^3	12.679	12.679	3.432	4.673	4.392,67	4.218,96	12.679	12,679
3	Meningkatnya kapasitas penegndalian daya rusak air	1)	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Ha	10.903	20.343,50	16.918,85	16.083,11	19.971,07	19.971,07	47.792,92	56.397,68
4	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	1)	Peningkatan RBO Indeks	Indeks	2,24	2,25	2,48	2,57	2,75	2,84	2,75	2,84
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air	1)	Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas	%	20	20	20	20	20	20	60	60
6	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	1)	Peningkatan layanan jaringan irigasi	Ha	182.017	155.382	52.519	52.519	78.876,3	63.248	313.412,30	271.149
		2)	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	Ha	480.534	491.901	288.496	291.171	327.164,81	273.191	1.096.194,81	1.056.263
		3)	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	Ha	3.581.530	3.581.530	3.265.230,01	3.265.230,01	3.372.594,25	3.195.073,24	3.581.530	3.581.530
		4)	Persentase daerah irigasi yang diairi oleh Bendungan	%	11	11	12	12	12	12	12	12
7	Meningkatnya potensi *energi* dari sumber-sumber air	1)	Peningkatan potensi *energi* sumber air	MW	113,19	111,84	0	0	0	0	113,19	111,84



BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui sandingan capaian *output*/*outcome* selama masa periode Renstra 2015 – 2019 pada tahun anggaran yang sudah berjalan, akan disajikan dalam bentuk format yang berbeda sebagaimana tersaji pada Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Capaian *Output* Bidang Sumber Daya Air

Program Prioritas/Output				Baseline 2014	Capaian			
					2015	2016	2017	2018
Ditjen Sumber Daya Air								
A	**Jaringan Irigasi**							
	Kewenangan Pusat							
	1	**Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi**			**151.144**	**50.668**	**61.503**	**37.756**
		A	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	7.145.168	107.922	44.662	51.347	30.682
		B	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1.643.283	40.242	3.963	7.950	6.746
		C	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	157.830	2.980	2.043	2.206	328
	2	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi**			**458.802**	**277.444**	**248.925**	**153.066**
		A	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.145.168	302.270	244.780	197.552	124.044
		B	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1.643.283	151.249	28.459	49.708	21.868
		C	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	157.830	5.283	4.205	1.665	7.154
	3	**Jaringan Irigasi Tambak**			**37.337**	**15.577**	**18.968**	**12.431**
		A	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	189.747	4.238	1.850	1.750	2.511
		B	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	189.747	33.099	13.727	17.218	9.920
	Kewenangan Daerah (DAK)							
	1		Pembangunan Jaringan Irigasi	N.A	4.028	1.718	6.767	35.274
	2		Peningkatan Jaringan Irigasi		114.122	84.424	157.728	149.912
	3		Rehabilitasi Jaringan Irigasi		685.033	290.629	294.816	168.145
B	**Sarpras Pengaman Pantai dan Banjir**							
	1	**Pembangunan Sarana dan Prasana**			**371 km/ 150 Buah**	**231 km/ 44 Buah**	**182 km/ 31 Buah**	**241,31 km/ 28 Buah**
		A	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (termasuk breakwater, seawall)	279	66,88	49,5	20,42	22,45
		B	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengaman Banjir (termasuk : normalisasi sungai, tanggul sungai, tebing, kanal)	1.448	304,36	197,48	161,71	218,86
		c	Pengendalian Sedimen dan Lahar Gunung Berapi	180	150	44	31	28
	2	**Rehabilitasi Sarana dan Prasana**			**137 km/ 21 Buah**	**30 km/ 2 Buah**	**28,5 km/ 11 Buah**	**58,71 km/ 10 Buah**
		A	Rehabilitasi Sarpras Pengaman Pantai	279	1	0,2	0,2	0,11
		B	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengaman Banjir	1.448	136	30	28,34	58,6
		C	Rehabilitasi Pengendalian Sedimen dan Lahar Gunung Berapi	180	21	2	11	10
C	**Bendungan dan Embung**							
	1	**Pembangunan Bendungan dan Embung**			**29 Bend./ 342 Embung**	**32 Bend./ 387 Embung**	**36 Bend./ 117 Embung**	**46 Bend./ 96 Embung**
		a.	Pembangunan Bendungan	178 Milik PU,31 Non PU	29 Bend. (16 Ongoing/ 13 Baru/ 5 Selesai)	32 Bend. (24 Ongoing/ 8 Baru/ 2 Selesai)	36 Bend. (30 Ongoing/ 6 Baru/ 2 Selesai)	46 Bend. (34 Ongoing/ 12 Baru/ 5 Selesai)
		-	On Going		16	24	30	34



Program Prioritas/Output				Baseline 2014	Capaian			
					2015	2016	2017	2018
		-	Baru		13	8	6	12
		-	Selesai		5	2	2	5
		b.	Pembangunan Embung	2.271	342	387	117	99
	2	**Rehabilitasi Bendungan dan Embung**			**5 Bend./ 64 Embung**	**5 Bend./ 71 Embung**	**2 Bend./ 73 Embung**	**2 Bend./ 13 Embung**
		a.	Rehabilitasi Bendungan		5	5	2	2
		b.	Rehabilitasi Embung		64	71	73	13
D	**Air Baku**							
	1	Pembangunan Sarpras Air Baku		51,44	6,97	6,15	4,34	7,46
	2	Rehabilitasi Sarpras Air Baku		34,12	7,97	0,92	0,7	0,33
E	**Operasi dan Pemeliharaan**							
	1	**Operasi dan Pemeliharaan Irigasi**			**3.357.420**	**3.402.053**	**3.216.285**	**2.947.789**
		a.	OP Irigasi Permukaan	2.376.521	2.251.918	2.356.773	2.359.615	2.234.627,81
		b.	OP Irigasi Rawa	703.362	922.186	921.643	760.556	613.956,00
		c.	OP Irigasi Tambak	25.922	133.156	114.718	85.259	88.734,70
		d.	OP Irigasi Air Tanah	150.327	50.160	8.919	10.855	10.470,79
F	**OP Bendung Irigasi**				**409**	**575**	**587**	**593**
		-	OP Bendung Irigasi		409	575	587	593
	2	**OP Sarpras Pengaman Pantai dan Banjir**			**2.606 Km/ 87 Buah**	**4.494 Km/ 441 Buah**	**3.880 Km/ 573 Buah**	**3.966,63 Km/ 550 Buah**
		a.	OP Sarpras Pengaman Pantai	279,36	116	161	148,99	163,86
		b.	OP Sarpras Pengendali Banjir	1.447,94	2.490	4.333	3.731,12	3.802,77
		c.	OP Pengendali Sedimen dan Lahar Gunung Berapi	180	87	441	573	550
	3	**OP Bendungan dan Embung/Situ**			**160 Bend./ 852 Embung**	**166 Bend./ 860 Embung**	**166 Bend./ 1.112 Embung**	**160 Bend./ 1.034 Embung**
		a.	OP Bendungan	178	160	166	166	160
		b.	OP Embung/Situ	1.510	852	860	1.112	1.034
	4	**OP Sarpras Air Baku**		**47,47**	**34,9**	**60,92**	**87,66**	**131,38 m^3/dtk**
		a.	OP Sarpras Air Baku	47,47	34,9	60,92	87,66	131,38

4.2.3 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja TA 2018 Terhadap Renstra 2015-2019

a. Perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 (2015-2018) dengan target Renstra 2015-2019

Dari pengukuran capaian indikator Kinerja pada sasaran program yang telah diuraikan diatas dihasilkan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018, dan apabila dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 pada hampir semua sasaran kegiatan yang mendukung sasaran program dan sasaran strategis, mengalami *backlog* yang cukup signifikan. sebagaimana disajikan pada tabel 4.15 di bawah ini :



Tabel 4.15 *Backlog* Capaian Renstra 2015-2019

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Outcome					Target Outcome Renstra (2015-2018)	Backlog Terhadap Renstra
		2015	2016	2017	2018	2015-2018		
SP2 Meningkatnya Ketahanan Air								
1 Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku								
SK1 Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku								
1. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	m3/det	6,97	6,15	4,34	7,46	24,92	45.52	-20,60
Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	Titik	3	53	128	222	406		
Embung air baku yang dibangun	Buah				7	7		
Unit air baku yang dibangun	Km	452	894	542	359	2.247		
2. Tingkat pengembalian fungsi debit dan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	m3/det	7,97	0,92	0,70	0,33	9,92	15.15	-5,23
Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	Titik	0	40	59	43	142		
Embung air baku yang direhabilitasi	Buah					0		
Unit air baku yang direhabilitasi	Km	11	104	60	32	207		
SK2 Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah dan Air Baku								
1. Tingkat pelayanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	%	0	0	0	100	100	100	0,00
2 Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air								
SK3 Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air								
1. Tingkat kapasitas tampung sumber air	Juta m^3	1,012	16,73	18,27	73,20	109,21	1.270,70	-1.161,49
Bendungan yang selesai dibangun pada tahun eksisting	buah	5	2	2	5	14		
Bendungan baru yang dibangun	buah	13	8	9	12	12		
Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	buah	29	32	39	29	29		
Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	buah	332	338	114	99	883		
2. Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula	Juta m^3	377,00	4,30	3,40	111,07	495,77	2.652	-2.156,23
Bendungan yang direhabilitasi	buah	5	5	2	2	14		
Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	buah	64	71	73	13	221		
Danau yang direvitalisasi	buah				9	9		
3 Tingkat potensi energi sumber air	MW	111,84	0	0	0,5	112,34	120,25	-7,91



Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Outcome					Target Outcome Renstra (2015-2018)	Backlog Terhadap Renstra
		2015	2016	2017	2018	2015-2018		
SK4 **Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan penampung air lainnya**								
SK5 **Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan**								
1. Tingkat pelayanan pembinaan bidang keamanan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	%	100	100	100	100	100	100	0,00
3 **Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak**								
SK6 **Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak**								
1. Tingkat luas kawasan yang telindungi dari daya rusak air								
Jumlah luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun	Hektar	20.343,50	16.083,11	19.971,07	15.984,90	72.382,58	155.952	-83.569,42
Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Km	304,36	182	122	163,6	467,60		
Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	Km		48	33	25,03	106,03		
Kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan	Km		22	35	22,32	79,32		
Stasiun pompa banjir yang dibangun/ditingkatkan	Unit		5	2	1	8		
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi	Hektar				2,22	2,22	0	2,22
Bangunan sabo yang dibangun/ditingkatkan	Buah	149	5	5	17	176		
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dibangun	Km				27,33	27,33	0	27,33
Breakwater yang dibangun/ditingkatkan	Km	62	4	4	2,95	42		
Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	Km		34	15	24,38	104		
2. Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air								
Jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi	Hektar				5.035,20	5.035,20	0	5.035,20
Tanggul yang direhabilitasi	Km	127	29	22	58	109		
Bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	Km		1	1	1	3		
Kanal banjir yang direhabilitasi	Km		0	0	0	0		
Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	Unit		0	0	0	0		



Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Outcome					Target Outcome Renstra (2015-2018)	Backlog Terhadap Renstra
		2015	2016	2017	2018	2015-2018		
Sungai yang direstorasi	Sungai				0	0		
Mata air yang dilindungi	mata Air				1	1		
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi	Hektar				0,82	0,82	0	0,82
Bangunan sabo yang direhabilitasi	Buah	21	3	1	10	35		
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi	Km				0	0,11	0	0,11
Breakwater yang direhabilitasi	Km	0,87	0,1	0,15	0	1,23		
Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi	Km				0,109			
SK7 Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai								
1. Tingkat pelayanan pembinaan bidang sungai dan pantai	%	100	100	100	100	100	100	0,00
4 Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA								
SK8 Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA								
1. Peningkatan indeks RBO	Indeks	2,25	2,57	2,84	2,94	2,94	3,29	-0,35
SK9 Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu								
1. Tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	%	100	100	100	100	100	100	0,00
SK10 Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS								
1. Tingkat layanan manajemen BBWS/BWS	%	100	100	100	100	100	100	0,00
SK11 Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional								
1. Tingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	%	100	100	100	100	100	100	0,00
5 Tingkat kinerja layanan irigasi								
SK12 Peningkatan layanan kinerja irigasi								
1. Tingkat layanan jaringan irigasi	**Hektar**	**155.382**	**52.519**	**63.248**	**40.267**	**311.416**	**788.130**	**-476.714**
Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun	Hektar	107.922	44.662	51.347	30.682	234.613		
Jaringan irigasi rawa yang dibangun	Hektar	40.242	3.963	7.950	6.746	58.901		
Jaringan irigasi tambak yang dibangun	Hektar	4.238	1.850	1.750	2.511	10.349		
Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun	Hektar	2.980	2.043	2.206	328	7.557		
Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan	Buah				0	0		
Bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun	Buah				42	42		
2. Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	**Hektar**	**491.901**	**291.171**	**273.191**	**162.986**	**1.219.249**	**2.490.101**	**-1.270.852,49**



Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Outcome					Target Outcome Renstra (2015-2018)	Backlog Terhadap Renstra
		2015	2016	2017	2018	2015-2018		
Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan	Hektar	302.270	244.780	197.552	124.044	868.646		
Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi/ditingkatkan	Hektar	151.249	28.459	49.708	21.868	251.284		
Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi/ditingkatkan	Hektar	5.283	4.205	1.665	7.154	18.307		
Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan	Hektar	33.099	13.727	17.218	9.920	73.964		
Sumur JIAT yang direhabilitasi	Buah				0	0		
Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan	Buah				21	21		
3. Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk	%	11,0	12,0	12,04	12,16	12,16	12,6	-0,44
SK13 Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa								
1. Tingkat layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa	%	100	100	100	100	100	100	0,00
6 Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan								
SK14 Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air								
1. Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m3/det	69,64	60,92	89,21	131,38	131,38	81,75	49,63
Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	titik				27	27		
Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	buah				201	201		
Unit air baku yang diopersikan dan dipelihara	km				320	320		
2. Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	Juta m^3	12.679	4.673	4.218,96	4.477	12.679	13.803	-1.124
Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	bendungan	160	166	166	160	166		
Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasiakn dan dipelihara	buah	852	860	1.112	1.034	1.112		
Danau yang dipelihara	danau							
3. Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air								
Jumlah luas kawasan yang selalu terlindungi dari daya rusak air oleh saran prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Hektar	0	0	0	178.049,50	178.049,50	0,00	178.049,50
Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara	km	2.490	4.333	3.731,12	3.637,09	3.637,09		
Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km				165,68	165,68		
Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	unit				0	0		
Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	buah				14	14		



Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Outcome					Target Outcome Renstra (2015-2018)	Backlog Terhadap Renstra
		2015	2016	2017	2018	2015-2018		
Sungai yang dipelihara	sungai				337	337		
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dioperasikan dan dipelihara	Juta m^3	0	0	0	600,19	600,19	0,00	600,19
Bangunan sabo yang dipelihara	buah	87	441	573	49,00	1.651,00		
Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara	buah				501,00			
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dioperasikan dan dipelihara	Km	0	0	0	163,86	163,86	0,00	163,86
Breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara	Km				163,86	163,86		
4. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	Hektar	3.581.530	3.265.230,01	3.195.073,24	3.581.530	3.581.530	3.519.694	61.835,81
Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	Hektar	2.251.918	2.356.773	2.359.615	2.234.628	2.359.615		
Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	Hektar	922.186	921.643	750.556	613.956	922.186		
Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dioperasikan dan dipelihara	Hektar	50.160	8.919	10.855	10.472	50.160		
5. Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	%	0	0	0	100	100	100	0,00
SK15 Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA								
1. Tingkat layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	%	100	100	100	100	100	100	0,00
Learning & Growth:								
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA								
SK16 Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (SDA)	%	100	100	100	100	100	100	0,00
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya								
SK17 Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)	%	100	100	100	100	100	100	0,00
SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo								
1 Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo								



Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Outcome					Target Outcome Renstra (2015-2018)	Backlog Terhadap Renstra
		2015	2016	2017	2018	2015-2018		
SK18 Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur sidoarjo								
1. Tingkat layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	%	0	0	0	93	93	0	93,00
SK19 Peningkatan layanan sarana dan prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo								
1. Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur sidoarjo	Km	0	0	0	1,77	1,77	0	1,77
2. Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur sidoarjo	Km	0	0	0	4,15	4,15	0	4,15
3. Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur sidoarjo	Km	0	0	0	13,5	13,50	0	13,50
4. Teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong	Juta m^3	0	0	0	33,97	33,97	0	33,97
5. Tertatanya kawasan diluar PAT	Hektar	0	0	0	10	10	0	10,00
Learning & Growth:								
Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA								
SK16 Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (SDA)	%	100	100	100	100	100	100	0,00
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya								
SK17 Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)	%	100	100	100	100	100	100	0,00



Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2015-2018 dengan target Renstra sampai dengan Tahun 2018 secara rinci secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. SP2 Meningkatnya Ketahanan Air

   a. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, capaian 2015-2018 terhadap SK1 Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku :

      1) Sub indikator i) tingkat layanan sarana dan prasarana air baku mencapai 24,92 m^3/detik, terdapat *backlog* sebesar -20,6 m^3/detik dari target Renstra 45,52 m^3/detik.

      2) Sub indikator ii) tingkat pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana air baku seperti semula mencapai 9,92 m^3/detik, terdapat *backlog* sebesar -5,23 m^3/detik dari target Renstra 15,15 m^3/detik.

   b. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, capaian 2015-2018 terhadap SK3 Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air :

      1) Sub indikator i) tingkat kapasitas tampung sumber air mencapai 109,212 juta m^3, dengan target Renstra 1.270,7 juta m^3 terdapat *backlog* sebesar -1.161,49 juta m^3.

      2) Sub indikator ii) tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula mencapai 495,77 juta m^3, dengan target Renstra 2.652 juta m^3 sehingga terdapat *backlog* sebesar 2.156,23 juta m^3.

      3) Sub indikator iii) tingkat potensi energi sumber air mencapai 112,34 MW dari target Renstra 120,25 MW sehingga terdapat *backlog* -7,91 MW.

   c. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, capaian 2015-2018 terhadap SK6 Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak :

      1) Sub indikator i) tingkat luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dengan jumlah luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun mencapai 72.382,58 hektar, dengan target Renstra 155.952 hektar terdapat *backlog* sebesar -83.569,42 hektar.



d. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, capaian 2015-2018 terhadap SK8 Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA terpadu :
   1) Sub indikator i) peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA diukur melalui pencapaian indeks RBO (*River Basin Organization) performance*, capaian hingga tahun 2018 sebesar 2,94 indeks sementara target indeks pada Renstra 3,29 sehingga terdapat *backlog* indeks sebesar -0.35.
e. Tingkat kinerja layanan irigasi, capaian 2015-2018 terhadap SK12 Peningkatan layanan kinerja irigasi :
   1) Sub indikator i) tingkat layanan jaringan irigasi mencapai 311.416 hektar, dengan target Renstra 788.130 hektar terdapat *backlog* sebesar -476.714 hektar.
   2) Sub indikator ii) tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi mencapai 1.219.249 hektar dari target Renstra 2.490.101 hektar sehingga terdapat *backlog* sebesar -1.270.852,49 hektar.
   3) Sub indikator iii) tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk mencapai 12,16% dengan target Renstra 12,60% terdapat *backlog* sebesar -0,44%.
f. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, capaian 2015-2018 terhadap SK14 Peningkatan kinerja layanan OP sarana dan prasarana sumber daya air :
   1) Sub indikator i) terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku mencapai 131,38 m^3/detik, jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 81,75 m^3/detik terdapat deviasi positif sebesar 49,63 m^3/detik.
   2) Sub indikator ii) terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air mencapai 12.679 juta m^3, dengan target Renstra sebesar 13.803 juta m^3 terdapat *backlog* sebesar -1.124 juta m^3.

3) Sub indikator iv) terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi mencapai 3.581.530 hektar, dengan target Renstra sebesar 3.519.694 hektar terdapat deviasi positif 61.835,81 hektar.

2. SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo

a. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, target kinerja pada sasaran kegiatan peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo belum terakomodir di Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air 2015-2017, sehingga pada uraian ini tidak dapat diperbandingkan.

b. Perbandingan Target dan Capaian Sasaran Strategis sampai dengan Tahun 2018 (2015-2018)

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terjadi perubahan peta strategi yang mengakibatkan perubahan sasaran strategis Ditjen Sumber Daya Air yang semula mendukung 2 Sasaran Strategis yaitu Tingkat dukungan untuk ketahanan air nasional dan Tingkat dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, berdasarkan hasil reviu Renstra paruh waktu, Ditjen Sumber Daya Air saat ini hanya mendukung 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Ketahanan Air. Meskipun demikian target kinerja sasaran strategis tidak mengalami perubahan. Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2015-2018 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16 Perbandingan Target dan Capaian Sasaran Strategis 2015-2018

Sasaran Strategis	2015	2016	2017	2018	2019
Target pada Renstra Kementerian PUPR	45,83%	50,33%	54,83%	59,33%	63,43%
Target pada Renstra Ditjen Sumber Daya Air	52,66%	53,93%	55,15%	56,33%	57,28%
Capaian	52,56%	53,15%	54,15%	82,94%	



4.3 Analisis Kinerja

4.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan, Sasaran Program dan Strategis Strategis

A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

a. Sasaran Kegiatan SK1 Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku

Evaluasi capaian kinerja sasaran kegiatan SK1, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.10, kinerja SK1 didukung oleh 2 sub indikator yaitu i) tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, dengan target 9,23 m^3/detik, realisasi kinerja sebesar 7,46 m^3/detik atau sebesar 81%. Untuk sub indikator ii) tingkat pengembalian fungsi debit dan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula, dengan target 0,37 m^3/detik, realisasi kinerja sebesar 0,33 m^3/detik atau sebesar 89%.

Dua sub indikator ini mendukung kinerja SK1 dengan bobot masing-masing 70% untuk sub indikator 1 dan 30% untuk sub indikator 2, sehingga capaian kinerja SK1 sebesar 83%.

b. Sasaran Kegiatan SK2 Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah dan Air Baku

Capaian kinerja SK2 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat pelayanan pembinaan bidang air tanah dan air baku yang dilaksanakan oleh unit kerja Pusat Air Tanah dan Air Baku, dengan target 1 N/S/P/K bidang air tanah dan air baku serta 34 BBWS/BWS yang dibina dalam bidang air tanah dan air baku. Target ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK2 ini, indikator yang diukur hanya pada 2 (dua) komponen *output* N/S/P/K dan BBWS/BWS yang dibina, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.



c. Sasaran Kegiatan SK3 Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber-sumber Air

Capaian kinerja SK3 didukung oleh 3 (tiga) sub indikator yaitu i) tingkat kapasitas tampung sumber air dengan target 235,23 juta m^3, realisasi kinerja sebesar 73,2 juta m^3 atau sebesar 31%. Untuk sub indikator ii) tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula, dengan target 110,96 juta m^3 dan realisasi 111,07 juta m^3 atau sebesar 100%, dan sub indikator iii) tingkat potensi energi sumber air dengan target 1 MW, realisasi 0,5 MW atau sebesar 50%.

Tiga sub indikator ini mendukung kinerja SK3 dengan bobot masing-masing untuk sub indikator 1 sebesar 60%, sub indikator 2 sebesar 35%, dan sub indikator 3 sebesar 5% sehingga capaian kinerja SK3 sebesar 56,2%.

d. Sasaran Kegiatan SK4 Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Bendungan, Danau, dan Penampung Air lainnya

Capaian kinerja SK4 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat pelayanan pembinaan bidang bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan oleh unit kerja Pusat Bendungan, dengan target 2 N/S/P/K bidang bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya serta 34 BBWS/BWS yang dibina dalam bidang bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya. Target ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK4 ini, indikator yang diukur hanya pada 2 (dua) komponen *output* N/S/P/K dan BBWS/BWS yang dibina, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

e. Sasaran Kegiatan SK5 Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Keamanan Bendungan

Capaian kinerja SK5 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat pelayanan pembinaan bidang keamana bendungan, danau dan bangunan penampung air



lainnya yang dilaksanakan oleh unit kerja Balai Bendungan, dengan target 4 N/S/P/K bidang keamanan bendungan, 2 dokumen rencana dan program kerja Balai Bendungan, serta 33 instansi yang dilayani dalam rangka layanan teknis bidang keamanan bendungan. Target ini tercapai 97,44%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK5 ini, indikator yang diukur hanya pada 3 (tiga) komponen *output* N/S/P/K, dokumen rencana dan program kerja, serta instansi yang dilayani, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

f. Sasaran Kegiatan SK6 Peningkatan Kapasitas Pengendalian Daya Rusak

Capaian kinerja SK6 didukung oleh 2 (dua) sub indikator yaitu i) tingkat luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dengan target jumlah luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun (bobot 70%) sebesar 18.937,78 hektar, realisasi kinerja sebesar 15.984,9 hektar atau sebesar 84%; target jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dibangun (bobot 20%) sebesar 2,226 juta m^3 realisasi kinerja sebesar 2,223 juta m^3 atau 99,87%; dan target jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dibangun (bobot 10%) sebesar 22,45 Km realisasi 22,45 Km atau 100%. Tiga komponen *output* ini mendukung kinerja sub indikator 1 dengan bobot masing-masing untuk komponen *output* 1 sebesar 70%, *output* 2 sebesar 20% dan *output* 3 sebesar 10%, sehingga kinerja sub indikator 1 sebesar 89%.

Untuk sub indikator ii) tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, dengan target jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (bobot 70%) sebesar 5.036,2 hektar dan realisasi 5.035,2 hektar atau sebesar 99,98%;

target jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi (bobot 20%) sebesar 0,82 juta m3 dan realisasi 0,82 juta m3 atau 100%; dan target jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (bobot 10%) sebesar 0,11 Km, realisasi 0,11 Km atau 100%. Tiga komponen *output* ini mendukung kinerja sub indikator 1 dengan bobot masing-masing untuk komponen *output* 1 sebesar 70%, *output* 2 sebesar 20% dan *output* 3 sebesar 10%, sehingga kinerja sub indikator 1 sebesar 99,99%.

Dua sub indikator ini mendukung kinerja SK6 dengan bobot masing-masing untuk sub indikator 1 sebesar 70%, dan sub indikator 2 sebesar 30%, sehingga capaian kinerja SK6 sebesar 92,34%.

g. Sasaran Kegiatan SK7 Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Sungai dan Pantai

Capaian kinerja SK7 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat pelayanan pembinaan bidang sungai dan pantai yang dilaksanakan oleh unit kerja Direktorat Sungai dan Pantai, dengan target 0 N/S/P/K bidang sungai dan pantai, serta 34 BBWS/BWS yang dibina dalam bidang sungai dan pantai. Target ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK7 ini, indikator yang diukur hanya pada 2 (dua) komponen *output* N/S/P/K dan BBWS/BWS yang dibina, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

h. Sasaran Kegiatan SK8 Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan SDA

Capaian kinerja SK8 didukung oleh 1 (satu) sub indikator peningkatan indeks RBO yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS. Pengukuran kinerja berdasarkan indeks RBO *performance* yang dikeluarkan oleh NARBO meliputi 15 indikator (telah dijelaskan pada Bab 2). Dari 34 BBWS/BWS indeks RBO performance rata-rata



dari yang ditargetkan sebesar 3,02 indeks, realisasi indeks yang dicapai sebesar 2,94 indeks atau 97,35%.

i. **Sasaran Kegiatan SK9 Peningkatan Layanan Pembinaan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu**

Capaian kinerja SK9 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu yang dilaksanakan oleh unit kerja Direktorat Bina Penatagunaan SDA, dengan target 0 N/S/P/K bidang tata kelola pengelolaan SDA terpadu, 34 BBWS/BWS yang dibina dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan pusat, 34 BBWS/BWS yang dibina dalam pengelolaan kelembagaan pengelolaan SDA, 34 BBWS/BWS yang dibina dalam pemanfaatan sumber daya air, 34 BBWS/BWS yang dibina dalam pengelolaan hidrologi, kualitas air dan lingkungan SDA, serta 0 draft pengaturan pengelolaan SDA. Capaian target yang mendukung SK9 ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK9 ini, indikator yang diukur hanya pada komponen *output* N/S/P/K dan BBWS/BWS yang dibina, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

j. **Sasaran Kegiatan SK10 Peningkatan Layanan Manajemen BBWS/BWS**

Capaian kinerja sasaran kegiatan SK10 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat layanan manajemen BBWS/BWS yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dengan target 149 dokumen rencana dan program kerja BBWS/BWS dan 243 layanan ketatalaksanaan BBWS/BWS. Capaian target yang mendukung SK10 ini tercapai 99,3%.

k. Sasaran Kegiatan SK11 Peningkatan Layanan Kesekretariatan Dewan SDA Nasional

Capaian kinerja SK11 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional dengan target 4 dokumen konsep kebijakan dan program pengelolaan SDA Nasional serta 1 layanan data dan informasi Sekretariat Harian Dewan SDA Nasional. Capaian pada SK ini sebesar 100%.

l. Sasaran Kegiatan SK12 Peningkatan Layanan Kinerja Irigasi

Capaian kinerja SK 12 didukung oleh 3 (tiga) sub indikator yaitu i) tingkat layanan jaringan irigasi dengan target 54.765 hektar, realisasi 40.267 hektar atau sebesar 74%. Sub indikator ii) tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi dengan target 181.995 hektar, realisasi 162.986 hektar atau sebesar 90%, serta sub indikator iii) tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk dengan target 7.182 hektar (penambahan potensi 12,14%), realisasi 8.471 hektar (penambahan potensi 12,16%), atau realisasi sebesar 100%.

Tiga sub indikator ini mendukung kinerja SK12 dengan bobot masing-masing untuk sub indikator 1 sebesar 60%, sub indikator 2 sebesar 35%, dan sub indiaktor 3 sebesar 5%, sehingga capaian kinerja SK12 sebesar 84,69%.

m. Sasaran Kegiatan SK13 Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Irigasi dan Rawa

Capaian kinerja SK13 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat pelayanan pembinaan bidang irigasi dan rawa yang dilaksanakan oleh unit kerja Direktorat Irigasi dan Rawa, dengan target 0 N/S/P/K bidang irigasi dan rawa, serta 34 BBWS/BWS yang dibina dalam bidang irigasi dan rawa. Target ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK13 ini, indikator yang diukur hanya pada 2 (dua) komponen *output* N/S/P/K dan BBWS/BWS yang dibina, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung



pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

n. **Sasaran Kegiatan SK14 Peningkatan Kinerja Layanan OP Sarana Prasarana Sumber Daya Air**

Capaian kinerja SK14 didukung oleh 5 (lima) sub indikator yaitu i) terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana air baku, dengan target dan realisasi sebesar 131,38 m3/detik atau 100%.

Sub indikator ii) terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air dengan target dan realisasi 4.477 juta m3 atau sebesar 100%.

Sub indikator iii) terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dengan target pada komponen *output* Jumlah luas kawasan yang selalu terlindungi dari daya rusak air oleh saran prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (bobot 70%) sebesar 178.050 hektar, target komponen *output* Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dioperasikan dan dipelihara (bobot 20%) sebesar 600 buah, dan target komponen *output* Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengaman pantai yang dioperasikan dan dipelihara (bobot 10%) sebesar 163,86 Km. Target pada semua komponen *output* yang mendukung sub indikator ini tercapai 100%.

Sub indikator iv) terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi dengan target dan realisasi 2.947.791 hektar atau sebesar 100%.

Sub indikator v) terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA dengan realisasi 100%.

Lima sub indikator ini mendukung kinerja SK14 dengan bobot masing-masing untuk sub indikator 1 sebesar 25%, sub indikator 2 sebesar 25%, sub indikator 3 sebesar 23%, sub indikator 4 sebesar 25% dan sub indikator 5 sebesar 2%, sehingga capaian kinerja SK14 sebesar 100%.

o. **Sasaran Kegiatan SK15 Peningkatan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA**

Capaian kinerja SK15 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat pelayanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA yang dilaksanakan oleh unit kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, dengan target 2 N/S/P/K bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, 34 BBWS/BWS yang dibina dalam bidang OP infrastruktur SDA, 34 Pemda yang dibina dalam bidang OP infrastruktur SDA, 10 unit peralatan pendukung OP, dan 1 layanan tanggap darurat akibat bencana. Target ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK15 ini, indikator yang diukur hanya pada 5 (lima) komponen *output* N/S/P/K, BBWS/BWS yang dibina, Pemda yang dibina, peralatan pendukung OP dan layanan tanggap darurat, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

p. **Sasaran Kegiatan SK16 Peningkatan Pembinaan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pengelolaan SDA**

Capaian kinerja SK16 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman dan penganggaran pengelolaan SDA, yang dilaksanakan oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, dengan target 0 N/S/P/K bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen Sumber Daya Air, 34 BBWS/BWS yang dibina dalam bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen Sumber Daya Air. Target ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK16 ini, indikator yang diukur hanya pada 2 (dua) komponen *output* N/S/P/K dan BBWS/BWS yang dibina, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung



pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

q. **Sasaran Kegiatan SK17 Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya**

Capaian kinerja SK17 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, yang dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air, dengan target 34 BBWS/BWS yang dibina dalam manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Target ini tercapai 100%. Jika kita perhatikan capaian kinerja untuk SK17 ini, indikator yang diukur hanya pada komponen *output* BBWS/BWS yang dibina, memang tidak akan setara dengan kinerja yang diukur pada triwulan IV karena ada paket pekerjaan di unit kerja yang sifatnya tidak rutin dan tidak mendukung langsung pencapaian kinerja sasaran kegiatan namun membebani kinerja fisik dan keuangan secara keseluruhan.

r. **Sasaran Kegiatan SK18 Peningkatan Layanan Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo**

Capaian kinerja SK18 didukung oleh 1 (satu) sub indikator tingkat layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh unit kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, dengan target dan realisasi 3 NSPK pengendalian lumpur, target 1 layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo terealisasi 7 layanan, target 50 berkas dampak sosial yang ditangani terealisasi 40 berkas, serta target dan realisasi 1 layanan dukungan manajemen PPLS. Target ini tercapai 93%.

s. **Sasaran Kegiatan SK19 Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo**

Capaian kinerja SK19 didukung oleh 5 (lima) sub indikator yaitu i) tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo dengan target dan realiasi 1,77 km tanggul dan infrastruktur lain yang dibangun atau 100%.

Sub indikator ii) tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo dengan target sebesar 3,34 km realisasi 4,15 km atau sebesar 100%.

Sub indikator iii) terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo dengan target dan realisasi 13,5 km atau sebesar 100%.

Sub indikator iv) teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong dengan target 40 juta m3, realisasi sebesar 33,97 juta m^3 atau sebesar 85%.

Sub indikator v) tertatanya kawasan diluar PAT dengan target 2 hektar dan realisasi 10 hektar atau sebesar 100%.

Lima sub indikator tersebut masing-masing mempunyai kontribusi bobot terhadap pencapaian kinerja SK19, yaitu untuk sub indiaktor 1 dengan bobot 10%, sub indikator 2 dengan bobot 5%, sub indikator 3 dengan bobot 10%, sub indikator 4 dengan bobot 70%, dan indikator 5 dengan bobot sebesar 5%, sehingga kinerja SK19 sebesar 89%.

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program

1. Sasaran Program SP2 "Meningkatnya Ketahanan Air"

Capaian kinerja pada sasaran program diperhitungkan secara berjenjang (*cascade*), didukung oleh capaian kinerja sasaran kegiatan SK berdasarkan bobot masing-masing yang telah ditetapkan. Indikator sasaran program SP2 didukung oleh 6 (enam) indikator sasaran program dengan 15 (lima belas) sasaran kegiatan pada level *internal process*, dan didukung oleh 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) sasaran kegiatan pada level *learning and growth*, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, mempunyai bobot 10% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu SK1 Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku, mempunyai bobot 90% (terhadap indikator sasaran



program), dengan capaian 83%. Dukungan selanjutnya dari SK2 Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku, mempunyai bobot 10% (terhadap indikator sasaran program), dengan capaian 100%. Kedua SK ini berkontribusi dalam pencapaian indikator tingkat layanan sarana dan prasarana air baku sebesar 8,5% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan.

b. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, mempunyai bobot 30% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran kegiatan, yaitu SK3 Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air, mempunyai bobot 85% (terhadap indikator sasaran program), dengan capaian 56,2%. Dukungan selanjutnya dari SK4 Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan penampung air lainnya, mempunyai bobot 10% (terhadap indikator sasaran program), dengan capaian 100%. Dukungan terakhir dari SK5 Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan, mempunyai bobot 5% (terhadap indikator sasaran program), dengan capaian 97,4%. Ketiga SK ini berkontribusi dalam pencapaian indikator tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air sebesar 18,8% tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 24%. Target pada indikator ini tidak tercapai dipengaruhi oleh rencana penambahan kapasitas tampung dari bendungan dan embung yang selesai sebesar 235,235 juta m^3 terealisasi penambahan kapasitas tampung sebesar 73,2 juta m^3.

c. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, mempunyai bobot 15% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu SK6 Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak, mempunyai bobot 90% (terhadap indikator sasaran program), dengan capaian 92,34%, serta SK7 Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai, mempunyai bobot 10% (terhadap indikator sasaran program), dengan capaian kinerja 100%. Kedua SK ini berkontribusi terhadap

capaian indikator SP tingkat kapasitas pengendalian daya rusak sebesar 14% melebihi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 13,5%.

d. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, mempunyai bobot 5% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 4 (empat) sasaran kegiatan, yaitu SK8 Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, mempunyai bobot 80% (terhadap indikator sasaran program), capaian kinerja sebesar 97,35%. Dukungan selanjutnya dari SK9 Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu, mempunyai bobot 10% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja 100%. Dukungan SK10 Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS, mempunyai bobot 8% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja 100%, dan SK11 Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional, mempunyai bobot 2% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja 100%. Keempat SK ini berkontribusi terhadap capaian indikator SP tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA sebesar 4,9% tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 5%. Hal ini dikarenakan penilaian RBO performance indeks sebagai indikator tata kelola pengelolaan SDA terpadu sebesar 2,94, tidak memenuhi target indeks yang direncanakan sebesar 3,02.

e. Tingkat kinerja layanan irigasi, mempunyai bobot 25% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu SK12 Peningkatan layanan kinerja irigasi, mempunyai bobot 90% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 84,69 %. Dukungan SK13 Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawa, mempunyai bobot 10% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja 100%. Kedua SK ini berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator SP tingkat kinerja layanan irigasi sebesar 21,6% melebihi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 21%.



f. Tingkat kinerja operasi pemeliharaan, mempunyai bobot 10% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu SK14 Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air, mempunyai bobot 90% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dukungan SK15 Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, mempunyai bobot 10% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja 100%. Kedua SK ini berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator SP tingkat kinerja operasi pemeliharaan sebesar 10% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan.

g. Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, mempunyai bobot 3% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu SK16 Peningkatan pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, mempunyai bobot 100% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 100%. SK ini berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator SP tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA sebesar 3% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 3%.

h. Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, mempunyai bobot 2% (terhadap Sasaran Program SP2). Indikator sasaran program ini didukung oleh 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu SK17 Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, mempunyai bobot 100% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 100%. SK ini berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator SP tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar 2% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 2%.



2. Sasaran Program SP3 "Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo"

Capaian kinerja pada sasaran program diperhitungkan secara berjenjang (*cascade*), didukung oleh capaian kinerja sasaran kegiatan SK berdasarkan bobot masing-masing yang telah ditetapkan. Indikator sasaran program SP3 didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran program dengan 2 (dua) sasaran kegiatan pada level *internal process*, dan didukung oleh 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) sasaran kegiatan pada level *learning and growth*, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, mempunyai bobot 95% (terhadap Sasaran Program SP3). Indikator sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu SK18 Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo, mempunyai bobot 25% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 93%. Dukungan SK19 Peningkatan layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, mempunyai bobot 75% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 89%. Kedua SK ini berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator SP tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo sebesar 85,75% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 85,5%.

b. Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, mempunyai bobot 2% (terhadap Sasaran Program SP3). Indikator sasaran program ini didukung oleh 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu SK16 Peningkatan pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, mempunyai bobot 100% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 100%. SK ini berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator SP tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA sebesar 2% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan.



c. Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, mempunyai bobot 3% (terhadap Sasaran Program SP3). Indikator sasaran program ini didukung oleh 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu SK17 Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, mempunyai bobot 100% (terhadap indikator sasaran program) dengan capaian kinerja sebesar 100%. SK ini berkontribusi terhadap capaian kinerja indikator SP tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar 3% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil pengukuran masing-masing indikator sasaran program, pengukuran sasaran program SP2 Meningkatnya Ketahanan Air dengan bobot 97% (terhadap sasaran strategis), kinerja mencapai 81,96% tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 87%. Pengukuran SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo dengan bobot 3% (terhadap sasaran strategis), kinerja mencapai 90,8% memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 90,5%.

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran program SP2 Meningkatnya Ketahanan Air, yang mempunyai bobot 97% dengan capaian kinerja sebesar 81,96%, serta pengukuran sasaran program SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo, yang mempunyai bobot 3% dengan capaian kinerja sebesar 90,8%. Capaian kinerja sasaran strategis (SS) Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi sebesar 82,20% tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan sebesar 87,10%.

Jika diperbandingkan terhadap target sasaran strategis sebagaimana yang dituangkan dalam Renstra Ditjen Sumber Daya Air 2015 – 2019 (reviu paruh waktu) dimana persentase dukungan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi sebesar 56,33%, target penambahan

persentase terhadap sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 Ditjen Sumber Daya Air tercapai.

Namun jika dibandingkan dengan Perjanjian Kerja TA, 2018, angka ini sedikit lebih rendah 4,9%. Perbedaan ini diakibatkan adanya perubahan cara perhitungan sebagaimana diamanatkan pasca review Renstra Ditjen Sumber Daya Air pada pertengahan tahun 2018. Semula, cara perhitungan memperhitungkan bahwa Ditjen Sumber Daya Air memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), yaitu Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, serta Meningkatnya ketahanan air nasional. Pasca review Renstra Kementerian PUPR, SS Ditjen Sumber Daya Air diubah menjadi hanya 1 (satu) yaitu Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi sedangkan SS. Ketahanan Air diubah menjadi pada level Sasaran Program (SP).

4.3.2 Analisis Masalah dan Penyebab Kegagalan/Keberhasilan

Dari evaluasi dan analisis kinerja pencapaian sasaran kegiatan, sasaran program dan sasaran strategis diatas, didapati beberapa faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian target sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan selama pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Keberhasilan

1. Faktor Eksternal
   a) Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders (pemerintah daerah setempat, masyarakat calon penerima manfaat, Kementerian/Lembaga/instansi terkait, Lembaga Donor) sehingga permasalahan/kendala dapat dikurangi terutama terkait masalah sosial dan pembebasan lahan.
   b) Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang terkena dampak oleh Pemerintah Daerah setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan.



2. Faktor Internal
   a) Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, *feasibility study*, DED, Amdal, LARAP) yang dilakukan sejak awal tahun 2018.
   b) Kebijakan Menteri PUPR untuk melaksanakan lelang dini kegiatan TA 2018 yang telah dimulai sejak Oktober 2017.
   c) Sosialisasi yang berkesinambungan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BBWS/BWS.
   d) Komitmen dan penekanan pimpinan Kementerian PUPR untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing BBWS/BWS/Satuan Kerja/SNVT.
   e) Rekayasa teknik dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian kendala teknis pelaksanaan di lapangan.
   f) Dukungan penggunaan sistem SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) yang membantu ULP dan POKJA dalam pelaksanaan proses pelelangan.
   g) Dukungan sistem *e-monitoring online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.
   h) Penyelenggaraan sistem manajemen mutu di lingkungan Satuan Kerja dan SNVT yang semakin meningkat melalui penerapan audit internal.

b. Faktor Kegagalan

1. Masalah pembebasan lahan
   a) Terlambatnya penyediaan alokasi dana untuk pembebasan tanah dari LMAN
   b) Tidak tersedianya lahan bebas untuk pelaksanaan konstruksi akibat terlambatnya pembebasan tanah (Bendungan Karian, Bendungan Sindang Heula, Bendungan Paselloreng, Bendungan Sukamahi, Bendungan Karalloe, Pengadaan Tanah Danau Limboto).
   c) Proses pembebasan lahan yang tidak tuntas yang disebabkan antara lain proses IPPKH (Bendungan Cipanas), belum adanya kesepakatan nilai ganti

rugi (Bendungan Leuwikeris), terkendala persoalan kelengkapan administrasi keuangan (Bendungan Bendo).

d) Pembebasan lahan oleh Pemda setempat belum dilakukan (Bendungan Napun Gete). Diperlukan koordinasi dengan Pemda setempat sehingga proses pembebasan lahan dapat dilaksanakan secepatnya.

2. Administrasi

a) Belum adanya *Loan agreement*/*Loan* belum efektif pada beberapa kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan (*Loan* URSIS pada Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Sragi I, *Loan* ESP pada *Engineering Service for Bangka Island Flood Management Subproject, Muara Juloi Multipurpose Dam Development Subproject*).

b) Keterlambatan revisi DIPA sehingga waktu yang tersisa sampai dengan akhir tahun anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan (Pembangunan Bendungan Jlantah, Appraisal tanah Bendungan Bener, Appraisal Pembangunan Bendungan Karian, BOP Pengadaan Tanah untuk pemindahan jalur SUTT).

c) Keterlambatan terbitnya ijin *multi years contract* (MYC) mengakibatkan keterlambatan administrasi (Supervisi Konstruksi Bendungan Sadawarna.

d) Prosedur administrasi pengadaan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan lelang ditingkat lembaga donor memakan waktu panjang sehingga waktu pelelangan tidak mencukupi.

e) Pelaksanaan kontrak beberapa paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada akhir tahun 2018, sehingga tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran (Pembangunan Bendungan Meninting, Bendungan Bagong, Bendungan Rukoh, Bendungan Manikin, Bendungan Beringin Sila).

3. Permasalahan teknis di lapangan antara lain terkendala cuaca sehingga sisa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan (Pembangunan Pelindung Tebing Danau Sipin), kendala teknis perubahan bentuk geokomposit (Revitalisasi Danau Tempe Kab.



Sidrap), keterlambatan pekerjaan penimbunan batu pada beberapa pekerjaan utama (bendungan utama, *upstream cofferdam*, *saddle dam* pada Pembangunan Bendungan Karian), keterlambatan pekerjaan *conduit* yang mengakibatkan pekerjaan konstruksi bendungan tidak dapat dilaksanakan (Bendungan Lolak), keterlambatan desain *conduit* oleh konsultan supervisi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan konstruksi di lapangan (Bendungan Ciawi).

4. Permasalahan sosial terdapat penolakan masyarakat sehingga konstruksi belum dapat dilaksanakan/pemutusan kontrak (Pembangunan Bendungan Mbay, Bendungan Pamakkulu, Pembangunan Embung Cihaurseah, Studi investigasi tambahan untuk DD Waduk Wonodadi).
5. Pembatalan/penundaan pelelangan paket kontraktual

   Terdapat paket kontraktual yang tidak dilanjutkan (drop) karena desain/reviu desain belum siap, belum ada *Loan agreement*, *annual work plan* yang tidak sesuai.
6. Pagu blokir

   Terdapat alokasi dana yang masih diblokir sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, antara lain pembangunan gedung, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan alat berat, cadangan bencana, bantuan sosial di PPLS, dan beberapa *Loan* yang belum efektif.
7. Sisa kegiatan dan sisa lelang

   Terdapat sisa lelang paket-paket kontraktual yang tidak dapat dimanfaatkan baik berasal dari rupiah murni maupun sisa SBSN yang tidak mendapat persetujuan Menteri Keuangan, dan sisa kegiatan swakelola yang tidak terserap.

4.3.3 Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari evaluasi kinerja yang diuraikan diatas, ketersediaan anggaran yang ada telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas dan fungsi Ditjen Sumber Daya Air. Penggunaan sumber daya anggaran mendukung untuk visi dan misi Kementerian PUPR



yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Pembangunan sumber daya air telah menekankan pada dukungan untuk tercapaianya program strategis nasional, melalui pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, penyediaan air baku, dan pengendalian daya rusak air.

Secara umum pengertian efisiensi adalah merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, sumber daya manusia, biaya dan sarana atau peralatan untuk menghasilkan satu satuan *output* dan yang tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti. Dari hasil realisasi capaian kinerja tahun 2018, pencapaian sasaran program dan sasaran strategis cukup memuaskan. Jika dilihat dari 6 (enam) indikator sasaran program untuk SP2 Meningkatnya Ketahan Air dan 1 (satu) indikator sasaran program SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo, capaian 2 (dua) indikator sasaran program tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air dan tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA.

Secara umum, sarana dan prasarana sumber daya air yang dibangun tahun 2018 telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu diarahkan untuk mendukung pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan, dukungan untuk pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, perdesaan dan perbatasan), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang handal.

Dalam mencapai hasil pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien, tidak terlepas dari dukungan anggaran, SDM, dan peralatan yang tersedia.

a. Alokasi Dana DIPA TA 2018



Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 3 diatas, pada awal TA 2018 alokasi anggaran dalam DIPA Tahun 2018 sebesar Rp. 37.309.551.551.000 dan pada akhir Triwulan IV alokasi anggaran menjadi Rp. 37.825.259.130.000.

Berdasarkan data *e-monitoring online*, progres penyerapan akhir keuangan TA 2018 sebesar 86,76% atau Rp. 32,81 Triliun dengan capaian progres fisik mencapai 89,86%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5,008 Triliun (13,24%) yang tidak terpakai/terserap.

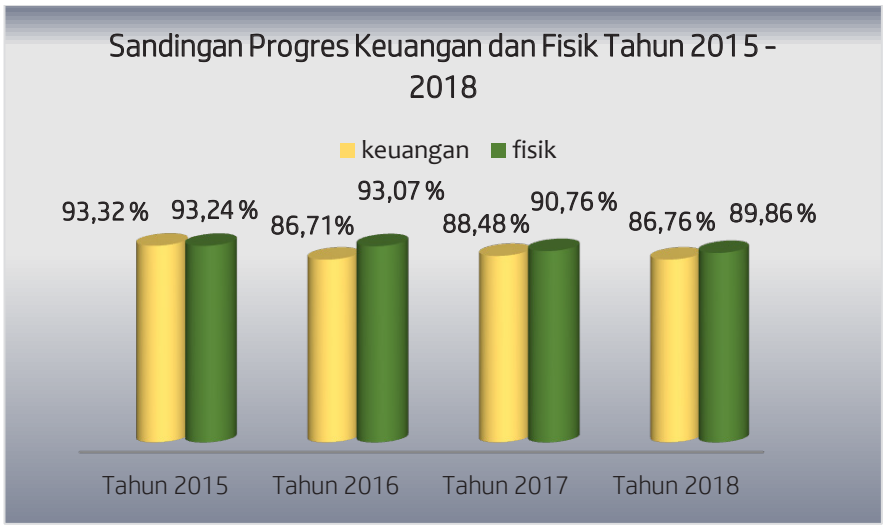
Jika diperhatikan dari anggaran yang tidak terserap, ada kondisi dimana antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan terdapat selisih progres sebesar 3,08% atau setara dengan Rp. 1,1 Triliun. Selisih ini berasal dari :

1) Sisa anggaran kegiatan administrasi umum sebesar Rp. 50,67 Miliar (administrasi kegiatan, gaji dan tunjangan, honorarium, operasional kendaraan, langganan daya dan jasa, dll).
2) Sisa anggaran kegiatan swakelola sebesar Rp. 220,23 Miliar (pekerjaan operasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, monitoring, dll.)
3) Sisa anggaran kegiatan kontraktual sebesar Rp. 832,45 Miliar (*single years contract*/SYC sebesar 40,15 Miliar, *multi years contract*/MYC baru sebesar Rp. 30 Miliar, dan *multi years contract*/MYC lanjutan sebesar Rp. 762,2 Miliar). Pada kegiatan yang bersifat MYC lanjutan sisa anggaran tidak terserap diakibatkan proses rekomposisi dana MYC yang baru disetujui menjelang akhir tahun anggaran sehingga tidak mencukupi waktu untuk melakukan revisi DIPA.

Selisih nilai realisasi fisik dengan keuangan tersebut diatas, terutama untuk sisa anggaran yang berasal dari kegiatan administrasi umum dan kegiatan swakelola dapat dikategorikan sebagai bentuk efisiensi anggaran, karena untuk menghasilkan satu satuan *output*, anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan dan tidak berdampak pada pemborosan.

Dari sisi alokasi anggaran dalam kurun waktu tahun 2015-2018 setiap tahun pagu Ditjen Sumber Daya Air mengalami peningkatan dari Rp. 31 Triliun pada Tahun

Anggaran 2015 meningkat menjadi Rp. 33,26 Triliun pada tahun 2017 dan Rp. 37,82 Triliun pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Gambar 4.9 dan Tabel 4.17 dibawah ini.



Gambar 4.9 Progres Keuangan dan Fisik Periode Tahun 2015-2018

Tabel 4.17 Tabel Progres Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 – 2018

Tahun	Pagu (Rp. Ribu)			Realisasi (Rp. Ribu)			Progres	
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total	Keu (%)	Fisik (%)
2015	28.810.776.054	2.291.073.739	31.101.849.793	26.993.072.530	2.032.258.820	29.025.331.350	93,32%	93,24%
2016	26.634.282.425	1.660.021.826	28.294.304.251	23.350.772.166	1.184.331.414	24.535.103.580	86,71%	93,07%
2017	31.599.787.242	1.667.843.930	33.267.631.172	28.502.532.424	930.607.167	29.433.846.285	88,48%	90,76%
2018	35.280.403.273	2.544.855.857	37.825.259.130	31.868.300.534	948.239.700	32.816.540.234	86,76%	89,86%

Dari Gambar 4.9 dan Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ini alokasi DIPA lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun realisasi penyerapan dan capaian target fisik cenderung turun karena adanya beberapa kendala sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

b. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diuraikan dalam Bab 3 (Kapasitas Organisasi) Ditjen Sumber Daya Air memiliki total jumlah pegawai sebanyak 8.208 orang, berstatus PNS pusat. Dalam pelaksanaan proses kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah (BBWS/BWS)



telah dilengkapi dengan personil-personil yang memadai dari sisi kuantitas dan kualitas. Bila dilihat dari tingkat pendidikan maka SDM yang ada pada Ditjen Sumber Daya Air didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA ke bawah dengan jumlah 3.828 orang (46,64%), selanjutnya adalah S1 dengan jumlah 2.876 orang (35,04%), S2 dengan jumlah 1.115 orang (14,07%), Diploma dengan jumlah 342 orang (4,16%), dan S3 berjumlah 7 orang (0,09%). Begitu halnya dengan gambaran komposisi PNS Ditjen Sumber Daya Air yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sebanyak 2.461 orang (29,98%) dan non teknik sebanyak 5.747 orang (70,02%).

Potret komposisi tersebut tentunya cukup mengkhawatirkan bagi organisasi dalam upaya mengejar target pembangunan infrastruktur sumber daya air. Mempertimbangkan hal tersebut, saat ini Ditjen Sumber Daya Air tengah melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia pada sisi kuantitas, Ditjen Sumber Daya Air telah melakukan upaya penataan tenaga honorer agar tenaga yang direkrut dapat berfungsi maksimal dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi. Di samping itu melalui proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2017 di Kementerian PUPR sebanyak 981 orang, Ditjen Sumber Daya Air memperoleh tambahan tenaga berstatus CPNS sebanyak 325 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan diploma Teknik Sipil sebanyak 42 orang.
2. Tingkat pendidikan sarjana sebanyak 275 orang, terdiri atas 256 orang sarjana Teknik Sipil, 6 orang sarjana Teknik Geodesi, 8 orang Sarjana Teknik Geologi, 1 orang sarjana Akuntansi, 1 orang sarjana Hukum, dan 3 orang sarjana Statistik.
3. Tingkat pendidikan paska sarjana sebanyak 8 orang dengan bidang ilmu *Hydraulic and Environmental, Hydrogeology*, Teknik Air Tanah, Teknik Pengairan, dan Teknik Sipil.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Ditjen Sumber Daya Air tengah melakukan pengembangan pelatihan berupa pelaksanaan bimbingan teknik



bidang sumber daya air kepada seluruh pegawai di lapangan baik teknik maupun non teknik, selain itu juga sedang dilakukan pengembangan jabatan fungsional teknik pengairan dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan para tenaga jabatan fungsional dan untuk mengatasi *gap* golongan antar pegawai. Hal ini didorong karena tengah terjadi gap yang cukup besar antara pegawai golongan III dan IV sehingga jika dibiarkan akan sulit mencari kaderisasi pejabat di masa datang.

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa PNS Ditjen Sumber Daya Air didominasi oleh PNS golongan III/b dengan jumlah 1.493 orang, dimana hal ini jika tidak dibangun strategi pengembangan jabatan fungsional yang memungkinkan seorang PNS dapat naik pangkat 2 tahun sekali, maka pada masa datang organisasi akan kehabisan kaderisasi yang sanggup mengejar persyaratan golongan dalam suatu jabatan Eselon III (administrator) ke atas.

Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia, tidak membuat kinerja Ditjen Sumber Daya Air menurun karena strategi pengembangan pegawai baik untuk PNS maupun Tenaga Honorer yang jika ditotal maka saat ini berjumlah 14.116 orang terus dilakukan secara konsisten. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diupayakan terselenggara secara optimal guna memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder, khususnya terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia Ditjen Sumber Daya Air.

Selanjutnya dalam hal pengukuran kinerja yang menyangkut keterkaitan antara indikator kinerja individu agar selaras dengan indikator kinerja atasannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air bersama Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR telah melakukan reviu penyusunan indikator kinerja individu berdasarkan penetapan kinerja dengan sampel BBWS Citanduy, BBWS Serayu Opakm dan BBWS Ciliwung Cisadane.

Begitu halnya dengan keterkaitan antara kinerja pegawai dengan pemberian reward dan punishment di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air telah diterapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :



- Kinerja dan *Reward* (Tunjangan Kinerja)

  Penerapan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian PUPR, pada pasal 15 ayat (2) mengamanatkan bahwa pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Sangat Baik, maka pada tahun berikutnya kepada pegawi tersebut diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% ditambah paling tinggi 50% dari selisih dengan besaran tunjangan kinerja kelas jabatan 1 tingkat di atasnya.

- Kinerja dan *Reward* (Pegawai Teladan)

  Pada setiap tanggal 3 Desember, Kementerian PUPR menetapkan dan memberikan penghargaan pegawai teladan kepada para pejabat/pegawai yang dinilai memiliki kinerja baik. Tahun 2017, 2 (dua) pegawai Ditjen Sumber Daya Air memperoleh predikat pegawai teladan dan pegawai berprestasi. Apresiasi yang diperoleh pegawai yang bersangkutan adalah kenaikan pangkat pilihan. Tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air mencoba untuk mengusulkan pegawai teladan namun tidak terpilih.

- Kinerja dan *Punishment*

  Setiap bulan November tahun anggaran berjalan, dilakukan evaluasi kinerja terhadap Pejabat Perbendaharaan terkait dengan catatan temuan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, perilaku disiplin, dan hasil penilaian kepala unit kerja. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pejabat perbendaharaan apakah layak untuk ditetapkan kembali atau tidak.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan anggaran Tahun 2018 diperlukan sarana dan peralatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditjen Sumber Daya Air baik di tingkat Pusat maupun Daerah (BBWS/BWS) sudah cukup memadai, sebagaimana dijelaskan pada Bab 3 diatas, yang meliputi :

a. Komputer dan peralatan komunikasi 16.543 Unit.



b. Kendaraan Dinas Operasional (KDO) 4.457 Unit.
c. Peralatan berat (Truck/dumptruck, excavator, loader, dredger) 7.556 unit.
d. Gedung Kantor, baik di Pusat maupun yang dimiliki masing-masing BBWS/BWS dengan jumlah 8.279 Unit.

Sarana dan prasarana diatas telah memberikan dukungan yang tinggi terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2018. Peralatan berat, peralatan komunikasi dan komputer serta kendaraan dinas operasional misalnya, telah memberikan andil yang besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam upaya terjaganya fungsi infrastruktur sumber daya air yang telah terbangun. Demikian juga dengan aplikasi sistem *e-monitoring online* juga menjadi andalan bagi tingkat pimpinan tinggi di Pusat untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing Unit Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Melalui sistem *e-monitoring online* dapat dilakukan pengendalian dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan bagi pekerjaan-pekerjaan yang mengalami masalah dan kendala di lapangan.

Dengan memanfaatkan dukungan ketiga input diatas proses pelaksanaan anggaran tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan program kegiatan yang ditetapkan sejak awal pengusulan anggaran TA 2018.

Keberhasilan capaian *output* diatas tidak terlepas dari kemampuan penanggungjawab kegiatan dan seluruh jajaran Ditjen Sumber Daya Air, di tingkat Pusat maupun di BBWS/BWS, untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dengan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, dari hasil pemantaun dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2018 bahwa kegiatan fisik yang memberikan *output* secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan program strategis yang ditetapkan, antara lain sesuai dengan direktif Presiden/Wakil Presiden RI, aspirasi DPR, arahan Menteri PUPR dan Renstra 2015-2019 Ditjen Sumber Daya Air.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan anggaran tahun 2018 Ditjen Sumber Daya Air dapat dikatakan efisien dari sisi penggunaan input yang tersedia yaitu dana, waktu, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia, untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan. Disamping itu, dengan seleksi usulan kegiatan yang ketat dengan memenuhi seluruh *readiness criteria* yang menjadi persyaratan sejak awal penyusunan DIPA 2018 dari Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka segala kendala dan hambatan di lapangan dapat diselesaikan. Dengan demikian dari hasil *output* yang dicapai dengan efisien telah memberikan dampak atau efek yang diharapkan telah tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

4.3.4 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2018 tersebut juga dilakukan upaya-upaya internal yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air. Upaya-upaya dimaksud, seperti :

a. Meningkatan pemahaman personil BBWS/BWS dalam penyelenggaraan sistem manajemen mutu sebagai alat untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
b. Meningkatkan SDM yang berkompeten dan berintegritas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan, dan kursus-kursus yang bersifat teknis dan administratif.
c. Meningkatkan budaya kerja berkinerja tinggi dan berintegritas, kegiatan ini dilakukan melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sejak tahun 2016 dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air, sebagai *pilot project* telah menetapkan BWS Sumatera V dan BBWS Pemali Juana sebagai unit satuan kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hingga tahun 2018 *pilot project* WBK dan WBBM pada 2 BBWS/BWS tersebut masih berlangsung, dan pada tahun berikutnya akan diusulkan 7 BBWS/BWS yang akan menerapkan WBK dan WBBM.

d. Meningkatkan pengelolaan regulasi, dengan pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pasca pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tersebut, Ditjen Sumber Daya Air telah berusaha untuk menyusun usulan peraturan-peraturan sebagai payung hukum sementara, dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan (selengkapnya daftar Peraturan Menteri PUPR yang ditetapkan pasca pembatalan UU No. 7 tahun 2004 disajikan dalam lampiran). Peraturan-peraturan yang telah diselesaikan, terdiri dari :
   1. 21 (dua puluh satu) Permen PUPR yang ditetapkan pada tahun 2015
   2. 3 (tiga) Permen PUPR yang ditetapkan pada tahun 2016
   3. 7 (tujuh) Permen PUPR yang ditetapkan pada tahun 2017
   4. 1 (satu) Permen PUPR yang ditetapkan pada tahun 2018, yaitu Permen PUPR No. 25/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi
e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT), dalam upaya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan Ditjen Sumber Daya Air telah memanfaatkan aplikasi sistem *e-monitoring Online* untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Selain itu, Ditjen Sumber Daya Air juga telah mengembangkan sistem manajemen perencanaan (*e-programming*). *E-progamming* dibangun untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan pemrograman didukung oleh teknologi informasi.
f. Meningkatkan layanan dukungan manajemen, berupa penyusunan NSPK (perencanaan dan pemograman SDA, tata kelola pengelolaan SDA Terpadu, NSPK



irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak, OP sarana dan prasarana SDA, pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai, keamanan Bendungan, penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku).

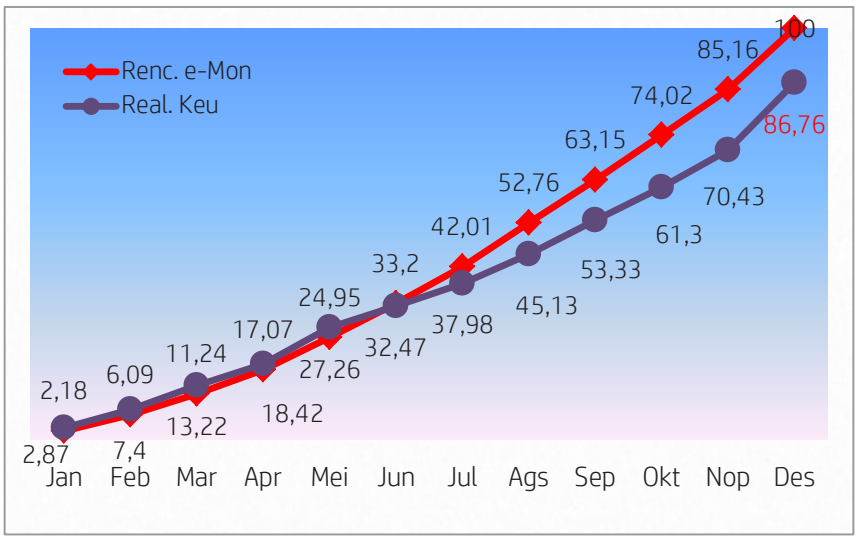
4.4 Realisasi Anggaran Tahun 2018

Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air Tahun 2018, Ditjen Sumber Daya Air pada awal Tahun anggaran 2018 (Januari 2018) mendapat anggaran dengan pagu sebesar Rp. 37.309.551.551.000.

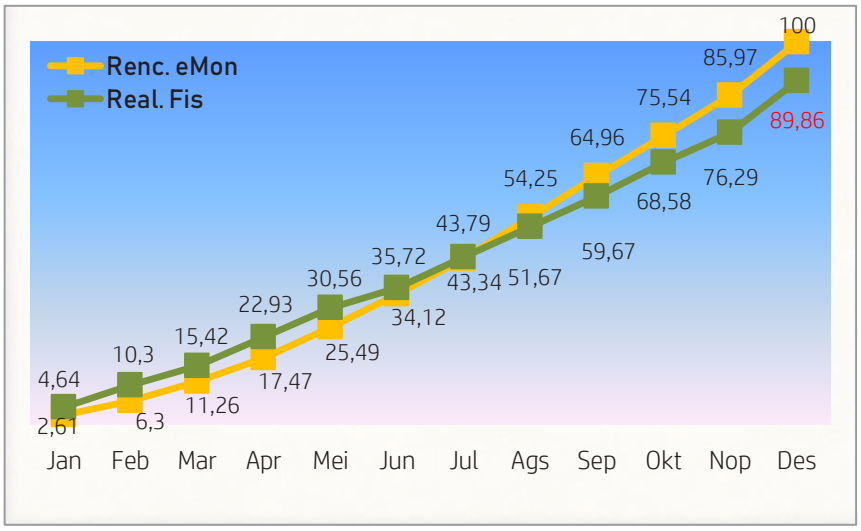
Jika dibandingkan pagu anggaran 2018 pada awal tahun dengan pagu akhir tahun anggaran relatif tidak mengalami perubahan. Hanya terjadi revisi pergeseran antar satker/SNVT, revisi buka blokir (gedung dan kendaraan), percepatan penarikan *Loan*, dan pergeseran dana bencana alam. Sehingga pagu DIPA TA 2018 mengalami revisi menjadi Rp. 37.825.259.130.000. Penyerapan keuangan sampai dengan akhir TA 2018 sebagai berikut : Progres terhadap DIPA SPAN (Rp. 37.825.259.130.000)

1) Progres keuangan : 86,76%, dari rencana 100%, deviasi 13,24%.
2) Progres fisik : 89,86%, dari rencana 100%, deviasi 10,14%.

Pada Gambar 4.10 dan 4.11 disajikan Kurva-S Rencana dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2018.



Gambar 4.10 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2018



Gambar 4.11 Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik Tahun 2018

Sampai dengan akhir Tahun anggaran 2018, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 5 Triliun atau sebesar 13,24% dari pagu DIPA Rp. 37,825 Triliun, antara lain:

a. Terdapat Rp. 1.086 Miliar dana tidak terserap karena permasalahan tanah (pembebasan/pengadaan tanah) yang belum tuntas antara lain pada Pengadaan tanah untuk pengendalian banjir Sungai Tondano, pengadaan tanah pengendalian banjir dan Rob Pekalongan, pembangunan jaringan irigasi D.I Nipah, pembebasan tanah untuk pembangunan D.I Rajui, pembangunan Bendungan Paselloreng, pembangunan Bendungan Sukamahi.
b. Terdapat Rp. 1.009 Miliar sisa dana pelaksanaan *multi years contract* (MYC) yang diakibatkan rekomposisi dan sisa lelang MYC (pagu masih tercantum dalam DIPA), antara lain Rehabilitasi prasarana pengendali banjir Sungai Bogowonto, rehabilitasi jaringan irigasi D.I Gondang, pembangunan DI Slinga Kiri.
c. Terdapat sisa dana bersumber dari SBSN sebesar Rp. 139 Miliar, antara lain pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Cikunten II, rehabilitasi jaringan irigasi DI Manganti, rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kalaena, pembangunan bangunan



pengaman pantai Desa Pasar Ipuh, pembangunan prasarana pengendali banjir Kaliyasa.

d. Terdapat sisa pelaksanaan sebesar Rp. 931 Miliar akibat tidak ditagihkan, sebagian besar merupakan kegiatan swakelola.

e. Terdapat Rp. 172 Miliar alokasi dana PLN (Pinjaman Luar Negeri) yang tidak terserap karena pelaksanaan ditunda akibat keterlambatan kesiapan lokasi, keterlambatan efektif *Loan*, keterlambatan proses administrasi *Loan*, antara lain *Engineering Service for Batam and Bintan Islands Flood Management Sub Project in Kepulauan Riau, Sentiong-Ancol Pump Station, Engineering Service for Bangka Island Flood Management Subproject, Consulting Services of Bali Beach Conservation Project.*

f. Terdapat Rp. 655,9 Miliar kegiatan mengalami keterlambatan kontrak sehingga tidak dapat dilaksanakan, antara lain pembangunan jaringan irigasi DI Bintang Bano, rehabilitasi besar Bendungan Merancang, penetapan sempadan Waduk Lempake, penyiapan dan penetapan izin operasi Bendungan Ponre-ponre.

g. Terdapat Rp. 108 Miliar kegiatan IPDMIP yang tidak terserap karena menunggu desain selesai, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi D.I SIM, D.I Mrican, DR Selakau Kompleks, D.I Ciliman, D.I Kosinggolan.

4.5 Dampak dan Manfaat

Salah satu tujuan Ditjen Sumber Daya Air, yaitu "Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi".

Dari hasil *output* yang diperoleh dalam penyelenggaraan anggaran Tahun 2018 yang diuraikan di atas akan memberikan manfaat yang besar bagi *stakeholders* terutama masyarakat di wilayah proyek yang dibangun/direhabilitasi antara lain berupa peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar proyek yang terbangun. Capaian *output* Tahun 2018 sebagai Tahun keempat Renstra 2015-2019 Ditjen Sumber Daya



Air mendukung pencapaian target sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Butir 4.3.

Dampak dan manfaat dari hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya air tahun 2018, antara lain :

a. Menambah dukungan ketersediaan suplai air irigasi pada areal pertanian beririgasi seluas 40.267 hektar, sehingga mampu meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar ± 0,297 juta ton GKG per Tahun, dengan asumsi produktivitas 5,16 ton GKG/ hektar, dengan IP 1,43.
b. Menambah dukungan akses kebutuhan air baku untuk kehidupan sehari-hari sebesar 7,46 m^3/detik atau setara dengan memenuhi air baku untuk 10,74 juta jiwa, dengan asumsi kebutuhan air baku 60 liter/jiwa/hari.
c. Mendukung tambahan kapasitas tampung sumber air sebesar 61,83 juta m^3, sehingga total tampungan sampai dengan Tahun 2018 sebesar 14,7 Miliar m^3 (tampungan sampai dengan tahun 2014 sebesar 13,557 Miliar m^3). Jika jumlah penduduk Tahun 2018 sebanyak ± 256,89 juta jiwa maka dapat meningkatkan tampungan per kapita menjadi 57,22 juta m^3/kapita/Tahun. Air tampungan dalam waduk dapat dimanfaatkan untuk air baku, irigasi, dll.

Berikut beberapa keberhasilan pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang memberikan dampak dan manfaat yang besar yang diselesaikan dalam Tahun 2018 pada Ditjen Sumber Daya Air :

1. Rehabilitasi D.I. Sidorejo

   Kegiatan ini berlokasi di kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan alokasi dana Rp. 106 Miliar untuk Saluran Induk dan Rp. 105 Miliar Saluran Sekunder, masa pelaksanaan secara MYC Lanjutan dari tahun 2015 – 2018. Manfaatnya adalah mengembalikan fungsi dalam mengaliri daerah irigasi seluas 7.938 hektar.



2. Pembangunan Daerah Irigasi Progopistan

Pembangunan D.I Progopistan dilaksanakan dari tahun 2016 – 2018, dengan alokasi dana Rp. 117 Miliar, kegiatan ini berlokasi di kabupaten Temanggung. Manfaatnya adalah mengaliri daerah irigasi seluas 1.108 hektar.



3. Pembangunan Saluran Suplesi Way Umpu Sistem

Kegiatan ini berlokasi di kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dengan masa pelaksanaan 2015-2018, alokasi dana sebesar Rp. 159 Miliar. Manfaatnya adalah mengaliri daerah irigasi seluas 3.860 hektar.



4. Pembangunan D.I Jambo Aye Kanan

Pembangunan D.I Jambo Aye Kanan berlokasi di Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur Provinsi Aceh, masa pelaksanaan 2016 – 2018, alokasi dana tahun 2018 Rp. 152,6 Miliar, dengan luas fungsional 1.000 hektar dan luas potensial 3.028 hektar, *output* saluran primer sepanjang 8.280 km dan saluran sekunder 34,338 km. manfaatnya adalah menambah Indeks Pertanaman (IP) dari 100% menjadi 200%.





5. Pembangunan Embung Serba Guna Pulau Laut – Tahap II

Kegiatan ini memiliki luas genangan 6,5 hektar, kapasitas tamping 170.000 m3, dengan alokasi anggaran Rp. 7,2 Miliar, berlokasi di kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Manfaatnya adalah sarana prasarana air baku sebesar 5 liter/detik dan listrik.



6. Pembangunan Embung Kota Jambi

Pembangunan Embung Kota Jambi memiliki kapasitas tamping 22.000 m^3, luas genangan 2 hektar, berlokasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan alokasi dana Rp. 6,6 Miliar, waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Manfaatnya adalah Untuk Air Baku, Irigasi, Pengendalian Banjir dan PLTMH.



7. Revitalisasi Danau UNS

Kegiatan ini berlokasi di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas danau 1,2 hektar, total volume air danau 7.959 m3, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, 180 hari kalender untuk masa pemeliharaan, alokasi dana Rp. 9,31 Miliar. Manfaatnya adalah 1) Mengendalikan Sedimentasi (Kolam Danau), 2) Menjaga kualitas air (dari limbah warga, sampah TPA), 3) Memperbesar kapasitas tampung air danau, 4) Mengatus lintasan alur sungai (Kali Kendil).



8. Pembangunan Pengendalian Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Bila (Tanru Tedong)

Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, waktu pelaksanaan 270 hari kalender, alokasi dana Rp. 7,76 Miliar, *output* Tanggul tanah 1.170 meter, pasangan bronjong 300 meter. Manfaatnya adalah Untuk Melindungi area pemukiman serta pertanian masyarakat sepanjang 1.250 m yang berlokasi di Kabupaten Sidrap Kecamatan Dua Pitue Desa Bila & Kampale.



9. Pembangunan Groundsill Sungai Cijolang

Pembangunan Groundsill Sungai Cijolang di Hilir Bendung Bantarheulang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan alokasi dana Rp. 2,76 Miliar, *outcome* 0,003 Juta m3, masa pelaksanaan 240 hari kalender. Manfaatnya adalah menahan laju sedimentasi.



10. Normalisasi Sungai Cimanuk Lama

Normalisasi Sungai Cimanuk Lama berlokasi di Kabupaten Indramayu, jenis pekerjaan galian alur, panjang penanganan 8 km, dengan alokasi anggaran Rp. 8,49 Miliar. Manfaatanya adalah mengamankan areal seluas 250 hektar.



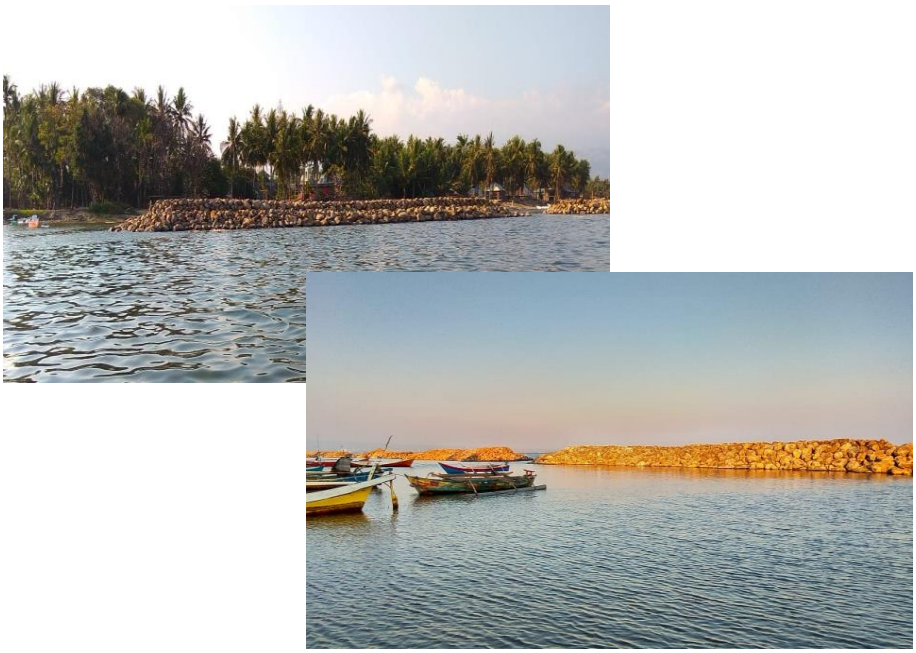
11. Pembangunan *Check dam* Sungai Cimanuk Kec. Cisurupan

Kegiatan ini berlokasi Sungai Cisurupan Kabupaten Garut dengan total panjang penanganan 1 buah, alokasi dana Rp. 6,692 Miliar. Manfaatnya adalah mengamankan areal seluas 0,005 jt m3, jenis konstruksi dinding pasangan beton.



12. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai

Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan *output* Urugan Batu 500 meter, masa pelaksanaan 270 hari kalender, alokasi dana Rp. 3,24 Miliar. Manfaatnya adalah Untuk Melindungi area pemukiman sepanjang 500 m yang berlokasi di Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Pompengan Pantai.



13. Pembangunan Prasarana Pengambilan Air Tanah untuk Air Baku (10 lokasi)

Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan volume 20 liter/detik, masa pelaksanaan 269 hari kalender, alokasi dana Rp. 8,6 Miliar. Manfaatnya adalah keterserdiaan air baku.






14. Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Wososukas

Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan alokasi dana Rp. 101,04 Miliar, debit 1,45 m3/detik, pelaksanaan 2016 – 2018. Manfaatnya adalah Penyediaan air baku sebesar 1.450 liter/detik.



15. Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Kabupaten Donggala

Kegiatan ini berlokasi di kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan *output* 2 titik, alokasi dana sebesar Rp. 7,65 Miliar. Manfaatnya adalah mengembalikan fungsi debit dan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula sebesar 0,005 m3/detik.



16. Bantuan Sosial Padat Karya (P3TGAI)

Perbaikan jaringan irigasi secara partisipatif merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses Pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran masyarakat petani sebagai pelaksana kegiatan.

Dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) disalurkan langsung ke Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) yang telah berbadan hukum, atau P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan SK Kepala Daerah, P3A yang disahkan dengan SK Kepala Desa atau Kelompok Masyarakat Petani yang selanjutnya disebut "Kelompok Penerima P3TGAI". Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan prioritas yang telah disusun melalui proses musyawarah desa. Selain itu pemberdayaan masyarakat petani bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian masyarakat petani dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 255.6/KPTS/M/2018 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1027/KPTS/M/2017 Tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2018. P3TGAI ini lebih difokuskan pada desa mempunyai jaringan irigasi yang kurang efektif dan membutuhkan perbaikan. Dalam pelaksanaan P3TGAI agar dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan Konsultan maupun Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bekerja sama dalam melakukan pendampingan terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan pelaksanaan sistem pelaporan dalam pelaksanaan program.

P3TGAI D.I Bila Kalola Kabupaten Wajo



P3TGAI D.I Bissua Kabupaten Gowa





BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

KETAHANAN AIR DAN PANGAN [1-2]

(TARGET DAN CAPAIAN)

PEMBANGUNAN BENDUNGAN & EMBUNG

65 BENDUNGAN (49 BARU/16 LANJUTAN) & **1.088** EMBUNG

TAMBAHAN MANFAAT 2015-2019

Layanan Irigasi Waduk **258 ribu ha**

Kapasitas Tampung **2,16 Miliar m³**

Air Baku **25,01 m³/detik**

Potensi Energi **150,72 MW**

2015	2016	2017	CAPAIAN 2018	TARGET 2019
16 Bendungan Lanjutan				
• **11** *On-going* • **13** Baru • **5** Selesai	• **22** *On-going* • **8** Baru • **7** Selesai	• **28** *On-going* • **6** Baru • **9** Selesai	• **29** *On-going* • **12** Baru • **14** Selesai	• **26** *On-going* • **10** Baru • **29** Selesai
29 BENDUNGAN	**37** BENDUNGAN	**43** BENDUNGAN	**55** BENDUNGAN	**65** BENDUNGAN
342 EMBUNG	387 EMBUNG	117 EMBUNG	99 EMBUNG	120 EMBUNG

12 BENDUNGAN BARU 2018

1. SIDAN, BALI
2. KOMERING/TIGADIHADJI, SUMSEL
3. BENER, JATENG
4. BERINGIN SILA, NTB
5. RANDUGUNTING, JATENG
6. MANIKIN, NTT
7. SADAWARNA, JABAR
8. BAGONG, JATIM
9. DIGOEL, PAPUA
10. RUKOH, ACEH
11. JLANTAH, JATENG
12. TAMBLANG, BALI

14 BENDUNGAN SELESAI 2015 – DES. 2018

1. PAYASEUNARA, ACEH
2. RAJUI, ACEH
3. JATIGEDE, JABAR
4. BAJULMATI, JATIM
5. NIPAH, JATIM
6. TITAB, BALI
7. TERITIP, KALTIM
8. RAKNAMO, NTT
9. TANJU,NTB
10. MILA, NTB
11. LOGUNG, JATENG
12. ROTIKLOT, NTT
13. SEI GONG, BATAM
14. SINDANGHEULA, BANTEN



KETAHANAN AIR DAN PANGAN [2-2]

(TARGET DAN CAPAIAN)

	Target Air Baku 67,52 m^3/detik	Target Jaringan Irigasi 1,000,000 ha — Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, Air Tanah, & Tambak (Pusat & Daerah)		Target Sapras Pengendali Daya Rusak 3.620 Km	Target Pengendali Sedimen dan Lahar 306 buah
		APBN	DAK		
2015	6,97	155.382	118.150	371	150
2016	6,15	52.518	86.142	247	44
2017	4,34	63.253	164.495	182	31
2018	7,46	40.267	185.186	241	28
CAPAIAN 2015-2018	24,92	311.420	553.973	1.041	253
2019	5,00	42.000	97.410	51	13



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan 5 Bendungan Selesai Tahun 2018



1. Sei Goong, Kota Batam (Prov. Kepri)

- Volume : 11,80 Juta m^3
- Manfaat: Air baku 0,40 m^3/det
- Biaya Konstruksi : 252 M

2. Sindang Heula, Kab. Serang (Prov. Banten)

- Volume : 9,26 Juta m^3
- Manfaat: Irigasi 1.289 Ha, Reduksi Banjir 50 m^3/det, Air baku 0,80 m^3/det
- Biaya Konstruksi : 427 M

3. Logung, Kab. Kudus (Prov. Jateng)

- Volume : 20,15 Juta m^3
- Manfaat: Irigasi 5.354 ha, Reduksi Banjir 105 m^3/det, Air baku 0,2 m^3/det, Listrik 0,5 MW
- Biaya Konstruksi : 639 M

4. Mila, Kab. Dompu (Prov. NTB)

- Volume : 6,57 Juta m^3
- Manfaat: Irigasi 1.689 ha, Reduksi Banjir 177,74 m^3/det, Air baku 0,1 m^3/det
- Biaya Konstruksi: 245 M

5. Rotiklot, Kab. Belu (Prov. NTT)

- Volume : 3,3 Juta m^3
- Manfaat: Irigasi 139 ha, Reduksi Banjir 500 m^3/det, Air baku 0,04 m^3/det, Listrik 0,15 MW
- Biaya Konstruksi : 518 M

Volume	Irigasi	Reduksi Banjir	Air Baku	Listrik	biaya konstruksi
51,08 Juta m^3	8.471 hektar	832,74 m^3/det	1,18 m^3/det	0,65 MW	2,082 Rp. trilyun



STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	MANFAAT
Impounding Februari 2019	Kota Batam	MYC	2015-2018	258 M	• Kapasitas Tampung: 11,30 juta m^3 • Penyediaan air baku: 470 Lt/det



STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	MANFAAT
Impounding Februari 2019	Kab. Serang	MYC	2015-2018	460,62 M	• Kapasitas Tampung: 9,26 juta m^3 • Penyediaan air irigasi: 1.289 Ha • Penyediaan air baku: 800 Lt/det • Reduksi Banjir: 50 m^3/det



STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	MANFAAT
Impounding akhir tahun 2018	Kab. Dompu	MYC	2015-2018	357 M	• Kapasitas Tampung: 6,57 juta m^3 • Penyediaan air irigasi: 1.689 Ha • Penyediaan air baku: 100 Lt/det • Reduksi banjir: 177 m^3/det



STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	MANFAAT
Impounding akhir tahun 2018	Kab. Belu	MYC	2015-2018	472 M	• Kapasitas Tampung: 2,67 juta m^3 • Penyediaan air irigasi: 510 Ha • Reduksi Banjir: 500 m3/det • Penyediaan air baku: 30 Lt/det • Potensi tenaga listrik: 0.15 MW



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA



STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	MANFAAT
Impounding akhir tahun 2018	Kab. Kudus	MYC	2015-2018	639 M	• Kapasitas Tampung: 20,15 juta m^3 • Penyediaan air irigasi: 88,5 Ha • Reduksi Banjir: 105 m3/det • Penyediaan air baku: 200 Lt/det • Potensi tenaga listrik: 0.5 MW

EMBUNG GIRIROTO
JAWA TENGAH





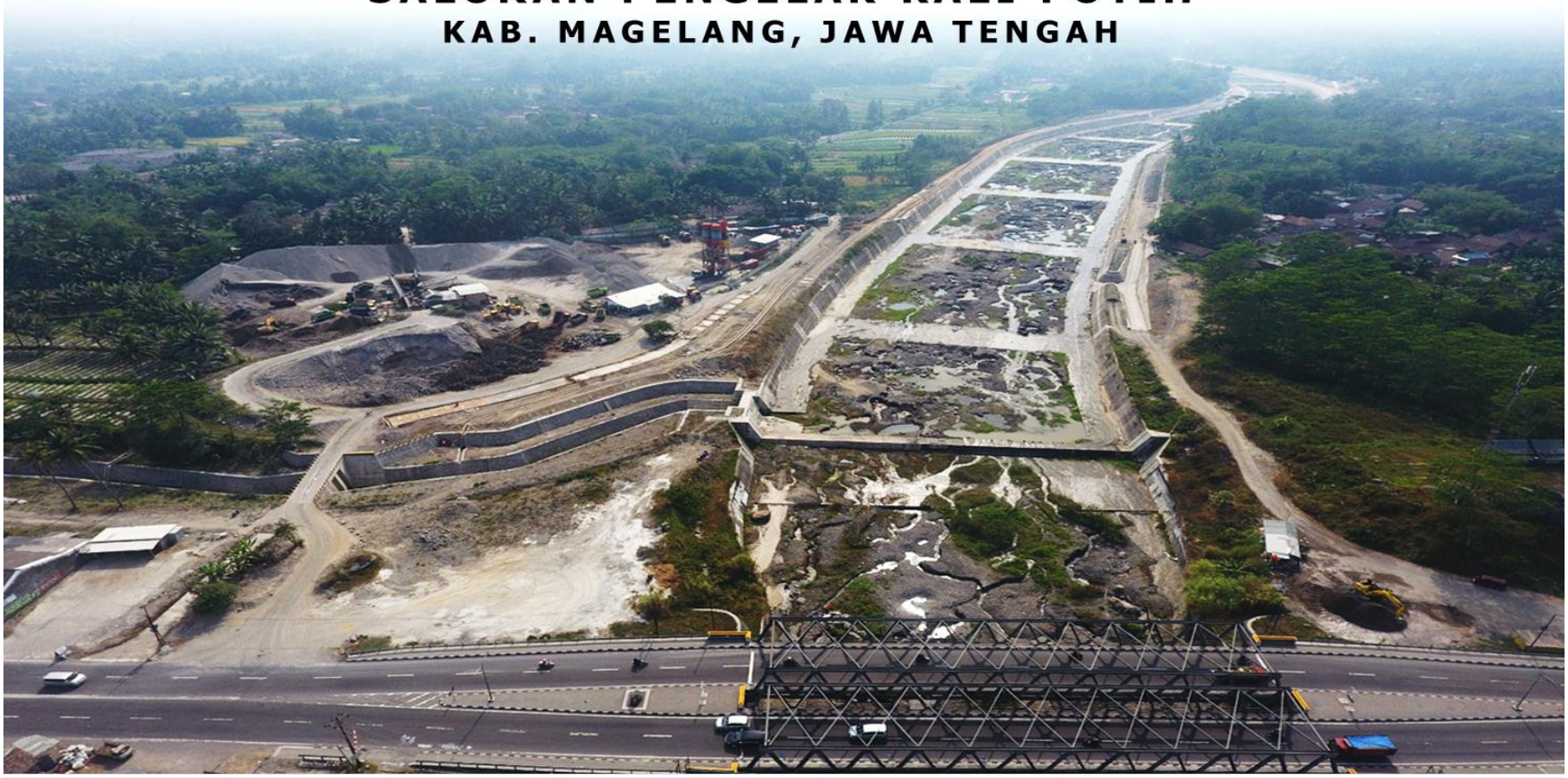
STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	MANFAAT
Diresmikan November 2018	Kota Surakarta	MYC	2016-2018	493 M	Reduksi Banjir Kota Surakarta

SAND POCKET KALI GENDOL
YOGYAKARTA



STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)
Diresmikan November 2018	Kab. Sleman	MYC	2016-2018	143 M

SALURAN PENGELAK KALI PUTIH
KAB. MAGELANG, JAWA TENGAH

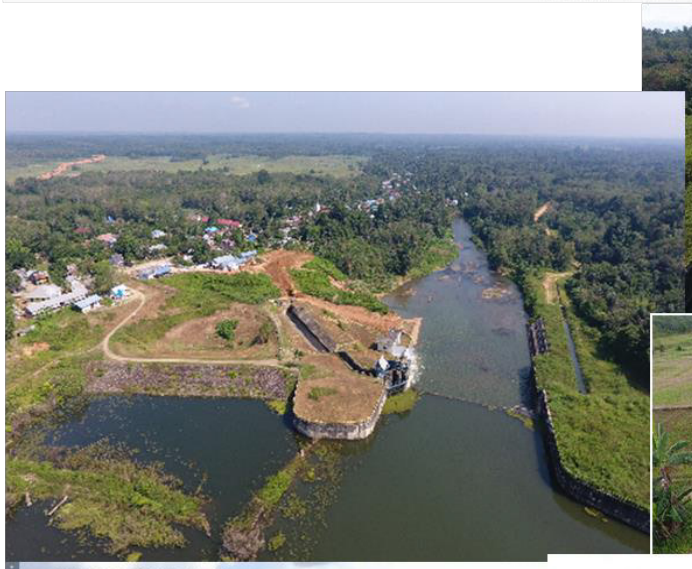


STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK	MANFAAT
Diresmikan November 2018	Kab. Magelang	MYC	2015-2017	283 M	• Daerah Perlindungan Jalur Utama DIY - Jawa Tengah • Panjang Perbaikan 2,77 km • Groundsill pelindung 24 unit • Dam Konsolidas 3 unit



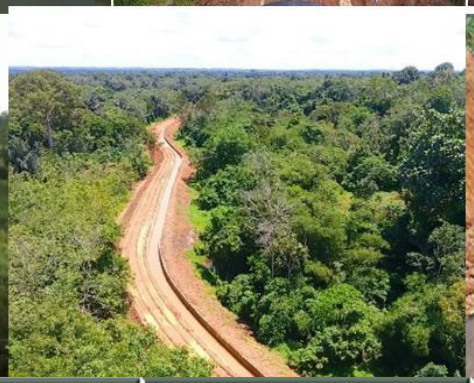
SIFAT	LOKASI	WAKTU PENYELESAIAN	NILAI KONTRAK	MANFAAT
Diresmikan Desember 2018	Kab. Serdang Bedagai	2014-2017	Rp 241 M	• Luas D.I : 7.558 Ha • Luas Fungsional: 3.558 Ha • Mengurangi efek banjir Kota Tebing Tinggi

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I PITAP
KALIMANTAN SELATAN











SIFAT	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK	MANFAAT
Diresmikan Desember 2018	Kab. Balangan	MYC	2015-2017	Rp 241 M	• Luas Potensial: 4.755 Ha • Luas Fungsional: 0 Ha

REHABILITASI D.I. KLAMBU JAWA TENGAH


Bangunan Utama D.I. Klambu


Saluran Irigasi Induk dan Sekunder D.I. Klambu Kanan


Saluran Irigasi Induk dan Sekunder D.I. Klambu Kiri

STATUS	LOKASI	KONTRAK	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA (Rp)	MANFAAT
Diresmikan Desember 2018	Kab. Demak-Grobogan-Kudus-Pati	MYC	2015-2018	Bendung =167 M Klambu Kanan = 184 M Klambu Kiri = 357 M	Luas D.I 37.451 Ha



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Dukungan Ditjen Sumber Daya Air dalam Penanganan Gempa di Lombok

69
Sumur Bor dan Pompa Air Tanah
telah dimanfatkan

PEMANFAATAN SUMUR BOR & POMPA AIR TANAH [2-2]

Sebaran **di Kab. Lombok Utara** antara lain:

- Kapasitas 25 l/det di Desa Pemenang, Kec. Pemenang
- Kapasitas 10 l/det di Desa Sokong, Kec. Tanjung (khusus melayani tengki air untuk Kec. Tanjung termasuk komp pemda pusat pengungsi)
- Kapasitas 15 l/det di Dusun Semboro Desa Gegelang Kec. Gangga.
- Kapasitas 20 l/det di Dusun Papak Desa Gegelang Kec. Gangga
- Kapasitas 20 i/det di Desa Gegelang Kec. Gangga
- SEG 161 kapasitas 3 l/det di Desa Rempek Kec. Gangga (khusus air minum)
- Kapasitas 20 l/det di Dusun Lingkuk Mumbul Desa Mumbul Sari, Kec. Gangga
- Kapasitas 15 l/det di Desa Mumbul Sari
- Kapasitas 5 /det di Desa Akar-akar (khusus air minum)
- Kapasitas 20 l/det di Dusun Arongan Bali Desa Akar-Akar, Kec. Gangga
- Kapasitas 15 l/det di Dusun Batugembung Desa Akar2.
- Kapasitas 15 l/det Desa Sukadana Kec. Bayan .
- 2 Sumur Bor kapasitas 10 l/det di dekat Kantor Bupati Lombok Utara untuk mensuplai air ke RS. Tanjung.



PESANTREN ISTI DADUDARAIN DESA MEDANA
KEC. TANJUNG LOMBOK UTARA.

Dukungan Ditjen Sumber Daya Air dalam Penanganan Gempa di Palu





Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III mempersiapkan sarana air bersih yang dapat dimanfaatkan warga disekitar kantor balai



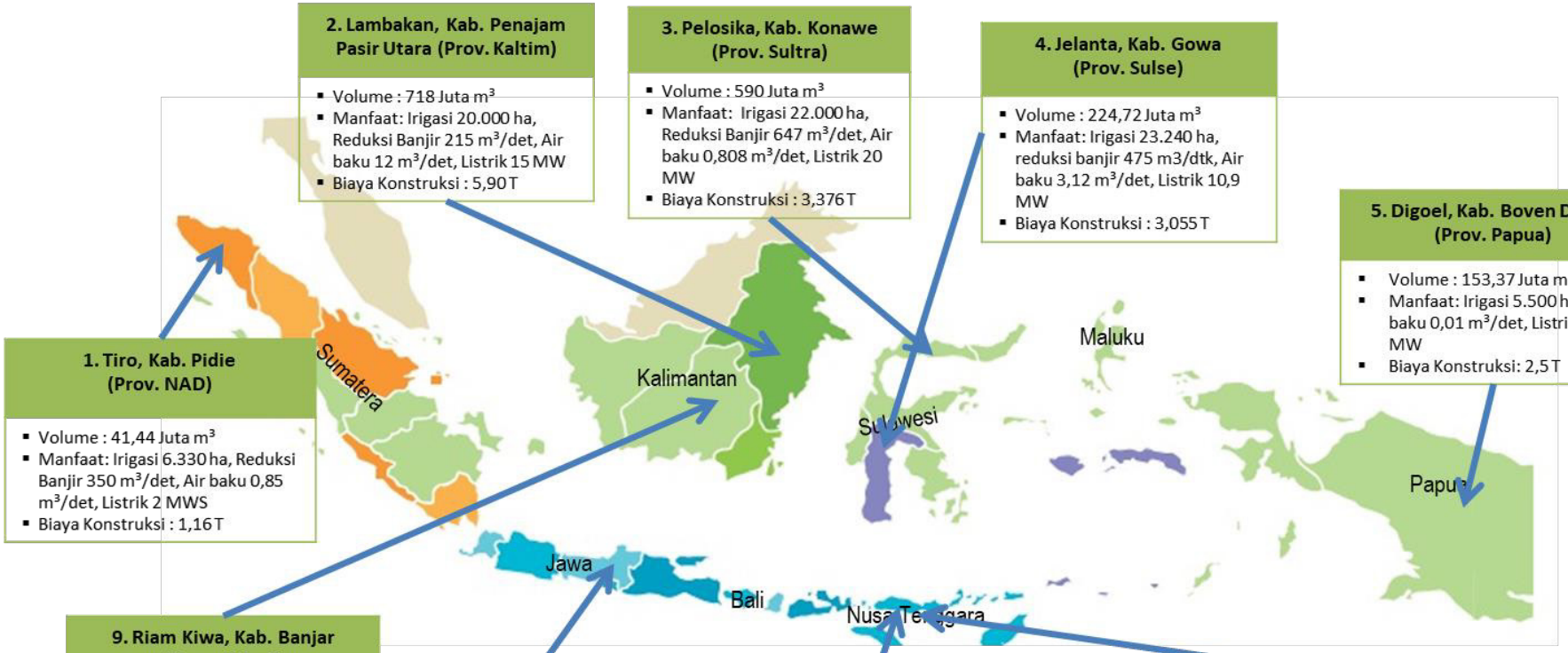




BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Pembangunan 9 Bendungan Baru Tahun 2019



1. Tiro, Kab. Pidie (Prov. NAD)

- Volume : 41,44 Juta m³
- Manfaat: Irigasi 6.330 ha, Reduksi Banjir 350 m³/det, Air baku 0,85 m³/det, Listrik 2 MWS
- Biaya Konstruksi : 1,16 T

2. Lambakan, Kab. Penajam Pasir Utara (Prov. Kaltim)

- Volume : 718 Juta m³
- Manfaat: Irigasi 20.000 ha, Reduksi Banjir 215 m³/det, Air baku 12 m³/det, Listrik 15 MW
- Biaya Konstruksi : 5,90 T

3. Pelosika, Kab. Konawe (Prov. Sultra)

- Volume : 590 Juta m³
- Manfaat: Irigasi 22.000 ha, Reduksi Banjir 647 m³/det, Air baku 0,808 m³/det, Listrik 20 MW
- Biaya Konstruksi : 3,376 T

4. Jelanta, Kab. Gowa (Prov. Sulse)

- Volume : 224,72 Juta m³
- Manfaat: Irigasi 23.240 ha, reduksi banjir 475 m3/dtk, Air baku 3,12 m³/det, Listrik 10,9 MW
- Biaya Konstruksi : 3,055 T

5. Digoel, Kab. Boven Digoel (Prov. Papua)

- Volume : 153,37 Juta m³
- Manfaat: Irigasi 5.500 ha, Air baku 0,01 m³/det, Listrik 65 MW
- Biaya Konstruksi: 2,5 T

6. Mbay, Kab. Nagekeo (Prov. NTT)

- Volume : 34,14 Juta m³
- Manfaat: irigasi 6.378 ha, air baku 0,234 m³/det, Listrik 0,2 MW.
- Biaya Konstruksi : 2,910 T

7. Kolhua, Kota Kupang (Prov. NTT)

- Volume : 6,65 Juta m³
- Manfaat: Air baku 0,15 m³/det, Listrik 0,04 MW
- Biaya Konstruksi: 596 M

8. Jragung, Kab. Demak (Prov. Jateng)

- Volume : 129 Juta m³
- Manfaat: Irigasi 6.435 Ha, Air baku 2 m³/det, Listrik 6 MW
- Biaya Konstruksi : 2 T

9. Riam Kiwa, Kab. Banjar (Prov. Kalsel)

- Volume : 110.57 Juta m³
- Manfaat: Irigasi 1.700 ha, reduksi banjir 797 m³/det, air baku 1 m³/det, listrik 0,9 MW
- Biaya Konstruksi : 2,2 T

Volume	lahan irigasi	Reduksi Banjir	Air Baku	Listrik	biaya konstruksi
2.007,89 Juta m³	91.583,00 Hektar	2.484 m³/det	20,17 m³/det	120,04 MW	7,2 Rp. trilyun



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Kunjugan Presiden RI ke Program Padat Karya di Kab. Tasikmalaya








BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Kunjugan Menteri PUPR ke Bendung Karet Multifungsi di Indramayu





BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Peresmian Bendungan Logung Oleh Dirjen SDA



Peresmian Bendungan Mila Oleh Dirjen SDA








Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Wosusokas
Jawa Tengah



Bab V
Penutup

Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air tahun 2018 merupakan wujud pertanggung jawaban Direktur Jenderal Sumber Daya Air kepada Menteri PUPR dan masyarakat (publik) sebagai penerima manfaat infrastruktur yang dibangun selama tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Sumber Daya Air berlandaskan pada tujuan, kebijakan, sasaran, dan program kegiatan yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Program NAWACITA Presiden, Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian PUPR, maupun Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen Sumber Daya Air. Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air sesuai Rencana Strategis Ditjen Sumber Daya Air Periode 2015-2019.

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen Sumber Daya Air merupakan salah satu upaya yang dilakukan Ditjen Sumber Daya Air dalam mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, dan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Sumber Daya Air. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air kepada Menteri PUPR, selaku pemberi amanah, dan kepada masyarakat (publik) sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil pengukuran capain kinerja terhadap Sasaran Program SP2 Meningkatnya Ketahanan Air yang meliputi 6 (enam) indikator sasaran program pada level *internal process* dan 2 (dua) indikator sasaran program pada level *learning and growth*, serta Sasaran Program SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang meliputi 1 (satu) indikator sasaran program pada level *internal process* dan 2 (dua) indikator sasaran



program pada level *learning and growth*, sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran program dapat memenuhi target dan 2 (dua) indikator sasaran program tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Indikator sasaran program yang memenuhi target, yaitu (1) tingkat layanan sarana dan prasarana air baku, dengan capaian kinerja 8,5% dari target 8,5%; (2) tingkat pengendalian daya rusak, dengan capaian kinerja 14% melebihi target sebesar 13,5%; (3) tingkat kinerja layanan irigasi, dengan capaian kinerja 21,6% melebihi target sebesar 21%; (4) tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan capaian kinerja memenuhi target sebesar 10%; (5) tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, dengan capaian kinerja memenuhi target sebesar 3%; (6) tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan capaian kinerja memenuhi target sebesar 2%; (7) tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan capaian kinerja 90,80% melebihi target sebesar 90,50%.

Indikator sasaran program yang tidak memenuhi target, yaitu (1) tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan capaian kinerja sebesar 18% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 24%; (2) tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, dengan capaian kinerja sebesar 4,9% tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 5%.

Hasil pengukuran indikator sasaran program tersebut mendukung capaian sasaran program SP2 Meningkatnya Ketahanan Air sebesar 81,96%, dimana capaian ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 87%. Berbeda halnya dengan capaian sasaran program SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo sebesar 90,80%, mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 90,50%.

Jika dibandingkan dengan target sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019, maka capaian kinerja sasaran program SP2 Meningkatnya Ketahanan Air dan SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo, mampu memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan masing-masing sebesar 57,34% untuk SP2 dan 60% untuk SP3.



BAB 5
PENUTUP

Berdasarkan hasil-hasil pengukuran kinerja Sasaran program diatas diperoleh realisasi capaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi** mencapai **82,20%,** melebihi dari target **56,33%** sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Sumber Daya Air 2015-2019,

Keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada beberapa indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholders* pembangunan sumber daya air di Indonesia. Selain itu, komitmen dan tekad yang kuat dalam diri insan Ditjen Sumber Daya Air memberikan konstribusi yang sangat tinggi dalam penyelenggaran pembangunan bidang sumber daya air, sesuai dengan motto Kementerian PUPR "**BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT**".

Ketidaktercapaian beberapa indikator kinerja diatas berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran tahun 2018, yakni sebesar Rp. 32.816.540.234.000,- atau 86,76% dari total alokasi DIPA Tahun 2018 sebesar Rp. 37.825.259.130.000,-, dengan progres fisik sebesar 89,86%.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sumber daya air tahun 2018 masih menghadapi masalah-masalah, kendala dan hambatan-hambatan yang setiap tahun terjadi. Permasalahan tersebut meliputi : (1) Keterlambatan proses perencanaan dan penyediaan lahan untuk lokasi proyek; (2) Kekurangsiapan perencanaan teknis, terutama kesiapan dokumen *detail design* yang tidak matang; (3) Proses administrasi pinjaman luar negeri yang memakan waktu lama, mulai dari proses *Loan Agreement* sampai efektifnya pinjaman luar negeri; (4) Adanya penolakan masyarakat atas kegiatan infrastruktur yang akan dibangun; (5) Komitmen pemerintah daerah dalam penyediaaan lahan yang sudah disepakati; (6) Masalah tukar menukar kawasan hutan dan atau tukar guling lahan dengan pihak Kementerian Kehutanan maupun Perhutani membutuhkan waktu yang cukup lama; (7) Lemahnya pengetahuan sumber daya manusia BBWS/BWS/SKPD TP-OP mengenai manajemen resiko proyek; (8) Sebaran personil yang tidak merata dengan komposisi (latar belakang pendidikan dan status kepegawaian) yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki proses pekerjaan utama pada bidang Teknik Sipil; (9) Minimnya pengadaan pendidikan dan pelatihan, dan/atau kursus-kursus yang diperoleh PNS/Non-PNS di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB 5
PENUTUP



Dalam upaya meminimalisir kendala dan hambatan yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam upaya pencapaian target *output/outcome* yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Air tahun berikutnya, beberapa upaya dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan, antara lain :

a. Penyiapan dokumen perencanaan teknis (Studi Kelayakan, AMDAL, DED, LARAP) secara lebih matang untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
b. Penyiapan lokasi lahan proyek lebih awal atau sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan di lokasi yang direncanakan.
c. Penelitian lebih awal terhadap usulan-usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya, bukan saja terhadap alokasi dana yang akan diusulkan tetapi juga penelitian terhadap kesiapan proyek yang akan dibangun.
d. Membangun sistem informasi kinerja yang dilakukan melalui sistem aplikasi *e-performance*, dalam upaya pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang dihasilkan tiap unit kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.
e. Peningkatan kompetensi *engineer*/sarjana teknik sipil muda dalam pengelolaan proyek (*project management*).
f. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan unsur keamanan serta penegak hukum dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
g. Penguatan fungsi pengawasan internal Ditjen Sumber Daya Air terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.
h. Menjadikan semua BBWS/BWS menyiapkan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBK, dalam upaya menciptakan *good governance* di lingkungan BBWS/BWS.
i. Mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan bidang sumber daya air kepada pemangku kepentingan *(stakeholders)* sebagai salah satu upaya pelayanan kepada masyarakat (publik).

Dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang telah diselesaikan tuntas dalam Tahun 2018 kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya dan seluruh *stakeholders* di wilayah proyek masing-masing.



Saluran Pengelak Kali Putih
Jawa Tengah

